



PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan program Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022, perlu dilakukan penyesuaian terhadap program, arah dan sasaran kinerja pemerintah daerah serta penganggaran sesuai peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, kebijakan pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
10. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

11. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
19. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
20. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030;
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

dan

GUBERNUR BANTEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) diubah sebagai berikut:

1. Lampiran ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Diantara Pasal 7 dan Bab VII disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 7A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

- (1) Program, yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, tetap dinyatakan berlaku sampai dengan diberlakukannya Peraturan Menteri dibidang Perencanaan dan Keuangan Daerah dan/ atau perubahan perangkat daerah.
- (2) Dalam hal perubahan Program sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2019
GUBERNUR BANTEN,

ttd

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

AL MUKTABAR

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2019 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (10-292/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS MINTONO, SH., M.SI
Pembina Muda Utama
NIP. 19680805 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN
NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI BANTEN 2017-2022

I. UMUM

Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan daerah tersebut dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas.

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Banten Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Banten 2005-2025 dan RPJMN 2015-2019.

Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 10 TAHUN 2019 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR (10-292/2019).

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI
BANTEN
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI BANTEN TAHUN 2017-2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan untuk menentukan tindakan masa depan secara tepat dari sejumlah pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki. Perencanaan pembangunan merupakan suatu bentuk kebijakan publik berupa konsep dan dokumentasi yang menggambarkan berbagai upaya terkait pencapaian tujuan melalui pengalokasian sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 serta mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah Gubernur/Wakil Gubernur terpilih dilantik, memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan

kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila (1) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini; (2) Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan (3) Terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2022 merupakan Tahap Akselerasi II, mengingat pelantikan Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten dan jadwal pengesahan RPJMD pada tahun yang sama 2017 maka tahun pemberlakuannya menjadi RPJMD Provinsi Banten tahun 2017-2022. Mengingat tahun 2017 sedang berjalan termasuk periode RPJMD tahun periode sebelumnya sehingga dalam penetapan indikator kinerja capainnya sebagai patokan angka dasar/base line tahun 2016 dan proyeksi tahun 2017 serta target indikator kinerja awal dimulai tahun 2018 sedangkan capaian indikator kinerja akhir tahun 2022.

Dalam RPJPD Provinsi Banten Tahun 2005-2025 telah ditetapkan Visi “Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa” yang ditempuh melalui 4 (empat) Misi yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia, berbudaya, sehat dan cerdas;
2. Mewujudkan perekonomian yang maju dan berdaya saing secara merata dan berkeadilan;
3. Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang lestari; dan
4. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Dalam Dokumen RPJPD Provinsi Banten 2005- 2025 dinyatakan RPJMD tahap keempat tahun 2018-2022 merupakan Tahap Akselerasi II. Adapun prioritas pembangunan pada tahap *Akselerasi II* meliputi:

1. Penanggulangan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial;
2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia;
3. Peningkatan daya saing perekonomian;
4. Peningkatan kualitas pelayanan prasarana dan sarana wilayah;
5. Pengelolaan tata ruang, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
6. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih; dan
7. Pengembangan dan pembangunan serta optimalisasi fungsi dan peran pusat pertumbuhan dan kawasan strategis.

Guna terwujudnya sinkronisasi perencanaan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat, maka perubahan RPJMD 2017-2022 memperhatikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik 2020-2024. Dikarenakan RPJMN Tahun 2020-2024 belum tersusun maka penyusunan Perubahan RPJMD 2017-2022 masih memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 yang memiliki Visi yaitu Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, serta Misi yang meliputi:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Arah kebijakan pembangunan RPJMN Rancangan teknokratik tahun 2020-2024, meliputi :

1. Pengembangan perdesaan, wilayah terdepan, terluar dan tertinggal.
2. Peningkatan sarana dan prasarana sosial-ekonomi di KTI dan daerah tertinggal lainnya.
3. Peningkatan konektivitas antar-wilayah.
4. Optimalisasi dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah (KEK, KI, KPBPB, KSPN).
5. Peningkatan tata kelola dan kapasitas Pemda dan Pemdes (kelembagaan, keuangan dan SDM Aparatur).
6. Percepatan pemenuhan SPM terutama di daerah tertinggal.
7. Peningkatan inovasi pemerintahan daerah.
8. Peningkatan kemudahan perizinan.
9. Pengembangan kerja sama antar-daerah, kolaborasi multipihak serta meningkatkan kualitas SDM.
10. Penataan pola hubungan Pusat dan Daerah.
11. Peningkatan peran kota kecil-menengah dan pengendalian kota besar metropolitan.
12. Penegakan penataan ruang yang berbasis kebencanaan dan peningkatan kepastian hukum hak atas tanah.

Dokumen Perubahan RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun. Dokumen Perubahan RPJMD disusun secara komprehensif dan terpadu, dengan mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif, serta memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan yang tertuang dalam rekomendasi DPRD Provinsi Banten terhadap LKPj Akhir Masa Jabatan Gubernur Banten Tahun 2012-2017.

RPJMD Provinsi Banten mengalami perubahan salah satunya disebabkan kejadian bencana alam berupa gelombang tsunami yang melanda daerah di pesisir di pantai barat Provinsi Banten yaitu Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Serang yang berdampak terjadinya kerugian/ korban sebanyak 437 orang meninggal dan sebanyak 33.721 orang mengungsi. Melihat dari kejadian tersebut tidak dapat dielakan bahwa Provinsi Banten merupakan daerah dengan kondisi wilayah yang rentan dan berpotensi terhadap berbagai bencana. Sebagai upaya penanggulangan permasalahan tersebut, Pemerintah Provinsi Banten perlu merencanakan

dan menyelenggarakan upaya-upaya terkait pengurangan risiko bencana secara efektif dan menyeluruh untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Salah satu upaya komprehensif yang dapat dilakukan adalah memasukkan arah, kebijakan dan strategi di dalam RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022.

Alasan berikutnya yaitu hasil pengendalian dan evaluasi pada tahapan proses yang sudah berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dalam indikator kinerja dengan rencana strategis (Renstra) Perangkat daerah serta belum selaras dengan fungsi perangkat daerah (SOTK) dan juga belum tertuangnya substansi terkait isu strategis, arah kebijakandan rencana proyeksi pendanaan yang merumuskan pendirian badan usaha milik daerah pada dokumen perencanaan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN PERUBAHAN RPJMD 2017-2022

Dalam penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, terdapat beberapa Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan yaitu:

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2008-2028;
9. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
10. Peraturan Pemerintah 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi Tahun 2018-2029;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja;
25. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Banten

- Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 26);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 66);
28. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030.

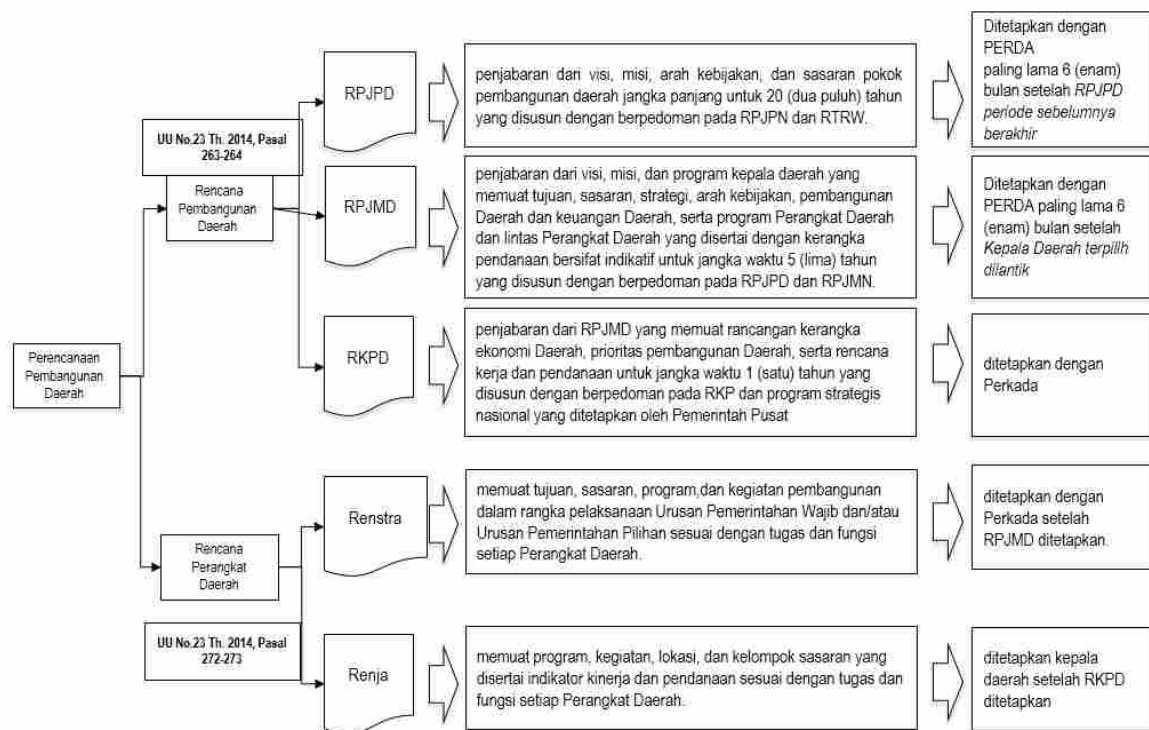
1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana Pembangunan Daerah sebagai suatu kesatuan dalam sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis serta atas-bawah dan bawah-atas. Guna melaksanakan hal tersebut maka Pemerintah Provinsi Banten dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) terdiri dari RPJPD dan RTRWP, perencanaan jangka menengah (5 tahun) terdiri dari RPJMD dan Renstra-PD, serta jangka pendek (1 tahun) terdiri dari RKPD dan Renja-PD.

Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 yang merupakan perubahan substansi RPJMD, dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD 2005-2025 dengan memperhatikan rancangan arah kebijakan dan prioritas pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024. Perubahan RPJMD selanjutnya dijabarkan dalam RKPD dan menjadi pedoman bagi PD dalam menyusun Renstra PD, Renja PD dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD. Dokumen RKPD dan RKA-PD inilah yang selanjutnya disusun menjadi

Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahunnya. Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 juga akan menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota dan berfungsi dalam pengendalian untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan selama periode tahun 2017-2022. Hubungan antar dokumen perencanaan dijelaskan lebih lanjut sebagaimana Gambar berikut:



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.4 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun dan ditetapkan dengan maksud untuk dapat memberikan arahan dan menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pembangunan daerah selama periode 5 (lima) tahun terutama bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh komponen masyarakat di Provinsi Banten.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Menetapkan visi, misi, dan program pembangunan daerah jangka menengah;
2. Memperkuat kebijakan dan strategi penanganan pengurangan resiko bencana dan penanggulangan bencana.

3. Menetapkan arah kebijakan mengenai pendirian BUMD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
4. Menetapkan arah kebijakan penganggaran sumber dana Non-APBD;
5. Memperkuat Kebijakan Revitalisasi Banten Lama dan Pembangunan Sport Centre;
6. Merubah indikator kinerja, kerangka pendanaan dan target kinerja RPJMD yang belum tepat;
7. Pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra PD, RKPD dan Renja PD serta perencanaan penganggaran;
8. Pedoman dalam penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten/Kota dan perencanaan penganggaran Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
9. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota serta dengan Provinsi yang berbatasan.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Penyusunan Perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami, berisikan Latar Belakang, Dasar Hukum Penyusunan, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Penyusunan Perubahan RPJMD;

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah, Standar Pelayanan Minimal dan Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2018;

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat Data dan Informasi tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, Neraca Daerah dan Rencana Kerangka Pendanaan;

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat Permasalahan dan Isu Strategis Internasional, Nasional dan Daerah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan isu-isu strategis RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022;

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menjelaskan tentang Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun;

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Berisi penjelasan tentang Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sesuai dengan Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih saat pencalonan yang disampaikan pada sidang paripurna DPRD.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat Program Perangkat Daerah, Indikator Kinerja Program dan Indikasi Pendanaan tahunan mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 yang dikelompokkan ke dalam 24 urusan wajib dan 8 urusan pilihan;

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Memuat Indikator Kinerja Daerah yang dirinci dalam Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum dan Aspek Daya Saing Daerah. Hal ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Visi Misi per tahun sampai akhir masa jabatan Tahun 2022;

BAB IX PENUTUP

Memuat Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan sebagai landasan dalam Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan selama kurun waktu lima tahun ke depan periode tahun 2017-2022.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 ASPEK GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

2.1.1 Kondisi Geografis

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten menjelaskan tentang luas wilayah Provinsi Banten yaitu sebesar 9.662,92 km², secara Administratif Provinsi Banten terdiri dari 4 (empat) kabupaten, yaitu Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang dan 2 (dua) Kota yaitu Tangerang dan Cilegon. Pada perkembangannya di wilayah Provinsi Banten terjadi pemekaran wilayah yaitu terbentuknya Kota Serang dari Kabupaten Serang (UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten) serta Kota Tangerang Selatan dari Kabupaten Tangerang (UU Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten).

Wilayah Provinsi Banten berada pada batas astronomis 105°01'11"-106°07'12" Bujur Timur dan 05°07'50" - 07°01'01" Lintang Selatan, posisinya sangat strategis karena terletak pada lintasan perdagangan nasional dan internasional yakni Selat Sunda yang merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI). Disamping itu, Provinsi Banten juga merupakan pintu gerbang yang menghubungkan antara Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera. Adapun batas-batas wilayah Provinsi Banten yaitu:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Sunda;
- Sebelah Timur berbatasan dengan DKI Jakarta dan Provinsi Jawa Barat;
- Sebelah Utara dengan Laut Jawa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.



Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Provinsi Banten

Topografi wilayah Provinsi Banten berkisar pada ketinggian 0 – 1.000 m dpl secara umum kondisi topografi wilayah Provinsi Banten merupakan dataran rendah yang berkisar antara 0 – 200 m dpl yang terletak di daerah Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kabupaten Pandeglang, dan sebagian besar Kabupaten Serang. Adapun daerah Lebak Tengah dan sebagian kecil Kabupaten Pandeglang memiliki ketinggian berkisar 201 – 2.000 m dpl dan daerah Lebak Timur memiliki ketinggian 501 – 2.000 m dpl yang terdapat di Puncak Gunung Sanggabuana dan Gunung Halimun.

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Banten secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu morfologi dataran, perbukitan landai-sedang (bergelombang rendah-sedang) dan perbukitan terjal.

Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian utara dan sebagian selatan. Wilayah dataran merupakan wilayah yang mempunyai ketinggian kurang dari 50 meter dpl (di atas permukaan laut) sampai wilayah pantai yang mempunyai ketinggian 0 – 1 m dpl.

Morfologi Perbukitan Bergelombang Rendah - Sedang sebagian besar menempati daerah bagian tengah. Wilayah perbukitan terletak pada wilayah yang mempunyai ketinggian minimum 50 m dpl. Di bagian utara Kota Cilegon terdapat wilayah puncak Gunung Gede yang memiliki ketinggian maksimum 553 m dpl, sedangkan perbukitan di Kabupaten Serang terdapat wilayah selatan Kecamatan Mancak dan Waringin Kurung dan di Kabupaten Pandeglang wilayah perbukitan berada di selatan. Di Kabupaten Lebak terdapat perbukitan di timur berbatasan dengan Bogor dan Sukabumi dengan karakteristik litologi ditempati oleh satuan litologi sedimen tua yang terintrusi oleh batuan beku dalam seperti batuan beku granit, granodiorit, diorit dan andesit. Biasanya pada daerah sekitar terobosaan batuan beku tersebut terjadi suatu proses remineralisasi yang mengandung nilai sangat ekonomis seperti cebakan bijih timah dan tembaga.

Potensi sumber daya air wilayah Provinsi Banten banyak ditemui di Kabupaten Lebak, sebab sebagian besar wilayahnya merupakan kawasan hutan lindung dan hutan produksi terbatas.

Berdasarkan pembagian Daerah Aliran Sungai (DAS), Provinsi Banten dibagi menjadi enam DAS, yaitu :

- DAS Ujung Kulon, meliputi wilayah bagian Barat Kabupaten Pandeglang (Taman Nasional Ujung Kulon dan sekitarnya);

- DAS Cibaliung-Cibareno, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Pandeglang dan bagian selatan wilayah Kabupaten Lebak;
- DAS Ciujung-Cidurian, meliputi bagian Barat wilayah Kabupaten Pandeglang;
- DAS Rawadano, meliputi sebagian besar wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Teluklada, meliputi bagian Selatan wilayah Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang;
- DAS Cisadane-Ciliwung, meliputi bagian Timur wilayah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang.

Tata air permukaan untuk wilayah Provinsi Banten sangat tergantung pada sumber daya air khususnya sumber daya air bawah tanah. Terdapat 5 satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) yang telah diidentifikasi, yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, antara lain CABT Labuan, CABT Rawadano dan CABT Malingping dan lintas Provinsi meliputi CABT Serang – Tangerang dan CABT Jakarta.

Potensi dari masing-masing satuan cekungan air bawah tanah ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Labuan

CABT Labuan ini mencakup wilayah Kabupaten Pandeglang ($\pm 93 \%$) dan Kabupaten Lebak ($\pm 7 \%$) dengan luas lebih kurang 797 km². Batas cekungan air bawah tanah di bagian barat adalah selat Sunda, bagian utara dan timur adalah batas pemisah air tanah dan di bagian selatan adalah batas tanpa aliran karena perbedaan sifat fisik batuan. Jumlah imbuhan air bawah tanah bebas (air bawah tanah pada lapisan akuifer tak tertekan/akuifer dangkal) yang berasal dari air hujan terhitung sekitar 515 juta m³/tahun. Sedang pada tipe air bawah tanah pada akuifer tertekan/akuifer dalam, terbentuk di daerah imbuhan yang terletak mulai elevasi di atas 75 m dpl sampai daerah puncak Gunung Condong, Gunung Pulosari dan Gunung Karang;

b. Satuan Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Rawadano

CABT Rawadano mencakup wilayah Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang, dengan total luas cekungan lebih kurang 375 km². Batas satuan cekungan satuan air bawah tanah ini di bagian utara, timur dan selatan berupa batas pemisah air bawah tanah yang berimpit dengan batas air permukaan yang melewati Gunung Pasir Pematang Cibatuh (420

m), Gunung Ipis (550 m), Gunung Serengean (700 m), Gunung Pule (259 m), Gunung Kupak (350 m), Gunung Karang (1.778 m), Gunung Asepun (1.174 m) dan Gunung Malang (605 m). Sedang batas di bagian barat adalah Selat Sunda.

Berdasarkan perhitungan imbuhan air bawah tanah, menunjukkan intensitas air hujan yang turun dan membentuk air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sejumlah 180 juta m^3/tahun , sebagian diantaranya mengalir dari lereng Gunung Karang menuju Cagar Alam Rawadano sekitar 79 m^3/tahun . Sedang air bawah tanah yang berupa mata air pada unit akuifer vulkanik purna Danau yang dijumpai di sejumlah 115 lokasi menunjukkan total debit mencapai 2.185 m^3/tahun . Sementara itu pada unit akuifer vulkanik Danau pada 89 lokasi, mencapai debit 367 m^3/tahun . Total debit dari mata air keseluruhan sebesar 2.552 m^3/tahun ;

c. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Serang – Cilegon

Satuan sub cekungan ini merupakan bagian dari CABT Serang – Tangerang, yang secara administratif termasuk dalam wilayah Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, dan Kabupaten Pandeglang, dengan luas wilayah sekitar 1.200 km^2 . Batas satuan cekungan ini di bagian utara adalah laut Jawa, bagian timur adalah K.Ciujung, bagian selatan merupakan batas tanpa aliran dan bagian barat adalah Selat Sunda.

Dari hasil perhitungan neraca air menunjukkan jumlah imbuhan air bawah tanah di wilayah satuan cekungan ini sebesar 518 juta m^3/tahun , sedang jumlah aliran air bawah tanah pada tipe lapisan akuifer tertekan sekitar 13 m^3/tahun , berasal dari daerah imbuhan yang terletak di sebelah utara dan barat daya yang mempunyai elevasi mulai sekitar 50 m dpl.

d. Satuan Sub Cekungan Air Bawah Tanah (CABT) Tangerang

Satuan sub cekungan ini mencakup wilayah Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak dan sebagian Kabupaten Bogor (Provinsi Jawa Barat), dengan total luas sekitar 1.850 km^2 . Batas sub cekungan ini di sebelah Utara adalah Laut Jawa, bagian timur adalah Kali Cisadane, bagian Selatan yang merupakan kontak dengan lapisan nir akuifer, serta bagian barat adalah Kali Ciujung.

Jumlah imbuhan air bawah tanah di seluruh sub CABT Tangerang sekitar 311 juta m³/tahun, sedangkan jumlah aliran air bawah tanah tertekan terhitung sekitar 0,9 juta m³/tahun.

Iklim wilayah Banten sangat dipengaruhi oleh Angin Monson (Monson Trade) dan Gelombang La Nina atau El Nino. Saat musim penghujan (Nopember - Maret) cuaca didominasi oleh angin Barat (dari Sumatera, Samudra Hindia sebelah selatan India) yang bergabung dengan angin dari Asia yang melewati Laut Cina Selatan. Pada Bulan Agustus cuaca didominasi oleh angin Timur yang menyebabkan wilayah Banten mengalami kekeringan yang keras terutama di wilayah bagian pantai utara, terlebih lagi bila berlangsung El Nino. Temperatur di daerah pantai dan perbukitan berkisar antara 22° C dan 32° C, sedangkan suhu di pegunungan dengan ketinggian antara 400 – 1.350 m.dpl mencapai antara 18° C – 29° C.

Curah hujan tertinggi sebesar 2.712 – 3.670 mm pada musim penghujan bulan September – Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Pandeglang sebelah barat dan curah 335 – 453 mm pada bulan September-Mei mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang. Pada musim kemarau, curah hujan tertinggi sebesar 615 – 833 mm pada bulan April – Desember mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah utara, seluruh luas wilayah Kota Cilegon, 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah utara dan seluruh luas wilayah Kota Tangerang, sedangkan curah hujan terendah pada musim kemarau sebanyak 360 – 486 mm pada bulan Juni – September mencakup 50% luas wilayah Kabupaten Tangerang sebelah selatan dan 15% luas wilayah Kabupaten Serang sebelah Tenggara.

Kondisi kemiringan lahan di Provinsi Banten terbagi menjadi tiga kondisi yang ekstrim yaitu:

- a. Dataran yang sebagian besar terdapat di daerah Utara Provinsi Banten yang memiliki tingkat kemiringan lahan antara 0 – 15%, sehingga menjadi lahan yang sangat potensial untuk pengembangan seluruh jenis fungsi kegiatan. Dengan nilai kemiringan ini tidak diperlukan banyak perlakuan khusus terhadap lahan yang akan dibangun untuk proses prakonstruksi. Lahan dengan kemiringan ini biasanya tersebar di sepanjang pesisir Utara Laut Jawa, sebagian wilayah Serang, sebagian Kabupaten Tangerang bagian utara serta wilayah selatan yaitu di sebagian pesisir Selatan dari Pandeglang

hingga Kabupaten Lebak;

- b. Perbukitan landai-sedang (kemiringan < 15% dengan tekstrur bergelombang rendah-sedang) yang sebagian besar dataran landai terdapat di bagian utara meliputi Kabupaten Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Tangerang, dan Kota Tangerang, serta bagian utara Kabupaten Pandeglang;
- c. Daerah perbukitan terjal (kemiringan < 25%) terdapat di Kabupaten Lebak, sebagian kecil Kabupaten Pandeglang bagian selatan dan Kabupaten Serang.
- d. Perbedaan kondisi alamiah ini turut berpengaruh terhadap timbulnya ketimpangan pembangunan yang semakin tajam, yaitu wilayah sebelah utara memiliki peluang berkembang relatif lebih besar daripada wilayah sebelah Selatan.

Sumber daya tanah wilayah Provinsi Banten secara geografis terbagi dua tipe tanah yaitu: (a) kelompok tipe tanah sisa atau residu dan (b) kelompok tipe tanah hasil angkutan. Secara umum distribusi dari masing- masing tipe tanah ini di wilayah Provinsi Banten, terdapat di Kabupaten Serang, Kabupaten Lebak, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Masing-masing tipe tanah yang terdapat di wilayah tersebut antara lain: 1. Aluvial pantai dan sungai; 2. Latosol; 3. Podsolik merah kuning; 4. Regosol; 5. Andosol; 6. Brown forest; 7. Glei.

Struktur geologi daerah Banten terdiri dari formasi batuan dengan tingkat ketebalan dari tiap-tiap formasi berkisar antara 200 – 800 meter dan tebal keseluruhan diperkirakan melebihi 3.500 meter. Formasi Bojongmanik merupakan satuan tertua berusia Miosen akhir, batuanannya terdiri dari perselingan antara batu pasir dan lempung pasir, batu gamping, batu pasir tufaan, konglomerat dan breksi andesit, umurnya diduga Pliosen awal. Berikutnya adalah Formasi Cipacar yang terdiri dari tuf batu apung berselingan dengan lempung tufaan, konglomerat dan napal glaukonitan, umurnya diperkirakan Pliosen akhir. Di atas formasi ini adalah Formasi Bojong yang terdiri dari napal pasir, lempung pasir, batu gamping kokina dan tuf.

Banten bagian selatan terdiri atas batuan sedimen, batuan gunung api, batuan terobosan dan Alluvium yang berumur mulai Miosen awal hingga Resen, satuan tertua daerah ini adalah Formasi Bayah yang berumur Eosen.

Formasi Bayah terdiri dari tiga anggota yaitu Anggota Konglomerat, Batu Lempung dan Batu Gamping. Selanjutnya adalah Formasi Citaruruep, Formasi Cijengkol, Formasi Citarate, Formasi Cimampang, Formasi Sareweh, Formasi Badui, Formasi Cimancuri dan Formasi Cikotok.

Batuan Gunung Api dapat dikelompokkan dalam batuan gunung api tua dan muda yang berumur Plistosen Tua hingga Holosen. Batuan terobosan yang dijumpai bersusunan andesiot sampai basal. Tuf Cikasungka berumur Plistosen, Lava Halimun dan batuan gunung api Kuartar. Pada peta lembar Leuwidamar disajikan pula singkapan batuan metamorf yang diduga berumur Ologo Miosen terdiri dari Sekis, Genes dan Amfibolit yang tersingkap di bagian utara tubuh Granodiorit Cihara. Dorit Kuarsa berumur Miosen tengah hingga akhir, Dasit dan Andesit berumur Miosen akhir serta Basal berumur kuartar. Batuan endapan termuda adalah aluuium dan endapan pantai yang berupa Kerikil, pasir, lempung, rombakan batu gamping, koral bercampur pecahan moluska atau kerang kerangan, gosong pantai dan gamping terumbu.

Akhir tahun 2015, wilayah administrasi Provinsi Banten terdiri dari empat wilayah kabupaten dan empat kota, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, luas daratan masing-masing Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Pandeglang (2.746,89 km²), Kabupaten Lebak (3.426,56 km²), Kabupaten Tangerang (1.011,86 km²), Kabupaten Serang (1.734,28 km²), Kota Tangerang (153,93 km²), Kota Cilegon (175,50 km²), Kota Serang (266,71 km²), serta Kota Tangerang Selatan (147,19 km²).

Adapun jumlah kecamatan dan kelurahan/desa pada wilayah administrasi pemerintahan di Provinsi Banten adalah sebagaimana di bawah ini :

Tabel 2.1
Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan dan Kelurahan/Desa Pada Wilayah Administrasi di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)	Kecamatan	Desa	Kelurahan
Kabupaten				
1. Pandeglang	2.746,89	35	287	52
2. Lebak	3.426,56	28	318	27
3. Tangerang	1.011,86	29	86	188
4. Serang	1.734,28	29	254	72
Kota				
1. Tangerang	153,93	13	-	104
2. Cilegon	175,50	8	4	39
3. Serang	266,71	6	30	37
4. Tangerang Selatan	147,19	7	-	54
Banten	9.662,92	155	979	573

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Provinsi Banten terbagi menjadi 8 (delapan) wilayah administrasi yaitu 4 (empat) pemerintah kabupaten dan 4 (empat) pemerintah kota, 155 (seratus lima puluh lima) kecamatan, 979 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan) desa dan 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) kelurahan. Luas keseluruhan Provinsi Banten adalah 9.662,92 Km² (sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi).

Pemerintah Kabupaten terdiri dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang, Pemerintah Kabupaten Lebak, Pemerintah Kabupaten Tangerang dan Pemerintah Kabupaten Serang. Sedangkan pemerintah kota terdiri dari Pemerintah Kota Tangerang, Pemerintah Kota Cilegon, Pemerintah Kota Serang dan Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pandeglang memiliki luas wilayah 2.746,89 Km² (dua ribu tujuh ratus empat puluh enam koma delapan puluh sembilan kilometer persegi), terdiri dari 35 (tiga puluh lima) kecamatan, 287 (dua ratus delapan puluh tujuh) desa dan 52 (lima puluh dua) kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Lebak memiliki luas wilayah 3.426,56 Km² (tiga ribu empat ratus dua puluh enam koma lima puluh enam kilometer persegi), terdiri dari 28 (dua puluh delapan) kecamatan, 318 (tiga ratus delapan belas) desa dan 27 (dua puluh tujuh) kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang memiliki luas wilayah 1.011,86 Km² (seribu sebelas koma delapan puluh enam kilometer persegi), terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 188 (seratus delapan puluh delapan) desa dan 86 (delapan puluh enam) kelurahan.

Pemerintah Kabupaten Serang memiliki luas wilayah 1.734,28 Km² (seribu tujuh ratus tiga puluh empat koma dua puluh delapan kilometer persegi), terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) kecamatan, 254 (tiga ratus dua puluh enam) desa, dan 72 (tujuh puluh dua) kelurahan.

Pemerintah Kota Tangerang memiliki luas wilayah 153,93 Km² (seratus lima puluh tiga koma sembilan puluh tiga kilometer persegi), terdiri dari 13 (tiga belas) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 104 (seratus empat) kelurahan.

Pemerintah Kota Cilegon memiliki luas wilayah 175,50 Km² (seratus tujuh puluh lima koma lima puluh kilometer persegi), terdiri dari 8 (delapan) kecamatan, 4 (empat) desa, dan 43 (empat puluh tiga) kelurahan.

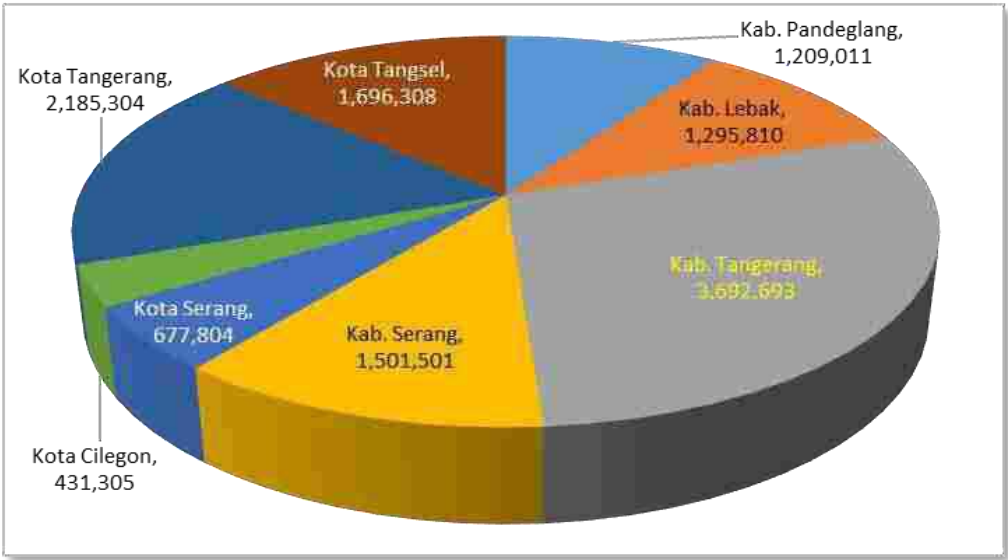
Pemerintah Kota Serang memiliki luas wilayah 266,71 Km² (dua ratus enam puluh enam koma tujuh puluh satu kilometer persegi), terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 30 (tiga puluh) desa, dan 37 (tiga puluh tujuh) kelurahan.

Pemerintah Kota Tangerang Selatan memiliki luas wilayah 147,19 Km² (seratus empat puluh tujuh koma tujuh puluh satu kilometer persegi), terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, tanpa ada pemerintah desa, dan 54 (lima puluh empat) kelurahan.

Secara keseluruhan luas Provinsi Banten adalah 9.662,92 Km² (sembilan ribu enam ratus enam puluh dua koma sembilan puluh dua kilometer persegi) terbagi atas 155 (seratus lima puluh lima) kecamatan, 1.238 (seribu dua ratus tiga puluh delapan) desa dan 313 (tiga ratus tiga belas) kelurahan.

2.1.2 Kondisi Demografis

Berdasarkan data hasil sensus penduduk, penduduk Provinsi Banten menunjukkan jumlah yang terus meningkat setiap tahun, baik penduduk laki-laki maupun perempuan. Penduduk Banten tahun 2018 sebanyak 12.689.736 jiwa yang terdiri atas 6.465.282 jiwa penduduk laki-laki dan 6.224.454 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2,17 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,87. Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2018 mencapai 1.313 jiwa/km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 14.197 jiwa/km² dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 378 jiwa/Km².

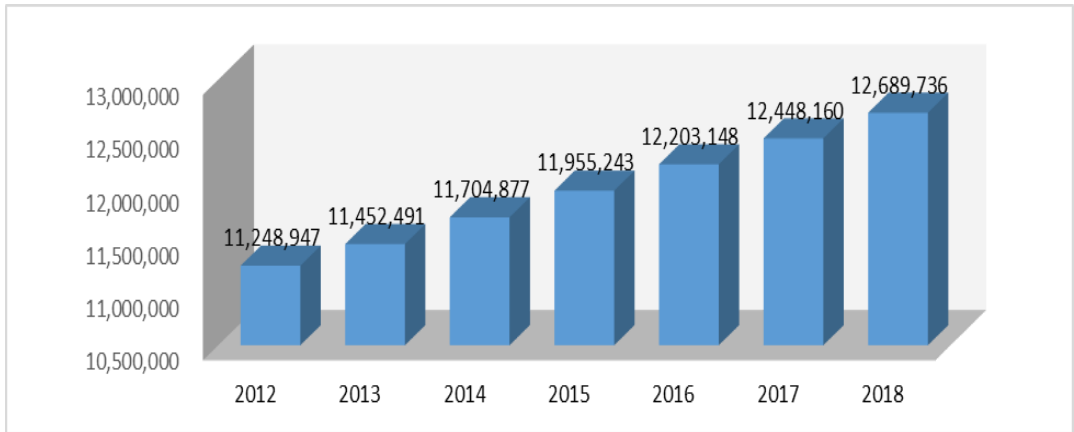


Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.2
Sebaran Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2018

Menurut data SIPD tahun 2018 jumlah penduduk Provinsi Banten tersebar pada 8 (delapan) kabupaten kota dengan sebaran sebagai berikut : Jumlah penduduk Kabupaten Lebak berjumlah 1.295.810 (satu juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus sepuluh) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Pandeglang berjumlah 1.209.011 (satu juta dua ratus sembilan ribu sebelas) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Serang berjumlah 1.501.501 (satu juta lima ratus seribu limaratus satu) jiwa; jumlah penduduk Kabupaten Tangerang berjumlah 3.692.693 (tiga juta enam ratus

sembilan puluh dua ribu enam ratus sembilan puluh tiga) jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang berjumlah 2.185.304 (dua juta seratus delapan puluh lima tiga ratus empat) jiwa; jumlah penduduk Kota Cilegon berjumlah 431.305 (empat ratus dua puluh lima ribu seratus tiga) jiwa; jumlah penduduk Kota Serang berjumlah 677.804 (enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus) jiwa; jumlah penduduk Kota Tangerang Selatan berjumlah 1.696.308 (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan) jiwa.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.3
Jumlah Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2012-2018

Data pertumbuhan penduduk di Provinsi Banten tahun 2012 sampai dengan 2017 menurut data SIPD Provinsi Banten 2018 sebagai berikut : Tahun 2012 berjumlah 11.248.947 (sebelas juta dua ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) jiwa. Tahun 2013 berjumlah 11.452.491 (sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh satu) jiwa. Tahun 2014 berjumlah 11.704.877 (sebelas juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) jiwa. Tahun 2015 berjumlah 11.955.243 (sebelas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh tiga) jiwa. Tahun 2016 berjumlah 12.203.148 (dua belas juta dua ratus tiga ribu seratus empat puluh delapan) jiwa. Tahun 2017 berjumlah 12.448.160 (dua belas juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus enam puluh) jiwa. Tahun 2018 berjumlah 12.689.736 (dua belas juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh enam) jiwa.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

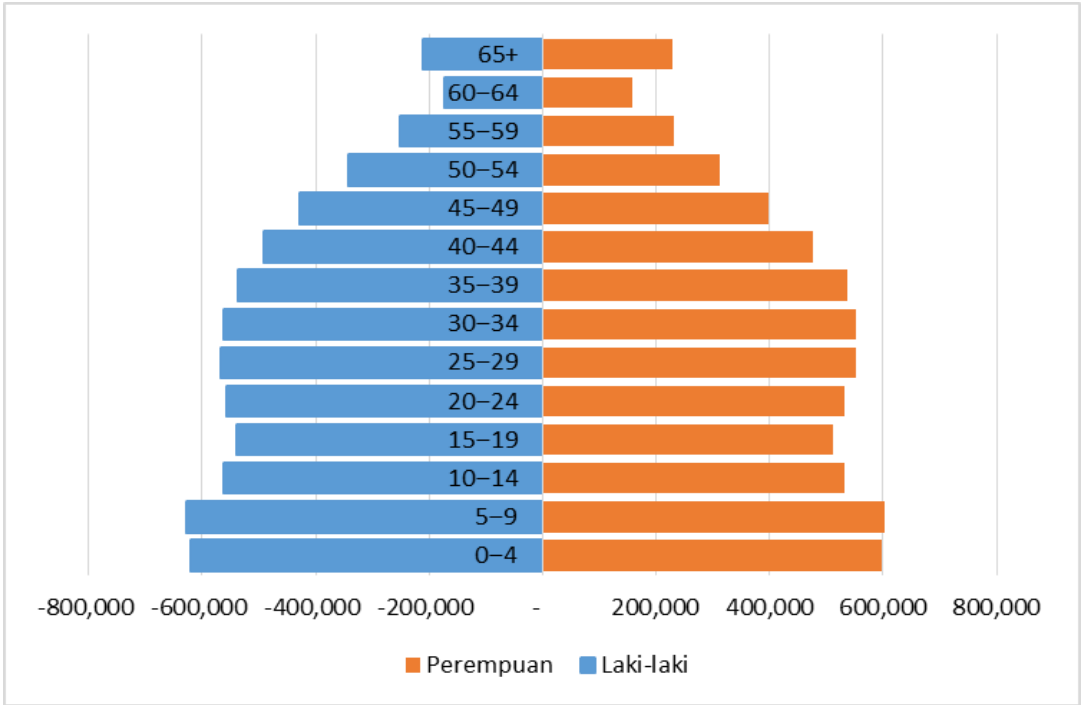
Gambar 2.4
Laju Pertumbuhan Penduduk di Provinsi Banten Tahun 2012-2018

Laju Pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2012-2018 menurut data SIPD Provinsi Banten 2018 adalah sebagai berikut : Tahun 2012 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,16% artinya pada tahun 2012 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah 2,16 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari wilayah luar Banten; tahun 2013 laju pertumbuhan penduduk sebesar 2,27 % artinya pada tahun 2013 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah 2,27 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten. Tahun 2014 laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten sebesar 2,20 % artinya pada tahun 2014 setiap 100 (seratus) penduduk Banten akan bertambah 2,20 jiwa dari kelahiran dan migrasi penduduk dari luar Banten. Laju pertumbuhan Provinsi Banten tahun 2015 sebesar 2,14 % artinya pada tahun 2015 setiap 100 (seratus) penduduk Banten akan bertambah sebesar 2,14 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar wilayah Banten. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2016 sebesar 2,06% artinya pada tahun 2016 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah 2,06 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar wilayah Banten. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2017 sebesar 2,01% artinya pada tahun 2017 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar 2,01 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten. Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Banten tahun 2018 sebesar 2,17% artinya pada tahun 2017 setiap 100 (seratus) orang penduduk Banten akan bertambah sebesar 2,17 jiwa dari kelahiran dan atau migrasi penduduk dari luar Banten.

Tabel 2.2
Jumlah Penduduk Provinsi Banten Menurut Jenis Kelamin Tahun 2017-2018

Kelompok Umur	2017		2018	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
0-4	622,837	600,223	620,242	597,557
5-9	617,763	588,994	627,920	601,742
10-14	550,266	522,472	562,671	533,395
15-19	540,496	511,736	538,628	511,201
20-24	552,845	530,707	556,461	531,509
25-29	563,413	550,639	565,994	551,885
30-34	555,086	549,982	560,890	552,958
35-39	527,362	525,919	536,731	536,365
40-44	480,235	462,264	491,866	477,190
45-49	411,962	381,741	426,814	398,577
50-54	324,448	297,029	340,844	312,734
55-59	239,113	218,599	252,334	232,475
60-64	162,105	145,480	173,709	157,744
65+	196,497	217,947	210,178	229,122

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.5
Komposisi Penduduk menurut Jenis Kelamin Provinsi Banten Tahun 2018

Pada tahun 2015, sebagian besar penduduk Banten tercatat sebagai penganut agama Islam yaitu sebanyak 92,55 persen, diikuti dengan penganut agama Budha sebanyak 3,60 persen, Kristen Protestan 1,50 persen, Katholik 1,40 persen, Hindu 0,09 persen, dan Khong Hu Cu 0,03 persen. Sebagai sarana ibadah, di Provinsi Banten terdapat 8.137 masjid, 14.574 mushola, 838 gereja Protestan, 14 gereja Katholik, 12 pura, 115 wihara dan 9 kelenteng.

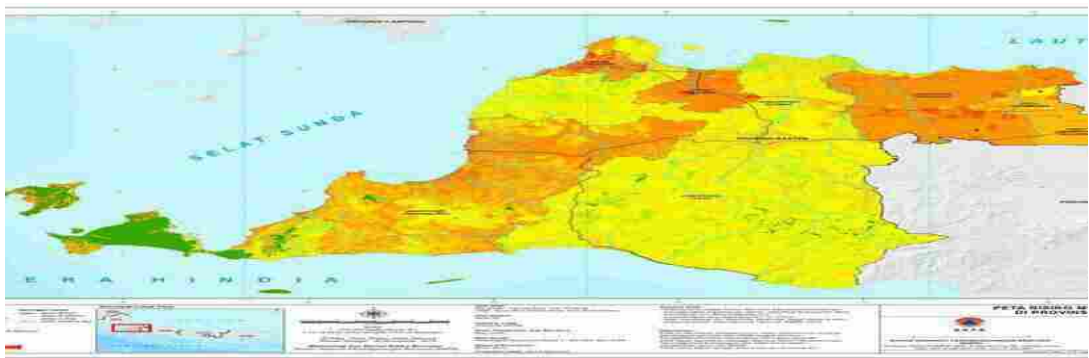
Tabel 2.3
Penduduk Provinsi Banten Menurut Agama yang dianut Tahun 2015

Agama	Islam	Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Khonghucu
Banten	9.730.51	162.83	145.5	91.99	380.394	2.949

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.1.3 Kawasan Rawan Bencana

Provinsi Banten merupakan salah satu daerah dengan kondisi wilayahnya rentan dan berpotensi terhadap bencana. Dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Rang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030 kawasan rawan bencana tersebut meliputi rawan banjir, rawan tsunami, rawan gempa bumi, rawan kebakaran hutan dan lahan, rawan cuaca ekstrim, angin topan dan puting beliung, rawan tanah longsor, rawan kekeringan dan rawan gagal teknologi. Sedangkan potensi rawan bencana yang disebabkan nonalam/sosial selain gagal teknologi adalah gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial dan teror yang frekuensinya masih relatif kecil.



Gambar 2.6
Peta Risiko Multi Bahaya di Provinsi Banten
(Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten 2016-2020)

Potensi bencana Provinsi Banten dikaji berdasarkan bencana yang pernah terjadi dan belum terjadi. Bencana yang pernah terjadi tidak tertutup kemungkinan akan terjadi lagi. Rangkuman kelas indeks bahaya keseluruhan bencana yang berpotensi di Provinsi Banten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4
Potensi Luas Bahaya di Provinsi Banten

No	Jenis Bencana	Bahaya	
		Luas (Ha)	Kelas
1	Banjir	475.652	TINGGI
2	Banjir Bandang	17.647	TINGGI
3	Cuaca Ekstrim	786.755	SEDANG
4	Epidemi dan Wabah Penyakit	42.619	RENDAH
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	15.545	TINGGI
6	Gempabumi	931.899	TINGGI
7	Kebakaran Hutan dan Lahan	176.996	TINGGI
8	Kegagalan Teknologi	20.634	TINGGI
9	Kekeringan	931.903	SEDANG
10	Tanah Longsor	151.858	TINGGI
11	Tsunami	34.854	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Resiko Bencana Banten 2016-2020

Tabel di atas menggambarkan potensi bencana di Provinsi Banten rata-rata berada pada kelas tinggi. Bencana banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kegagalan teknologi, tanah longsor, tsunami dikatakan memiliki kelas bahaya tinggi. Bencana lainnya adalah cuaca ekstrim dan kekeringan memiliki kelas bahaya sedang, sedangkan bencana epidemi dan wabah penyakit memiliki kelas bahaya rendah.

Potensi ancaman bencana dari pengkajian kelas indeks sampai pada tingkat kabupaten/kota dijabarkan untuk setiap bencana, seperti berikut :

1. **Banjir**

Banjir adalah peristiwa terbenamnya daratan karena peningkatan volume air akibat hujan deras, luapan air sungai, atau pecahnya bendungan. Bencana banjir termasuk bencana yang sering terjadi di Indonesia dan beberapa wilayah bagiannya, termasuk Provinsi Banten. Bencana tersebut dapat berpotensi terjadi beberapa wilayah didukung oleh kondisi wilayah yang rentan.

Perhitungan potensi bahaya banjir dilihat berdasarkan parameter-parameter standar ukur, yaitu daerah rawan banjir, kemiringan lereng, jarak dari sungai, dan curah hujan. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini :

Tabel 2.5
Potensi Luas Bahaya Banjir di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	155.038	TINGGI
2	Lebak	57.919	TINGGI
3	Tangerang	101.186	TINGGI
4	Serang	98.869	TINGGI
5	Tangerang	15.393	TINGGI
6	Cilegon	9.682	TINGGI
7	Serang	22.846	TINGGI
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		475.652	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir Provinsi Banten memiliki 475.652 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

2. Kekeringan

Perhitungan potensi bahaya kekeringan dilihat berdasarkan pedoman umum pengkajian risiko bencana. Dalam pedoman tersebut, dimuat parameter sebagai alat ukur untuk setiap bencana. Parameter untuk bahaya meteorologi (Indeks Presipitasi Terstandarisasi). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kekeringan di Provinsi Banten seperti tabel berikut.

Tabel 2.6
Potensi Luas Bahaya Kekeringan di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	274.689	SEDANG
2	Lebak	335.120	SEDANG
3	Tangerang	101.186	SEDANG
4	Serang	147.658	SEDANG
5	Tangerang	15.393	SEDANG
6	Cilegon	16.467	RENDAH
7	Serang	26.671	SEDANG
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		931.903	SEDANG

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kekeringan Provinsi Banten memiliki 931.903 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kekeringan adalah sedang. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

3. Cuaca Ekstrim

Cuaca ekstrim adalah fenomena meteorologi yang ekstrim dalam sejarah (distribusi), khususnya fenomena cuaca yang mempunyai potensi menimbulkan bencana, menghancurkan tatanan kehidupan sosial, atau yang menimbulkan korban jiwa manusia. Bencana cuaca ekstrim didasarkan pada distribusi klimatologi. Tipenya sangat bergantung pada lintang tempat, ketinggian, topografi, dan kondisi atmosfer. Oleh karena itu, perhitungan potensi bahaya cuaca ekstrim dilihat berdasarkan parameter keterbukaan lahan, kemiringan lereng, dan curah hujan tahunan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter di atas, diperoleh potensi luas bahaya cuaca ekstrim di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.7
Potensi Luas Bahaya Cuaca Ekstrim di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	195.138	SEDANG
2	Lebak	280.879	SEDANG
3	Tangerang	101.186	SEDANG
4	Serang	136.949	SEDANG
5	Tangerang	15.393	SEDANG
6	Cilegon	15.830	SEDANG
7	Serang	26.661	SEDANG
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		786.755	SEDANG

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya cuaca ekstrim Provinsi Banten memiliki 786.755 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya cuaca ekstrim adalah sedang. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

4. Tanah Longsor

Tanah longsor adalah pergerakan suatu massa batuan, tanah atau bahan rombakan material penyusun lereng bergerak ke bawah atau keluar lereng di bawah pengaruh gravitasi. Tanah longsor dapat terjadi disebabkan adanya gangguan kestabilan pada lereng dan dapat dipicu oleh curah hujan, kejadian gerakan tanah, dan getaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa bahaya tanah longsor dapat terjadi di daerah lereng di suatu wilayah.

Dalam pengkajian indeks bahaya, bencana tanah longsor dapat dilihat berpotensi berdasarkan parameter zona kerentanan gerakan tanah (PVMBG) dan kemiringan lereng (di atas 15%).

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya tanah longsor di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.8
Potensi Luas Bahaya Tanah Longsor di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	29.423	TINGGI
2	Lebak	98.515	TINGGI
3	Serang	19.022	TINGGI
4	Tangerang	11	RENDAH
5	Cilegon	3.871	SEDANG
PROVINSI BANTEN		151.858	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tanah longsor Provinsi Banten memiliki 151.858 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tanah longsor adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

5. Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Gelombang ekstrim dan abrasi umumnya terjadi karena gelombang angin yang timbul akibat tiupan angin di permukaan laut. Gelombang dapat menimbulkan energi untuk membentuk pantai, menimbulkan arus dan transpor sedimen dalam arah tegak lurus di sepanjang pantai. Angin yang bertiup dengan kecepatan dan arah tertentu di permukaan laut akan menimbulkan riakan (gerakan) air yang semula kecil menjadi

besar dan kemudian menjadi gelombang. Energi gelombang yang datang tegak lurus dari arah utara pantai mengikis kawasan tersebut sehingga menimbulkan abrasi yang terjadi secara terus-menerus dapat mengakibatkan perubahan garis pantai. Oleh karena itu, gelombang ekstrim dan abrasi memiliki kerentanan untuk beberapa wilayah yang berada di pinggir pantai.

Perhitungan potensi bahaya bencana gelombang ekstrim dan abrasi dilihat berdasarkan parameter tinggi gelombang, arus, tipologi pantai, tutupan vegetasi, dan bentuk garis pantai. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya gelombang esktrim dan abrasi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.9
Potensi Luas Bahaya Gelombang Esktrim dan Abrasi di Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	9.077	TINGGI
2	Lebak	1.702	TINGGI
3	Tangerang	1.156	SEDANG
4	Serang	2.584	SEDANG
5	Cilegon	812	SEDANG
6	Serang	214	SEDANG
PROVINSI BANTEN		15.545	TINGGI

Sumber : *Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)*

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gelombang esktrim dan abrasi Provinsi Banten memiliki 15.545 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya gelombang esktrim dan abrasi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

6. Gempabumi

Bencana gempabumi merupakan salah satu bencana yang disebabkan oleh faktor geologi. Gempabumi adalah peristiwa pelepasan energi yang menyebabkan pergeseran pada bagian dalam bumi secara tiba-tiba. Perhitungan potensi bahaya gempabumi dilihat berdasarkan parameter dasar pengkajian risiko bencana, yaitu kelas topografi, intensitas guncangan di batuan dasar, intensitas guncangan di permukaan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya gempabumi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.10
Potensi Luas Bahaya Gempabumi di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	274.689	TINGGI
2	Lebak	335.120	TINGGI
3	Tangerang	101.186	SEDANG
4	Serang	147.656	SEDANG
5	Tangerang	15.393	SEDANG
6	Cilegon	16.465	SEDANG
7	Serang	26.671	SEDANG
8	Tangerang Selatan	14.719	SEDANG
PROVINSI BANTEN		931.899	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya gempabumi Provinsi Banten memiliki 931.889 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya gempabumi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

7. Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan atau lahan. Berdasarkan kondisi daerah Provinsi Banten, maka berpotensi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan. Perhitungan potensi bahaya kebakaran hutan dan lahan dilihat berdasarkan parameter jenis hutan dan lahan, iklim, dan jenis tanah.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.11
Potensi Luas Bahaya Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	95.658	SEDANG
2	Lebak	70.230	SEDANG
3	Tangerang	212	SEDANG
4	Serang	10.511	TINGGI
5	Cilegon	355	TINGGI
6	Serang	30	SEDANG
PROVINSI BANTEN		176.996	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kebakaran hutan dan lahan Provinsi Banten memiliki 176.996 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kebakaran hutan dan lahan adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

8. Banjir Bandang

Banjir bandang merupakan bencana baru dalam pengkajian risiko bencana. Penambahan pengkajian bencana banjir bandang disesuaikan dengan kerangka acuan kerja dari BNPB. Dalam pengkajian potensi bahaya, parameter bahaya banjir bandang dikaji berdasarkan parameter sungai utama, topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsor yang memiliki kelas tinggi). Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya banjir bandang di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.12
Potensi Luas Bahaya Banjir Bandang di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	2.173	TINGGI
2	Lebak	11.645	TINGGI
3	Tangerang	400	TINGGI
4	Serang	3.160	TINGGI
5	Tangerang	75	TINGGI
6	Tangerang Selatan	194	TINGGI
PROVINSI BANTEN		17.647	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya banjir bandang Provinsi Banten memiliki 17.647 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya banjir bandang adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota terdampak.

9. Epidemi dan Wabah Penyakit

Perhitungan potensi bahaya bencana epidemi dan wabah penyakit dilihat berdasarkan Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana. Berdasarkan aturan tersebut, disusun pengkajian potensi bahaya berdasarkan parameter-parameter sebagai alat ukurnya. Parameter tersebut adalah kepadatan penduduk penderita campak, kepadatan penduduk penderita malaria, kepadatan penduduk penderita demam berdarah, kepadatan penduduk penderita HIV/AIDS, dan kepadatan penduduk. Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.13
Potensi Luas Bahaya Epidemi dan Wabah Penyakit
di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	4.483	RENDAH
2	Lebak	1.089	RENDAH
3	Tangerang	28.200	RENDAH
4	Serang	3.154	RENDAH
5	Tangerang	892	RENDAH
6	Cilegon	1.841	RENDAH
7	Serang	1.004	RENDAH
8	Tangerang Selatan	1.956	RENDAH
PROVINSI BANTEN		42.619	RENDAH

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya epidemi dan wabah penyakit Provinsi Banten memiliki 42.619 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya epidemi dan wabah penyakit adalah rendah. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

10. Kegagalan Teknologi

Kegagalan teknologi merupakan semua kejadian yang diakibatkan oleh kesalahan desain, pengoperasian, kelalaian, dan kesengajaan manusia dalam penggunaan teknologi dan/atau industri. Pengelolaan teknologi tinggi yang tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak kegagalan ataupun kecelakaan yang berdampak bagi masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Pengkajian potensi bahaya kegagalan teknologi disusun berdasarkan parameter-parameter sebagai alat ukurnya. Perhitungan potensi bahaya kegagalan teknologi dilihat berdasarkan parameter kapasitas industri dan jenis industri: manufaktur (logam) dan kimia.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut, maka diperoleh potensi luas bahaya kegagalan teknologi di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.14
Potensi Luas Bahaya Kegagalan Teknologi

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Tangerang	8.275	TINGGI
2	Serang	4.746	TINGGI
3	Tangerang	1.692	TINGGI
4	Cilegon	4.605	TINGGI
5	Serang	857	TINGGI
6	Tangerang Selatan	459	SEDANG
7	Tangerang	8.275	TINGGI
8	Serang	4.746	TINGGI
PROVINSI BANTEN		20.634	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya kegagalan teknologi Provinsi Banten memiliki 20.634 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya kegagalan teknologi adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

11. Tsunami

Tsunami merupakan rangkaian gelombang laut yang menjalar dengan kecepatan tinggi. Sebagian besar tsunami disebabkan oleh gempabumi di dasar laut dengan kedalaman kurang dari 60 km dan magnitude lebih dari 7 SR. Tsunami juga dapat diakibatkan oleh longsor dasar laut, letusan gunung berapi dasar laut, atau jatuhnya meteor ke laut. Perhitungan potensi bahaya tsunami dilihat berdasarkan parameter adalah ketinggian maksimum tsunami, kemiringan lereng, dan kekasaran permukaan.

Berdasarkan perhitungan dengan standar parameter tersebut maka diperoleh potensi luas bahaya tsunami di Provinsi Banten seperti tabel di bawah ini.

Tabel 2.15
Potensi Luas Bahaya Tsunami di Provinsi Banten

NO	KABUPATEN/KOTA	BAHAYA	
		LUAS (Ha)	KELAS
1	Pandeglang	13.445	TINGGI
2	Lebak	2.672	TINGGI
3	Tangerang	8.227	SEDANG
4	Serang	8.296	TINGGI
5	Cilegon	1.024	TINGGI
6	Serang	1.190	RENDAH
PROVINSI BANTEN		34.854	TINGGI

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten
Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel di atas menunjukkan bahwa hasil dari potensi luas bahaya tsunami Provinsi Banten memiliki 34.854 Ha total potensi luas bahaya. Dari luas bahaya tersebut diketahui kelas bahaya tsunami adalah tinggi. Potensi luas bahaya dan kelas bahaya Provinsi Banten tersebut diidentifikasi berdasarkan potensi bahaya seluruh kabupaten/kota.

2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1 Pertumbuhan PDRB

Kinerja pembangunan pada aspek kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran hasil pelaksanaan pembangunan yang meliputi Pertumbuhan Ekonomi dan distribusi beberapa lapangan usaha di Provinsi Banten.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.7

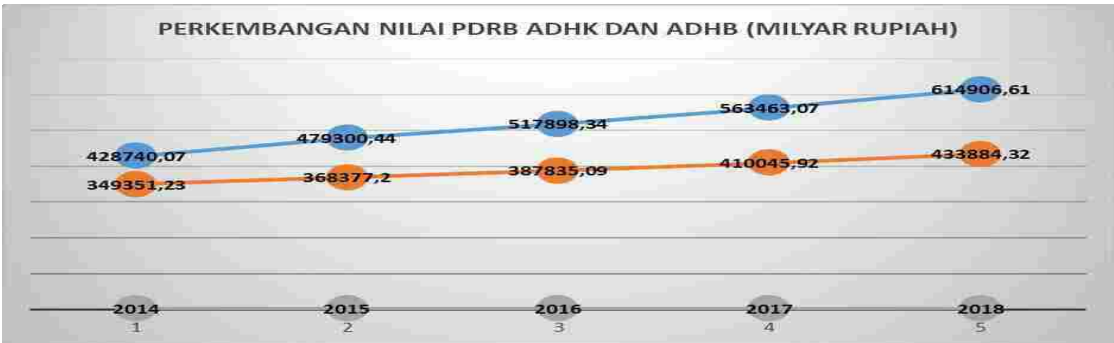
Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) 2012-2018 (Tw IV)

Struktur perekonomian suatu daerah dapat dilihat dari distribusi persentase PDRB kelompok lapangan usaha yang terdiri dari kelompok lapangan usaha primer, kelompok lapangan usaha sekunder dan kelompok lapangan usaha tersier. Kelompok lapangan usaha primer terdiri dari lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan, pertambangan dan penggalian. Kelompok usaha sekunder terdiri dari lapangan usaha industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, konstruksi. Kemudian kelompok lapangan usaha tersier terdiri dari lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan, real estate, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial, dan jasa lainnya.

Apabila dilihat menurut lapangan usahanya, pada tahun 2017, lapangan usaha Industri Pengolahan memberikan sumbangan tertinggi sebesar 31,88 persen, kemudian disusul lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor sebesar 12,33 persen. Selanjutnya lapangan usaha Kontruksi menyumbang 10,41 persen dan lapangan usaha real estat memberikan sumbangan sebesar 7,42 persen. Sementara peranan lapangan usaha lainnya secara keseluruhan menyumbang sebesar 37,96 persen.

Struktur perekonomian Banten menurut lapangan usaha tahun 2018 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu: Industri Pengolahan (31,20 persen); Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor (12,49 persen); dan Transportasi dan Pergudangan (11,08 persen).

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Banten terus mengalami peningkatan sebagaimana terlihat pada gambar berikut :



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.8
Perkembangan Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan dan Harga Berlaku Provinsi Banten (Milyar Rupiah) 2014-2018

Tabel 2.16
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha PDRB	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	19.456,95	20.743,47	22.108,75	23.054,69	23.879,78
B. Pertambangan dan Penggalian	2.677,28	2.775,25	2.870,48	2.850,85	2.871,46
C. Industri Pengolahan	130.305,90	134.907,47	139.073,54	144.219,15	149.425,06
D. Pengadaan Listrik dan Gas	4.399,17	4.338,09	4.158,64	4.179,58	4.480,41
E. Pengadaan Air	329,28	346,29	369,93	396,92	416,26
F. Konstruksi	31.636,47	34.153,90	36.307,71	39.224,02	42.241,66
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	47.249,36	49.575,36	51.486,46	54.651,24	58.613,53
H. Transportasi dan Pergudangan	21.908,32	23.348,64	25.133,93	27.289,08	29.293,61
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.006,95	8.520,04	9.165,73	9.924,70	10.664,18
J. Informasi dan Komunikasi	18.119,06	19.782,89	21.373,06	23.173,72	24.998,29
K. Jasa Keuangan	9.351,26	10.136,57	11.587,60	12.037,90	12.873,62
L. Real Estate	27.697,29	29.687,73	32.003,54	34.538,74	37.260,63
M,N. Jasa Perusahaan	3.346,88	3.607,27	3.875,63	4.182,02	4.458,77
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.970,70	6.361,71	6.813,81	7.140,46	7.517,97
P. Jasa Pendidikan	9.979,68	10.647,51	11.354,62	12.197,11	13.103,71
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.020,47	4.228,76	4.542,71	4.912,96	5.249,40
R,S,T,U. Jasa lainnya	4.896,20	5.216,25	5.608,94	6.072,79	6.535,99
PDRB	349.351,23	368.377,20	387.835,09	410.045,92	433.884,32

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.17
 Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan
 Usaha (Persen) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha PDRB	Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,45	6,61	6,58	4,28	3,58
B. Pertambangan dan Penggalian	3,96	3,66	3,43	-0,68	0,72
C. Industri Pengolahan	1,70	3,53	3,09	3,70	3,61
D. Pengadaan Listrik dan Gas	8,26	-1,39	-4,14	0,50	7,20
E. Pengadaan Air	7,15	5,16	6,83	7,30	4,87
F. Konstruksi	11,46	7,96	6,31	8,03	7,69
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,04	4,92	3,85	6,15	7,25
H. Transportasi dan Pergudangan	5,42	6,57	7,65	8,57	7,35
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,83	6,41	7,58	8,28	7,45
J. Informasi dan Komunikasi	18,71	9,18	8,04	8,42	7,87
K. Jasa Keuangan	4,75	8,40	14,31	3,89	6,94
L. Real Estate	8,42	7,19	7,80	7,92	7,88
M,N. Jasa Perusahaan	8,78	7,78	7,44	7,91	6,62
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,18	6,55	7,11	4,79	5,29
P. Jasa Pendidikan	7,57	6,69	6,64	7,42	7,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,34	5,18	7,42	8,15	6,85
R,S,T,U. Jasa lainnya	7,49	6,54	7,53	8,27	7,63
PDRB	5,51	5,45	5,28	5,73	5,81

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.18
Kontribusi Sektor dalam PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2010
(Persen) Tahun 2014-2018

Lapangan Usaha PDRB	Persentase PDRB atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
	2014	2015	2016	2017	2018
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,82	5,87	6,02	5,90	5,78
B. Pertambangan dan Penggalian	0,87	0,81	0,79	0,74	0,69
C. Industri Pengolahan	34,70	33,52	32,57	31,93	31,20
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2,57	2,70	2,32	2,13	2,08
E. Pengadaan Air	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
F. Konstruksi	9,77	9,96	10,12	10,30	10,61
G. Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,53	12,37	12,18	12,29	12,49
H. Transportasi dan Pergudangan	9,19	10,14	10,70	10,87	11,08
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,33	2,34	2,37	2,39	2,38
J. Informasi dan Komunikasi	3,64	3,51	3,53	3,64	3,53
K. Jasa Keuangan	2,78	2,79	3,04	3,03	3,08
L. Real Estate	6,95	7,07	7,22	7,47	7,62
M,N. Jasa Perusahaan	0,99	1,02	1,05	1,08	1,09
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,93	1,98	2,04	2,03	2
P. Jasa Pendidikan	3,17	3,17	3,23	3,31	3,44
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,15	1,13	1,15	1,18	1,21
R,S,T,U. Jasa lainnya	1,54	1,55	1,57	1,62	1,63
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.19
Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota
(Juta Rupiah) Tahun 2014-2017

Wilayah	PDRB (Rp)			
	2014	2015	2016	2017
Pandeglang	15,097,104.74	15,974,129.39	16,856,468.51	17,876,027.09
Lebak	15,756,246.97	16,733,237.57	17,716,138.88	18,788,268.35
Tangerang	73,828,384.71	77,962,945.83	82,139,044.21	86,937,312.91
Serang	42,300,934.77	44,454,582.21	46,719,819.27	49,154,271.36
Kota Tangerang	86,183,522.76	90,807,569.45	95,631,145.01	101,280,309.33
Kota Cilegon	57,261,922.79	59,982,731.73	63,014,416.12	66,534,357.56
Kota Serang	16,745,083.89	17,808,478.25	18,926,545.83	20,139,187.38
Kota Tangsel	42,411,467.14	45,485,613.63	48,602,863.79	52,213,998.57
BANTEN	349,351,227.66	368,377,203.02	387,824,352.75	409,959,694.09

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.2.2 Laju Inflasi

Berdasarkan berita resmi Statistik BPS Provinsi Banten yang dirilis pada tanggal 2 Januari 2019 menyatakan bulan desember tahun 2018, harga barang-barang/jasa kebutuhan pokok masyarakat di Banten secara umum mengalami kenaikan. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 142,31 pada bulan November menjadi 143,20 pada bulan Desember atau terjadi perubahan indeks (inflasi) sebesar 0,63 persen.

Enam dari tujuh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks, yaitu berturut-turut: kelompok bahan makanan mengalami kenaikan indeks sebesar 1,78 persen, kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan naik sebesar 0,94 persen, kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau naik sebesar 0,37 persen, kelompok kesehatan naik sebesar 0,14 persen, kelompok sandang naik sebesar 0,13 persen, kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar naik sebesar 0,02 persen sedangkan kelompok pendidikan, rekreasi dan olahraga mengalami penurunan sebesar -0,04 persen.

Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan Desember ini adalah angkutan udara, telur ayam ras, daging ayam ras, bawang merah dan cabai merah. Laju inflasi tahun kalender dan inflasi “Year on Year” (IHK Desember 2018 terhadap Desember 2017) tercatat sebesar 3,42 persen.

Tabel 2.20
IHK, Inflasi, Laju Inflasi Banten Menurut Kelompok Pengeluaran Bulan Desember 2018 (2017= 100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Desember 2017	IHK Nopember 2018	IHK Desember 2018	Inflasi Desember 2018 *)	Laju Inflasi Tahun 2018 **)	Inflasi “Year on Year” **)
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
U M U M	138,47	142,31	143,20	0,63	3,42	3,42
1. Bahan Makanan	148,93	149,75	152,41	1,78	2,34	2,34
2. Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	153,88	157,32	157,89	0,37	2,60	2,60
3. Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	130,14	135,04	135,06	0,02	3,78	3,78
4. Sandang	114,64	119,19	119,35	0,13	4,11	4,11
5. Kesehatan	135,57	143,92	144,11	0,14	6,30	6,30
6. Pendidikan, rekreasi dan olahraga	136,08	142,34	142,29	-0,04	4,57	4,57
7. Transpor, komunikasi & Jasa Keuangan	130,96	134,08	135,34	0,94	3,35	3,35

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.9
Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Banten Tahun 2014-2018

2.2.3 PDRB Perkapita

Bila PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah itu, maka akan dihasilkan suatu indikator yang dinamakan PDRB per kapita. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Pada Tahun 2017, secara agregat PDRB per kapita Banten mencapai mencapai 45.342.376,40 juta rupiah atau senilai US\$ 3,233.43, meningkat 5,73 persen bila dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 42,470,297.23 juta rupiah (US\$ 3,266.95). Peningkatan tersebut, lebih rendah bila dibandingkan dengan peningkatan pada tahun-tahun sebelumnya selama periode 2014-2015 berturut-turut sebesar 11,30 persen dan 9,28 persen.

PDRB per kapita merupakan proxy ukuran pendapatan per kapita atau dengan kata lain, PDRB per kapita diasumsikan sebagai pendapatan per kapita. Kemampuan masyarakat untuk mengonsumsi produk barang/jasa sangat dipengaruhi oleh pendapatan per kapita. Apabila diperhatikan perkembangan daya beli masyarakat yang diasumsikan setara dengan peningkatan pendapatan per kapita yang dikoreksi oleh angka inflasi, maka daya beli masyarakat di Banten pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi sebesar 2,76 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yang mencapai 4,98 persen. Kondisi perubahan daya beli dalam periode tahun 2012- 2016 fluktuatif dengan rentang 5 persen.

Tabel 2.21
PDRB Perkapita Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015*	2016**
PDRB per Kapita (Juta Rp)	30,20	32,99	36,63	40,03	42,31
PDRB per Kapita (US \$)	3.214,85	3.154,77	3,085,95	2,988,64	3,179,83
Indeks Perkembangan PDRB per Kapita (2010=100)	118,92	129,90	144,22	157,60	166,59
Pertumbuhan PDRB per Kapita	7,95	9,23	11.03	9,28	5,70
Catatan : * Angka Sementara ** Angka Sangat Sementara					

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.22
PDRB Perkapita Menurut Kabupaten/(Rupiah) 2012-2017

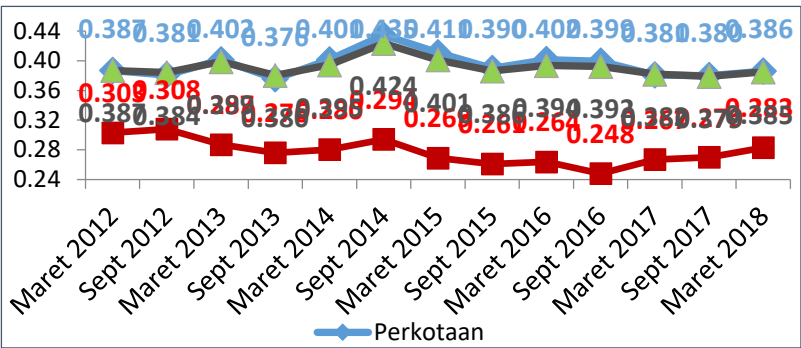
Wilayah	PDRB Per Kapita (Rp)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
01 Pandeglang	12,887,168.08	13,900,103.54	15,317,815.93	17,028,467.00	18,481,047.53	20,225,700.22
02 Lebak	12,239,703.77	13,416,112.11	14,765,720.77	16,279,741.41	17,676,916.60	19,214,831.95
03 Tangerang	23,662,041.75	25,514,935.14	27,999,002.57	30,160,683.84	31,443,263.94	33,277,805.72
04 Serang	29,240,909.81	31,685,494.20	35,077,025.86	38,124,015.53	41,020,521.53	44,221,583.65
71 Kota Tangerang	43,919,046.02	48,433,319.89	54,980,937.05	60,891,275.08	65,001,733.08	69,826,157.74
72 Kota Cilegon	141,650,612.05	155,024,561.93	172,091,926.65	186,985,703.61	195,975,954.64	209,695,821.29
73 Kota Serang	25,575,823.32	28,203,885.22	31,148,320.22	34,058,115.95	36,690,997.41	39,727,941.32
74 Kota Tangsel	28,020,186.07	30,723,741.42	33,539,279.37	36,441,854.63	38,503,578.29	41,532,733.05
BANTEN	30,202,440.50	32,991,607.00	36,629,181.91	40,091,233.92	42,470,297.23	45,342,376.40

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.2.4 Indeks Gini Rasio dan Analisa Ketimpangan

Ketimpangan pendapatan penduduk masih cukup tinggi seiring dengan meningkatnya pengeluaran masyarakat dalam setahun terakhir. Kesimpulan itu didapat berdasarkan hasil perhitungan koefisien gini (gini ratio) yang Tahun 2018 sebesar 0,385 dan tahun 2017 sebesar 0,379 walaupun pada penurunan tahun 2014 sebesar 0,35.

Sekadar informasi, koefisien gini dibagi menjadi tiga indikator, yakni kurang dari 0,3 persen menunjukkan ketimpangan rendah, antara 0,3 sampai 0,5 persen menunjukan ketimpangan tingkat menengah, dan lebih dari 0,5 persen menunjukkan ketimpangan tinggi. Statistik menunjukkan, penurunan gini ratio terbesar terjadi di perkotaan, yakni sebesar 0,018 poin dari 0,428 pada Maret 2015 menjadi 0,410. Sedangkan di pedesaan, gini rasio juga turun sebesar 0,007 poin dari 0,334 menjadi 0,327.



Sumber SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.10
Perkembangan *Gini Ratio* Banten, Maret 2012–Maret 2018

Untuk mengukur ketimpangan pendapatan juga bisa dilihat dari tingkat pengeluaran masyarakat. Indikator ketimpangan pengeluaran dilihat dari tingkat pengeluaran 40 persen terbawah dari setiap kelompok masyarakat, yakni kelompok berpenghasilan rendah, sedang dan tinggi. Penilaiannya berkebalikan dari koefisien gini, di mana semakin tinggi nilai semakin rendah ketimpang dan sebaliknya.

Ketimpangan tinggi terjadi jika persentase pengeluaran 40 persen masyarakat di bawah 12 persen. Sedangkan untuk kisaran 12-17 persen masuk kategori sedang, dan di atas 17 persen menunjukkan ketimpangan yang rendah. Kendati foefisien gini di perkotaan turun paling besar, namun ketimpangan pengeluaran di perkotaan lebih parah dibandingkan dengan ketimpangan di perdesaan. Ukuran Bank Dunia juga menunjukkan hal yang sama, yaitu di perkotaan tergolong ketimpangan sedang atau di bawah 17 persen sementara di perdesaan tergolong ketimpangan rendah di atas 17 persen.

Tabel 2.23
Indeks *Gini Ratio* di Provinsi Banten Tahun 2012 -2018

Wilayah Provinsi	Indeks Gini						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Banten	0,384	0,38	0,424	0,386	0,392	0,379	0,385

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

2.2.5 Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Banten pada bulan Maret 2018 mencapai 5,24 persen. Jika dibandingkan dengan persentase penduduk miskin pada September 2017 (5,59 persen). Dalam kurun waktu enam bulan terjadi penurunan sebesar 0,35 poin. Persentase penduduk miskin baik di daerah perkotaan maupun perdesaan mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 4,69 menjadi 4,38 dan persentase penduduk miskin di perdesaan turun dari 7,81 pada September 2017 menjadi 7,33 pada Maret 2018. Sejalan dengan penurunan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin di Banten pada periode yang sama berkurang sebanyak 38,47 ribu orang dari 699,83 ribu orang pada September 2017 menjadi 661,36 ribu orang pada bulan Maret 2018.

Tabel 2.24
Perkembangan Tingkat KemiskinanProvinsi Banten Tahun 2018

Daerah	Bulan/ Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase Penduduk Miskin
Perkotaan	Sept. 2017	415,67	4,69
	Maret 2018	393,80	4,38
Pedesaan	Sept. 2017	284,16	7,81
	Maret 2018	267,55	7,33
Perkotaan + pedesaan	Sept. 2017	699,83	5,59
	Maret 2018	661,36	5,24

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Banten mencapai 661,36 ribu orang (5,24 persen), berkurang sebanyak 38,47 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 699,83 ribu orang (5,59 persen).

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2017 sebesar 4,69 persen turun menjadi 4,38 persen pada Maret 2018. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2017 sebesar 7,81 persen turun menjadi 7,33 persen pada Maret 2018.

Selama periode September 2017-Maret 2018, jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan turun sebanyak 21,87 ribu orang (dari 415,67 ribu orang pada September 2017 menjadi 393,80 ribu orang pada Maret 2018), sementara di daerah perdesaan turun sebanyak 16,61 ribu orang (dari 284,16 ribu orang pada September 2017 menjadi 267,55 ribu orang pada Maret 2018).

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan pada Maret 2018 tercatat sebesar 71,66 persen. Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan kondisi September 2017 yaitu sebesar 70,92 persen

Jenis komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan Maret 2018 di perkotaan maupun di perdesaan adalah beras, rokok kretek filter, telur ayam ras, daging ayam ras, kopi bubuk dan kopi instan (sachet) serta roti. Sedangkan komoditi non makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai Garis Kemiskinan di perkotaan maupun perdesaan adalah perumahan, bensin, listrik, pendidikan, dan perlengkapan mandi.

Tabel 2.25
 Angka Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (Persen) Tahun 2012-2017

Kabupaten/Kota	TAHUN					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kab Pandeglang	9,28	10,25	9,5	10.43	9.67	9.74
Kab Lebak	8,63	9,5	9,17	9.97	8.71	8.64
Kab Tangerang	5,71	5,78	5,26	5.71	5.29	5.39
Kab Serang	5,28	5,02	4,87	5.09	5.29	4.63
Kota Tangerang	5,56	5,26	4,91	5.04	4.94	4.95
Kota Cilegon	3,82	3,99	3,81	4.10	3.57	3.52
Kota Serang	5,7	5,92	5,7	6.28	5.58	5.57
Kota Tangerang Selatan	1,33	1,75	1,68	1.69	1.67	1.76

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Sumbangan Garis Kemiskinan Makanan terhadap Garis Kemiskinan tercatat sebesar 70,29 persen. Sementara kelompok komoditi non makanan hanya menyumbang 29,71 persen terhadap Garis Kemiskinan.

Berdasarkan indikator-indikator pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan tersebut, pencapaian pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten belum menciptakan peluang ekonomi yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, yang disebut sebagai pertumbuhan ekonomi inklusif (inclusive growth). Pertumbuhan inklusif adalah pertumbuhan yang inheren, berkelanjutan, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara golongan kaya dan golongan miskin. Pertumbuhan inklusif menunjukkan

pertumbuhan yang berkualitas, yang memungkinkan seluruh individu ikut berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan yang berkualitas diartikan sebagai pertumbuhan ekonomi yang secara signifikan memperbesar ketersediaan lapangan pekerjaan dan menurunkan angka kemiskinan. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi semakin berkualitas bila semakin besar masyarakat yang terlibat dan menikmati hasil ekonomi produktif di dalam sistem perekonomian. Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ekonom mendorong kemitraan yang mapan antara pemerintahan daerah, kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha dalam mengelola sumber daya lokal yang ada untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan memicu pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah tertentu.

Pertumbuhan yang inklusif tergantung dari tiga komponen penting: keberhasilan memaksimalkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat; ketersediaan jaringan pengaman sosial bagi seluruh lapisan masyarakat; dan keberhasilan menjamin keadilan akses terhadap kesempatan kerja. Ketiga komponen dasar dari pembangunan yang inklusif sangat tergantung pada aspek institusi dan tata kelola.

Untuk memaksimalkan kesempatan atau peluang ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu memperkuat ekonomi berbasis potensi lokal. Dalam memperkuat ekonomi lokal, Nancey Green Leigh dan Edward J. Blakely dalam *Planning Local Economic Development: Theory and Practice* (2016) merumuskan beberapa kriteria, yaitu: 1) Bahan baku dan sumber daya lokal; 2) Dapat digerakan oleh penduduk lokal/ sesuai dengan kemampuan penduduk (SDM) lokal; 3) Pengusaha dan tenaga kerja dominan adalah tenaga kerja lokal; 4) Melibatkan sebagian besar penduduk lokal; 5) Skala pelayanan kecil ditunjukkan oleh jumlah investasi dan jumlah tenaga kerja; 6) Terdapat organisasi/ kelompok kegiatan ekonomi; 7) Terdapat keterkaitan dengan kegiatan ekonomi lain; 8) Memunculkan wirausahawan baru. Pengembangan dunia usaha yang berbasis potensi local merupakan komponen penting dalam perencanaan pembangunan ekonomi daerah karena daya tarik, kreasi, atau daya tahan kegiatan dunia usaha dianggap sebagai cara terbaik untuk menciptakan perekonomian daerah yang sehat.

2.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses perubahan kualitas diri manusia menuju kehidupan yang lebih baik. Adapun kemajuan pembangunan manusianya secara umum dapat ditunjukkan dengan melihat perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM sendiri adalah ukuran yang mencerminkan capaian kemajuan pembangunan manusia, yang dibentuk menurut tiga dimensi dasar kebutuhan manusia, yaitu umur panjang dan sehat, pengetahuan dan standar hidup layak. Angka IPM berdasarkan kabupaten/kota di provinsi Banten dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.26
Perkembangan IPM Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
Tahun 2012 – 2017

Kab/Kota	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
Kabupaten Pandeglang	61,35	62,06	62,72	63,40	63,82
Kabupaten Lebak	61,13	61,64	62,03	62,78	62,95
Kabupaten Tangerang	69,28	69,57	70,05	70,44	70,97
Kabupaten Serang	63,57	63,97	64,61	65,12	65,60
Kota Tangerang	75,04	75,87	76,08	76,81	77,01
Kota Cilegon	70,99	71,57	71,81	72,04	72,29
Kota Serang	69,69	70,26	70,51	71,09	71,31
Kota Tangerang Selatan	78,65	79,17	79,38	80,11	80,84
Provinsi Banten	69,47	69,89	70,27	70,96	71,42
Indonesia	68,31	68,90	69,55	70,18	70,81

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.11
Perkembangan IPM Provinsi Banten 2011-2017

IPM Banten sendiri pada tahun 2017 ini baru mencapai 71,42. Berarti, jaraknya dari yang ideal masih kurang 28,58 persen. Adapun status pembangunan manusianya masih tetap berkategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Betapapun juga, dengan angka IPM sebesar itu, capaian pembangunan manusia Banten berada pada peringkat tertinggi ke delapan di Indonesia. Pada tahun 2017, IPM Banten telah mencapai 71,42, atau meningkat 0,46 poin dibandingkan tahun lalu yang sebesar 70,96. Kemajuan pembangunan manusia Banten pada tahun 2017 mengalami perlambatan. Ditandai oleh pertumbuhan IPM yang mencapai 0,65 persen, lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2016 yang mencapai 0,98 persen.

2.2.7 Angka Rata-rata Lama Sekolah

Perbaikan tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah tidak terlepas dari pendidikan yang merupakan penentu kualitas penduduk. Kualitas penduduk Banten sendiri selama tiga tahun terakhir ini telah meningkat pesat. Kondisi ini dapat diketahui dari meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas (RLS) dan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan S1/DIV/S2/S3 (APT), hingga mencapai 8,37 tahun dan 6,39 persen. Bahkan, kualitas penduduk Banten ini secara rata-rata lebih tinggi dibandingkan Nasional, yang memiliki RLS dan APT hanya 7,95 tahun dan 5,96 persen.

Tabel 2.27
Rata rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2013 – 2018

Kabupaten/Kota	Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	6,44	6,45	6,60	6,62	6,63	6,72
Kab Lebak	5,81	5,84	5,86	6,19	6,20	6,21
Kab Tangerang	8,18	8,2	8,22	8,23	8,24	8,27
Kab Serang	6,65	6,69	6,90	6,98	7,17	7,18
Kota Tangerang	9,82	10,2	10,20	10,28	10,29	10,51
Kota Cilegon	9,6	9,66	9,67	9,68	9,69	9,73
Kota Serang	8,56	8,58	8,59	8,6	8,61	8,62
Kota Tangerang Selatan	11,48	11,56	11,57	11,58	11,77	11,78
Provinsi Banten	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53	9,62

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Rata rata lama sekolah Provinsi Banten pada tahun 2013 adalah 8.17, angka pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar 36 poin atau 8,53. Selama periode 2013 hingga 2017, Harapan Lama Sekolah telah meningkat sebesar 1,45 tahun. Meningkatnya Harapan Lama Sekolah juga menjadi sinyal bahwa memang ada perbaikan pada sistem pendidikan di Banten. Kondisi ini sekaligus menjadi penanda dari semakin banyaknya penduduk yang bersekolah. Sayangnya, angka pertumbuhan Harapan Lama Sekolah dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan, inilah yang harus dicari jalan keluarnya. Betapapun juga, Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 telah mencapai 12,78 tahun. Artinya, bahwa anak-anak yang telah berusia 7 tahun pada tahun 2017, memiliki peluang untuk bersekolah hingga Semester I di perguruan tinggi, atau setidaknya menamatkan pendidikan hingga lulus SMA.

Sementara itu, Rata-rata Lama Sekolah di Banten pada tahun 2018 telah mencapai 9,62 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk yang berusia 25 tahun ke atas telah mengenyam pendidikan hingga kelas IX (SMP kelas III).

Selain itu, angka pertumbuhan Rata-rata Lama Sekolah yang selalu positif, menjadi penanda bahwa kualitas pendidikan penduduk Banten terus mengalami peningkatan. Bahkan dalam setahun terakhir ini, kualitas pendidikan penduduk Banten meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

2.2.8 Angka Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) mencerminkan kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. HLS mengukur kesempatan pendidikan seorang penduduk di mulai pada usia tujuh tahun. Secara sederhana, HLS dapat didefinisikan sebagai angka partisipasi sekolah menurut umur tunggal. HLS merupakan indikator yang menggambarkan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka ini diperoleh dengan cara membagi banyaknya partisipasi sekolah penduduk pada usia a pada tahun t dengan jumlah penduduk yang bersekolah pada usia a pada tahun t . Harapan Lama sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.28
Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota dan Provinsi Banten
Tahun 2012 – 2018

Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah (Tahun)						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	12.17	12.86	13.38	13.39	13.40	13.41	13,42
Kab Lebak	10.96	11.55	11.88	11.90	11.91	11.92	11,93
Kab Tangerang	11.18	11.44	11.65	11.89	12.11	12.51	12,80
Kab Serang	11.72	12.09	12.35	12.36	12.37	12.38	12,39
Kota Tangerang	12.23	12.60	12.86	12.90	13.41	13.44	13,83
Kota Cilegon	12.18	12.67	13.07	13.10	13.11	13.12	13,13
Kota Serang	11.82	11.92	12.34	12.36	12.63	12.64	12,65
Kota Tangerang Selatan	12.79	13.24	13.58	13.61	14.08	14.390	14,42
Provinsi Banten	11.79	12.05	12.31	12.35	12.70	12.78	12,85

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Berdasarkan tabel tersebut, Angka Harapan Lama Sekolah di Provinsi Banten pada Tahun 2018 adalah sebesar 12,85 Tahun, dengan kecenderungan selalu meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2012 dan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,06%. Angka indikator HLS tersebut mengindikasikan bahwa anak usia 7 tahun di Provinsi Banten mempunyai peluang untuk bersekolah selama 12,85 tahun, atau sampai dengan lulus sekolah menengah. Dalam wilayah Provinsi Banten, Kota Tangerang Selatan mencapai angka HLS tertinggi, yaitu 14,42 tahun dan Kabupaten Lebak menunjukkan angka HLS terendah, yaitu 11,93 tahun.

2.2.9 Angka Harapan Hidup

Capaian Banten untuk bidang kesehatan dalam tiga tahun terakhir telah menunjukkan adanya perbaikan. Kondisi ini terlihat dari terus meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH) hingga mencapai 69 tahun lebih 64 bulan pada tahun 2018. Selain itu, angka kesakitan yang diukur dengan persentase penduduk yang mengalami keluhan kesehatan menurun hingga menjadi 28,30 persen. Sayangnya, rata-rata lama sakit dari penduduk yang mengalami keluhan kesehatan justru meningkat dari sekitar 5 hari menjadi 6 hari.

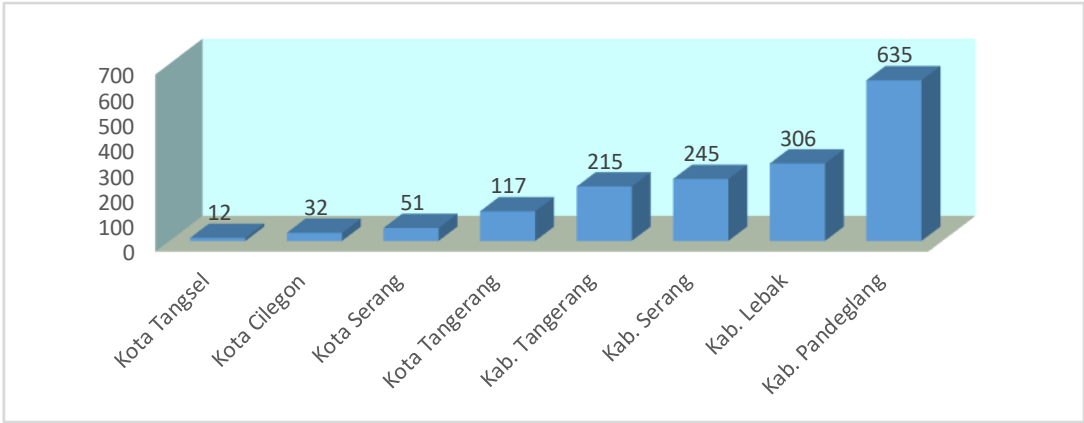
Tabel 2.29
Angka Harapan Hidup Tahun 2013 – 2018

Kabupaten/Kota	Angka Harapan Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Tahun)					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kab Pandeglang	62,83	62,91	63,51	63,77	64,04	64,24
Kab Lebak	65,83	65,88	66,28	66,43	66,59	66,79
Kab Tangerang	68,96	68,98	69,28	69,37	69,47	69,61
Kab Serang	63,03	63,09	63,59	63,81	64,02	64,22
Kota Tangerang	71,09	71,09	71,29	71,34	71,38	71,45
Kota Cilegon	65,84	65,85	66,15	66,24	66,32	66,43
Kota Serang	67,23	67,23	67,33	67,36	67,38	67,58
Kota Tangerang Selatan	72,1	72,11	72,12	71,14	72,16	72,26
Provinsi Banten	69,04	69,13	69,43	69,46	69,49	69,64

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

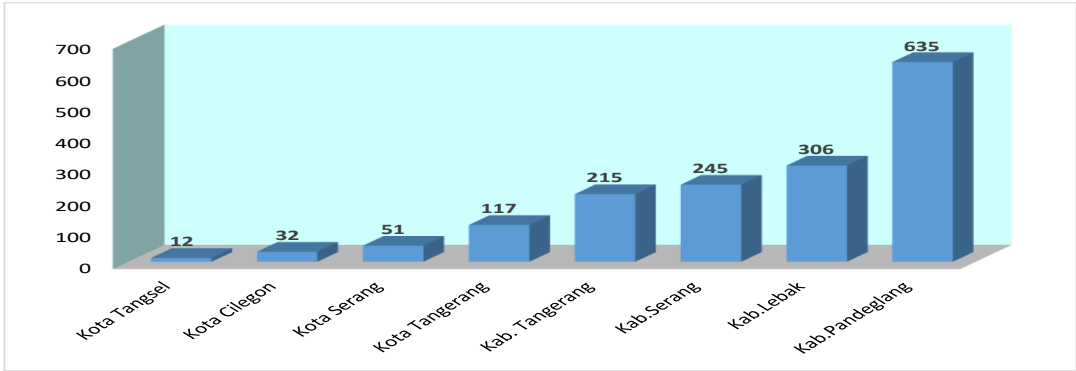
2.2.10 Persentase Balita Gizi Buruk

Kasus gizi buruk di Provinsi Banten Tahun 2015 masih cukup tinggi terutama di Kabupaten Pandeglang sebesar 635 kasus dan kabupaten Lebak sebesar 306 kasus, hal ini perlu penanganan secara komprehensif dengan melibatkan lintas sektor terkait.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.12
Jumlah Gizi Buruk 2018

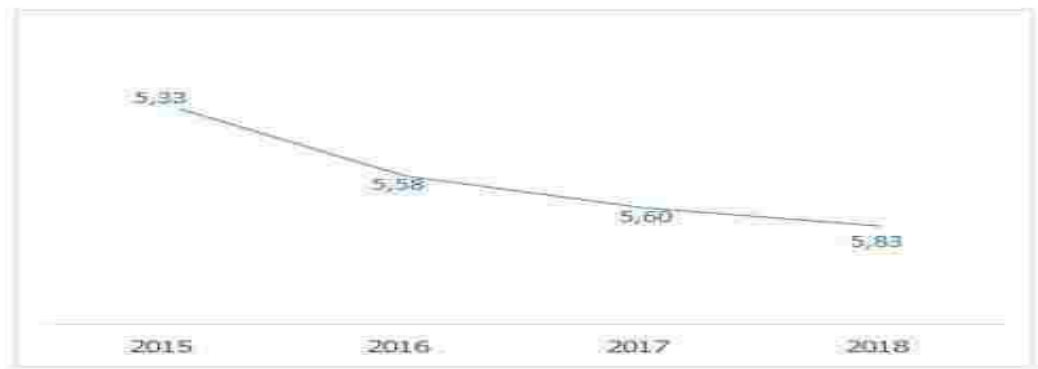


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.13
Jumlah Gizi Buruk Ditangani/ Dirawat 2018

2.2.11 Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja Banten (penduduk usia 15 tahun ke atas), yang memasuki pasar kerja telah meningkat hingga menjadi lebih dari dua pertiganya. Kondisi ini terlihat dari indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang memberikan gambaran mengenai besarnya persentase penduduk usia kerja yang termasuk dalam bagian angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja Banten sendiri selama periode 2015 sampai dengan Agustus 2018 tersebut terus bertambah, yaitu dari 5,33 juta orang menjadi 5,83 juta orang.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018
Gambar 2.14
Angka partisipasi angkatan kerja (Dalam Juta)

2.2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mengalami kenaikan dari 62,32 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 63,50 persen pada tahun 2018. TPAK sebesar 63,50 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 hingga 50 orang yang aktif secara ekonomi.TPAK sebesar 63,66 persen berarti dari 100 orang penduduk usia kerja terdapat sekitar 63 hingga 50 orang yang aktif secara ekonomi.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018
Gambar 2.15
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Banten (Persen)
Tahun 2012-2018

2.2.13 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka di perkotaan lebih rendah dibanding yang di perdesaan, yaitu 7,62 persen berbanding 10,77 persen. Keadaan ini dimungkinkan karena lapangan pekerjaan lebih banyak tersedia di perkotaan dibanding di perdesaan, sehingga penyerapan angkatan kerja dalam dunia kerja di perkotaan lebih tinggi dan tingkat pengangguran pun rendah.

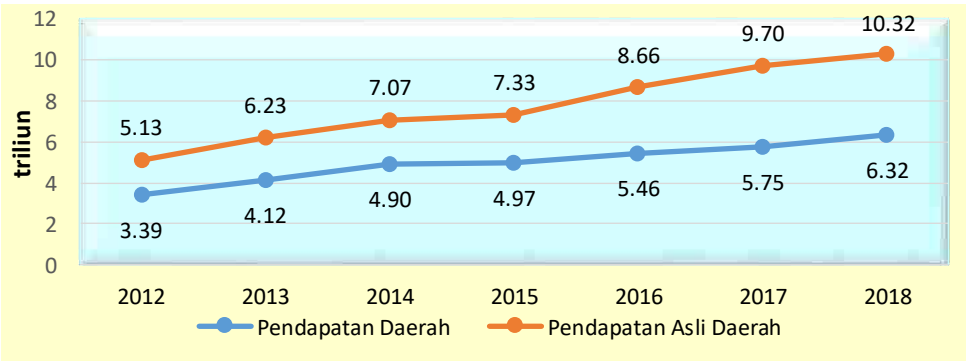


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.16
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten
Tahun 2012-2018 (Persen)

2.2.14 Persentase PAD terhadap Pendapatan

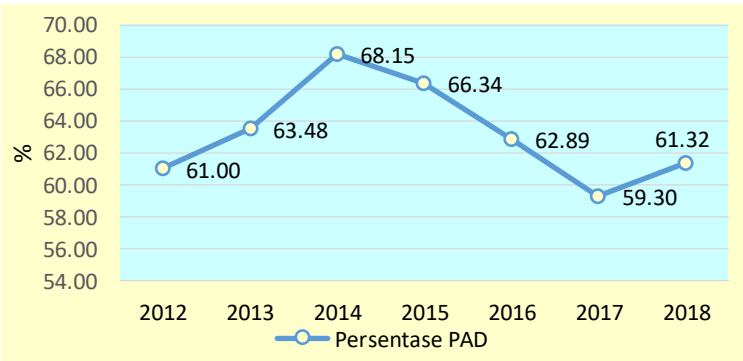
Perkembangan APBD Provinsi Banten tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah berada pada kisaran 12,5%, pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar Rp5,13 triliun terus bergerak naik hingga pada tahun 2016 sebesar Rp8,66 triliun. Pertumbuhan tersebut memberikan gambaran yang sangat baik terhadap peningkatan pendapatan daerah. Rata-rata pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 12%. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2012 masih sebesar Rp. 3,39 triliun dan menjadi Rp6,32 triliun pada tahun 2018. Realisasi perkembangan dapat dilihat pada grafik berikut :



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.17
Realisasi Pendapatan dan Pendapatan Asli Daerah
Provinsi Banten Tahun 2012-2018

Selanjutnya komposisi pendapatan daerah tahun 2012-2016 secara signifikan di dominasi oleh Pendapatan Asli Daerah yang mencapai kisaran 61,00 persen sampai dengan 61,32 persen. Komposisi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat pada grafik berikut:



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.18
 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Banten
 Tahun 2012-2018

2.2.15 Pertumbuhan Industri

Industri pengolahan adalah satu-satunya lapangan usaha yang setiap tahun selalu mendominasi struktur perekonomian Banten. Jumlah perusahaan atau usahanya pada tahun 2016 mencapai 129 ribu unit, atau bertambah 10 ribu unit dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, penyerapan tenaga kerjanya justru menurun dari 1,2 juta orang menjadi 1,1 juta orang. Akan tetapi, NTB yang diciptakannya meningkat hingga mencapai angka 168,4 triliun rupiah. Akibatnya, NTB per tenaga kerja juga meningkat dari 133,9 juta rupiah menjadi 150,8 juta rupiah.

Secara spasial, industri pengolahan Banten terkonsentrasi di Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan bagian timur Kabupaten Serang dengan teknologi produksi kebanyakan padat tenaga kerja. Kemudian, Kota Cilegon dan bagian barat Kabupaten Serang yang menjadi daerah konsentrasi industri padat modal. Secara keseluruhan persentase jumlah perusahaan, tenaga kerja dan NTB industri pengolahan untuk keempat Kabupaten/Kota tersebut terhadap total Banten mencapai 93,6 persen, 78,0 persen dan 93,4 persen.

Adanya perbedaan teknologi produksi antar perusahaan/usaha industri pengolahan, secara agregat dapat dilihat dari tingkat produktivitas tenaga kerja, yang dalam hal ini diukur dengan NTB per tenaga kerja. Dimana, tingkat produktivitas tenaga kerja industri padat modal akan lebih tinggi dibandingkan yang padat tenaga kerja. Dengan melihat besaran NTB

per tenaga kerja, dapat dikatakan bahwa industri pengolahan yang ada di Kota Cilegon relatif paling padat modal dibandingkan daerah lain di Banten. Adapun yang paling padat tenaga kerja adalah industri pengolahan yang terletak di Kabupaten Tangerang.

Tabel 2.30
Statistik Industri Pengolahan Banten Tahun 2016-2017

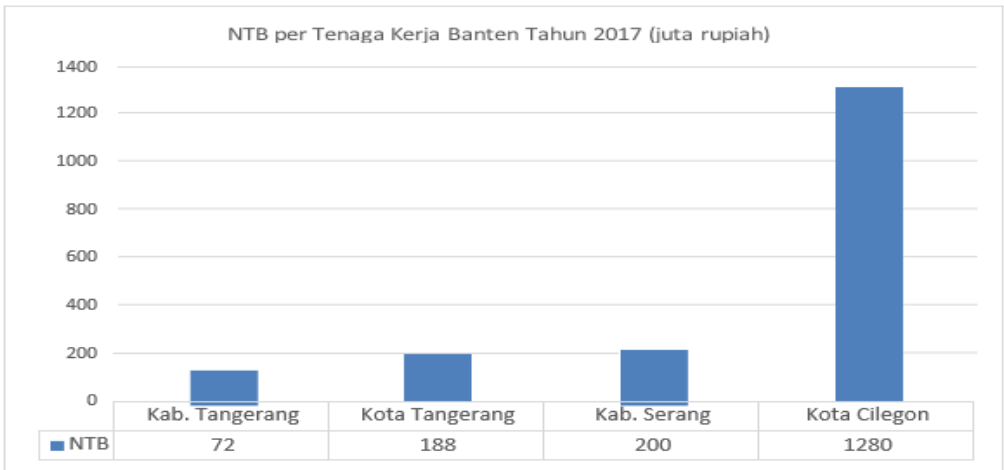
URAIAN	2016	2017
Perusahaan/Usaha (Ribuan Unit)	113	108
Tenaga Kerja (Orang)	1.117	1.246
Nilai Tambah Bruto (NTB, Triliunan Rp)	168,7	180,0
NTB per Tenaga Kerja (Juta Rp)	151,0	144,4

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.31
Distribusi Spasial Industri Pengolahan Banten (persen) Tahun 2017

URAIAN	PERUSAHAAN	TENAGA KERJA	NTB
Kabupaten Tangerang	40,6	48,9	24,2
Kota Tangerang	34,3	19,3	24,9
Kabupaten Serang	9,9	12,8	17,6
Kota Cilegon	4,2	3,1	27,0
Kabupaten/Kota Lainnya	11,0	15,9	6,3

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.19
NTB per Tenaga Kerja Banten (juta rupiah) Tahun 2017



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.20
Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang di Provinsi Banten
Tahun 2012-2015

2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1 Urusan

2.3.1.1 Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang mengamanatkan agar Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Pelaksanaan Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dalam pelaksanaan pelayanan Pendidikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, memberikan hak kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain hak tersebut, Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan gratis bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2018 sudah mengimplementasikan program pendidikan gratis melalui skema biaya operasional sekolah (BOS dan BOSDA) dan pembiayaan lainnya penunjang proses pembelajaran untuk SMA/SMK/SK Negeri dan Swasta.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu, serta wajib membina dan mengembangkan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Angka Partisipasi Kasar dan Angka Partisipasi Murni merepresentasikan dimensi partisipasi pendidikan pada tingkat SD/MI sampai SMA/MA. Selama periode 2015 hingga 2018, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Partisipasi Kasar tingkat SMA/MA 11,01 poin dan Angka partisipasi murni SMA/MA sebesar 6,29 poin.

Tabel 2.32
Angka Partisipasi Kasar (APK) Provinsi Banten Tahun 2015 – 2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)			
	2015	2016	2017	2018
SD/MI	107,7	108,23	107,44	103,92
SMP/MTs	98,86	99,4	99,54	97,61
SMA/MA	73,22	76,82	83,01	84,23

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.33
Pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Banten Agustus 2018

No	Kabupaten / Kota	Pendidikan yang Ditamatkan		
		< SD	SD/Sederajat	SLTP
1	Kab. Pandeglang	4.541	9.48	10.56
2	Kab. Lebak	3.665	9.609	15.61
3	Kab. Tangerang	5.073	24.005	32.627
4	Kab. Serang	2.563	11.727	20.658
5	Kota Tangerang	674	11.064	12.583
6	Kota Cilegon	1.728	3.333	1.663
7	Kota Serang	1.749	7.112	4.577
8	Kota Tangerang Selatan	497	1.109	3.007
	Provinsi Banten	20.49	77.438	101.285

No	Kabupaten / Kota	Pendidikan yang Ditamatkan		
		SLTA	D3	Jumlah
1	Kab. Pandeglang	16.622	2.306	43.509
2	Kab. Lebak	16.939	900	46.723
3	Kab. Tangerang	92.883	9.909	164.497
4	Kab. Serang	47.896	1.319	84.163
5	Kota Tangerang	40.554	12.827	77.702
6	Kota Cilegon	10.928	887	18.539
7	Kota Serang	9.342	1.677	24.457
8	Kota Tangerang	27.164	5.365	37.142
	Provinsi Banten	262.328	35.190	496.732

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.34
Angka Partisipasi Murni Provinsi Banten Tahun 2015 – 2018

Tingkat Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)			
	2015	2016	2017	2018
SD/MI	95,7	95,4	94,58	92,76
SMP/MTs	80,14	75,12	75,3	73,27
SMA/MA	55,73	57,34	60,05	62,02

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Kualitas penduduk Banten yang meningkat ternyata didorong oleh semakin luasnya akses penduduk terhadap pendidikan. Hal ini ditandai oleh angka partisipasi sekolah (APS) untuk berbagai kelompok usia yang terus mengalami peningkatan. Namun demikian, masih rendahnya APS kelompok usia 16-18 tahun, harus mendapat perhatian lebih dari semua pihak. Hal ini karena dengan nilai APS yang hanya 67 persen, berarti ada sekitar sepertiga penduduk usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2017 tidak bersekolah lagi.

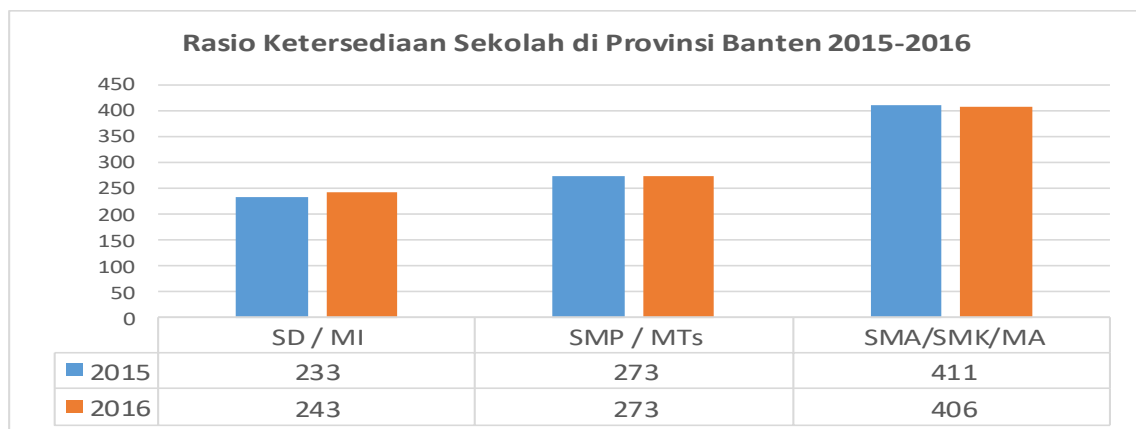
Tabel 2.35
Angka Partisipasi Sekolah di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Sekolah	Partisipasi Sekolah		
	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Masih sekolah	Lagi/Tidak Sekolah
Laki - Laki / Male			
7-12	0,77	99,23	0,00
13-15	0,20	95,95	3,85
16-18	0,83	68,39	30,78
19-24	0,19	20,38	79,43
7-24	0,50	67,91	31,59
Perempuan/ Female			
7-12	0,42	99,38	0,19
13-15	0,34	95,39	4,27
16-18	0,00	67,07	32,93
19-24	0,08	22,31	77,61
7-24	0,23	68,27	31,50
Laki - Laki - Perempuan			
7-12	0,60	99,31	0,10
13-15	0,27	95,67	4,06
16-18	0,44	67,77	31,79
19-24	0,14	21,33	78,53
7-24	0,37	68,09	31,55

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Pada kelompok umur 7-12 dan 13-15, angka partisipasi sekolah sudah relatif tinggi, yaitu 99,31 dan 95,67. Namun demikian, APS kelompok usia 16 - 18 tahun masih rendah. Dengan nilai APS yang sebesar 67,77 persen, menunjukkan bahwa masih terdapat sepertiga penduduk usia 16-18 tahun, yang pada tahun 2017 tidak bersekolah lagi

Kualitas pendidikan penduduk berkaitan erat dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan. Salah satu indikatornya adalah rasio ketersediaan sekolah (RKS), yang dapat menggambarkan kemampuan sekolah dalam menampung penduduk usia sekolah sesuai dengan jenjang pendidikan. Berdasarkan data yang ada, terlihat bahwa SMA/SMK/MA mengalami penurunan. Berarti, ketersediaan gedung sekolahnya sudah meningkat, melebihi pertambahan penduduk usia sekolah. Adapun untuk gedung sekolah SD/MI, peningkatannya masih sedikit di bawah pertambahan penduduk usia sekolahnya.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.21
Rasio Ketersediaan Sekolah di Provinsi Banten 2015-2016

Tabel 2.36
Jumlah murid SLTA (SMA+SMK) di Provinsi Banten
Tahun 2015-2018

KABUPATEN/ KOTA	2015	2016	2017	2018
Kab. Tangerang	102.729	110.884	115.538	113.540
Kota Tangerang	74.983	77.117	77.685	73.557
Kab. Serang	42.247	46.523	48.445	46.560
Kota Tangerang Selatan	53.881	57.492	60.935	58.242
Kab. Lebak	34.538	36.790	37.555	38.039
Kab. Pandeglang	33.591	37.579	39.240	38.697
Kota Serang	30.546	31.709	32.907	30.594
Kota Cilegon	17.589	18.410	18.967	18.270
PROVINSI BANTEN	390.104	416.504	431.272	417.499

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Hal ini bukan berarti proses belajar mengajar pada ketiga jenjang pendidikan tersebut sudah berlangsung optimal karena penempatan tenaga pengajar belum merata masih terkonsentrasi di perkotaan.

Ketersediaan fasilitas pendidikan akan menentukan kualitas pendidikan, dimana salah satu indikatornya adalah rasio murid-guru, yaitu rasio yang menggambarkan beban seorang guru dalam mengajar sekelompok murid. Di Banten, rasio murid-guru untuk tingkat SLTA rata-rata 18,32 sedangkan untuk MA rata-rata 16 seperti ditunjukkan pada table di bawah ini.

Tabel 2.37
Jumlah sekolah dan Rasio murid guru SLTA
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid-Guru
	Kabupaten				
1	Pandeglang	36	15.056	829	18,16
2	Lebak	53	19.883	975	20,39
3	Tangerang	148	50.357	2.245	22,43
4	Serang	77	23.312	1.274	18,30
	Kota				
1	Tangerang	83	28.767	1.552	18,54
2	Cilegon	23	6.900	521	13,24
3	Serang	30	11.570	627	18,45
4	Tangerang Selatan	79	27.096	1.590	17,04
	Provinsi Banten	529	182.941	9.613	18,32

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.38
Jumlah sekolah dan Rasio murid guru MA
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
1	Kab.Pandeglang	84	13.168	887	15
2	Kab. Lebak	77	8.994	690	13
3	Kab. Tangerang	68	14.277	670	21
4	Kab. Serang	79	14.714	851	17
1	Kota Cilegon	24	4.112	254	16
2	Kota Tangerang	22	4.007	323	12
3	Kota Serang	24	4.226	275	15
4	Kota Tangerang Selatan	18	3.254	242	13
	Provinsi Banten	396	66.752	4.192	16

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.39
Jumlah sekolah dan Rasio murid guru SMK
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten	Sekolah	Murid	Guru	Rasio Murid- Guru
1	Kab.Pandeglang	83	24.553	1.396	18
2	Kab. Lebak	51	17.678	897	20
3	Kab. Tangerang	177	65.628	2.278	29
4	Kab. Serang	84	25.637	1.187	22
1	Kota Cilegon	128	49.088	2.243	22
2	Kota Tangerang	22	12.125	588	21
3	Kota Serang	45	21.448	1.022	21
4	Kota Tangerang Selatan	78	34.204	1.289	27
	Provinsi Banten	668	250.361	10.900	23

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.40
Tingkat Pendidikan pengajar di SKH Banten
di Provinsi Banten Tahun 2018

No	Kabupaten/Kota	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	Jumlah
1	Kab.Pandeglang	22	0	3	0	160	4	0	189
2	Kab. Lebak	4	4	1	0	89	6	0	104
3	Kab. Tangerang	16	2	4	0	137	2	0	161
4	Kab. Serang	13	0	0	0	30	0	0	43
5	Kota Cilegon	1	1	0	0	47	1	0	50
6	Kota Tangerang	20	2	4	1	151	3	0	181
7	Kota Serang	5	0	2	0	101	10	0	118
8	Kota Tangerang Selatan	32	2	10	0	129	11	0	184
	Provinsi Banten	113	11	24	1	844	37	0	1030

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

Tabel 2.41
Data Ketunaan SKH Se-Banten di Provinsi Banten Tahun 2018

NO	KETUNAAN	SDLB							SMPLB				SMALB			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	KETUNAAN	1	2	3	4	5	6	JLH	7	8	9	JLH	10	11	12	JLH
1	NETRA	12	16	13	8	2	7	58	15	9	8	32	6	5	12	23
2	RUNGU	107	99	116	85	73	95	575	89	102	70	261	72	62	60	194
3	GRAHITA RINGAN	153	141	128	134	107	149	812	167	118	126	411	106	78	53	237
4	GRAHITA SEDANG	83	158	117	104	110	134	706	140	132	130	402	104	67	52	223
5	DAKSA RINGAN	16	21	22	13	9	12	93	25	10	14	49	2	4	8	14
6	DAKSA SEDANG	20	12	15	4	5	4	60	10	2	6	18	4	2	2	8
7	LARAS	0	0	0	0	3	20	23	0	0	0	0	1	4	0	5
8	WICARA	1	2	8	5	2	3	21	1	0	1	2	0	0	0	0
9	HIPERAKTIF	11	16	20	13	10	6	76	7	2	5	14	1	0	0	1
10	CERDAS ISTIMEWA	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0	1	0	1
11	BAKAT ISTIMEWA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	KESULITAN BELAJAR	9	4	9	5	8	11	46	8	7	0	15	4	4	3	11
13	NARKOBA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	INDIGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	DOWN SYNDROME	35	20	34	19	20	21	149	16	6	9	31	4	9	5	18
16	AUTIS	66	80	96	106	73	63	484	58	41	45	144	41	20	32	93
17	LAINNYA	23	10	4	8	7	6	58	5	4	1	10	2	0	0	2
18	JUMLAH	536	579	582	504	429	532	3162	541	434	415	1390	347	256	227	830
Jumlah Total																5382

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Banten

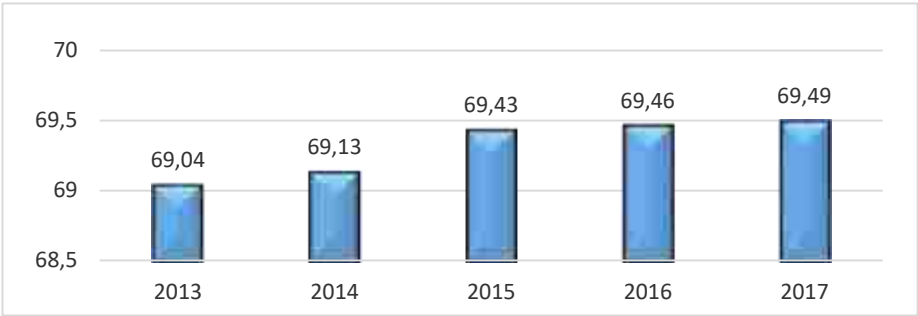
Pada tahun 2018 di Provinsi Banten terdapat 529 unit Sekolah Menengah Atas (SMA) dengan 9.613 guru dan 182.941 murid, 396 unit Madrasah Aliyah (MA) dengan 4.192 guru dan 66.752 murid, 668 unit Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan 10.900 guru dan 250.361 murid serta Jumlah guru SKH sebanyak 1.030 guru.

2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, disebutkan bahwa pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Tingkat kualitas kesehatan merupakan indikator penting untuk menggambarkan mutu pembangunan manusia suatu daerah, dalam upaya mencapai derajat kesehatan tersebut Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan upaya terobosan dengan cara memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat tidak mampu di seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten.

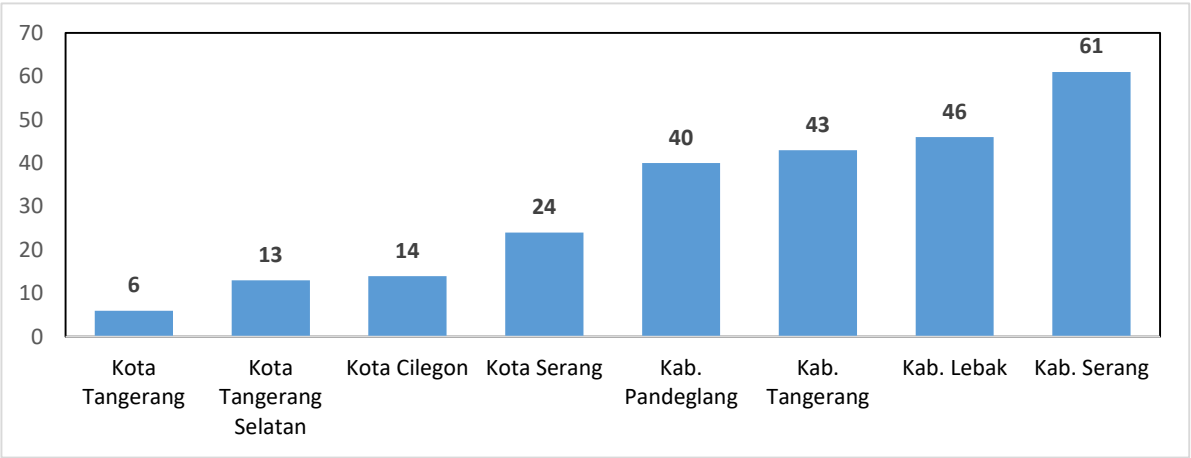
Semakin sehat kondisi suatu masyarakat, maka akan semakin mendukung proses dan dinamika pembangunan ekonomi suatu daerah semakin baik. Beberapa indikator penting yang dapat menggambarkan kondisi kesehatan suatu daerah antara lain; ketersediaan fasilitas kesehatan, angka kesakitan (morbiditas), pemberian ASI, Imunisasi dan penolong kelahiran.

Angka Harapan Hidup saat lahir merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat. Selama periode 2013 hingga 2017, Banten telah berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup saat lahir sebesar 0,96 tahun, yang setara dengan rata-rata pertumbuhan 0,19 persen per tahun. Bahkan, angka pertumbuhan tahun 2017 menjadi yang tertinggi selama periode tersebut. Angka Harapan Hidup Banten sendiri pada tahun 2017 ini mencapai 69,49 tahun atau sekitar 69 tahun 5 bulan.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.22
Angka harapan Hidup saat Lahir Provinsi Banten
Tahun 2010 – 2017

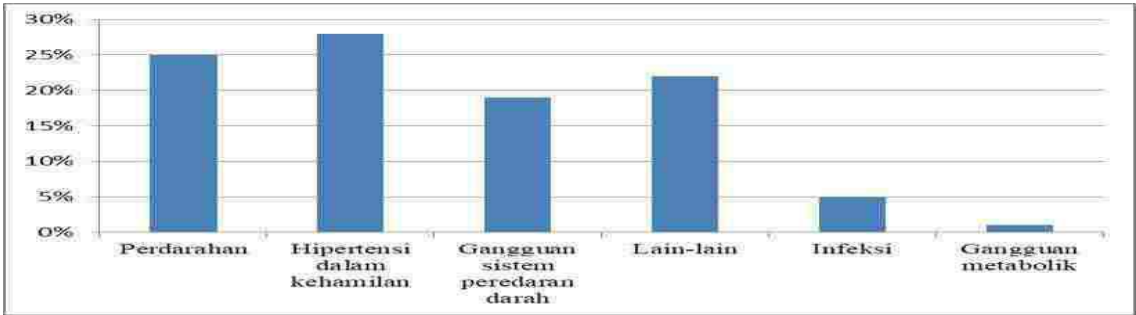


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.23
Jumlah Kematian Ibu di Provinsi Banten Tahun 2018

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2017 angka kematian ibu melahirkan mencapai 227 kasus, dan angka kematian bayi yang dilahirkan mencapai 1.246 kasus. Berikut jumlah kematian ibu di Provinsi Banten pada tahun 2018.

Data berikut menggambarkan beberapa penyebab kematian ibu. Data didapatkan dari laporan Dinas Kesehatan Provinsi Banten yang disajikan dalam gambar berikut ini:

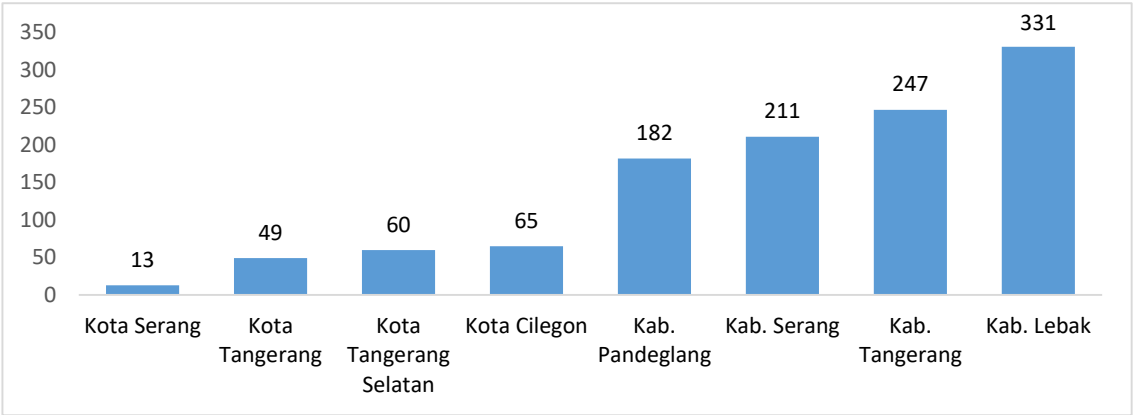


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.24
Penyebab Kematian Ibu di Provinsi Banten Tahun 2018

Berdasarkan Gambar diatas, menyebutkan bahwa penyebab utama kematian ibu 28% karena hipertensi dalam kehamilan, 25% karena perdarahan, 19% gangguan sistem peredaran darah, 5% karena infeksi, 1% karena gangguan metabolik dan lain-lain 22%. Sedangkan menurut hasil penelitian PUSKA FKMUI dengan USAID JHPIEGO tahun 2017 di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang Kota dan Kabupaten Serang, penyebab kematian ibu adalah karena perdarahan, Preeklamsi dan eklampsi serta anemia pada kehamilan, dan komplikasi pada saat persalinan. Sekitar 15% dari kehamilan mengalami komplikasi, sisanya 85% normal.

Data selanjutnya adalah jumlah kematian bayi di Provinsi Banten. Sumber data angka tersebut didapatkan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten tahun 2018 sebagai berikut:

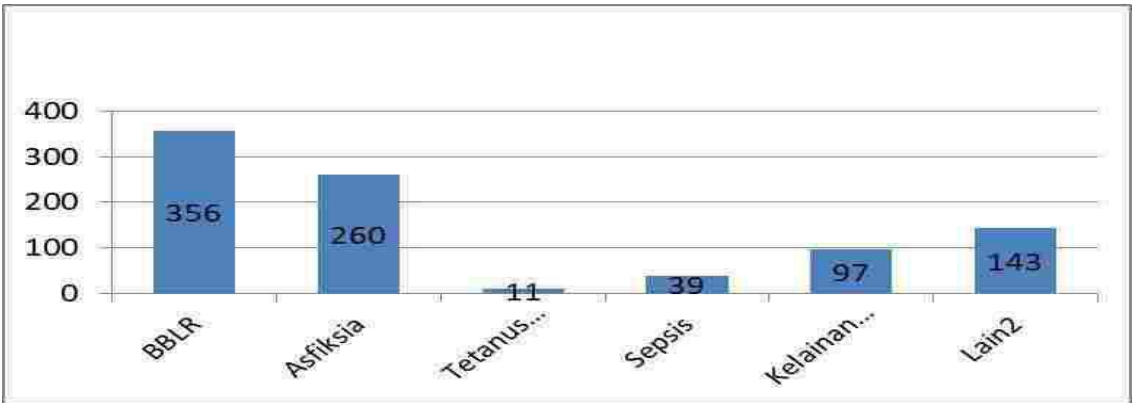


Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.25
Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Banten Tahun 2018

Berdasarkan gambar diatas sebanyak 1.147 kasus. Angka kematian bayi pada tahun 2018 tertinggi berada di wilayah Kabupaten Serang sebanyak 61 kasus, kemudian Kabupaten Lebak sebanyak 46 kasus dan Kabupaten Pandeglang sebanyak 40 kasus. Sedangkan. Untuk kematian bayi tertinggi berda di wilayah Kabupaten Lebak sebanyak 326 kasus, Kabupaten Tangerang sebanyak 247 kasus dan Kabupaten serang sebanyak 205 kasus. Besaran angka ini menurut United States Agency for International Development (USAID) menjadikan Banten berkontribusi terbesar ke -4 untuk AKI, dan berkontribusi terbesar ke-5 untuk AKB di Indonesia.

Sedangkan penyebab terjadinya kematian pada bayi disebabkan berdasarkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut ini:



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.26
Penyebab Kematian Bayi di Provinsi Banten

Berdasarkan Gambar tersebut penyebab kematian bayi di Provinsi Banten berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Provinsi tahun 2018 adalah karena Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, kelainan kongenital, sepsis, tetanus dan penyebab lain.

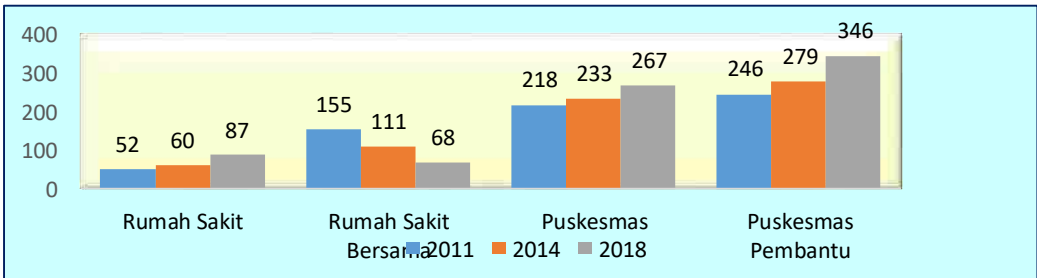
Tabel 2.42
Capaian Kinerja Program Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit
Provinsi Banten Tahun 2012-2016

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase Jumlah Bayi Yang Mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap/UCI (Universal Child Immunization) dibawah 1 tahun di Desa/Kelurahan	85	81,2	77	80	90,2
2	Persentase kasus baru Tuberkulosis Paru (BTA positif) yang disembuhkan (%)	89	84	78,35	66	49
3	Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk	<1	<1	<1	0,001	<1
4	Persentase cakupan penduduk yang terakses air minum berkualitas (%)	74	61,3	56	60,2	63
5	Presentasi puskesmas yang melaksanakan program pengendalian Penyakit Tidak Menular (%)	10	20	30	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Capaian Program pencegahan dan pengendalian penyakit sudah cukup baik namun perlu penanganan dan kebijakan yang komprehensif agar lebih optimal.

Tingginya pemahaman penduduk Banten akan arti penting kesehatan, terutama karena mereka sering berinteraksi dengan petugas kesehatan dan difasilitasi oleh berbagai sarana kesehatan yang semakin bertambah banyak. Tercatat, jumlah sarana kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas pada tahun 2017 masing-masing sebanyak 106 unit rumah sakit dan 239 unit puskesmas. Kedua sarana kesehatan tersebut secara total didukung oleh 1.406 dokter umum, dokter gigi dan dokter spesialis, serta 4.118 bidan dan 4.281 perawat.



Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.27
Fasilitas Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2011-2018



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Gambar 2.28
Tenaga Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2011–2018

Kasus HIV/AIDS menjadi permasalahan serius di Provinsi Banten dengan prevalensi HIV/AID mencapai <0,5 dengan fenomena gunung es dimana masih banyak yang belum terdeteksi. Selain itu penyakit menular yang butuh penanganan serius adalah penyakit diare yang mencapai 265.549 kasus.

Tabel 2.43
Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/Kota	HIV	AIDS	IMS	DBD	Diare	TB
Kab. Pandeglang	8	33	28	100	37.287	22
Kab. Lebak	28	14	120	15	39.627	4
Kab. Tangerang	178	30	1.366	69	68.796	5
Kab. Serang	88	27	910	344	28.533	2
Kota Tangerang	122	15	1.232	228	26.395	5
Kota Cilegon	33	26	538	230	11.767	2
Kota Serang	29	17	533	125	8.401	5
Kota Tangerang Selatan	148	35	204	249	2.338	8
Provinsi Banten	634	197	4.931	1.360	223.144	53

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.44
Prevalensi HIV (%) dari Total Populasi Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Prevalensi HIV (%)	<0,5	<0,43	< 0,46	<0,48	<0,5

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Capaian layanan urusan Pekerjaan umum dan Penataan Ruang selama tahun 2013-2016 menunjukkan bahwa jaringan jalan dan jembatan belum mantap, pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi, kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/ dipelihara serta Luas layanan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi teknis belum optimal.

Pada tahun 2016, dari 757,375 km Jalan Provinsi di Provinsi Banten, sepanjang 420,48 km dalam kondisi baik (55,52%), kemudian 177,69 km dalam kondisi sedang (23,46), 75,58 km dalam kondisi rusak ringan (9,98%) dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat (11,04%)

Tabel 2.45
Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan Provinsi Banten
Tahun 2012-2016

Kondisi Jalan	Panjang Jalan Provinsi Menurut Kondisi Jalan				
	2012	2013	2014	2015	2016
Baik	429,42	229,65	384,79	384,79	420,48
Sedang	215,54	380,21	194,32	194,32	177,69
Rusak	128,55	174,39	60,31	60,31	75,58
Rusak Berat	79,38	68,64	213,47	213,47	
JUMLAH	852,89	852,89	852,89	852,89	757,375

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2017

Gambar 2.29
Persentase Kondisi Jalan Provinsi Banten

Tabel 2.46
Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan
Provinsi Banten Tahun 2010-2015

Jenis Permukaan	Panjang Jalan Provinsi Menurut Jenis Permukaan (km)					
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Diaspal	758.91	666.22	660.72	736	504.91	-
Kerikil	-	-	1.50	-	-	-
Tanah	-	-	19.44	-	-	-
Beton	-	103.87	171.23	116.89	41.11	-
Tidak Dirinci	11.18	-	-	-	306.86	-
Jumlah	770.09	770.09	852.89	852.89	852.89	1329.38

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.47
 Persentase Kondisi Jalan Menurut Wilayah Kerja Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2016-2017

No	Wilayah/Nama Ruas jalan	Panjang Ruas (km)	Lebar Ruas (m)	Panjang Tiap Kondisi (km) 2016				Panjang Tiap Kondisi (km) 2017			
				Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat	Baik	Sedang	Rusak Ringan	Rusak Berat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	WKP II										
	Sub Total	249,778	175,500	142,691	57,732	19,546	29,809	168,920	54,732	17,546	8,580
	Persentase %	32,98		33,94	32,49	25,86	35,65	35,01	31,13	28,55	22,86
	WKP I										
	Sub Total	188,454	244,000	124,888	50,954	7,790	4,822	127,738	52,104	7,682	0,930
	Persentase %	24,88		29,70	28,68	10,31	5,77	26,47	29,63	12,50	2,48
	WKP III										
	Sub Total	319,142	153,600	152,901	69,007	48,240	48,994	185,875	69,007	36,230	28,030
	Persentase %	42,14		36,36	38,83	63,83	58,59	38,52	39,24	58,95	74,67
	Total	757,375		420,48	177,69	75,58	83,62	482,53	175,84	61,46	37,54
	Persentase %	100,000		55,52	23,46	9,98	11,04	63,71	23,22	8,11	4,96

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.48
Capaian Infrastruktur Jembatan, Sumber Air dan Jaringan Irigasi Di Provinsi Banten Tahun 2013-2016

No	CAPAIAN	2013	2014	2015	2016
1.	Prosentase jaringan jembatan provinsi dalam kondisi mantap	87,78	75.79	87.83	74.34
2.	Cakupan pelayanan pencegahan, penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi	6,11	3,10	0.00	6,30
3.	Kapasitas tampung sumber air yang dibangun, dijaga/ dipelihara	15,93	25,16	2,00	80,00
4.	Luas layanan Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan irigasi teknis (Km)	3.706	2.525	5.190	3.911,98

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Pada urusan Penataan Ruang, mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Provinsi Banten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2020, penetapan Kawasan strategis di wilayah provinsi dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu: a. kepentingan pertahanan dan keamanan; b. pertumbuhan ekonomi; c. sosial dan budaya; d. pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan e. fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi, Kawasan Strategis Provinsi yang ditetapkan dalam RTRW meliputi: 1. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) di Kecamatan Curug, Kecamatan Cipocok jaya dan Kecamatan Serang Kota Serang serta kawasan sport center yang diarahkan sesuai dengan potensinya sebagai Kawasan permukiman, perdagangan dan jasa; 2. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) merupakan kawasan dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah; 3. Kawasan Serang Utara Terpadu terdiri dari Wilayah Utara Kota Serang dan Kabupaten Serang dengan potensi perikanan, pariwisata, pertanian dan industri; 4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu meliputi Kecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, dan Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak dengan potensi perikanan, pertambangan, pariwisata dan industri; 5. Kawasan perbatasan antar kabupaten/kota di Provinsi Banten dengan potensi permukiman dan infrastruktur wilayah.

Berdasarkan kepentingan sosial dan budaya, kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW adalah Kawasan Strategis Provinsi di wilayah Kawasan Situs Banten Lama yang meliputi Kota Serang dan Kabupaten Serang.

Sejalan dengan pengembangan kawasan strategis, untuk mendukung peningkatan prestasi olah raga di provinsi Banten perlu disediakan fasilitas olahraga (sport centre) yang representatif dalam lokasi yang terpadu dan memenuhi standar nasional maupun internasional. Fasilitas tersebut memungkinkan Banten untuk menjadi host multi event keolahragaan, yang akan mendorong perkembangan industri olahraga di Provinsi Banten.

2.3.1.5 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah adalah struktur fisik terdiri dari ruangan, halaman dan area sekitarnya yang digunakan sebagai tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga (UU RI Nomor 4 Tahun 1992). Menurut WHO, rumah adalah struktur fisik atau bangunan untuk tempat berlindung, dimana lingkungan berguna untuk kesehatan jasmani dan rohani serta keadaan sosialnya baik demi kesehatan keluarga dan individu (Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan 2001).

Rumah tinggal yang dapat dikategorikan ke dalam rumah yang layak huni sebagai tempat tinggal harus memenuhi beberapa kriteria kualitas rumah tempat tinggal. Beberapa di antaranya yaitu rumah yang memiliki dinding terluas yang terbuat dari tembok atau kayu, dengan beratapkan beton, genteng, sirap, seng maupun asbes, dan memiliki lantai terluas bukan tanah. Berdasarkan data Susenas 2013-2015, persentase rumah tangga yang bertempat tinggal di rumah yang berlantaikan bukan tanah menunjukkan adanya peningkatan, walaupun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi.

Rumah atau hunian tempat tinggal adalah salah satu kebutuhan dasar manusia yang mutlak harus dimiliki. Berdasarkan data yang ada, sekitar 82 persen rumah tangga di Banten pada tahun 2016 ini sudah menempati rumah milik sendiri. Berarti, kepemilikan rumah oleh rumahtangga sudah meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan rumah yang baru, kebanyakan justru lebih luas dari rumah lama yang dulu mereka tempati. Kondisi yang demikian itu setidaknya tercermin dari turunnya persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan luas lantai per kapita maksimal 7,2 meter persegi.

Kualitas rumah yang ditempati, baik dari bentuk fisik maupun fasilitas yang tersedia, dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan dan status sosial penghuninya. Kondisi fisik rumah yang ditempati pada tahun 2016 sendiri terlihat banyak mengalami perbaikan. Hal ini diketahui dari bertambahnya persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan lantai terluas dari

marmer atau keramik dan berdinding terluas dari tembok. Hanya saja, persentase rumahtangga yang menempati rumah dengan atap terluas dari beton atau genteng, justru menurun dari tahun- tahun sebelumnya.

Tabel 2.49
 Statistik Perumahan Banten (%) Tahun 2014-2016

URAIAN	2014	2015	2016
Rumahtangga menempati rumah milih sendiri	77,96	80,94	81,52
Rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai per kapita ≤7,2 M2	11,00	11,23	9,23
Rumahtangga menempati rumah dengan luas lantai terluas marmer/kramik	NA	73,78	78,23
Rumahtangga menempati rumah dengan atap dari beton/genteng	83,26	79,16	79,14
Rumahtangga menempati rumah dengan dinding terluas dari tembok	84,86	84,88	87,47

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Sementara itu sumber air minum bersih dan sanitasi layak merupakan salah satu fasilitas perumahan yang berperan penting dalam kehidupan sehari- hari. Namun keberadaan keduanya ternyata masih menjadi masalah yang kronis bagi sebagian penduduk Banten. Tercatat, sampai tahun 2016 ini masih ada sekitar tiga dari sepuluh rumahtangga yang belum mempunyai akses terhadap kedua fasilitas perumahan tersebut. Bahkan untuk sumber air minum bersih, persentase rumah tangga yang mampu mengaksesnya justru menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 2.50
 Jenis Air Bersih yang digunakan Tahun 2013-2014

Kabupaten/Kota	PERSENTASE AIR BERSIH YANG DIGUNAKAN											
	Air kemasan		Ledeng		Pompa		Sumur		Lainnya		Jumlah	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kab Pandeglang	9,59	13,32	4,17	4,81	9,14	12,08	43,42	41,94	77,09	27,84	100	100
Kab Lebak	9,27	11,43	4,46	2,77	12,23	12,30	48,34	47,90	74,05	25,60	100	100
Kab Tangerang	58,65	60,48	3,09	6,77	28,26	26,24	9,87	6,51	9,99	0	100	100
Kab Serang	42,62	42,38	6,54	5,15	24,73	24,27	18,09	15	26,11	13,20	100	100
Kota Tangerang	68,25	73,92	8,67	5,17	22,24	20,38	0,30	0	0,85	0,53	100	100
Kota Cilegon	75,01	78,78	1,65	1,42	19,43	16,96	2,98	2,12	3,90	0,72	100	100
Kota Serang	47,01	53,51	1,21	3	38,07	30,40	10,82	10,43	13,71	2,67	100	100
Kota Tangerang Selatan	51,37	53,06	1,99	1,19	42,78	44,40	3,87	1,13	3,87	0,23	100	100
Provinsi Banten	46,89	49,82	4,52	4,54	24,95	24,18	15,97	13,91	23,63	7,55	100	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.51
Penggunaan Sanitasi Rumah Tangga Tahun 2013-2014

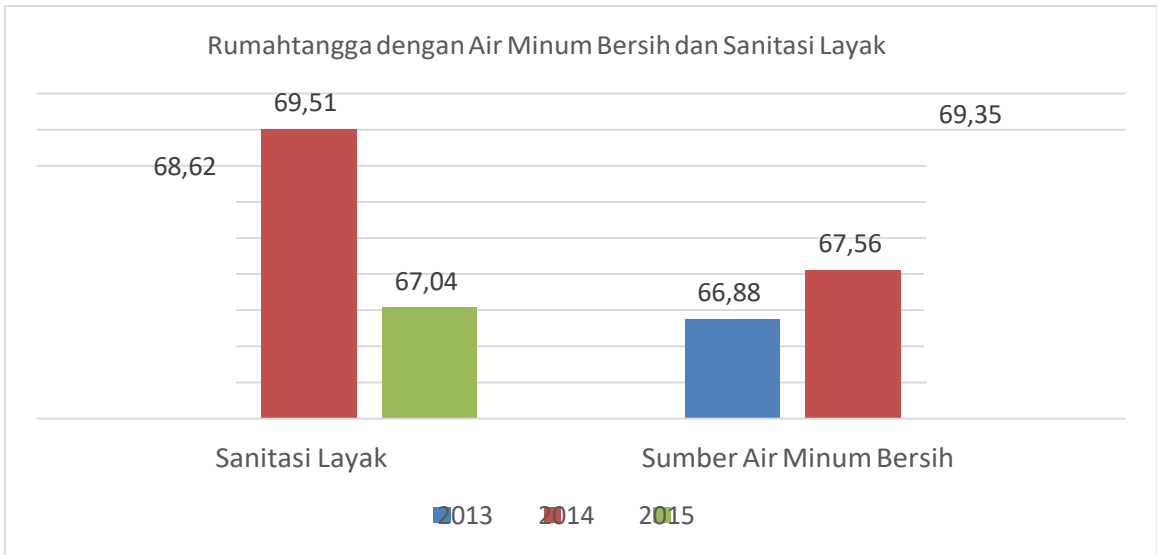
Kabupaten/Kota	Rumah Tangga dalam Penggunaan Sanitasi									
	Sendiri		Bersama		Umum		Tidak Ada		Jumlah	
	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
Kab Pandeglang	46,92	51,60	4,94	4,51	4,24	2,47	43,90	41,43	100	100
Kab Lebak	50,38	52,92	4,35	6,74	2,06	1,56	43,21	38,79	100	100
Kab Tangerang	69,84	71,27	11,83	10,18	2,49	2,61	15,83	15,94	100	100
Kab Serang	48,56	56,38	6,64	7,44	3,06	0,74	41,74	35,43	100	100
Kota Tangerang	83,36	86,11	14,05	11,88	1,95	1,61	0,65	0,39	100	100
Kota Cilegon	87,87	90,04	6,87	3,76	0	0	5,26	6,19	100	100
Kota Serang	71,44	72,61	5,33	5,34	0,78	2,48	22,46	19,57	100	100
Kota Tangerang Selatan	94,29	96,77	4,71	2,92	0,50	0,31	0,50	0	100	100
Provinsi Banten	69,03	72,25	8,68	7,82	2,17	1,68	20,11	18,25	100	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.52
Luas lantai Bangunan Rumah Tangga Tahun 2013-2014

Kabupaten/ Kota	Rumah Tangga Menurut Luas Lantai Bangunan Tempat Tinggal											
	<20		20 â€“ 49		50 â€“ 99		100 â€“		150+		Jumlah	
	201	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	201	201	2014
Kab Pandeglang	2,18	1,83	33,97	33,38	51,35	51,22	9,11	9,34	3,39	4,23	100	100
Kab Lebak	2,27	2,70	51,93	46,09	39,52	44,21	5,08	5,64	1,21	1,36	100	100
Kab Tangerang	9,36	4,44	25,94	27,20	54,97	56,60	7,17	8,74	2,56	3,02	100	100
Kab Serang	5,07	5,44	31,18	26,36	52,96	55,46	8,03	9	2,76	3,74	100	100
Kota Tangerang	16,34	18,21	31,39	25,77	30,65	33,16	13,12	14,71	8,49	8,14	100	100
Kota Cilegon	4,07	2,34	19,34	16,12	44,17	45,32	22,69	20,15	9,74	16,0	100	100
Kota Serang	2,72	4,29	17,97	20,03	46,23	45,66	22,32	19,68	10,76	10,3	100	100
Kota Tangerang Selatan	2,45	1,82	26,10	22,22	41,08	50,31	16,89	16,42	13,49	9,22	100	100
Provinsi Banten	7,23	6,25	30,77	28,24	45,54	48,42	10,82	11,50	5,64	5,59	100	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.30
Rumahtangga dengan Air Minum Bersih dan Sanitasi Layak 2013-2015

Tabel 2.53
Sumber Utama penerangan Rumah Tangga Tahun 2015

Kabupaten/kota	Listrik	Bukan Listrik	Jumlah
Kab Pandeglang	99,61	0,39	100
Kab Lebak	98,35	1,65	100
Kab Tangerang	99,94	0,06	100
Kab Serang	99,89	0,11	100
Kota Tangerang	100,00	0,00	100
Kota Cilegon	100,00	0,00	100
Kota Serang	100,00	0,00	1,00
Kota Tangerang Selatan	99,95	0,05	100
Provinsi Banten	99,74	0,26	100

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.54
Bahan Bakar Utama Rumah Tangga Tahun 2015

Kabupaten/Kota	Listrik	Gas/ Elpiji	Minyak Tanah	Kayu Bakar	Lain nya	Tidak Memasak	Jumlah
Kabupaten							
Pandeglang	0,22	46,97	0,00	52,23	0,00	0,58	99,42
Lebak	0	41,83	0,00	58,07	0,10	0,00	100,00
Tangerang	0,63	91,89	0,81	5,15		1,28	98,72
Serang	0,36	77,72	0,30	20,32	0,23	0,92	99,08
Kota							
Tangerang	0,76	95,62	0,72	0,19	0,00	2,70	97,30
Cilegon	0,43	95,02	0,13	3,18	15,21	0,60	99,40
Serang	0,24	88,55	0,29	10,11	0,34	0,47	99,53
Tangerang selatan	0,89	97,90	0,66	0,30	0,00	0,25	99,75
Provinsi Banten	0,52	81,47	0,49	16,27	0,16	1,08	98,82

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.1.5 Ketentraman dan Ketertiban Umumn serta Perlindungan Masyarakat

Pembangunan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dilakukan untuk mewujudkan kondisi sosial yang tertib dan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan. Kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat sangat berkaitan erat dengan aspek sosial, politik, dan hukum. Berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga keswadayaan masyarakat berkembang dan berperan dalam berbagai bidang, baik budaya, keagamaan, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas sosial lainnya. Meskipun masih terdapat pertentangan dalam kehidupan bermasyarakat, tetapi masih dapat ditolerir.

Kondisi sosial tersebut berkaitan dengan kondisi politik dan kondisi hukum. Kehidupan politik yang diarahkan untuk mewujudkan demokrasi masih dimaknai sebagai kebebasan semata oleh sebagian masyarakat yang seringkali dapat mengganggu kelompok masyarakat lainnya yang mempengaruhi kondisi ketentraman dan ketertiban umum.

Tabel 2.55
Tindak Pidana dan Penyelesaian Tindak Pidana di Provinsi Banten
Tahun 2012-2016

SATUAN	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Tindak Pidana	4.063	3.378	5.857	10.345	4.607	2.413
Penyelesaian Tindak Pidana	2.974	1.966	2.191	5.886	2.988	1.621
Persentase	26,80	41,80	62,59	43,10	35,14	

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Dalam aspek hukum, penegakkan hukum yang lemah dan tidak konsisten mempengaruhi pula kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat. Tingkat kriminalitas dan pelanggaran hukum lainnya masih cukup tinggi. Di samping itu protes ketidakpuasan terhadap suatu masalah yang mengarah pada perusakan fasilitas umum seringkali terjadi. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketentraman dan ketertiban masih cukup baik.

Tabel 2.56
Resiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 Penduduk Menurut Wilayah Kepolisian Resort Provinsi Banten 2013–2016

Kepolisian Resort	2013	2014	2015	2016
Kepolisian Resort-Polda Banten				
Pandeglang	11,30	13,71	8,57	28,79
Lebak	11,79	15,09	13,75	44,73
Serang	27,57	75,87	63,00	83,21
Cilegon	20,49	18,63	19,85	213,29
Kepolisian Resort-Polda Metro Jaya				
Kota Tangerang	31,00	25,00	29,00	-
Kabupaten Tangerang	155,00	144,00	98,00	22,52
Kota Tangerang Selatan	.	.	.	

Sumber: SIPD Provinsi Banten, 2017

2.3.1.6 Sosial

Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) tiap tahun mengalami penurunan, pada tahun 2012 hanya terdapat 22 jenis PMKS sehingga mengalami kenaikan pada tahun 2013 dimana pada tahun 2013 sudah menggunakan data 26 jenis PMKS. Pada tahun 2016 jumlah PMKS (26 PMKS) sebanyak 797.842 KK.

Tabel 2.57
Jumlah PMKS di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah PMKS (26 PMKS) (KK dan Jiwa)	742.517	825.914	806.189	799.510	797.842

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Jumlah TAGANA yang dilatih setiap tahun mengalami peningkatan dari tahun 2012 s.d tahun 2016 sebanyak 1.402 Orang.

Tabel 2.58
Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih
di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Taruna Siaga Bencana (TAGANA) yang dilatih	1.286	1.286	1.286	1.286	1.402

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Selama 5 tahun (Tahun 2012 - 2016) mampu menangani 19.557 PMKS (Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Wanita Korban Tindak Kekerasan/ WKTK, Korban Penyalahgunaan Napza/ Eks Napza) dari total PMKS (Lanjut Usia, Anak, Penyandang Disabilitas, Tuna Sosial, Wanita Korban Tindak Kekerasan/ WKTK, Korban Penyalahgunaan Napza/ Eks Napza) sebanyak 137.212 Orang.

Tabel 2.59
Jumlah Penanganan PMKS di Provinsi Banten Tahun 2012-2016

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
Penanganan PMKS	3,636	3,799	3,910	4,028	4,184

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Korban bencana alam setiap tahun semakin menurun, dimana tahun 2012-2016 mampu menangani sebanyak 189.978 orang.

Tabel 2.60
Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial Tahun 2012-2018

INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Korban Bencana Alam (Orang)	18.714	100.486	51.355	8.252	7.900	82.262	5.484
Korban Bencana Sosial (Orang)	212	470	1,979	227	383	987	103
Jumlah	18.926	100.956	53.334	8.479	8.283	83.259	5.587

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.61
 Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Menurut
 Jenis dan Kabupaten/Kota di Provinsi Banten 2018

Kabupaten/ Kota	Balita Terlantar	Anak Terlantar	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Anak Berhadapan dengah Hukum	Anak Jalanan	Anak dengan Kedisabil itas
Kab. Pandeglang	173	774	100	0	11	590
Kab. Lebak	116	763	7	34	72	1.126
Kab. Tangerang	11.218	65.050	1.158	95	150	422
Kab. Serang	3.447	11.834	63	7	200	712
Kota Tangerang	179	496	31	100	56	218
Kota Cilegon	0	3	1	1	50	108
Kota Serang	1389	5.102	17	0	141	234
Kota Tangerang Selatan	3	39	0	0	0	170
Banten	16.525	84.061	1.377	237	680	3.580

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Kabupaten/Kota	Anak yang Menjadi KTK/Diperlakukan Salah	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan	Pengemis	Pemulung
Kab. Pandeglang	4	6.112	18	31	131
Kab. Lebak	0	13.925	14	34	112
Kab. Tangerang	41	17.433	166	270	2.784
Kab. Serang	11	3.314	102	157	1.660
Kota Tangerang	3	23.119	1	54	827
Kota Cilegon	21	1.371	38	47	209
Kota Serang	13	1.622	26	103	238
Kota Tangerang Selatan	0	19.211	0	1	340
Banten	93	86.107	365	697	6.301

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Kabupaten/Kota	Bekas warga Binaan LP	korban penyalah gunaan NAPZA	Tuna Susila	Orang dengan HIV/AIDS(ODHA)
Kab. Pandeglang	88	42	1	7
Kab. Lebak	118	27	13	23
Kab. Tangerang	421	205	96	313
Kab. Serang	275	12	33	65
Kota Tangerang	239	191	15	4
Kota Cilegon	158	25	888	52
Kota Serang	48	22	58	15
Kota Tangerang Selatan	0	8	0	0
BANTEN	1.347	532	1.104	479

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.62
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Pekerja Sosial Profesional	Pekerja Sosial Masyarakat	Karang Taruna	Dunia Usaha	WKSBM	Tenaga Kesejahteraan sosial Kecamatan
Kab Pandeglang	0	1.619	339	3	22	35
Kab Lebak	0	1.725	345	30	43	28
Kab Tangerang	7	870	274	0	0	29
Kab Serang	5	319	326	2	2	29
Kota Tangerang	0	823	104	127	505	13
Kota Cilegon	2	215	51	20	43	8
Kota Serang	0	330	72	28	66	6
Kota Tangerang Selatan	107	220	57	2	0	7
Banten	121	6.121	1.568	212	681	155

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Kabupaten/Kota	Taruna Siaga Bencana	Lembaga Kesejahteraan Sosial	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Keluarga Pioner	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	Penyuluh Sosial
Kab Pandeglang	210	1	1	117	99	0
Kab Lebak	214	191	2	0	11	4
Kab Tangerang	155	37	3	0	0	0
Kab Serang	189	85	3	0	0	0
Kota Tangerang	145	112	1	106	202	60
Kota Cilegon	200	11	1	7	43	0
Kota Serang	168	24	1	264	396	0
Kota Tangerang Selatan	121	13	1	6	50	1
Banten	1.402	474	9	500	801	65

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.63
Karakteristik Kerawanan Sosial Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Komunitas Adat Terpencil	Korban Bencana Alam	Korban Bencana Sosial/Pengungsi
Kab Pandeglang	.	362	16
Kab Lebak	5.239	2.003	56
Kab Tangerang	.	2.999	98
Kab Serang	.	438	16
Kota Tangerang	.	634	12
Kota Cilegon	.	1.358	0
Kota Serang	.	106	0
Kota Tangerang Selatan	.	0	185
Provinsi Banten	5.239	7.900	383

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

2.3.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.3.2.1 Ketenagakerjaan

Jumlah penduduk usia 15-64 tahun merupakan angkatan kerja produktif, sebagai unsur utama. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten pada Tahun 2015 sebesar 317.201 orang (siswa tahun 2014 dan yang mendaftar tahun 2015). Dari seluruh pencari kerja yang terdaftar, 52.979 orang (16,70%) telah ditempatkan bekerja, sementara 80.376 orang (25,34%) dihapuskan dari daftar pencari kerja. Pada akhir tahun 2015, siswa pencari kerja di Provinsi Banten sebanyak 183.846 orang, dimana sebagian besar berpendidikan terakhir SMA yaitu 130.043 orang (70,73%), sementara yang paling sedikit berpendidikan terakhir Strata II/ Strata III sebanyak 378 orang (0,20%).

Sementara itu menurut sektor lapangan usaha, sektor Industri Pengolahan merupakan sektor dengan jumlah pekerja terbanyak di tahun 2015 yaitu sebanyak 1.198.766 pekerja, diikuti dengan sektor Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel dengan jumlah pekerja sebanyak 1.189.908 pekerja. Beberapa tabel dan gambar di bawah ini menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di provinsi Banten ;

Tabel 2.64
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Jumlah Angkatan Kerja	Persentase Angkatan Kerja
Kab Pandeglang	831.548	62,81
Kab Lebak	898.868	67,56
Kab Tangerang	2.672.261	63,49
Kab Serang	1.055.834	62,42
Kota Tangerang	1.648.817	63,67
Kota Cilegon	312.796	63,56
Kota Serang	475.658	63,02
Kota Tangerang Selatan	1.284.952	61,92
Provinsi Banten	9.180.734	63,49

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.65
Jumlah Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Tahun 2017 – 2018

Kabupaten/Kota	Bekerja		Pengangguran	
	2017	2018	2017	2018
SD Ke Bawah	36,56	35,58	24,61	19,71
SMP	15,17	17,35	24,61	20,39
SMA	18,43	20,71	25,00	31,73
SMK	13,04	11,83	18,55	21,08
Diploma I/II/III	4,27	3,07	1,55	1,29
Universitas	12,54	11,45	5,68	5,80

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Sektor pertanian memiliki tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi dari jumlah penduduk bekerja. Namun hubungan antar subsistem pertanian belum sepenuhnya menunjukkan keharmonisan baik pada skala lokal, regional, dan nasional. Cara pandang sektoral yang belum terintegrasi pada sistem pertanian serta ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan global merupakan kendala yang masih dihadapi sektor pertanian.

Tabel 2.66
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Provinsi Banten Tahun 2015

Pendidikan Tertinggi yang di Tamatkan	Jenis Kelamin		
	Laki laki	Perempuan	Jumlah
Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Tamat SD	232	2.075	2.307
Sekolah Dasar	532	860	1.392
Sekolah Menengah Pertama	4.755	8.430	13.185
Sekolah Mengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan	42.755	35.006	77.761
Diploma I/II/III Akademi	1.578	3.023	4.601
Universitas	4.516	5.369	9.885
TOTAL	54.368	54.763	109.131

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.67
Informasi Pencari Kerja Dirinci Menurut Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2016

No	Dinas Tenaga Kerja	Pencari Kerja				
		Sisa Tahun Lalu	Terdaftar Tahun Ini	Penempatan Tahun Ini	Dihapuskan Tahun Ini	Sisa Akhir Tahun Ini
1.	Kab. Pandeglang	25.938	9.040	2.775	16.377	15.826
2.	Kab. Lebak	14.150	8.075	729	6.950	14.546
3.	Kab. Tangerang	44.354	33.253	3.005	24.776	49.826
4.	Kab. Serang	18.035	27.251	3.936	25.900	15.450
5.	Kota Tangerang	15.388	17.627	9.839	5.537	17.639
6.	Kota Cilegon	12.654	4.727	1.661	836	14.884
7.	Kota Serang	20.101	1.253	101	-	21.253
8.	Kota Tangerang Selatan	12.250	7.905	3.385	-	16.770
Provinsi Banten		162.870	109.131	25.431	80.376	166.194

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Peningkatan partisipasi perempuan dalam pembangunan dapat digambarkan dalam Indeks Pembangunan Gender Provinsi Banten pada Tahun 2016 90,97 menjadi 91,14 pada Tahun 2017. Dan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Banten pada Tahun 2016 69,14 menjadi 70,00 Tahun 2017. Dalam upaya pembangunan yang responsif gender dioptimalkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak, ketersediaan data terpilah serta penyusunan anggaran rensposif gender kedalam Perencanaan

Penganggaran yang Responsive Gender (PPRG), terlindunginya perempuan dan anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta meningkatkan ketahanan keluarga. Dalam upaya pemenuhan hak-hak anak dan mendorong terbentuknya kabupaten/kota layak anak, Provinsi Banten termasuk 4 (empat) daerah yang diberikan predikat dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai provinsi pelopor layak anak.

Tabel 2.68
Capaian Pembentukan Kabupaten/Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota	Tingkatan
Kab. Serang	Pratama
Kota Serang	Pratama
Kab Pandeglang	Pratama
Kab Lebak	Pratama
Kota Cilegon	Madya
Kota Tangerang	Madya
Kab Tangerang	Madya
Kota Tangerang Selatan	Nindya

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.3 Lingkungan Hidup

Kondisi lingkungan hidup di Provinsi Banten masih terjaga kelestariannya termasuk di kawasan lindung seperti kawasan strategis Taman Nasional Ujung Kulon, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Cagar Alam Rawa Danau, Cagar Alam Gunung Tukung Gede, kawasan Gunung AKARSARI (Gunung Asepun, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari). Pencemaran dapat berasal dari limbah yang dibuang oleh berbagai kegiatan (seperti tambak, perhotelan, pemukiman, industri, dan transportasi laut) yang terdapat di dalam wilayah pesisir dan juga berupa kiriman dari berbagai dampak kegiatan pembangunan di bagian hulu.

Sedimentasi atau pelumpuran yang terjadi di perairan pesisir sebagian besar berasal dari bahan sedimen di bagian hulu (akibat penebangan hutan dan praktek pertanian yang tidak mengindahkan asas konservasi lahan dan lingkungan), yang terangkut aliran air sungai atau air limpasan dan diendapkan di perairan pesisir.

Walaupun sudah dilakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan namun masih terdapat berbagai aktifitas ekonomi yang belum ramah lingkungan, seperti adanya kawasan pertambangan di areal hutan lindung dan maraknya pertambangan tanpa ijin (PETI) yang sangat merusak lingkungan. Berkembangnya kawasan industri di wilayah utara Provinsi

Banten memberikan implikasi langsung terhadap tingginya kerawanan pencemaran lingkungan. Sejumlah kasus pencemaran lingkungan yang terkait dengan keberadaan dan aktifitas industri diantaranya seperti: tumpahan HCL, tumpahan xylene dari tangki terbakar, terbakarnya limbah B3, serta tumpahan kaustik soda, dan lain- lain. Disamping itu, indikasi tingkat pencemaran tinggi pada sungai- sungai sebagai akibat aktifitas industri dan permukiman, seperti Sungai Cimoyan, Sungai Ciujung, Kaliangke, Cirarap, dan Cibanten juga perlu ditanggulangi.

Kegiatan pengolahan pertanian dan kehutanan (*up land*) yang buruk tidak saja merusak ekosistem sungai (melalui banjir dan erosi), tetapi juga akan menimbulkan dampak negatif pada perairan pesisir dan pantai. Sementara itu, kerusakan lingkungan yang berasal dari wilayah pesisir, pantai dan laut bisa berupa degradasi fisik habitat pesisir (mangrove, terumbu karang dan padang lamun); abrasi pantai; hilangnya daerah konservasi/kawasan lindung; eksploitasi sumberdaya alam yang berlebih (*over exploitation*); dan bencana alam.

Pencemaran udara di Provinsi Banten terutama di daerah perkotaan dari waktu ke waktu diperkirakan akan semakin meningkat seiring dengan laju pertumbuhan pembangunan di berbagai sektor seperti sektor industri, perhubungan/transportasi dan pariwisata. Hal ini perlu mendapatkan perhatian secara serius dan perlu penanganan atau pengendalian secara baik dan komprehensif antara instansi terkait.

Jenis industri/aktivitas yang ada di Provinsi Banten sangat beragam, dari industri kecil menengah, rumah sakit, pariwisata, sampai industri besar yang memiliki resiko lingkungan yang tinggi. Industri kecil yang ada di Provinsi Banten didominasi oleh industri pangan, kerajinan logam dan penambangan emas dan pasir. Sedangkan industri besar di wilayah ini umumnya adalah industri kimia, logam dasar dan industri berbasis petroleum. Limbah cair yang keluar dari kegiatan industri harus diperhatikan dan diupayakan pengelolaannya agar pengaruh negatif (pencemaran) dapat diminimalkan. Dampak limbah cair ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi secara langsung juga dapat membahayakan manusia/makhluk hidup, terutama sekali limbah cair yang memiliki sifat berbahaya dan beracun (B3).

Limbah cair industri kecil selama ini belum dilakukan pengelolaan secara benar, terkadang limbah cair tersebut dibuang langsung ke lingkungan. Kendala utama adalah masalah biaya pembuatan instalasi pengolahan limbah yang tinggi dan industri kecil tersebut tidak mampu

membuatnya. Selain itu juga masalah teknologi pengolahan limbah yang belum diketahui oleh sebagian besar industri kecil. Walaupun sebagian besar industri kecil tersebut menghasilkan limbah cair tidak berbahaya dan dalam jumlah yang sedikit, namun beberapa industri kecil di Provinsi Banten memiliki potensi kerusakan lingkungan yang tinggi.

2.3.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan wilayah dalam struktur tata ruang Provinsi Banten sampai saat ini masih terjadi ketimpangan. Dalam konteks wilayah utara-tengah-selatan Banten, terjadi pemusatan pertumbuhan perkotaan yang sangat pesat di wilayah utara dan tengah, sementara wilayah perdesaan di selatan Banten yang seharusnya dikembangkan menjadi wilayah pendukung dari aspek lingkungan dan pertanian agro kurang mendapat sentuhan pemerataan pembangunan. Sementara itu di wilayah perbatasan masih terjadi ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman maupun prasarana jalan.

Tabel 2.69
Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa di
Provinsi Banten Tahun 2016

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
1	Cakupan Pembinaan Pemerintah (Desa/Kel) (pemerintah desa dan BPD)	6	6	6	6	5
2	Cakupan Pengembangan Pemerintahan (Desa)	1261	1261	1262	1238	933
3	Rasio Desa/Kel yang Mengalami Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat (Desa/Kelurahan)	47,72	60,00	70,00	80,00	90,00
4	Rasio Penguatan Kemandirian Masyarakat Desa (Lembaga Keuangan Mikro Desa BUMDes) (%)	79,34	79,34	85,00	80,00	72,12
5	Rasio Jumlah Kelompok Usaha Ekonomi Keluarga Pedesaan setiap desa terhadap jumlah desa keseluruhan (Pasar Desa, UED-SPP, UPPKS, Lumbung Desa) (%)	2,24	3,80	3,80	5,00	0,25
6	Jumlah masyarakat miskin yang meperoleh pemberdayaan sosial(KK)	2.012	1605	1.215	1.330	3.174

No	INDIKATOR	2012	2013	2014	2015	2016
7	Jumlah Komunitas masyarakat terpencil yang diberdayakan (KK)	220	200	220	250	320
8	Cakupan Pengembangan Inovasi dan Pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna	1 Posyantek	1 Posyantek	3 Posyantek	Gelar TTG Nasional Provinsi Aceh	10 Posyantek

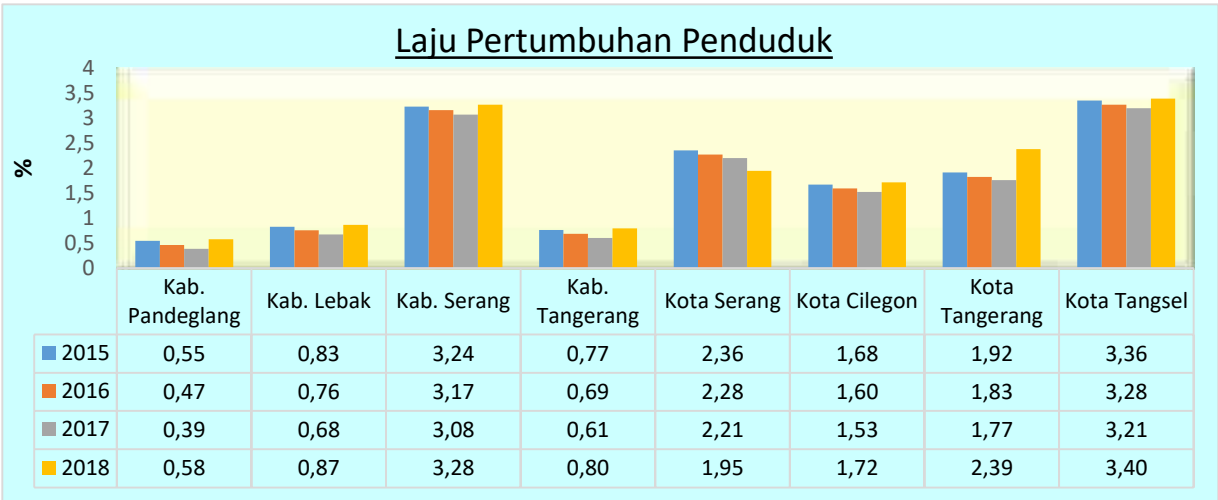
Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.5 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sumber utama data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk telah dilaksanakan sebanyak enam kali sejak Indonesia merdeka, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan 2010. Di dalam sensus penduduk, pencacahan dilakukan terhadap seluruh penduduk yang berdomisili di wilayah teritorial Indonesia termasuk warga negara asing kecuali anggota korps diplomatik negara sahabat beserta keluarganya.

Penduduk Banten berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2017 sebanyak 12,45 juta jiwa yang terdiri atas 6,34 juta jiwa penduduk laki-laki dan 6,1 juta jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016, penduduk Banten mengalami pertumbuhan sebesar 2,01 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2017 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,94

Kepadatan penduduk di Provinsi Banten tahun 2017 mencapai 1.288 jiwa/km2 dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 8 kabupaten/ kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kota Tangerang dengan kepadatan sebesar 13.902 jiwa/km2 dan terendah di Kabupaten Lebak sebesar 376 jiwa/Km2.



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.31
Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012-2017

Tabel 2.70
Jumlah Rumah tangga dan Rata-rata Banyaknya Anggota Rumah tangga
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga	Rata-rata Banyak Anggota Rumah Tangga
1	Kab Pandeglang	281.359	4,25
2	Kab Lebak	309.719	4,10
3	Kab Tangerang	827.015	4,08
4	Kab Serang	337.615	4,37
1	Kota Tangerang	540.97	3,78
2	Kota Cilegon	98.979	4,16
3	Kota Serang	141.176	4,46
4	Kota Tangerang Selatan	393.391	3,92
	Provinsi Banten	2.930.224	4,08

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.71
Jumlah Fasilitas Kesehatan Keluarga Berencana (Faskes KB) dan
Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	KKB	PPKBD
1	Kab Pandeglang	37	340
2	Kab Lebak	48	347
3	Kab Tangerang	93	274
4	Kab Serang	47	327
1	Kota Tangerang	91	104
2	Kota Cilegon	25	43
3	Kota Serang	33	67
4	Kota Tangerang Selatan	150	54
	PROVINSI BANTEN	524	1556

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.72
Pasangan Usia Subur dan Peserta KB Aktif Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif			
			IUD	MOW	MOP	Kondom
	KABUPATEN/KOTA					
1	Pandeglang	249.207	9.104	2000	2429	3964
2	Lebak	287.282	10.077	2384	2343	3078
3	Tangerang	711.203	53.504	13689	5289	12366
4	Serang	319.350	21.843	3855	2624	4101
	KOTA					
1	Tangerang	252.455	20.133	4967	811	7584
2	Cilegon	75.472	4774	1308	149	1416
3	Serang	116.958	8119	1759	415	2994
4	Tangerang Selatan	644.255	35.681	6630	1758	37931
	PROVINSI BANTEN	2.656.182	163.235	36592	15818	73434

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.73
Remaja Usia 15-24 Tahun yang Mendapat Penyuluhan Tentang
Kesehatan Reproduksi (Kespro), HIV/AIDS, dan KB Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penyuluhan Kespro	Penyuluhan HIV/AIDS	Penyuluhan KB
	Kabupaten			
1	Pandeglang	-	775	-
2	Lebak	-	418	-
3	Tangerang	-	-	-
4	Serang	-	450	-
	Kota			
1	Tangerang	-	1.53	-
2	Cilegon	--	1.852	-
3	Serang	-	440	-
4	Tangerang Selatan	-	100	-
	Provinsi Banten	-	1.53	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.6 Perhubungan

Pada tahun 2017, dari 762,03 km jalan di Provinsi Banten, sepanjang 432,13 km dalam kondisi baik (56,71%), kemudian 170,69 km dalam kondisi sedang (22,40%), 75,58 km dalam kondisi rusak (9,92%) dan 83,62 km dalam kondisi rusak berat (10,97%). Jumlah kendaraan bermotor yang terdapat di Provinsi Banten antara lain 660,41 ribu mobil penumpang, 1,95 ribu bus, 158,55 ribu truk, dan 4,12 juta sepeda motor.

Tabel 2.74
 Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Kabupaten/Kota
 dan Jenis Kendaraan di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jenis kendaraan			
		Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor
Kabupaten					
1	Pandeglang	14.386	402	7.732	215.708
2	Lebak	12.989	34	8.267	253.224
3	Tangerang	150.003	210	46.980	1.224.583
4	Serang	26.439	88	10.759	368.806
Kota					
1	Tangerang	186.046	691	40.195	954.431
2	Cilegon	30.746	114	9.699	242.801
3	Serang	34.736	439	8.178	208.750
4	Tangerang Selatan	205.061	125	26.744	648.493
	Total	660.406	1.953	158.554	4.116.796

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.75
 Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang
 berwenang mengelolanya di Provinsi Banten (km)

No	Kabupaten/Kota	Pemerintahan yang Berwenang mengelola			
		Negara	provinsi	Kab/Kota	Jumlah
	Kabupaten				
1	Pandeglang	186,97	132,48	723,03	1.042,48
2	Lebak	146,59	184,39	837,96	1.168,94
3	Tangerang	27,73	111,95	992,61	1.132,29
4	Serang	113,80	128,06	601,13	842,99
	Kota				
5	Tangerang	18,40	31,81	280,71	330,92
6	Cilegon	47,07	3,36	304,13	354,56
7	Serang	14,51	118,36	164,90	297,77
8	Tangerang Selatan	9,80	51,61	397,65	459,07
	Jumlah	546,89	762,03	4.302,12	6.955,94

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.76
 Kondisi Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang
 berwenang mengelolanya di Provinsi Banten Tahun 2017 (km)

No	Kabupaten/Kota	Pemerintahan yang Berwenang mengelola			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
	Kabupaten				
1	Pandeglang	74,04	82,63	19,20	11,10
2	Lebak	66,52	34,21	17,90	11,11
3	Tangerang	7,70	18,00	2,00	-
4	Serang	72,00	37,36	3,65	0,8
	Kota				
5	Tangerang	5,90	11,53	0,97	-
6	Cilegon	24,50	21,25	1,32	-
7	Serang	10,86	3,10	0,10	-
8	Tangerang Selatan	5,41	3,90	0,50	-
	Jumlah	266,93	211,98	45,64	23,01

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Penumpang domestik yang menggunakan transportasi udara pada tahun 2017 adalah sebanyak 23.719.345 orang datang dan 21.923.671 orang pergi dari bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, tercatat juga sebanyak 2.701.030 orang transit di bandara ini. Sedangkan untuk penumpang internasional tercatat 7.234.235 orang datang, 7.420.353 orang berangkat dan 31.009 orang transit di Bandara Soekarno-Hatta pada tahun 2017.

2.3.2.7 Komunikasi dan Informatika

Pembangunan di bidang komunikasi dan informatika di wilayah provinsi Banten terus berjalan. Layanan komunikasi dan informatika melalui media cetak dan media elektronik telah banyak dinikmati oleh masyarakat Banten. Secara umum jumlah rumah tangga yang masih menggunakan telepon rumah hanya sebesar 5,40 persen di tahun 2015, menurun dibandingkan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2013 masih tercatat sebanyak 7,85 persen. Penurunan penggunaan telepon rumah terjadi baik pada rumah tangga yang tinggal di perkotaan, maupun yang tinggal di daerah perdesaan. Pengguna telepon rumah masih didominasi oleh masyarakat yang tinggal di perkotaan yaitu sebesar 7,75 persen sedangkan di perdesaan hanya 0,3 persen.

Masyarakat kini cenderung memilih telepon seluler karena praktis, dapat dibawa bepergian kemana-mana, lebih bersifat pribadi, dan tersedianya kecanggihan teknologi dalam telepon seluler yang dapat mengakses internet, menyimpan dan mendengarkan musik, menyimpan gambar (foto) dan video, serta merekam gambar dan suara, dan lain-lain.

Pada tahun 2015, penggunaan telepon seluler meningkat 2,51 persen dibandingkan tahun 2013, dari 89,53 persen menjadi 92,04 persen. Di perdesaan peningkatan penggunaan telepon seluler lebih besar dibandingkan di perkotaan, dimana di perdesaan jumlah pengguna telepon seluler naik 5,97 persen dari 77,67 persen di tahun 2013 menjadi 83,64 persen di tahun 2015. Sedangkan di perkotaan pengguna telepon seluler hanya meningkat 0,89 persen dari 95,03 persen di tahun 2013 menjadi 95,92 persen di tahun 2015.

2.3.2.8 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Struktur ekonomi Banten ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor pertanian, industri, perdagangan dan pariwisata. Seiring dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan

ekonorni dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonorni daerah menjadi faktor penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonorni daerah. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi serta pasar.

Peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi dirasakan belum optimal. Hal tersebut disebabkan kurangnya efektifitas fungsi dan peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pembangunan, masih tingginya kredit konsumsi dibandingkan dengan kredit investasi sehingga kurang menopang aktivitas sektor riil.

Tabel 2.77
Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

No	Kab/Kota	TAHUN 2016			TAHUN 2017			TAHUN 2018		
		Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total	Aktif	Tidak Aktif	Total
1	Kab. Pandeglang	434	109	543	440	110	550	465	100	565
2	Kab. Lebak	696	98	794	757	82	839	521	322	843
3	Kab. Tangerang	684	202	886	934	254	1.188	1.126	433	1.559
4	Kab. Serang	623	460	1.083	457	203	660	511	814	1.325
5	Kota Cilegon	604	404	1.008	662	116	778	301	230	531
6	Kota Serang	299	189	488	403	138	541	166	202	368
7	Kota Tangerang	674	168	842	277	47	324	421	480	901
8	Kota Tangsel	502	20	522	234	297	531	328	298	626

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.32
Koperasi Provinsi Banten Tahun 2016 s.d 2018

Tabel 2.78
 Rekapitulasi Data UMKM Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
 Tahun 2016 s.d 2017

NO	KABUPATEN /KOTA	TAHUN 2016				TAHUN 2017			
		MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH	MIKRO	KECIL	MENENGAH	JUMLAH
1	KOTA TANGERANG	8.043	1.478	427	9.948	103.750	20.717	7.380	131.847
2	KOTA TANGERANG SELATAN	4.719	1.214	308	6.241	86.611	13.660	5.503	105.774
3	KOTA CILEGON	4.048	55	4	4.107	37.912	4.374	1.614	43.900
4	KOTA SERANG	2.079	31	3	2.113	56.969	6.842	1.494	65.305
5	KABUPATEN SERANG	37.242	12.608	280	50.130	103.750	10.459	1.265	115.474
6	KABUPATEN TANGERANG	1.728	135	15	1.878	212.626	26.019	7.464	246.109
7	KABUPATEN LEBAK	53.529	650	8	54.187	110.386	7.295	589	118.270
8	KABUPATEN PANDEGLANG	495	24	0	515	108.504	8.504	790	117.798
TOTAL		111,388	16.171	1.045	128.604	820.508	97.870	26.099	944.477

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.9 Penanaman Modal

Iklim investasi di Provinsi Banten menunjukkan perkembangan yang terus membaik. Posisi Banten yang strategis menempatkan Banten menjadi tujuan investasi, baik PenanamanModal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Namun demikian, pertumbuhan investasi belum mampu meningkatkan keterkaitan dengan usaha ekonomi lokal dan kesempatan kerja. Hal ini diakibatkan belum efisien dan efektifnya birokrasi, belum adanya kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam bidang penanaman modal, masih rendahnya infrastruktur pendukung adalah merupakan kendala dalam upaya peningkatan investasi di Banten.

Tabel 2.79
 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu USD)	Penyerapan Tenaga Kerja
Kab. Pandeglang	7	12,90	--
Kab. Lebak	29	3.943,60	--
Kab. Tangerang	1.048	785.355,30	--
Kab. Serang	358	505.235,30	--
Kota Tangerang	543	212.247,20	--
Kota Cilegan	227	903.192,20	--
Kota Serang	18	484.720,40	--
Kota Tangerang Selatan	249	152.762,60	--
Total	2.479	3.047.469,50	--

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Realisasi investasi di Provinsi Banten tidak hanya berhasil melampaui target daerah, namun juga berhasil menembus target nasional. Berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diterima oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) Provinsi Banten, total realisasi investasi Provinsi Banten tahun 2016 mencapai Rp. 52,3 triliun dengan 2.980 proyek dari target nasional sebesar Rp. 50 triliun dan target daerah sebesar Rp. 14,1 triliun. Dengan demikian, tingkat capaian realisasi investasi di Banten tahun 2016 sebesar 104,60 persen dari target nasional dan 370,92 persen dari target daerah.

Peningkatan realisasi investasi juga diikuti dengan tingginya minat investor asing dalam menanamkan modalnya di Banten. Berdasarkan LKPM tersebut, realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Banten tahun 2016 menempati urutan ke-3 setelah DKI Jakarta dengan nilai investasi mencapai 2.912,1 juta US\$ dari 2161 proyek.

Sementara itu, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Provinsi Banten berada di peringkat ke-4 dengan nilai investasi mencapai Rp 12,42 triliun dengan 496 proyek.

Tabel 2.80
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (juta RP)	Penyerapan Tenaga Kerja
Kab. Pandeglang	7	444.705,50	--
Kab. Lebak	14	5.359,00	--
Kab. Tangerang	298	5.340.184,80	--
Kab. Serang	112	3.451.313,00	--
Kota Tangerang	169	1.881.900,40	--
Kota Cilegan	57	3.315.784,60	--
Kota Serang	11	241.982,60	--
Kota Tangerang Selatan	31	460.675,20	--
Total	699	15.141.904,70	--

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.81
Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Sektor Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribuan Juta)
1	Pertanian/Perikanan		
	Perikanan	-	-
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	263.809,90
2	Peternakan	8	73.037,10
3	Pertambangan dan penggalian	7	15.288,40
4	Industri Pengolahan		
	1). Makanan	85	3.431.603,10
	2). Tekstil	25	146.460.00

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu Juta)
	3). Kulit, Barang dari Kulit Sepatu	7	2900,00
	4). Kayu	8	4.740,00
	5). Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	22	226.563,60
	6). Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	96	1.080.861,90
	7). Alat Angkutan dan Tranportasi Lainnya	10	79.610,10
	8). Karet, Barang dari Karet dan Plastik	84	715.414,30
	9). Logam Dasar, Barang Logam, Mesin, dan Elektronik	131	2.653.612,50
	10). Mineral non Logam	28	1.351.596,30
	11). Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	3	0,00
	12). Lainnya	16	44.545,30
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	15	1.582.446,30
6	Konstruksi	8	85.329,30
7	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
	Perdagangan dan Reparasi	47	185.713,40
	Hotel dan Restoran	23	133.244,60
8	Pengangkutan dan Komunikasi	12	2.290.020,70
9	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	49	736.962,80
10	Jasa Lainnya	14	38.145,10
	Total	699	15.141.904,70

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Dari sebaran investasi pada Januari-Desember Tahun 2015, seperti tahun sebelumnya, nilai investasi tertinggi PMA berada di Kota Cilegon dengan nilai investasi sebesar 1,48 miliar US\$ dengan 193 proyek, disusul berturut-turut Kabupaten Tangerang sebesar 421 juta US\$ dengan 815 proyek, Kabupaten Serang sebesar 338 juta US\$ dengan 330 proyek, Kota Serang sebesar 302 juta US\$ dengan 38 proyek, Kota Tangerang 223,8 juta US\$ dengan 560 proyek, Kota Tangerang Selatan sebesar 115 juta US\$ dengan 194 proyek, Kabupaten Lebak sebesar 26 juta US\$ dengan 27 proyek, dan Kabupaten Pandeglang sebesar 1,4 juta US\$ dengan 4 proyek.

Pada Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Kabupaten Tangerang menempati urutan pertama dengan nilai investasi Kabupaten Tangerang sebesar Rp. 6,1 triliun dengan 212 proyek, disusul berturut-turut yakni Kota Tangerang sebesar Rp. 2,4 triliun dengan 111 proyek, Kota Cilegon sebesar Rp. 2,3 triliun dengan 49 proyek, Kabupaten Serang sebesar Rp. 715 miliar dengan 73 proyek, Kabupaten Lebak sebesar Rp. 657 miliar dengan 23 proyek, Kota Serang sebesar Rp. 35,4 miliar dengan 11 proyek, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp. 16,5 miliar dengan 7 proyek, dan Kota Tangerang Selatan sebesar Rp. 2,1 miliar dengan 10 proyek.

Tabel 2.82
 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut Sektor
 Ekonomi di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Sektor Ekonomi	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu Juta)
1	Pertanian/Perikanan		
	Perikanan	-	-
	Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	263.809,90
2	Peternakan	8	73.037,10
3	Pertambangan dan penggalian	7	15.288,40
4	Industri Pengolahan		
	1). Makanan	85	3.431.603,10
	2). Tekstil	25	146.460,00
	3). Kulit, Barang dari Kulit Sepatu	7	2900,00
	4). Kayu	8	4.740,00
	5). Kertas, Barang dari Kertas dan Percetakan	22	226.563,60
	6). Kimia Dasar, Barang Kimia dan Farmasi	96	1.080.861,90
	7). Alat Angkutan dan Tranportasi Lainnya	10	79.610,10
	8). Karet, Barang dari Karet dan Plastik	84	715.414,30
	9). Logam Dasar, Barang Logam, Mesin, dan	131	2.653.612,50
	10). Mineral non Logam	28	1.351.596,30
	11). Instrumen Kedokteran, Presisi, Optik dan Jam	3	0,00
	12). Lainnya	16	44.545,30
5	Listrik, Gas dan Air Bersih	15	1.582.446,30
6	Konstruksi	8	85.329,30
7	Perdagangan, Hotel dan Restoran		
	Perdagangan dan Reparasi	47	185.713,40
	Hotel dan Restoran	23	133.244,60
8	Pengangkutan dan Komunikasi	12	2.290.020,70
9	Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran	49	736.962,80
10	Jasa Lainnya	14	38.145,10
	Total	699	15.141.904,70

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.10 Kepemudaan dan Olahraga

Pemuda merupakan subjek sekaligus objek pembangunan yang sangat strategis. Berdasarkan data SUPAS 2015, sebagian besar penduduk Provinsi Banten berada pada kelompok umur muda, dengan dependency ratio sebesar 46,94. Angka ini menunjukkan bahwa 100 orang produktif di Provinsi Banten akan menanggung 47 orang non produktif. Angka Ketergantungan yang berada di bawah 50 menunjukkan bahwa di Provinsi Banten terdapat penduduk usia produktif yang cukup banyak, atau mengalami bonus demografi. Bonus Demografi, yang hanya terjadi satu kali dalam kehidupan akan memunculkan kesempatan (window of opportunity) bagi suatu daerah untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam bonus demografi dapat dimanfaatkan apabila wilayah tersebut sudah dapat mempersiapkan sumber daya manusia dengan baik. Apabila sumber daya

manusia tidak dipersiapkan dengan baik maka bonus demografi akan menjadi bencana demografi, karena jumlah penduduk usia muda yang cukup banyak akan berdampak pada berbagai masalah kerawanan sosial. Untuk memanfaatkan peluang bonus demografi dan menghindari bencana demografi, Pemerintah Provinsi Banten perlu meningkatkan investasi pada sumber daya manusia.

Sebagai salah satu unsur sumberdaya manusia dan tulang punggung yang akan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa, pemuda perlu dikembangkan agar berkualitas unggul dan memiliki daya saing tinggi, melalui pembangunan di bidang kepemudaan yang tercermin pada Indeks Pembangunan Pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda memotret situasi pembangunan pemuda berdasarkan disagregasi data yang terdiri dari lima domain, yakni pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Pada Tahun 2016, kinerja pembangunan kepemudaan Banten menunjukkan angka 49,17 atau peringkat ke-22 secara nasional. Capaian ini mengalami peningkatan dari IPP pada Tahun 2015 yang sebesar 45,83 atau peringkat ke-24 secara nasional.

Pada domain pendidikan, rata-rata lama sekolah dan partisipasi sekolah menengah cenderung baik—begitu pula partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Nilai sub-indeks indikator-indikator ini berada pada kisaran 7-9 poin.

Capaian terendah Provinsi Banten adalah pada partisipasi pemuda dalam organisasi, kurang dari empat persen. Hal ini membuat nilai sub-indeksnya berada di nilai terendah, satu poin. Tiga indikator berikutnya mencatat nilai sub-indeks dua poin, masing-masing adalah pemuda wirausaha, pemuda berpendapat dalam rapat kemasyarakatan, serta pemuda perempuan 16-24 tahun bersekolah menengah dan perguruan tinggi. Pada tahun 2016 pemuda wirausaha tidak cukup banyak, kurang dari 0,3 persen. Angka ini turun dari angka pada IPP tahun 2015 sebesar 0,4 persen. Sementara itu, perempuan 16-24 bersekolah menengah dan perguruan tinggi hanya naik kurang dari tiga persen dari capaian 33 persen di tahun 2015 lalu, sehingga membuat sub-indeksnya tidak mengalami perubahan.

Selain melalui pembangunan kepemudaan, upaya membangun sumberdaya manusia dan meneruskan cita-cita perjuangan bangsa juga dapat ditempuh melalui pembangunan keolahragaan. Secara kontekstual, pembangunan keolahragaan telah menjadi bagian dari upaya pembangunan

secara keseluruhan. Pasal 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, menggariskan bahwa keolahragaan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan jasmani, rohani, dan sosial, serta membentuk watak dan kepribadian bangsa yang bermartabat.

Lebih daripada itu, keolahragaan nasional ditujukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa, pembangunan olahraga juga dalam rangka mempersatukan negara-bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan perdamaian dunia, seperti nampak dalam semboyan sport for peace atau olahraga untuk perdamaian. Melalui olahraga, setiap individu dapat mengalami kesetaraan, kebebasan, disiplin, kekuatan mental, kesabaran, daya juang, serta sportivitas.

Gambaran pembangunan olah raga di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.83
Prestasi Olah Raga Provinsi Banten Tahun 2012-2016

Tahun	Tingkat Internasional				Tingkat Nasional				
	Medali			Cabang Olahraga	medali			Cabang Olahraga	
	1	2	3		1	2	3		
2012	-	2	1	Judo	9	6	13	Pencaksilat, Basket, Tenis Meja, Volly, Bulutangkis, Sepakbola, Sepaktakraw, Tenis Lapangan	
2013	3	-	2	Judo, Karate	8	6	14	Judo, Renang, Senam, Gulat, Atletik, Tae Kwon Do, Tinju, Karate	
2014	3	-	-	Karate	9	7	15	Pencaksilat, Basket, Tenis Meja, Volly, Bulutangkis, Sepakbola, Sepaktakraw, Tenis Lapangan	
2015	14	1	2	Judo, Karate, Gulat & Tae Kwon Do	5	9	17	Angkat Besi, Bulutangkis, Gulat, Judo, Tenis Meja, Renang, Atletik, Pencaksilat, Karate, Tae Kwon Do	
2016	10	1	1	Judo, Karate	15	11	8	Pencaksilat, Basket, Tenis Meja, Volly, Bulutangkis, Sepakbola, Sepaktakraw, Tenis Lapangan	

Keterangan: (Medali 1: emas, 2: Perak, 3: Perunggu)

Selain dengan perolehan medali, terdapat indikator yang lebih komprehensif untuk mengukur kemajuan pembangunan olahraga, yaitu Sport Development Index (SDI) atau Indeks Pembangunan Olahraga. Melalui pendekatan komprehensif ini, pembangunan olahraga dipandang sebagai suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk

melakukan aktivitas fisik. Oleh karenanya, pembangunan olahraga harus memampukan setiap orang memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang, baik menyangkut fisik, rohani, maupun sosial, secara paripurna.

SDI merupakan suatu indeks gabungan yang mencerminkan keberhasilan pembangunan olahraga berdasarkan empat dimensi dasar: (1) ruang terbuka yang tersedia untuk olahraga, (2) sumber daya manusia atau tenaga keolahragaan yang terlibat dalam kegiatan olahraga, (3) partisipasi warga masyarakat untuk melakukan olahraga secara teratur dan (4) derajat kebugaran jasmani yang dicapai oleh masyarakat.

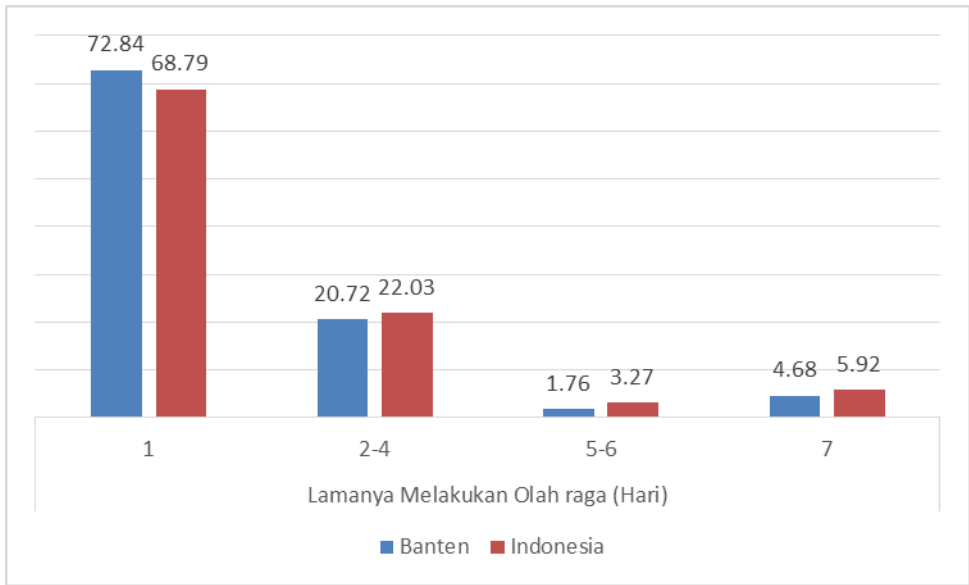
Gambaran kondisi sumber daya manusia keolahragaan di Provinsi Banten disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.84
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat Tahun 2012-2016

URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016
Jumlah Pelatih	718	718	718	718	718
Jumlah Pelatih Yang Bersertifikat	40	40	40	80	115
Cakupan Pelatih Yang Bersertifikat	5,57	5,57	5,57	11,14	16,02

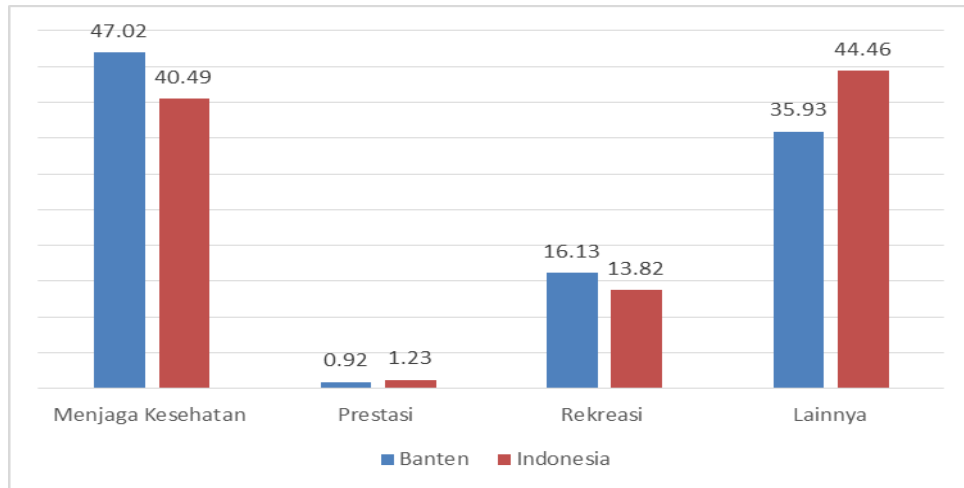
Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dilihat dari sisi sumber daya manusia keolahragaan, jumlah pelatih yang bersertifikat mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun dilihat dari sisi partisipasi olahraga, Provinsi Banten masih lebih rendah secara rata-rata nasional.



Sumber: Statistik Sosial Budaya, 2015

Gambar 2.33
Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga Selama Seminggu Terakhir dan Lamanya Melakukan Olahraga (Hari) di Banten dan Indonesia, 2015



Sumber: Statistik Sosial Budaya, 2015

Gambar 2.34
 Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas yang Melakukan Olahraga dan Tujuan Olah Raga selama Seminggu Terakhir di Banten dan Indonesia, 2015

Rendahnya partisipasi olahraga dan tujuan melakukan olahraga prestasi mengindikasikan bahwa atlet, klub, penggemar olahraga dan masyarakat Provinsi Banten memerlukan fasilitas yang representatif dan terpadu, yang mampu mewadahi aktivitas seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisik untuk menjaga kesehatan, maupun untuk rekreasi.

Lebih daripada itu, ketersediaan fasilitas olahraga yang representatif dalam lokasi yang terpadu dan memenuhi standar nasional maupun internasional, memungkinkan Banten untuk menjadi host multi event keolahragaan, yang akan mendorong perkembangan industri olahraga di Provinsi Banten.

2.3.2.11 Kebudayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan pemerintahan bidang kebudayaan untuk daerah Provinsi meliputi Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, Pelestarian tradisi yang masyarakat penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi, serta Pembinaan lembaga adat yang penganutnya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.

Berkaitan dengan Kesenian Tradisional, kewenangan daerah Provinsi adalah Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya lintas Daerah kabupaten/kota. Pada Sub Urusan Sejarah, Daerah Provinsi menangani

Pembinaan sejarah lokal provinsi. Untuk Sub Urusan Cagar Budaya, Pemerintah Provinsi menangani Penetapan cagar budaya peringkat provinsi, Pengelolaan cagar budaya peringkat provinsi, Penerbitan izin membawa cagar budaya ke luar Daerah provinsi, sedangkan untuk Permuseuman, Pemerintah Provinsi menangani Pengelolaan museum provinsi.

Pembangunan kebudayaan di Banten ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Namun, disisi lain upaya peningkatan jati diri masyarakat Banten seperti solidaritas sosial, kekeluargaan, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Budaya berperilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Analisis kinerja atas seni budaya dan olahraga dilakukan terhadap indikator-indikator : jumlah grup kesenian, jumlah klub olahraga, dan jumlah gedung olahraga.

Tabel 2.85
Jumlah Seni dan Budaya Provinsi Banten Tahun 2016

SENI DAN BUDAYA PROVINSI BANTEN	TOTAL
CAGAR BUDAYA	26
MUSEUM	5
MAESTRO	2
WARISAN BUDAYA TAK BENDA	58
KOMUNITAS ADAT	36
TRADISI	28
BAHASA DAERAH	1

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.86
Jumlah Museum, Situs Purbakala, dan Bangunan Bersejarah Lainnya Menurut Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Museum	Situs Purbakala	Bangunan Bersejarah	Makam Sejarah
1	Kab. Pandeglang	1	9	17	98
2	Kab. Lebak	1	4	10	17
3	Kab. Tangerang	-	6	6	43
4	Kab. Serang	-	4	2	6
5	Kota Tangerang	-	2	9	2
6	Kota Cilegan	4	3	3	2
7	Kota Serang	3	48	39	66
8	Kota Tangerang Selatan	-	1	3	12
	Provinsi Banten	9	77	89	246

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.87
 Jumlah Sanggar Seni Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten
 Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Sanggar Seni	Seni Tradisional	Seni Tradisi	Seni Modern
1	Kab. Pandeglang	191	4	14	18
2	Kab. Lebak	9	3	5	1
3	Kab. Tangerang	264	8	33	72
4	Kab. Serang	34	7	13	3
5	Kota Tangerang	623	6	5	228
6	Kota Cilegan	77	5	27	4
7	Kota Serang	54	19	19	11
8	Kota Tangerang Selatan	48	3	-	6
	Provinsi Banten	1.300	55	116	34

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.88
 Jumlah Lembaga dan Tenaga Seni Menurut Kabupaten/Kota
 di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Seniman	Lembaga Seni	Galeri
1	Kab. Pandeglang	94		1
2	Kab. Lebak	10	2	1
3	Kab. Tangerang	33	1	-
4	Kab. Serang	13	2	1
5	Kota Tangerang	5	1	1
6	Kota Cilegon	21	-	2
7	Kota Serang	38	7	54
8	Kota Tangerang Selatan	-	1	1
	Banten	214	14	61

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.12 Perpustakaan

Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan pertambahannya sangat kecil dari 47.218 pengunjung pada tahun 2012 hanya bertambah menjadi 131.804 pengunjung pada tahun 2016 dengan rata-rata penambahan sebesar 32,59 persen.

Tabel 2.89
 Data dan Informasi Perpustakaan Daerah Provinsi Banten
 Tahun 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Pertahun (Orang)	47.218	52.108	52.525	73.598	131.804
2	Koleksi Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah (Eksemplar)	6.200	8.950	29.570	39.965	68.200
3	Rasio Perpustakaan Persatuan Penduduk	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
4	Jumlah rata rata pengunjung perpustakaan perhari (Orang)	196	217	218	255	361
5	jumlah koleksi judul buku perpustakaan (Judul)	2.200	950	7.020	3.465	5540
6	Jumlah Pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	27	30	30	38	42

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
	a. Pustakawan	1	4	4	5	5
	b. Tenaga Teknis					
	- PNS	8	8	8	17	18
	- Non PNS	18	18	18	15	17
	c. Penilai				1	2

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

2.3.2.13 Kearsipan

Pengelolaan arsip menjadi perhatian dari Pemerintah Daerah, jumlah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan hanya 40 persen pada tahun 2012 dan meningkat 30 persen pada tahun 2016 sebesar 70 persen.

Tabel 2.90
 Data dan Informasi Kearsipan Daerah Provinsi Banten 2012-2016

No	Bidang Urusan/Indikator	Tahun				
		2012	2013	2014	2015	2016
1	Persentase OPD yang menyelenggarakan kearsipan sesuai ketentuan kearsipan (%)	40%	51%	63%	70%	70%
2	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan (Orang)	116	123	137	139	171
3	Jumlah Koleksi Hasanah Arsip Statis di Depo Arsip Banten (Boks Arsip)	200	300	400	1.000	2.500
4	Jumlah Pengunjung Depo Arsip Banten (Orang)	120	240	360	480	600

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.14 Statistik

Akurasi data dan informasi dalam perencanaan pembangunan merupakan kunci keberhasilan bagi sebuah data dan informasi yang berkualitas. Data yang valid menjadi penting karena pihak-pihak terkait yang akan membutuhkan tidak akan banyak bertanya terkait validitas data dan sumber data yang hasilnya kadang tiap instansi berbeda-beda. Untuk mengatasi masalah tersebut peningkatan akurasi akan data menjadi salah satu sasaran indikator kinerja bagi dinas atau OPD pengampunya. Pengumpulan sampai dengan penyediaan data dan informasi itu merupakan aspek penting dalam pembangunan pada urusan Statistik. Jenis statistik terdiri dari statistik dasar, statistik sektoral, dan statistik khusus. Penyelenggaraan statistik dasar dilakukan oleh BPS sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Sementara itu, statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi. pemerintah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya baik secara mandiri maupun bersama dengan BPS, instansi vertikal lain dan SKPD provinsi/kabupaten/kota di wilayah Provinsi Banten.

Pembangunan di bidang statistik diarahkan pada upaya penyediaan data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan terpublikasinya data dan informasi statistik yang cepat, tepat, rinci dan relevan sesuai kebutuhan masyarakat dan kebutuhan manajemen kebijakan serta Meningkatnya mutu pelayanan statistik daerah. Pelaksanaan program dan kegiatan dalam Urusan Statistik sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar dari perencanaan pembangunan.

2.3.2.15 Persandian

Penyelenggaraan pengamanan persandian adalah rangkaian kegiatan dan tindakan pencegahan atau penanggulangan yang dilakukan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk melindungi kelangsungan persandian dari segala hakekat ancaman dan gangguan dalam satu kesatuan Sistem Persandian Negara. Persandian sebagai upaya untuk mengamankan, melindungi dan menjamin orisinalitas sebuah dokumen pemerintah dan didukung oleh penggunaan teknologi informasi di segala aspek mulai dari administrasi perkantoran (e-office), perencanaan (e-planning), keuangan (e-budgetting) dan fungsi pemerintahan lainnya. Penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah akan menghadapi beberapa resiko seperti penyadapan, hacking dan berbagai ancaman lainnya. Adanya ancaman dalam pengelolaan pemerintahan yang berbasis teknologi informasi (e-government) tersebut membuat pengelolaan persandian oleh pemerintah daerah menjadi terasa lebih penting.

Urusan persandian tersebut di Provinsi Banten diserahkan pada Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik, Persandian. Dalam pelaksanaan operasionalnya persandian pada Pemerintah Provinsi Banten sebagai sarana pengamanan informasi belum dimanfaatkan secara optimal di instansi lingkup pemerintah, ini karena banyak keterbatasan terutama dalam hal infrastruktur teknologi informasi maupun sumberdaya manusia ASN di Banten belum ada yang secara khusus menangani hal ini. Selain itu belum terjalannya forum komunikasi sandi se Banten yang nanti didalamnya banyak pihak-pihak terkait terlibat seperti Jajaran Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota se-Banten, TNI, POLDA, Kejaksaan Tinggi. Harapannya jika sudah ada forum komunikasi terkait problem keamanan persandian pada pemerintah bisa elaborasi langkah apa dan program apa yang akan dijalankan terkait kegiatan persandian di Provinsi Banten.

2.3.3 Urusan Pilihan

2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sumberdaya kelautan dan perikanan, Provinsi Banten tersebar di lima Kabupaten/Kota dengan 61 buah pulau-pulau kecil yaitu di Kota Cilegon sebanyak 5 pulau, Kabupaten Pandeglang sebanyak 33 pulau, Kabupaten Serang sebanyak 17 pulau, Kabupaten Tangerang sebanyak 1 pulau, dan Kabupaten Lebak sebanyak 5 pulau. Di samping itu Banten memiliki garis pantai 499,62 km, terbagi atas garis pantai yang menghadap Samudra Indonesia 138,62 km, menghadap Laut Jawa 127,10 km dan menghadap Selat Sunda 233,90 km Kondisi geografis semacam ini menyimpan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat besar termasuk di dalamnya perikanan tangkap dan budidaya, industri pengolahan produk perikanan dan bioteknologi, pariwisata bahari dan pantai, pertambangan dan energi, perhubungan laut, industri kapal, bangunan laut dan pantai, pulau-pulau kecil dan kegiatan pendayagunaan benda-benda berharga (the sunken treasures).

Di perairan Laut Banten, peluang pengembangan sangat besar karena kaya akan jenis-jenis ikan dengan potensi sebesar 60.400 ton/tahun (Proyeksi Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap di Laut 2010-2014 menurut Provinsi dalam Renstra KKP, 2010), sedangkan potensi perairan umum mencapai 2.965 ton/tahun (Laporan Statistik Perikanan Tangkap, 2010). Di Laut Selatan (Samudera Hindia), peluang pengembangan terbuka lebar dengan potensi sebesar 666.240 ton/thn.

Di bidang Perikanan Budidaya, peluang untuk dikembangkan usaha perikanan budidaya air tawar, perairan pedalaman, air payau serta budidaya laut, yang keseluruhannya mencapai luas 27.562 ha.

Provinsi Banten memiliki perairan umum yang cukup potensial dikembangkan untuk kegiatan perikanan tangkap dan perikanan budidaya, yaitu sekitar 4.928 Ha, yang terdiri dari cekdam/waduk 621 Ha, situ 320 Ha, rawa 3.416 Ha dan bekas galian pasir 572 Ha.

Pengembangan perluasan areal lahan usaha budidaya air payau masih terbuka terutama di pesisir Pantai Barat dan Pantai Selatan Banten, dengan tetap memperhatikan kelestarian ekosistem jalur hijau hutan mangrove mengingat karakteristik lahannya yang khas. Secara umum, prospek pengembangan ke depan masih terbuka luas, mengingat sampai saat ini, pemanfaatan secara keseluruhan baru mencapai sekitar 66,80%.

Untuk kondisi perikanan tangkap sepanjang Pantai Utara merupakan

konsentrasi dan pemukiman nelayan, bila dibandingkan Pantai Barat dan Pantai Selatan. Tercatat jumlah nelayan di Banten pada tahun 2015 mencapai 30.791 orang yang mendiami 61 desa di Pesisir Utara, 48 desa di pesisir Barat dan 20 desa di Pesisir Selatan.

Jumlah armada perikanan tangkap tercatat pada tahun 2015 sebanyak 7.185 buah, didominasi oleh jenis armada kapal motor yang jumlahnya mencapai 6.200 unit.

Pada tahun 2017, di Provinsi Banten terdapat 9.235 rumah tangga perikanan tangkap, dimana 8.676 rumah tangga atau 93,95 persen diantaranya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di laut, sementara sisanya merupakan rumah tangga yang menangkap ikan di perairan umum. Total produksi perikanan tangkap selama tahun 2017 sebesar 107,36 ribu ton, dimana 106,54 ribu ton atau 99,24 persen diantaranya dihasilkan dari perikanan tangkap di laut. Selanjutnya mengenai data produksi perikanan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.91
Produksi Perikanan di Provinsi Banten (Ton) Tahun 2010-2014

NO	KAB./KOTA	JUMLAH		
		2012	2013	2014
1	Kab Pandeglang	7.216	9.188	9.583
2	Kab Lebak	3.527	3.535	3.545
3	Kab Tangerang	19.869	20.906	21.244
4	Kab Serang	53.724	62.537	68.355
5	Kota Tangerang	443	462	473
6	Kota Cilegon	250	273	263
7	Kota Serang	1.258	1.918	1.817
8	Kota Tangerang Selatan	847	539	357
	Provinsi Banten	87.134	99.358	105.635

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.92
Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kabupaten/Kota dan Subsektor di Provinsi Banten (ton) Tahun 2016-2017

No	Kabupaten/Kota	Perikanan Laut		Perairan Umum		Jumlah	
		2016	2017	2016	2017	2016	2017
1	Kab Pandeglang	18.566,20	13.782,38	-	31,34	18.566,20	13.813,73
2	Kab Lebak	5.812,40	2323,02	376,00	37,58	6.188,4	2.360,60
3	Kab Tangerang	16.372,10	86944,28	71,00	81,49	16.443,10	87.025,76
4	Kab Serang	8.128,38	644,40	112,00	646,97	8.240,34	1.291,37
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
6	Kota Cilegon	357,60	726,95	-	357,60	357,60	749,25
7	Kota Seraang	3.206,50	2123,69	-	3.206,50	3.206,50	2.123,69
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-
	Provinsi Banten	59.103,00	68.004,50	559,00	819,67	53.002,14	107.364,3

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Tabel 2.93
Luas Areal Budidaya Perikanan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis
Budidaya di Provinsi Banten (ha) Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Budidaya Laut	Tambak	Kolam	Keramba	Jaring Apung	Sawah	Jumlah
1	Kab Pandeglang	92	66	1.485	-	25	-	1.668
2	Kab Lebak	-	54	4.914	520	18	-	5.506
3	Kab Tangerang	250	965	3.408	-	134	-	4.757
4	Kab Serang	1.075	975	744	-	10	-	2.804
5	Kota Tangerang	-	-	522	-	-	-	522
6	Kota Cilegon	-	-	188	-	-	-	188
7	Kota Seraang	57	456	1.072	-	10	-	1.595
8	Kota Tangerang Selatan	-	-	390	-	-	-	390
Banten		861,6	1.474	2.516	12.723	520	197	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

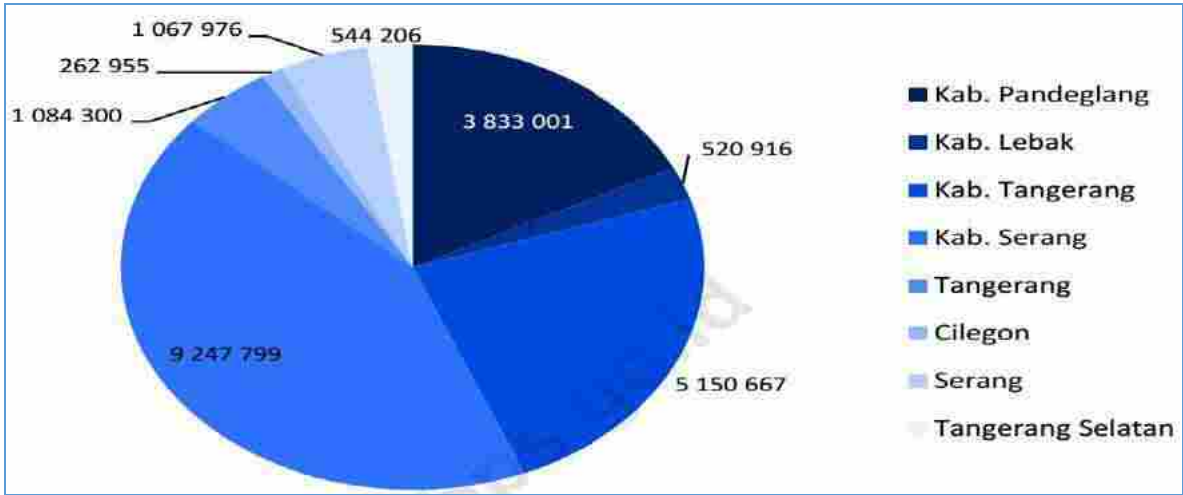
2.3.3.2 Pariwisata

Salah satu sektor yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa adalah sektor Pariwisata. Banten merupakan salah satu provinsi yang berpotensi untuk menjadi daerah utama tujuan wisata karena memiliki beragam obyek dan daya tarik wisata terutama wisata pantai, alam dan budaya serta ditunjang oleh sarana dan prasarana akomodasi yang memadai. Kegiatan pariwisata di Banten cukup potensial untuk menunjang pendapatan dan pembangunan daerah.

Pada tahun 2015 terdapat 311 hotel (berbintang dan nonbintang) di Provinsi Banten yang menyediakan 10.681 kamar dan 16.057 tempat tidur. Hotel tersebut digunakan oleh tamu asing maupun tamu domestik dengan rata-rata lama menginap selama 2,03 hari untuk tamu asing dan 1,70 hari untuk tamu domestik. Sementara itu, tingkat penghunian kamar hotel selama tahun 2015 adalah 52,87 persen untuk hotel berbintang dan 36,83 persen untuk hotel nonbintang.

Pada tahun 2015, di Provinsi Banten terdapat 138 lokasi wisata tirta, 86 wisata marina pantai, 79 wisata sejarah, 6 suaka alam dan 147 wisata lainnya. Selain itu terdapat 4 museum, 26 situs purbakala, 120 bangunan bersejarah dan 232 makam sejarah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata, sepanjang tahun 2015 terdapat 14.243.949 wisatawan yang mengunjungi lokasi wisata di Provinsi Banten, yang terdiri dari 14.118.787 wisatawan nusantara dan 125.162 wisatawan mancanegara.



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.35
Jumlah Wisatawan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten (orang) Tahun 2017

Tabel 2.94
Statistik Perhotelan di Provinsi Banten Tahun 2012-2014

Jenis Tamu	Banyaknya Tamu Hotel (Ribuan Jiwa)		
	2012	2013	2014
Tamu Asing	100,69	359,61	175,94
Tamu Indonesia	1.339,92	2.976,69	1.627,93
Tamu Asing dan Indonesia	1.440,61	3.336,30	1.803,87

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.95
Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Domestik Menurut
Bulan di Provinsi Banten (hari) Tahun 2017

Bulan	Tamu Asing	Tamu Domestik
Januari	1,68	1,46
Februari	2,25	1,48
Maret	1,75	1,45
April	2,01	1,43
Mei	2,06	1,47
Juni	1,96	1,42
Juli	2,09	1,52
Agustus	3,66	1,42
September	1,44	1,42
Oktober	1,88	1,49
November	1,66	1,40
Desember	1,58	1,21
Rata-rata	1,95	1,43

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.96
Jumlah Wisatawan Nusantara dan Wisatawan Mancanegara Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten (orang) Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Nusantara	Wisatawan Mancanegara	Jumlah
1	Kab Pandeglang	3.831.027	1.974	3.833.001
2	Kab Lebak	519.241	1.675	520.916
3	Kab Tangerang	5.105.545	45.122	5.150.667
4	Kab Serang	9.245.374	2.425	9.247.799
5	Kota Tangerang	785.524	298.776	1.084.300
6	Kota Cilegon	212.801	50.154	262.955
7	Kota Seraang	1.066.885	1.091	1.067.976
8	Kota Tangerang Selatan	541.960	2.246	544.206
Banten		21.380.357	403.463	21.711.820

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.97
Jumlah Objek Wisata Tirta Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Wisata Tirta					Jumlah
		Situ/ Danau	Air panas	Air Terjun	Arung Jeram	Kolam Renang	
1	Kab Pandeglang	6	4	37	5	5	57
2	Kab Lebak	3	4	12	1	5	25
3	Kab Tangerang	8	-	-	-	9	17
4	Kab Serang	7	3	6	-	3	19
5	Kota Tangerang	4	-	-	-	12	16
6	Kota Cilegon	1	-	-	-	3	4
7	Kota Seraang	1	1	-	-	7	9
8	Kota Tangerang Selatan	9	-	-	-	15	24
Banten		39	12	55	6	59	171

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.98
Jumlah Objek Wisata Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Wisata di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Wisatawan Marina Pantai	Wisata Sejarah	Suaka Alam	Objek Wisata Lainnya	Jumlah
1	Kab Pandeglang	19	20	2	47	88
2	Kab Lebak	11	16	1	18	46
3	Kab Tangerang	7	14	-	34	55
4	Kab Serang	36	3	2	37	78
5	Kota Tangerang	-	9	-	10	19
6	Kota Cilegon	10	3	4	-	17
7	Kota Seraang	3	60	1	16	80
8	Kota Tangerang Selatan	-	2	3	15	20
Banten		86	127	13	177	403

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.99
Jumlah Restoran/Rumah Makan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2012-2015

No	Kabupaten/Kota	2014	2015	2016	2017*
1	Kab Pandeglang	99	102	102	116
2	Kab Lebak	50	52	52	21
3	Kab Tangerang	131	132	132	-
4	Kab Serang	86	86	86	-
5	Kota Tangerang	172	179	179	385
6	Kota Cilegon	86	87	87	121
7	Kota Seraang	155	155	155	107
8	Kota Tangerang Selatan	331	354	354	202
Banten		1.110	1.147	1.147	952

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.3.3 Pertanian

Provinsi Banten merupakan salah satu lumbung pangan nasional. Sektor pertanian yang berkembang sangat bervariasi mulai dari tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Komoditas utama tanaman pangan yang dikembangkan terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan ubi jalar, dengan tingkat produksi sebagai berikut :

Tabel 2.100
Produksi Tanaman Pangan di Provinsi Banten (Ton) Tahun 2014-2017

Jenis Tanaman Pangan	2014	2015	2016	2017	2018
Padi					
Padi Sawah	1.959.596	2.127.671,26	2.300.595	2.369.731,00	1.643.046
Padi Ladang	1.877.312	61.325,29	57.607	43.747,00	
Palawija					
Jagung	154.454	11.870,20	19.882	63.518,00	331.865,38
Kedelai	10.983	7.291,31	4.020	2.126,00	18.093,56
Kacang Tanah	9.031	11.003,34	8.419	5.726,67	4.174
Kacang Hijau	12.384	541,89	432	220,70	281,18
Ubi Kayu	960	74.162,60	90.629	75.486,00	82.641,95
Ubi Jalar	89.141	20.149,91	24.255	20.724,00	16.470,53

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Sentra produksinya terletak pada kabupaten, yaitu Pandeglang, Lebak, Serang, dan Tangerang. Produksi padi Banten sendiri pada tahun 2015 mencapai 2,19 juta ton gabah kering giling (GKG), atau naik 0,14 juta ton GKG dibandingkan tahun 2014. Penambahan luas tanam dan panen harus diusahakan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pertanian, seperti perbaikan jaringan irigasi tersier, pembuatan embung dan pompanisasi, secara merata disemua sentra produksi, selain itu juga peningkatan produktivitas, melalui penerapan sistem penanaman jarak legowo serta penggunaan bibit unggul bersertifikat dan pupuk bantuan pemerintah, antara lain melalui program upaya khusus.

Tabel 2.101
Penggunaan Irigasi Tanaman Pangan Tahun 2017-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah	Irigasi	Non Irigasi	Jumlah
Kab. Pandeglang	22.746,00	32.022,00	54.768,00	22.746	32.022	54.768
Kab. Lebak	26.135,00	27.947,70	54.082,70	22.747	25.006	47.753
Kab. Tangerang	24.220,00	11.976,00	36.196,00	23.744	12.487	36.231
Kab. Serang	26.138,10	21.863,70	48.001,80	23.887	23.687	47.574
Kota Tangerang	377,70	131,60	509,30	316	147	463
Kota Cilegon	0,00	1.594,90	1.594,90	-	1.503	1.503
Kota Serang	4.820,00	3.119,00	7.939,00	4.787	3.152	7.939
Kota Tangerang Selatan	0,00	91,00	91,00	-	54	54
Provinsi Banten	104.436,80	98.745,90	203.182,70	98.228	98.058	196.285

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.102
Penggunaan Lahan Tanaman Pangan Tahun 2017-2018

Kabupaten/ Kota	Tahun 2017			Tahun 2018		
	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Sementara Tidak Di Usahakan	Tegal/ Kebun	Ladang/ Huma	Sementara Tidak Di Usahakan
Kab. Pandeglang	63.331,00	31.408,00	4.990,00	63.331	31.408	4.990
Kab. Lebak	12.873,30	28.859,00	2.621,00	19.062	28.131	2.772
Kab. Tangerang	10.153,00	33,00	1.232,00	9.241	0	1.202
Kab. Serang	29.986,20	7.816,20	548,10	19.266	7.296	631
Kota Tangerang	538,30	0,00	239,00	546	36	246
Kota Cilegon	2.103,00	1.256,00	1.146,00	2.715	1.871	1.133
Kota Serang	7.279,00	1.312,00	0,00	7.279	1.723	0
Kota Tangerang	768,00	279,00	112,00	478	375	23
JUMLAH	127.031,8	70.963,20	10.888,10	121.918	70.839	10.997

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.103
Produktifitas Tanaman pangan Tahun 2017 – 2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017					
		Padi Sawah			Padi Ladang		
		Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas	Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas
1	Kab. Pandeglang	135.057	768.477	56,90	6.162	20.834	33,81
2	Kab. Lebak	102.918	586.925	57,03	6.245	21.111	33,80
3	Kab. Tangerang	71.874	410.535	57,12	-	-	-
4	Kab. Serang	88.555	505.745	57,11	340	1.147	33,74
5	Kota Tangerang	528	3.001	56,87	-	-	-
6	Kota Cilegon	2.286	13.000	56,86	277	277	33,81
7	Kota Serang	14.394	81.617	56,70	379	379	33,81
8	Kota Tangerang Selatan	76	432	56,94	-	-	-
Provinsi Banten		415.687	2.369.731	57,01	43.747	43.747	33,81

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017					
		Jagung			Kedelai		
		Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas	Luas Panen	Produksi	Produk-tivitas
1	Kab. Pandeglang	10.296	41.418,00	40,23	1.267	1.636,00	12,92
2	Kab. Lebak	4.496	17.678,00	39,32	206	264,00	12,82
3	Kab. Tangerang	50	184,00	37,19	-	-	-
4	Kab. Serang	933	3.341,00	35,81	113	149,00	13,19
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
6	Kota Cilegon	19	70,00	37,01	-	-	-
7	Kota Serang	185	669,00	36,17	55	69,00	12,61
8	Kota Tangerang Selatan	40	157,00	39,36	5	7,00	13,76
Provinsi Banten		16.018,00	63.518	39,65	1.646,00	2.126	12,92

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018					
		Padi			Jagung		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Kab. Pandeglang	93.386	449.695	4,82	45.335	222.374,20	49,05
2	Kab. Lebak	81.029	378.079	4,67	18.962	98.431,45	51,91
3	Kab. Tangerang	66.930	316.152	4,72	46	251,81	54,98
4	Kab. Serang	79.459	419.228	5,28	1.582	8.456,06	53,46
5	Kota Tangerang	756	3.867	5,12	0	0,00	0,00
6	Kota Cilegon	1.721	8.284	4,81	262	1.474,79	56,31
7	Kota Serang	11.555	67.726	5,86	134	712,91	53,24
8	Kota Tangerang Selatan	3	15	5,00	35	164,16	46,90
Provinsi Banten		334.839	1.643.046	4,91	66.356	331.865,38	50,01

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2018		
		Kedelai		
		Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	Kab. Pandeglang	18.925	14.115,01	7,46
2	Kab. Lebak	4.001	3.374,63	8,43
3	Kab. Tangerang	0	0,00	0,00
4	Kab. Serang	665	600,91	9,04
5	Kota Tangerang	0	0,00	0,00
6	Kota Cilegon	1	0,55	5,54
7	Kota Serang	1	0,55	5,54
8	Kota Tangerang Selatan	2	1,90	9,50
Provinsi Banten		23 594	18.093,56	7,67

Sumber : SIPD Provinsi Banten

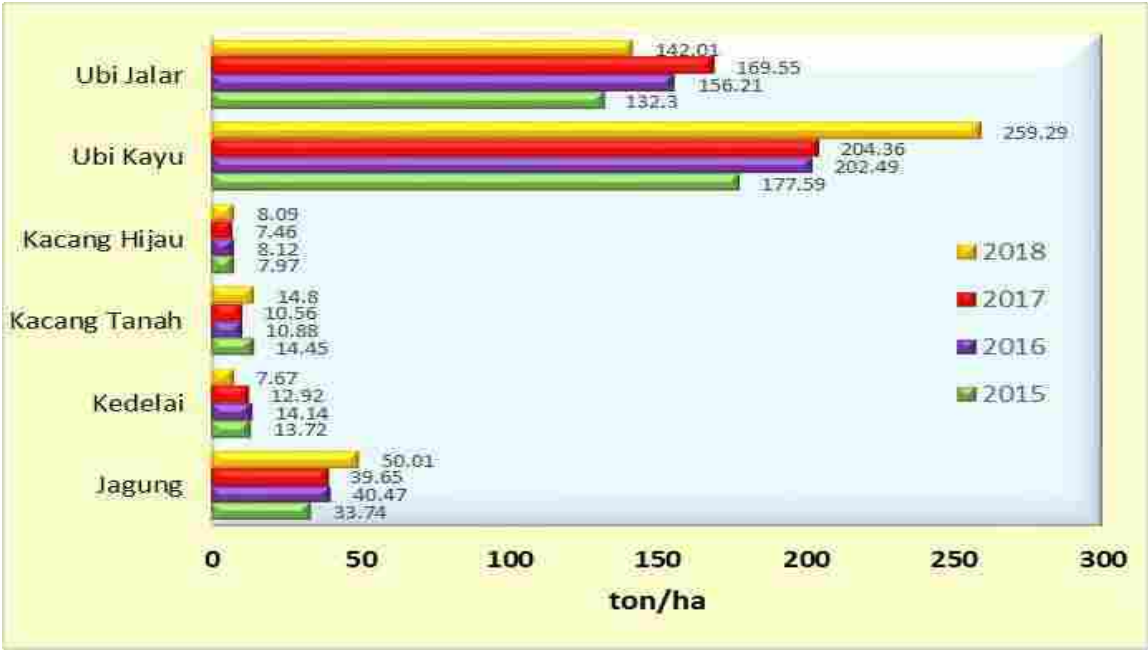
Peningkatan/penurunan produksi tanaman palawija pada tahun 2015 umumnya disebabkan oleh penambahan/penurunan luas panen. Produksi tanaman palawija terbanyak dipegang oleh tanaman ubi kayu, sedangkan yang paling sedikit adalah tanaman kacang hijau. Adapun produktivitas tanaman tertinggi dan terendah, juga dipegang oleh tanaman ubi kayu dan tanaman kacang hijau, dengan tingkat produktivitas masing-masing sebanyak 178 kw/ha dan 8 kw/ha.

Tabel 2.104
Statistik Tanaman Pangan Banten Tahun 2015-2018

JENIS TANAMAN	2015	2016	2017	2018
PADI				
- Luas Panen (000 Ha)	399.334	399.334	415.687	334.839
- Produksi (000 Ton)	2.300.595	2.300.595	2.369.731	1.643.046
- Produktivitas (Kw/Ha)	57,61	57,61	57,01	4,91
JAGUNG				
- Luas Panen (000 Ha)	3.518	4.913	16.018,00	66.356
- Produksi (000 Ton)	11.870,02	19.882	63.518,00	331.865,38
KEDELAI				
- Luas Panen (000 Ha)	5.316	2.844	1.646,00	23.594
- Produksi (000 Ton)	7.291,13	4.020	2.126,00	18.093,56

JENIS TANAMAN	2015	2016	2017	2018
KACANG TANAH				
- Luas Panen (000 Ha)	7.614	7.741	5.422,70	4.174
- Produksi (000 Ton)	11.003,34	8.419	5.726,67	6.178,18
KACANG HIJAU				
- Luas Panen (000 Ha)	680	532	295,80	347
- Produksi (000 Ton)	541.89	432	220,70	281,18
UBI KAYU				
- Luas Panen (000 Ha)	4.176	4.476	3.694,00	3.187
- Produksi (000 Ton)	74.162,60	90.629	75.486,00	82.641,95
UBI JALAR				
- Luas Panen (000 Ha)	1.523	1.553	1.222,00	1.160
- Produksi (000 Ton)	20.149,91	24.255	20.724,00	16.470,53

Sumber : SIPD Provinsi Banten



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.36
Produktivitas Tanaman Palawija Banten (Ribuan Ton)
Tahun 2015- 2018

Sedangkan Komoditas tanaman hortikultura yang dikembangkan di Provinsi Banten meliputi tanaman Buah Golden Melon dari Kota Cilegon dan Serang, Jambu Citra dari Anyer Kabupaten Serang, Tanaman Buah Naga di Baros Kabupaten Serang, Bunga Anggrek di Kota Tangerang Selatan dan Kota Serang.

Untuk Produksi sayur-sayuran menunjukkan peningkatan yang cepat terutama sayuran dataran rendah, dengan komoditas andalannya jamur, petai, kacang panjang dan cabe besar.

Tabel 2.105
 Produktivitas Tanaman Sayuran Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Sayuran di Provinsi Banten Tahun 2017 (kuintal/Hektar)

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2017				
		Bawang	Cabai	Kentang	Kubis	Petai
1	Kab. Pandeglang	12	565	-	1	104
2	Kab. Lebak	2	378	-	-	9
3	Kab. Tangerang	14	49	-	-	364
4	Kab. Serang	245	433	-	-	347
5	Kota Tangerang	-	-	-	-	320
6	Kota Cilegon	-	32	-	-	8
7	Kota Serang	1	48	-	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	70	-	-	65
Provinsi Banten		273	1.575	-	-	1.217

No	Kabupaten/Kota	Tahun 2018				
		Bawang	Cabai	Kentang	Kubis	Petai
1	Kab. Pandeglang	15	666	-	-	69
2	Kab. Lebak	1	329	-	-	24
3	Kab. Tangerang	13	56	-	-	393
4	Kab. Serang	106	4255	-	-	299
5	Kota Tangerang	-	3	-	-	294
6	Kota Cilegon	-	29	-	-	3
7	Kota Serang	2	77	-	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	-	53	-	-	35
Provinsi Banten		137	1.575	-	-	1.217

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Perbedaan potensi dan masalah komoditas pertanian unggulan di setiap wilayah mengakibatkan terbentuknya pola aliran komoditas (commodity flows) yang memperlihatkan adanya hubungan keterkaitan antar wilayah. Dalam hal ini hubungan koleksi dan distribusi komoditas pertanian unggulan, di suatu wilayah ada yang menjadi daerah pemasaran dan sekaligus juga sebagai daerah produksi, ataupun salah satu diantaranya.

Tabel 2.106
 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Sayuran dan Buah-buahan Semusim Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Tanaman	Tahun 2017			Tahun 2018	
	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)	Produktivitas (Kwinta/ha)	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)
Bawang Daun	64	299,90	46,86	86	459
Bawang Merah	273	994,10	36,41	137	880
Bawang Putih	-	-	-	0	-
Bayam	1.628	9.423,60	57,88	1 578	10.021
Blewah	2	-	2,00	0	-
Buncis	50	223,60	44,72	29	136
Cabai Besar	969	6.464,20	66,71	896	6.712
Cabai Rawit	606	4.571,80	75,44	572	5.225

Jenis Tanaman	Tahun 2017			Tahun 2018	
	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)	Produktivitas (Kwinta/ha)	Luas Panen (ha)	Prouksi (ton)
Jamur	17.436	13.925,00	7,99	13 226	16.456
Kacang Merah	3	3,20	10,67	0	-
Kacang Panjang	1.577	13.142,40	83,34	1 393	13.977
Kangkung	1.841	11.649,20	63,28	1 820	12.008
Kembang Kol	4	7,30	18.25	3	3
Ketimun	1.776	12.906,90	72,67	1 441	14.064
Kubis	1	1,40	14,00	0	-
Labu Siem	25	349,70	139,88	14	110
Lobak	1	0,50	5,00	0	-
Melon	26	106,50	40,96	28	82
Petsai/Sawi	1.217	8.132,80	66,83	1 117	8.535
Semangka	101	1.039,00	102,87	102	951
Terung	674	5.837,80	86,61	565	5.999
Tomat	214	1.016,80	47,51	163	783
Wortel	42	167,10	39,79	45	355

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.107
 Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Buah buahan dan Sayuran Tahunan Menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Tanaman	Luas Panen (pohon)	Produksi (ton)	Produktivitas (kg/pohon)
Alpukat	8.775	13.488	153,71
Belimbing	12.560	11.576	92,17
Duku	10.081	5.045	50,04
Durian	289.038	226.280	78,29
Jambu Air	31.234	25.277	80,93
Jambu Biji	39.797	20.717	52,06
Jengkol	50.759	17.920	35,30
Jeruk Besar	762	805	105,64
Jeruk Siam	9.328	4.860	52,10
Mangga	251.148	183.630	73,12
Manggis	265.897	129.443	48,68
Markisa	271	153	56,46
Nangka	37.878	33.990	89,74
Nanas	25.717	2.184	8,49
Pepaya	112 179	79 478	70,85
Petai	65 093	34 945	53,68
Pisang	6 170 823	2 501 903	40,54
Rambutan	173 844	81 542	46,91
Salak	31 904	3 996	12,53
Sawo	12 987	13 547	104,31
Sirsak	50 645	16 248	32,08
Sukun	64 499	31 804	49,31
Melinjo	112 179	79 478	70,85

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Hubungan keterkaitan aliran komoditas pertanian unggulan antar daerah/wilayah di Provinsi Banten, terjadi baik antar daerah internal maupun dengan daerah luar (External region). Interaksi antar wilayah ini terjadi karena adanya saling melengkapi kebutuhan. Di satu daerah ada yang kelebihan produksi (surplus) suatu komoditas, sedangkan daerah lainnya kekurangan

(minus) produksi komoditas tersebut. Berdasarkan fenomena tersebut, maka perlu dilakukan suatu identifikasi pola ruang aliran komoditas pertanian unggulan di Provinsi Banten.

Hal ini baik terasa maupun tidak terasa, cepat atau lambat akan berdampak bagi kelangsungan perkembangan Provinsi Banten.

Tabel 2.108
Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Tanaman Biofarmaka menurut Jenis Tanaman di Provinsi Banten Tahun 2017

Jenis Tanaman	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
Dlingi	5 500	4 100	0,75
Jahe	523 873	1 126 737	2,15
Kapulaga	19 405	43 006	2,22
Keji Beling	5 538	22 222	4,01
Kencur	341 299	493 814	1,45
Kunyit	427 503	813 093	1,90
Laos	1 045 636	3 641 410	3,48
Lempuyang	39 918	47 280	1,18
Lidah Buaya	6 017	7 653	1,27
Mahkota Dewa	3 705	129 857	35,05
Mengkudu	14 812	135 154	9,12
Sambiloto	6 361	10 105	1,59
Temuireng	295	585	1,98
Temukunci	6 498	7 634	1,17
Temulawak	21 275	25 787	1,21

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.109
Produktivitas Tanaman Biofarmaka Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Tanaman di Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017

No	Kabupaten /Kota	Jahe	Laos	Kencur	Kunyit	Lempuyang	Temulawak
1	Kab. Pandeglang	1,69	0,96	0,96	1,32	1,28	1,33
2	Kab. Lebak	2,64	5,54	1,84	3,15	1,79	1,29
3	Kab. Tangerang	1,59	1,68	1,49	1,32	3,00	1,12
4	Kab. Serang	1,79	1,14	1,94	1,87	1,03	1,21
5	Kota Tangerang	3,40	3,58	3,09	2,85	-	3,00
6	Kota Cilegon	5,64	2,10	2,14	4,07	1,00	-
7	Kota Serang	3,26	1,32	2,12	1,35	-	-
8	Kota Tangerang Selatan	1,31	1,62	1,32	1,31	1,66	1,66
	Provinsi Banten	2,15	3,48	1,45	1,90	1,18	1,21

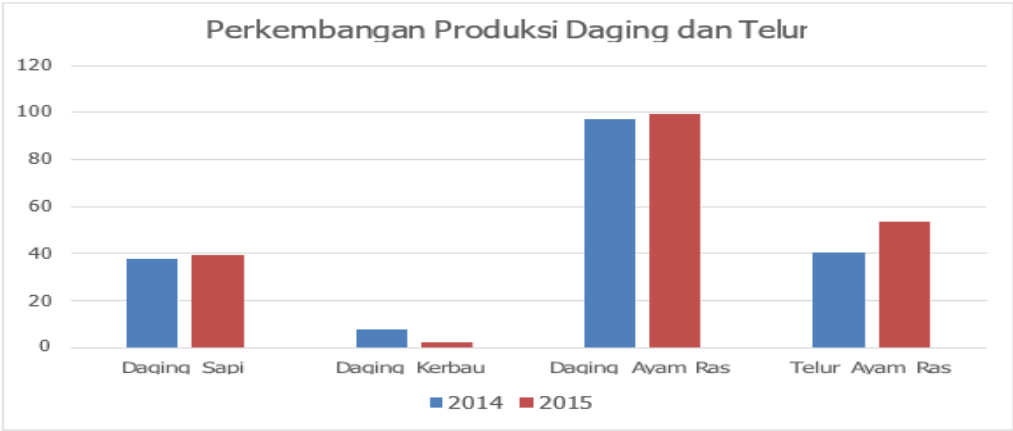
Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.110
Statistik Komoditas Tanaman Unggulan Provinsi Banten Tahun 2017

TANAMAN	SATUAN	2017
Anggrek	Juta Tangkai	40,22
Melinjo	Ton	62,16
Aren	Ton	3 287
Melon	Ton	40,96
Durian	Ton	78,29

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Provinsi Banten juga merupakan salah satu produsen daging dan telur yang sangat potensial dalam skala nasional. Banten menjadi produsen daging sapi terbesar keempat dan produsen daging kerbau nomor sepuluh di Indonesia. Tingkat produksi keduanya pada tahun 2015 masing-masing sebanyak 39 ribu ton dan 2 ribu ton. Sementara sentra produksinya, untuk daging sapi terletak di Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, serta Kota Tangerang Selatan. Adapun daging kerbau di Kabupaten Serang dan Lebak. Selain daging sapi dan kerbau, Banten juga menjadi produsen daging ayam ras terbesar kelima dan produsen telur ayam ras terbanyak kesembilan di Indonesia. Tingkat produksi daging dan telur ayam ras ini masing-masing sebanyak 99 ribu ton dan 53 ribu ton, dengan sentra produksi terdapat di Kota Serang dan Kabupaten Tangerang serta Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang.



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.37
Perkembangan Produksi Daging dan Telur di Provinsi Banten
Tahun 2014-2015 (ribu ton)

Tabel 2.111
Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017-2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017					
		Sapi	Kerbau	Kuda	Kambing	Domba	Babi
1	Kab. Pandeglang	202.334	246.841	-	249.336	179.269	
2	Kab. Lebak	644.271	684.008	-	320.276	228.981	
3	Kab. Tangerang	8.859.678	189.108	-	656.140	969.922	183.939
4	Kab. Serang	1.879.272	1.874.534	-	757.430	719.577	
5	Kota Tangerang	12.854.723	17.474	-	261.592	57.554	419.407
6	Kota Cilegon	487.580	31.952	-	68.634	39.983	
7	Kota Serang	2.210.923	314.081	-	80.901	156.401	
8	Kota Tangerang Selatan	3.138.325	82.517	122	940	531	34
	Provinsi Banten	30.277.105	3.440.515	122	2.395.249	2.352.218	603.380

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.112
 Produksi Daging Ternak Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018		
		Sapi	Kerbau	Kuda
1	Kab. Pandeglang	553 654	164 229	-
2	Kab. Lebak	1 155 003	1 261 855	-
3	Kab. Tangerang	10 415 435	191 324	-
4	Kab. Serang	239 458	2 263 818	-
5	Kota Tangerang	15 077 981	26 763	-
6	Kota Cilegon	1 303 251	34 505	-
7	Kota Serang	2 279 275	41 804	-
8	Kota Tangerang Selatan	4 676 067	110 713	-
	Provinsi Banten	35 700 124	4 095 011	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.113
 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2017			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1	Kab. Pandeglang	270.098	10.378	1.058.261	5.009
2	Kab. Lebak	2.088.460	68.680	8.256.104	74.014
3	Kab. Tangerang	1.501.968	2.942.775	28.929.924	166.128
4	Kab. Serang	883.394	1.134.658	12.022.747	704.265
5	Kota Tangerang	5.875.599	58.587	23.669.552	211.687
6	Kota Cilegon	52.421	-	10.299.898	2.719
7	Kota Serang	340.419	303.462	3.711.790	30.054
8	Kota Tangerang Selatan	50.174	83.000	109.092	2.950
	Provinsi Banten	11.062.533	4.601.540	88.057.369	1.196.826

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.114
 Produksi Daging Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
 Provinsi Banten (Kg) Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Tahun 2018			
		Ayam Kampung	Ayam Petelur	Ayam Pedaging	Itik
1	Kab. Pandeglang	487.407	0	8.321.833	11.285
2	Kab. Lebak	1.742.338	56.569	7.622.181	73.298
3	Kab. Tangerang	876.806	2.588.332	34.261.894	108.791
4	Kab. Serang	60.516	31.482	20.177.083	60.050
5	Kota Tangerang	323.454	41.469	25.841.222	44.511
6	Kota Cilegon	26.780	-	305.671	3.613
7	Kota Serang	86.409	34.255	3.919.398	5.734
8	Kota Tangerang Selatan	72.443	71.001	24.080.545	145.122,73
	Provinsi Banten	3.676.152	2.823.108	124.529.829	452.404

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.115
Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
Provinsi Banten (Kg) Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Tahun 2017			
	Ayam Kampung	Ayam Telur	Itik	Itik Manila
Kab. Pandeglang	5.173,55	-	1.474,42	-
Kab. Lebak	1.266,61	1.244,19	429,48	160,18
Kab. Tangerang	4.528,54	36.867,75	3.085,04	446,43
Kab. Serang	4.005,47	5.600,55	3.229,43	-
Kota Tangerang	131,54	-	171,04	84,25
Kota Cilegon	74,39	6,80	71,23	-
Kota Serang	76,34	5.848,13	12,87	16,30
Kota Tangerang Selatan	61,35	1.427,18	23,19	-
Provinsi Banten	15.317,79	50.994,59	8.496,69	707,16

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.116
Produksi Telur Unggas Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Ternak di
Provinsi Banten (Kg) Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Tahun 2018			
	Ayam Kampung	Ayam Telur	Itik	Itik Manila
Kab. Pandeglang	3.630,62	2.659,55	13,33	58,33
Kab. Lebak	1.230,55	1.257,14	369,72	167,27
Kab. Tangerang	4.646,28	37.520,11	3.165,25	458,04
Kab. Serang	3.960,85	36.865,00	2.504,87	-
Kota Tangerang	88,06	-	162,58	-
Kota Cilegon	95,84	6,34	72,84	-
Kota Serang	517,71	656,54	97,06	130,77
Kota Tangerang Selatan	84,04	1.007,98	24,95	-
Provinsi Banten	14.253,95	79.972,66	6.410,61	814,40

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.3.4 Kehutanan

Produksi hasil hutan yang berupa kayu di Provinsi Banten pada tahun 2017 berupa kayu bulat sebanyak 17,56 ribu m3 yang terdiri dari kayu jati dan kayu rimba. Produksi kayu jati pada tahun 2017 sebesar 11,69 ribu m3, dengan nilai produksi 27,89 miliar rupiah, sedangkan produksi kayu rimba sebesar 5,86 ribu m3 dengan nilai 1,95 miliar rupiah.

Tabel 2.117
Luas Kawasan Hutan dan Perairan Menurut Kabupaten/Kota (Ha)
Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam Dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi			Jumlah Luas Hutan Dan Perairan
			Terbatas	Tetap	Dapat Dikon versi	
Pandeglang	429.846	107.290,36	7.059,00	2.645.604	-	14.510.386
Lebak	332.476	32.014,00	2.843.554	1.688.370	-	80.658
Kab. Tangerang	160.160	-	-	-	-	160.160
Kab. Serang	71.714	631.035	408.836	94.309	-	1.205.894
Kota Tangerang	-	-	-	-	-	-
Kota Cilegon	45.482	-	-	24.428	-	69.910
Kota Serang	-	3.285	-	17.752	-	21.037
Kota Tangerang Selatan	-	-	-	-	-	-
Total	1.039.678	14.564.756	3.958.290	4.470.463	-	24.033.187

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.118
Tabel 2.119. Produksi Kayu Hutan Menurut Jenis Produksi di
Provinsi Banten Tahun 2012–2018 (m³)

Tahun	Kayu Bulat	Kayu Gergajian	Kayu lapis
2012	34.777,28	--	-
2013	30.010,20	--	-
2014	29.812,93	-	-
2015	29.888,11	-	-
2016	5.324,12	-	-
2017	17.559,87	-	-
2018	21.542,57		

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Tabel 2.119
Produksi Kayu Jati dan Kayu Rimba Tahun 2012-2018

Tahun	Kayu jati		Kayu Rimba	
	Produksi (m3)	Nilai Produksi (Rp)	Produksi (m3)	Nilai Produksi (Rp)
2012	12.101,84	23.515,00	22.675,44	12.115,00
2013	14.311,89	23.338,00	15.698,31	6.407,00
2014	8.725,10	19.015,00	21.087,83	14.130,00
2015	14.640,29	47.917,00	15.247,82	15.864,00
2016	2.192,24	4.671,00	3.131,88	1.855,00
2017	11.694,52	27.886,79	5.865,35	1.951,57
2018	14.178,38	22.963,48	7.364,19	2.272,87

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

2.3.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pada tahun 2017, jumlah perusahaan pertambangan di Provinsi Banten sebanyak 203 perusahaan, dimana yang terbanyak adalah perusahaan pertambangan andesit, pasir laut, dan pasir darat. Dilihat dari luas wilayah penambangannya, bahan tambang jenis pasir laut memiliki wilayah terluas, yaitu sebesar 38,39 ribu ha. Sementara itu, dari jumlah produksinya, andesit memiliki produksi terbesar yaitu 2,66 juta m3.

Tabel 2.120
 Luas Wilayah Pertambangan Menurut Jenis Bahan Tambang di Provinsi
 Banten (Ha) Tahun 2015-2017

No	Jenis Bahan Tambang	2015		2016		2017	
		m3	Ton	m3	ton	m3	Ton
1	Batu Bara	-		-	320,29	-	320,29
2	Emas	-		-	30	-	0,59
3	Perak	-		-	-	-	4,17
4	Andesit	2.707.742		1.490.039	-	2.657.506,18	-
5	Zeolit	-		-	-	750	-
6	Galena	-		21.856	-	-	-
7	Pasir Darat	422.754		2.500.090	-	649.945	-
8	Pasir Kuarsa	194.368		217.089	-	209.275,1	-
9	Pasir Kali (sungai)	-		-	-	-	-
10	Bentonit	-		29.076	-	-	-
11	Tanah Liat	-		-	-	-	-
12	Tanah Urug	63.255		-	-	681.718	-
13	Batu Gamping	1.465.396		-	-	1.457.836,8	-
14	Tras	16.497		119.287	-	-	-
15	Pasir Besi	-		-	-	-	-
16	Pasir Laut	13.041.391		7.902.666	-	373.500	-
17	Makadam	-		-	-	-	-
18	Feidspar	500		-	-	-	-
19	Breksi Tufaan	-		-	-	-	-
20	Seng/Zn	-		-	-	-	-
21	Mangan	-		-	-	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Pada aspek infrastruktur listrik dan energi, tingkat keberhasilan penanganan listrik dapat dilihat dari rasio elektrifikasi desa dan rumah tangga, sektor listrik menjadi salah satu sektor yang strategis bukan saja untuk Banten tapi juga untuk Jawa-Bali. Dari sisi supply, di Banten terdapat dua pembangkit listrik yang masuk dalam jaringan listrik koneksi Jawa-Bali, yaitu PTLU Suralaya di Kota Cilegon yang dikelola oleh PT Indonesia Power dan PLTU Labuan di Kabupaten Pandeglang. Dari sisi demand, distribusi atau penjualan listrik PLN di Banten dilakukan oleh PT PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dan PT PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten.

Tabel 2.121
 Sumber Utama penerangan Rumah Tangga Tahun 2017

Sumber Utama Penerangan			
Kabupaten/ kota	Listrik	Bukan Listrik	Jumlah
Kabupaten			
Pandegalang	99,84	0,16	100,00
Lebak	99,75	0,25	100,00
Tangerang	100,00	0,00	100,00
Serang	100,00	0,00	100,00

Sumber Utama Penerangan			
Kabupaten/ kota	Listrik	Bukan Listrik	Jumlah
Kota			
Tangerang	100,00	0,00	100,00
Cilegon	100,00	0,00	100,00
Serang	99,82	0,18	100,00
Tangerang Selatan	100,00	0,00	100,00
Provinsi Banten	99,95	0,05	100,00

Sumber: SIPD Provinsi Banten 2018

Diterapkannya kebijakan konversi bahan bakar dari minyak tanah ke gas pada tahun 2007 telah memunculkan berbagai permasalahan di tingkat masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energinya. Di Banten, implementasi kebijakan tersebut dihadapkan pada ketidaksiapan adaptasi sistem institusi (produsen dan distributor) dan teknologi (mencakup stasiun pengisian, tabung dan kompor gas, kendaraan pengangkut) di dalam mengantisipasi perubahan dan ketidakpastian yang dimunculkannya. Di tingkat masyarakat dan dunia usaha, pilihan adaptasi terhadap bahan bakar pengganti di dalam merespon kebijakan konversi bahan bakar minyak juga ditentukan oleh pontensi ketersediaan energi alternatif di tingkat lokal. Jenis-jenis energi alternatif akan menjadi pilihan manakala memiliki tingkat biaya ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan bahan bakar gas. Sumber energi alternatif dan penyediaannya perlu dihadirkan untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dan dunia usaha di dalam memenuhi kebutuhan energi sesuai dengan kapasitas adaptasi ekonomi dan budaya yang dimilikinya.

Tabel 2.122
 Realisasi Penjualan Gas Kota Triwulanan di Provinsi Banten
 Tahun 2009 s.d Tahun 2017

Tahun	Triwulan				Jumlah
	I	II	III	IV	
2009	306.400.862	301.589.707	321.949.580	344.344.700	1.274.287.849
2010	415.427.341	398.114.512	420.491.718	440.800.790	1.674.834.361
2011	394.972.658	397.275.300	413.582.906	451.887.088	1.657.717.952
2012	408.684.818	403.345.700	435.750.977	408.425.545	1.656.207.040
2013	363.990.947	385.858.980	375.381.161	419.485.517	1.517.716.605
2014	407.173.104	430.603.933	389.784.806	423.063.576	1.650.625.419
2015	410.337.224	386.537.692	403.030.991	419.104.492	1.619.010.401
2016	394.256.619	385.010.685	339.414.335	347.059.780	1465741419
2017	332.449.891	349.581.054	351.726.889	358.445.347	1.329.203.181

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

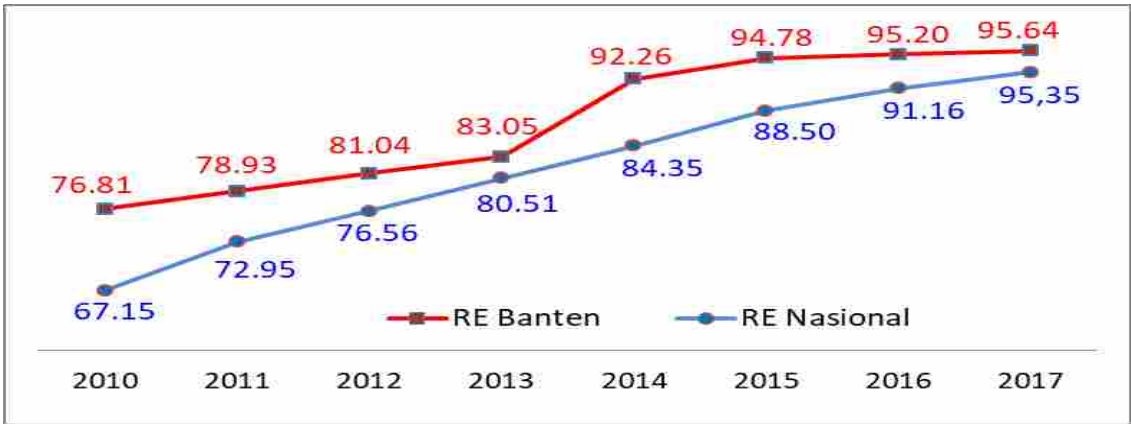
Pada tahun 2017, jumlah pelanggan listrik di wilayah Provinsi Banten sebanyak 2,93 juta pelanggan, dengan daya tersambung sebesar 9,90 juta kVA dan energi yang terjual sebesar 21,68 juta MWh.

Tabel 2.123
Jumlah Pelanggan, Daya Tersambung dan Energi Terjual
Perusahaan Listrik Negara (PLN) Menurut Jenis Tarif
di Provinsi Banten Tahun 2017

No	Klasifikasi	Jumlah Pelanggan	Daya Tersambung (kVA)	Energy Terjual (MWh)
1	Sosial	52.711	177.958	261.901
2	Rumah Tangga	2.711.966	2.686.734	4.599.679
3	Bisnis	150.570	1.632.983	2.599.679
4	Industri	6.324	5.193.554	2.520.949
5	Pemerintahan	9.548	148.378	13.623.275
6	lainnya	1.462	64.299	238.722
Jumlah		2.932.581	9.903.905	21.681.470

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Perkembangan rasio elektrifikasi dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Rasio elektrifikasi Banten tahun 2017 telah mencapai 95,64%, namun dengan distribusi yang belum merata, dan sebanyak 132.762 rumah tangga belum berlistrik.



Sumber : SIPD Provinsi Banten 2017

Gambar 2.38
Perkembangan Rasio Elektrifikasi di Banten Tahun 2010-2017

Tabel 2.124
Perkembangan Rasio Elektrifikasi (RE) Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Banten Tahun 2017

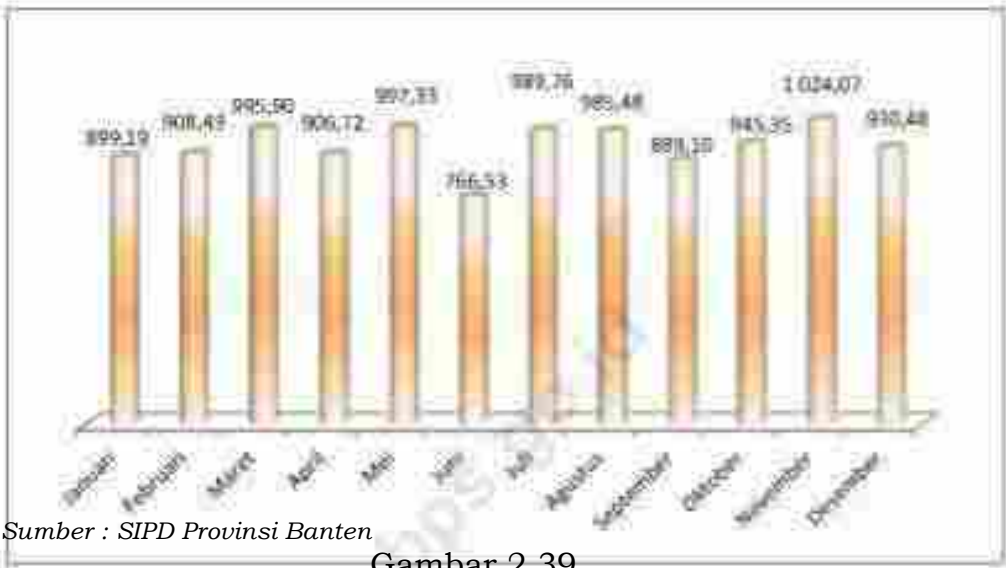
Kabupaten/kota	Rasio Elektrifikasi (%)	Rumah Tangga Belum Berlistrik
Kabupaten		
Pandeglang	86,47	38.292
Lebak	86,20	43.111
Tangerang	96,96	26.642
Serang	93,95	20.604
Kota		

Kabupaten/kota	Rasio Elektrifikasi (%)	Rumah Tangga Belum Berlistrik
Tangerang	99,99	16
Cilegon	98,87	1.149
Serang	98,31	2.462
Tangerang Selatan	99,88	486
Provinsi Banten	95,64	132.762

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

2.3.2.6. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan potensi yang besar untuk dikembangkan. Nilai ekspor Provinsi Banten tahun 2017 sebesar US\$11,24 miliar, naik 20,49 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar US\$9,33 miliar. Sektor industri pengolahan memberikan kontribusi terbesar pada ekspor Provinsi Banten, yaitu sebesar US\$10,97 miliar (97,68%), sementara sisanya berasal dari sektor pertanian US\$233,58 juta (2,08%), migas US\$24,75 juta (0,22%), serta pertambangan dan lainnya US\$2,49 juta (0,02%). Nilai impor Provinsi Banten tahun 2017 sebesar US\$11,03 miliar, naik 29,53 persen dibandingkan nilai impor tahun sebelumnya yang sebesar US\$8,51 miliar. Sebagian besar impor tersebut berupa bahan baku dan barang penolong sebesar US\$10,49 miliar (95,10%), sedangkan sisanya berupa barang modal US\$299,69 juta (2,72%) dan barang konsumsi US\$240,37 juta (2,18%).



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.39
 Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Bulan (juta US\$) Tahun 2017

Tabel 2.125
 Neraca Perdagangan Luar Negeri Provinsi Banten (juta US\$)
 Tahun 2014-2018

Tahun	Nilai Ekspor	Nilai Impor	Ekspor Neto
2014	10.231,20	12.180,91	-1.949,71
2015	9.046,27	9.851,99	-805,72
2016	9.326,94	8.512,21	814,73
2017	11.238,39	11.025,96	212,43
2018			
Januari	992,29	990,29	2,00
Februari	894,23	978,31	-84,08
Maret	987,87	892,55	95,32
April	1.012,35	1.163,7	-151,35
Mei	1.147,37	1.210,31	-62,94
Juni	731,75	851,38	-119,63

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2018

Tabel 2.126
 Nilai Ekspor Provinsi Banten Menurut Jenis Produk (juta US\$)
 Tahun 2016-2017

Jenis Produk	Nilai Ekspor	
	2016	2017
Migas	38,96	24,75
Pertanian	186,4	233,58
Industri Pengolahan	9.099,16	10.977,57
Pertambangan dan lainnya	2,39	2,49

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.127
 Nilai Impor Provinsi Banten Menurut Golongan Penggunaan Barang
 (juta US\$) Tahun 2016-2017

Penggunaan Barang	Nilai impor	
	2016	2017
Barang Konsumsi	217,46	240,37
Bahan Baku dan bahan Penolong	8.013,24	10.485,89
Barang Modal	281,51	299,69
Jumlah	8.512,21	11.025,96

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.2.7. Perindustrian

Pada tahun 2016, di Provinsi Banten terdapat 1.862 perusahaan industry besar dan sedang, dengan tenaga kerja sebanyak 514.462 orang. Nilai produksi yang dihasilkan pada tahun 2015 adalah sebesar 440,20 trilyun rupiah.

Tabel 2.128
 Jumlah Perusahaan Industri Besar dan Sedang
 Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016

KABUPATEN/KOTA	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Produksi (Ribu Rupiah)
Kab Pandeglang	11	757	178.328.841
Kab Lebak	23	3.655	1.241.720.966
Kab Tangerang	757	182.308	116.639.653.649
Kab Serang	184	82.343	58.507.799.094
Kota Tangerang	638	189.036	129.137.886.793
Kota Cilegon	79	22.386	125.403.394.171
Kota Serang	25	1.175	229.704.749
Kota Tangerang Selatan	145	32.802	8.858.684.095
Provinsi Banten	1.862	514.462	440.197.172.358

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.3.4. Urusan Penunjang

2.3.4.1. Perencanaan Pembangunan

Pemerintah daerah wajib menyusun perencanaan pembangunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten menyusun perencanaan pembangunan dengan pendekatan money follow program. Dengan demikian diharapkan pendekatan penganggaran akan lebih fokus pada pembiayaan belanja daerah dalam kegiatan perangkat daerah dapat memberikan dampak yang signifikan kepada masyarakat serta mendukung prioritas nasional.

Pendekatan money follow program mendukung perencanaan yang holistik tematik yaitu penanganan secara menyeluruh dan terfokus pada kegiatan yang relevan dengan pencapaian tujuan program prioritas, terintegrasi yaitu keterpaduan seluruh kegiatan yang saling memperkuat dan selaras dalam mencapai sasran prioritas nasional, dan spasial yaitu kegiatan prioritas yang direncanakan berdasarkan data dan informasi yang baik serta lokasi yang jelas sehingga memudahkan proses integrasi dan pemantauan di lapangan.

Tabel 2.129
Jumlah Kegiatan Belanja Langsung dalam APBD
Provinsi Banten Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kegiatan
1	2014	939
2	2015	1047
3	2016	1467
4	2017	1191
5	2018	1257

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Pada Tahun 2014 Provinsi Banten pernah mendapatkan penghargaan anugerah pangripta nusantara kategori A tingkat provinsi terbaik ketiga, yang pada saat ini berganti nama menjadi penghargaan pembangunan daerah. Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah maka Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem perencanaan terpadu yang terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem monitoring evaluasi. Hal ini untuk menjaga konsistensi dan transparansi dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

2.3.4.2. Keuangan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

Penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan salah satu parameter dari kualitas pengelolaan keuangan di kementerian/lembaga maupun di level pemerintah daerah. Pada Tahun 2017, Pemerintah Provinsi Banten telah meraih opini BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini dapat dianalisa sebagai salah satu upaya yang signifikan Pemerintah Provinsi Banten dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.

Tabel 2.130
 Penilaian BPK Terhadap APBD Provinsi Banten

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Opini BPK	Wajar Dengan Pengecualian (WDP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Pemerintah Provinsi Banten sejak Tahun 2017 telah menggunakan sistem aplikasi terpadu antara *e-planning*, *e-budgeting* dan *e-monev*. Hal ini diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah.

2.3.4.3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, mengubah paradigma manajemen kepegawaian, dari administrasi pegawai menjadi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam paradigma baru manajemen ASN memandang perlu ada perubahan dalam pengelolaan ASN, dari perspektif lama manajemen kepegawaian yang menekankan pada hak dan kewajiban individual pegawai menuju pespektif baru yang menekankan pada manajemen pengembangan SDM secara strategis.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota dipindahkan ke provinsi. Dengan demikian Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten, ASN tenaga pendidik dan kependidikan SMA/SMK dan sederajat dari Kabupaten/Kota pindah status ke Provinsi sejumlah 5.909 Orang. Pemerintah Provinsi Banten mempunyai jumlah ASN yang cukup memadai, yakni 10.284 orang termasuk dengan tenaga pendidik dan kependidikan. Hal ini merupakan potensi *human capital* yang strategis dalam optimalisasi penyelenggaraan pemerintah daerah



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.40

ASN Provinsi Banten Berdasarkan Golongan Ruang, termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun 2017



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.41

Provinsi Banten Berdasarkan Tingkat Pendidikan termasuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan Tahun 2017

Berdasarkan grafik di atas Jumlah ASN Pemerintah Provinsi Banten yang besar di golongan III, hal ini diperlukan strategi yang tepat sehingga potensi tersebut dapat optimal dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Banten. Dan berdasarkan grafik 2. Tingkat pendidikan ASN Banten jumlahnya besar pada tingkat s1 dan s2, hal ini merupakan potensi yang memadai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan ASN yang sesuai dengan bidangnya. Pemerintah Provinsi belum menyusun rencana pengembangan kompetensi ASN atau *Human Capital Development Plan* (HCDP). Hal ini diperlukan untuk

mengoptimalisasikan kualitas kompetensi ASN Provinsi Banten sehingga dapat mendukung secara signifikan dalam mewujudkan *good governance*.

Tabel 2.131
Rekapitulasi Diklat Struktural dan Diklat Prajabatan

NO	NAMA DIKLAT	JUMLAH ALUMNI						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	TOTAL
Diklat Struktural Bagi PNS Daerah								
1	Diklat Kepemimpinan Tingkat III	40	40	40	40	40	-	200
2	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV	160	118	80	40	40	40	478
3	Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk. III	62	115	140	142	200	99	758
4	Fasilitasi Pola Kontribusi Diklatpim Tk. IV	154	120	180	322	560	480	1816
Diklat Prajabatan Bagi CPNS Daerah Se-Provinsi Banten								
1	Diklat Prajabatan Gol III	214	108	-	66	90	-	478
2	Diklat Prajabatan Gol II K1/K2	-	-	-	349	-	-	349
3	Diklat Prajabatan Gol III K2/K2 Pola Kontribusi	-	-	-	1468	800	-	2268
4	Diklat Prajabatan Gol II K1/K2 Pola Kontribusi	-	-	-	1420	800	-	2220
5	Diklat Prajabatan Gol II	74	158	-	-	53	-	285
6	Diklat Prajabatan K1/K2 Pola Kontribusi	-	-	-	-	360	-	360
JUMLAH		704	659	440	3847	2943	619	9212

Sumber Data : SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel 2.123 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Banten telah menyelenggarakan diklat struktural dan diklat prajabatan bagi ASN Provnsi Banten sesuai dengan analisis kebutuhan diklat. Dengan diterapkannya Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2018 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, BPSDM Provinsi Banten dalam menyelenggarakan diklat harus berdasarkan pada analisis peningkatkan kompetensi ASN sesuai dengan kelas jabatannya.

2.3.4.4. Penelitian dan Pengembangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang “Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang “Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan”, memberikan arahan kepada pemerintah dan pemerintah daerah, berkaitan dengan upaya menata, mengatur, dan menghasilkan teknologi, yang lebih bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat dan dunia usaha.

Peran penting penelitian dan pengembangan dalam melahirkan inovasi menjadi kata kunci bagi peningkatan daya saing bangsa atau wilayah. Peraturan Pemerintah nomor 38/2017 tentang Inovasi Daerah diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah untuk dapat menciptakan kondisi lingkungan ideal bagi tumbuh kembangnya inovasi. Letak strategis provinsi Banten sebagai penyangga ibu kota dan penghubung Pulau Jawa dan Sumatera hanya akan menjadi keunggulan komparatif jika tidak disertai inovasi. Karenanya keberadaan lembaga penelitian yang ada di wilayah Provinsi Banten seperti halnya PUSPIPTEK (Pusat Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dengan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimilikinya akan menjadi capital lebih bagi provinsi ini untuk meningkatkan daya saingnya. Sumber daya Litbang di Provinsi Banten juga diwanai dengan banyaknya perguruan tinggi swasta ternama seperti Universitas Pelita Harapan, Swiss German University, Universitas Multi Media Nusantara atau pun perguruan tinggi lainnya yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Pelaksanaan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan hendaknya dapat menciptakan wahana untuk kolaborasi berbagai sumber daya Iptek tersebut.

Tabel 2.132
Data Jumlah Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta
di Provinsi Banten

No	Perguruan Tinggi	Jumlah
1	Universitas	24
2	Sekolah Tinggi	53
3	Institut	2
4	Politeknik	4
5	Akademi	30
	Jumlah	167

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Permasalahan inovasi juga tidak dipahami sebatas penggunaan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah produk. Persoalan inovasi juga dapat digunakan untuk menjawab berbagai kendala bisnis proses yang mungkin dijumpai dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan. Paradigma tata kelola pemerintahan pasca reformasi yang memberikan ruang lebih bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan melahirkan tuntutan Inovasi pelayanan public yang dapat dilahirkan melalui pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan

2.3.4.5. Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi pengawasan internal merupakan bagian tak terpisah dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja pengawasan internal, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan arahan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektifitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Untuk itu, APIP harus terus melakukan perubahan dalam menjalankan fungsinya guna memberi nilai tambah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini sejalan dengan peran pengawasan internal untuk mendorong peningkatan efektivitas manajemen risiko (risk management), pengendalian (control) dan tata kelola (governance) organisasi. APIP juga mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pengawasan diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai, melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Tabel 2.133
Capaian Kinerja Pengawasan Pemerintah Provinsi Banten

Uraian	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Nilai Maturitas SPIP	2	2	3
Nilai Kapabilitas APIP	1	1	2

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan Tabel 2.125 Kinerja pengawasan Provinsi Banten dari tahun ke tahun meningkat kualitasnya. Hal ini perlu menjadi komitmen antar pemangku kepentingan dalam rangka peningkatan kinerja pengawasannya dalam rangka mewujudkan *clean government* dan *good governance* di Pemerintah Provinsi Banten.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Perkapita

Gambaran tingkat kemampuan ekonomi daerah tentang Pengeluaran Rata-rata Konsumsi Rumah Tangga per Kapita sebulan menurut Kelompok Barang Pangan/Non Pangan di Provinsi Banten dapat dilihat dari kebutuhan kalori masyarakat. Dari tabel ini terlihat bahwa konsumsi pangan yang beragam belum bisa dicapai, sumber kalori utama masyarakat sangat tergantung pada padi-padian, akibatnya tingkat ketersediaan pangan daerah, menjadi salah satu indikator yang dibutuhkan untuk menjaga stabilitas daerah, disamping juga distribusi.

Rata-rata konsumsi kalori di Provinsi Banten tahun 2017 adalah sebanyak 2.249,33 kilo kalori per kapita per hari, naik 5,35 persen dari tahun 2016 yang sebanyak 2.135,13 kilo kalori per kapita per hari.

Tabel 2.134
Rata-rata Konsumsi Kalori per Kapita Sehari
Menurut Kelompok Makanan (kkal) Tahun 2012-2017

Kelompok Makanan	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Padi-padian	882,04	850,36	847,77	871,6	915,06	861,81
Umbi-umbian	15,66	15	14,99	21,85	26,64	37,81
Ikan	42,52	45,16	45,55	42,89	43,76	50,83
Daging	67,87	53,17	57,73	70,2	70,60	87,87
Telur dan susu	47,39	68,05	66,69	70,45	69,16	72,63
Sayuran	33,07	33,44	34,19	25,57	28,23	33,47
Kacang-kacangan	53,75	55,9	55,05	53,75	61,34	60,35
Buah-buahan	30,2	33,46	36,27	39,17	35,02	47,64
Minyak dan lemak	212,58	221,78	233,47	252,8	267,85	262,06
Bahan minuman	59,36	79,21	72,64	81,13	85,20	78,76
Bumbu-bumbuan	17,4	21,34	21,09	8,42	11,38	14,56
Konsumsi lainnya	52,42	62,57	58,2	69,45	68,18	75,78
Makanan dan minuman jadi	303,54	403,78	387,4	460,12	452,69	565,76
Jumlah	1.809,3	1.943,2	1931	2.067,4	2.135,13	2.249,33

Sumber : SIPD Provinsi Banten, 2018 (diolah)

2.4.2. Pemerintahan dan Kelembagaan

2.4.2.1. BUMD Pemerintah Provinsi Banten

Saat ini Pemerintah Provinsi Banten memiliki dua (2) BUMD, yaitu PT Jamkrida Banten dan PT. Banten Global Development. Masing-masing lembaga berupaya untuk mencapai kinerja yang baik agar dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Provinsi Banten dalam bentuk deviden yang disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian untuk meningkatkan PAD perlu dibentuk BUMD dalam rangka pemanfaatan potensi ekonomi daerah.

a. PT Penjaminan Kredit Daerah Banten (PT Jamkrida Banten).

PT Jamkrida Banten merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi Banten yang bergerak dalam bidang usaha penjaminan. PT Jamkrida Banten hadir sebagai implementasi atas regulasi dan apresiasi Pemerintah untuk para pelaku usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sebagaimana tertuang dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Lembaga Penjaminan dan Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perijinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil.

Merespon regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi Banten telah mengeluarkan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Banten dan Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten untuk mendukung pembangunan ekonomi di bidang Koperasi dan UMKM. Pembentukan Jamkrida Banten dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan memperlancar kegiatan usaha sehingga Koperasi dan UMKM dapat membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif.

Adapun tujuan pembentukan Jamkrida Banten adalah:

1. Memberikan jasa penjaminan kredit kepada Koperasi dan UMKM;
2. Memberdayakan Koperasi dan UMKM;
3. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian daerah khususnya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran;
4. Menjaga stabilitas perekonomian melalui terciptanya peluang usaha yang tangguh dan berdaya saing.

5. Meningkatkan penyaluran kredit produktif dan peningkatan LDR dari BPD, Bank Umum dan BPR.

Komposisi saham PT. Jamkrida Banten adalah 51 % (Lima puluh satu persen) Pemerintah Provinsi Banten, dan pemegang saham lainnya paling tinggi 49 %. Yang dimaksud pemegang lainnya adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Warga Negara Indonesia, dan Badan Hukum Indonesia.

Mempertimbangkan rencana usaha perseroan tahun 2016-2020, maka untuk memenuhi volume penjaminan yang terus meningkat diperlukan tambahan modal dari pemegang saham. Oleh karenanya, berdasarkan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB) No : 174, tanggal 31 Agustus 2016 dihadapan Notaris Fachrul Kesuma Dharma, SH Notaris di Kota Serang yang telah disetujui oleh Kementrian Hukum dan HAM Nomor: AHU-0016122.AH.01.02 tanggal 5 September 2016 telah dilakukan perubahan Modal Dasar Perseroan semula sebesar Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah) menjadi Rp. 220.000.000.000,- (dua ratus dua puluh milyar rupiah).

Besarnya modal dasar dihitung dengan mempertimbangkan kebutuhan dan asumsi bahwa modal yang telah disetor dianggap sebagai pemenuhan minimal atas modal dasar yang akan ditetapkan. Pemerintah provinsi Banten telah memenuhi kewajiban/penyertaan modal PT Jamkrida Banten, sebesar Rp. 51.000.000.000,- (lima puluh satu milyar rupiah) sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Daerah Kedalam Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Banten.

Sejak Oktober 2014 – 2015 Jamkrida Banten hanya memberikan penjaminan terhadap lembaga keuangan Bank dan Non Bank yang konvensional, namun dengan memperhatikan perkembangan dan kesempatan pasar yang ada, pada tahun 2016 memutuskan untuk membuka Unit Usaha Syariah.

b. PT Banten Global Development

Perusahaan Daerah Banten Global Development didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

Tujuan pembentukan PT. Banten Global Development adalah untuk:

1. Pengembangan usaha baru yang diawali dengan pembentukan anak perusahaan dalam bentuk sub holding.
2. Menjalin kerjasama dengan mitra penyandang dana yang mempunyai keahlian tertentu untuk pengembangan usaha.
3. Mendapat penugasan khusus.

Penyertaan modal daerah ke dalam BUMD disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.135
Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Sampai Dengan
Tahun 2017

Nama Badan/Lembaga/Pihak Ketiga	Dasar Hukum Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	Jumlah Modal yang telah disertakan sampai dengan Tahun ini
PT. BANK JABAR BANTEN	Perda No.3 Tahun 2007	130.147.464.173
BPR/LPK	Perda No.3 Tahun 2007	10.200.000.000
BPR/LPK	Perda No.4 Tahun 2009	19.412.000.000
PT.BGD	Perda No.1 Tahun 2012	34.961.227.000
PT.PPKD/Jamkrida	Perda No.4 Tahun 2013	51.000.000.000
PT.BGD	Perda No.5 Tahun 2013	614.600.000.000
JUMLAH		860.320.691.173

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Mengacu pada regulasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, dimana BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten dan juga potensi ekonomi daerah yang begitu pesat, sudah seharusnya diantisipasi melalui pembentukan badan usaha milik daerah baru sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banten. Kebijakan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) diselaraskan pada potensi dan karakteristik daerah meliputi bidang keuangan, bidang pertambangan, bidang aneka usaha, bidang infrastuktur, transportasi dan air, serta bidang pariwisata.

Sektor pertanian merupakan salah satu sektor unggulan provinsi Banten yang banyak memberikan kontribusi penyerapan tenaga kerja sebesar

15,28 % (BPS Provinsi Banten, per Agustus 2018). Banyaknya tenaga kerja yang bekerja di sektor tersebut belum diikuti dengan posisi tawar dalam hal pemasaran hasil produksi.

2.4.2.2. Kerjasama Pembangunan Daerah

Pembangunan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 yang mengamanatkan bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama daerah dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektifitas layanan publik serta saling menguntungkan. Kerjasama tersebut diharapkan dapat mengatasi keterbatasan pembiayaan bagi pemerintah disebabkan pembangunan membutuhkan porsi anggaran yang besar, untuk itu skema pembiayaan perlu dirancang sedemikian rupa sehingga target pembangunan pemerintah dapat tercapai dengan baik sesuai dengan perencanaan.

Pemerintah Provinsi Banten memformulasikan bagaimana konsep pembangunan yang direncanakan tidak serta merta mengandalkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten, terdapat juga pendanaan yang bersumber dari kerjasama dengan pihak ketiga, baik itu melalui Program Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan (TJSKBL/CSR) Perusahaan ataupun Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Potensi dukungan kerjasama pendanaan untuk pelaksanaan program pembangunan di Banten yang bersumber dari TJSKBL/CSR dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.136
Daftar BUMD/BUMN/BUMS di Provinsi Banten

BUMN	BUMD	BUMS
1	2	3
PT. Krakatau Steel;	Banten Global Development (BGD);	PT. PT Indosat Ooredoo (Indosat);
PT. Angkasa Pura 2;	Bank Jabar dan Banten (BJB).	PT. XL Axiata.Tbk;
PT. Pelindo 2;	PT. JAMKRIDA Banten	PT. Alam Sutera Tbk;
PT. ASDP;		PT. Ciputra Group;
PT. Pertamina;		PT. Paramount Land;
PT. Indonesian Power;		PT. Lippo Karawaci.Tbk;
PT. PLN;		PT. BSD;
PT. PGN;		PT. Astra Infra Toll Road;
PT. TASPEN;		PT. Perlite Indonesia Abadi;
ASKES;		PT. Krakatau Posco;
BPJS;		PT. Perkasa Jaya Sun;
SUCOPINDO;		PT. Asahimas Chemical;
Jasa Raharja;		PT. Cemindo Gemilang;
Bank Indonesia;		PT. Krakatau Nippon Steel Sumikin;
Bank Republik Indonesia (BRI);		PT. Chandra Asri Petrochemical Tbk;
Bank Tabungan Negara (BTN);		PT. Nippon Shokubai Indonesia;
Bank Negara Indonesia (BNI);		PT. Sulfindo Adiusaha;
Bank Mandiri;		PT. Spinmill Indah Industry;
PT. Pegadaian;		PT. Krakatau Osaka Steel;
PT. Telkomsel;		PT. Merak Energi Indonesia;
PT. Telkom;		PT. NS Bluescope Indonesia;
PT. Antam;		PT. Berkah Manis Makmur;
PT. perhutani;		PT. Indoferro;
PT. Marga Mandalasakti;		PT. Golden Harvest Cocoa Indonesia;

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) salah satu skema kerjasama pembangunan yang melibatkan pihak swasta atau dikenal sebagai Public Private Partnership (PPP).

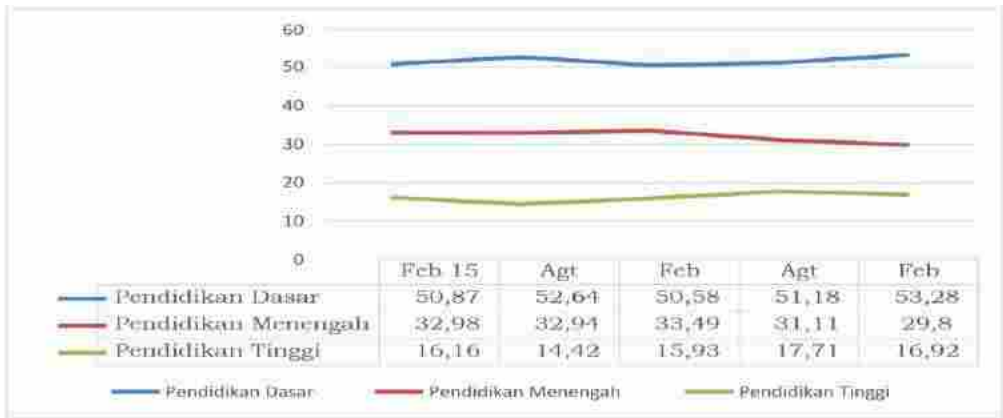
Tabel 2.137
Daftar Rencana Proyek Kerjasama

No	Rencana Proyek
1	Kerjasama pendirian Banten Mangrove Center
2	Kerjasama pengelolaan Situ
3	SPAM Regional
4	Pengelolaan Sampah Terpadu
5	Sport Center Provinsi Banten (KPBU / Non-KPBU)
6	Public facilities terkait pembangunan Tol Serang – Panimbang
7	Public facilities terkait pembangunan Waduk Karian dan Sindang heula

2.4.3. Kondisi keuangan, bisnis dan tenaga kerja

2.4.3.1. Kualitas Tenaga Kerja

Salah satu cara mengukur kualitas tenaga kerja adalah dilihat dari pendidikan yang ditamatkan. Pada saat ini sebagian besar orang yang bekerja di Banten hanya memiliki pendidikan dasar atau setingkat SMP ke bawah. Pada Februari 2017, sekitar 53,28 persen penduduk yang bekerja hanya memiliki pendidikan dasar. Penduduk bekerja yang memiliki pendidikan menengah (setara SMA) sebesar 29,80 persen, dan yang memiliki pendidikan tinggi (Diploma ke atas) sebesar 16,92 persen. Dibandingkan dengan keadaan Februari 2016, penduduk bekerja yang hanya berpendidikan dasar dan menengah mengalami peningkatan. Namun demikian, penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi juga meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja dengan pendidikan tinggi semakin memiliki daya saing yang tinggi di pasar kerja.



Sumber : SIPD Provinsi Banten

Gambar 2.42
Persentase Penduduk Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2015-2017

Berdasarkan daerah desa/kota, terlihat perbedaan yang cukup signifikan data penduduk bekerja berdasarkan tingkat pendidikan. Pada Februari 2017, penduduk bekerja di perkotaan yang hanya berpendidikan dasar sekitar 41,65 persen (1,63 juta orang), berpendidikan menengah sekitar 36,22 persen (1,42 juta orang) dan berpendidikan tinggi sekitar 22,14 persen (867 ribu orang). Di perdesaan, sebanyak 82,00 persen (1,30 juta orang) diantara penduduk bekerja hanya memiliki pendidikan dasar, sementara pekerja dengan pendidikan menengah sekitar 13,97 persen (221 ribu orang) dan pendidikan tinggi hanya sekitar 4,03 persen (64 ribu orang).

Kondisi ini memperlihatkan bahwa dari sisi pendidikan, kualitas penduduk bekerja di perdesaan jauh tertinggal dibandingkan dengan yang di perkotaan. Penduduk bekerja di perdesaan banyak terserap di sektor pertanian, di sektor ini tidak dituntut kualifikasi pendidikan yang tinggi.

Penduduk bekerja menurut pendidikan tidak memperlihatkan komposisi yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada Februari 2017, persentase pekerja perempuan yang berpendidikan rendah lebih besar dibanding yang laki-laki. Hal ini juga terjadi pada tingkat pendidikan tinggi, pekerja perempuan berpendidikan tinggi persentasenya lebih tinggi dibandingkan dengan yang laki-laki yaitu 18,08 persen berbanding 16,25 persen. Hal ini menunjukkan bahwa banyak perempuan yang berpendidikan tinggi dapat mengaplikasikan ilmunya dengan bekerja.

2.4.3.2. Nilai Tukar Petani/Nelayan

Nilai Tukar Petani/Nelayan (NTP/NTN) merupakan perbandingan dari indeks harga yang diterima petani/nelayan (It) dengan indeks harga yang dibayar petani/nelayan (Ib). Selain itu, NTP/NTN biasa digunakan sebagai indikator proxy kesejahteraan petani/nelayan. Pada tahun 2017, rata-rata Nilai tukar Petani sebesar 98,85, dengan rata-rata Indeks Harga yang diterima (It) sebesar 127,49 dan Indeks Harga yang Dibayar (Ib) sebesar 127,79. Pada tahun yang sama NTP tertinggi sebesar 101,54 terjadi di bulan Desember dan terendah di bulan Maret sebesar 98,85.

Tabel 2.138
 Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Banten
 Tahun 2012 – 2017

Bulan	Nilai Tukar Petani (NTP)					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Januari	107.66	110.51	105	105.42	106,61	98,97
Februari	108.61	110.03	105.27	105.19	106,57	97,92
Maret	107.69	109.38	105.59	105.09	104,74	98,19
April	107.25	109.65	105.62	102.79	103,42	98,94
Mei	107.03	109.73	104.23	102.30	102,03	98,86
Juni	107.66	109.70	104.35	103.22	101,54	100,19
Juli	107.53	109.33	104.54	103.28	101,32	99,60
Agustus	108.61	109.29	103.68	103.95	100,25	99,83
September	108.81	109.71	103.74	104.84	100,47	100,69
Oktober	109.51	111.41	104.80	106.07	100,55	101,01
November	109.83	111.88	104.71	107.53	100,30	101,29
Desember	111.07	104.84	105.46	107.45	100,49	101,54

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Jika dilihat secara makro, angka tersebut mencerminkan bahwasanya petani dan nelayan belum bisa hidup layak, dikarenakan nilai NTP/NTN masih dibawah 100, Penanganan yang terstruktur dan terprogram sangat dibutuhkan untuk menjawab persoalan diatas, dikarenakan ini menjadi salah satu sumber kemiskinan di pedesaan dan pesisir. Peningkatan produksi pangan (pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan) harus senantiasa dilaksanakan dengan cara produksi yang baik dan benar dengan memperhatikan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkelanjutan(*sustanaibel recourse*).

2.4.4. Kualitas hidup dan pengembangan infrastuktur

2.4.4.1. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari jaringan infrastruktur transportasi, sumber daya air, irigasi, energi, telekomunikasi, serta sarana dan prasarana permukiman. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah,yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemacu pertumbuhan ekonomi wilayah, serta sebagai interkoneksi wilayah.



Gambar 2.43
 Luas Wilayah Kabupaten/ Kota di Provinsi Banten 2016

2.4.4.2. Transportasi

Infrastruktur transportasi terdiri dari transportasi darat, udara dan laut. Pada aspek transportasi darat, salah satu indikator tingkat keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah meningkatnya tingkat kemantapan dan kondisi jalan.

Tabel 2.139
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelolanya di Provinsi Banten (km) Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Pemerintah yang Berwenang Mengelola		
		Negara	Provinsi	Jumlah
1	Kab Pandeglang	62,51	175,83	283,34
2	Kab Lebak	218,80	185,92	404,72
3	Kab Tangerang	8,80	114,50	123,30
4	Kab Serang	57,61	241,62	299,23
1	Kota Tangerang	7,76	29,10	36,77
2	Kota Cilegon	23,47	3,42	26,89
3	Kota Serang	88,61	53,76	142,37
4	Kota Tangerang Selatan	9,01	48,75	57,76
Jumlah		476,49	852,89	1 329,38

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.140
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Kondisi Jalan di Provinsi Banten (km) Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Baik	Sedang	Rusak	Rusak Berat
1	Kab Pandeglang	131,19	23,9	3,49	17,25
2	Kab Lebak	57,18	35,25	25,85	67,64
3	Kab Tangerang	47,00	21,93	7,82	37,75
4	Kab Serang	93,19	74,56	0,00	73,87
5	Kota Tangerang	9,00	8,90	11,20	-
6	Kota Cilegon	2,82	0,50	-	0,10
7	Kota Serang	29,07	18,19	-	6,50
8	Kota Tangerang Selatan	15,35	11,10	11,95	10,36
Jumlah		384,79	194,32	60,31	213,47

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 2.141
Panjang Jalan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Permukaan Jalan di Provinsi Banten (km) Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Kondisi Jalan			
		Aspal	Tidak diaspal	Lainnya	Jumlah
1	Kab Pandeglang	238,34	-	-	238,34
2	Kab Lebak	404,72	-	-	404,72
3	Kab Tangerang	123,30	-	-	123,30
4	Kab Serang	299,23	-	-	299,23
5	Kota Tangerang	36,77	-	-	36,77
6	Kota Cilegon	26,89	-	-	26,89
7	Kota Serang	142,37	-	-	142,37
8	Kota Tangerang Selatan	57,76	-	-	57,76
Jumlah		1 329,38	-	-	1 329,38

Sumber:SIPD Provinsi Banten

Selanjutnya guna meningkatkan daya saing khususnya terkait dengan transportasi, di Provinsi Banten telah terdapat 4 (empat) bandara yaitu Bandara Soekarno Hatta, Bandara Budiarto Curug, Bandara TNI-AU Gorda dan Bandara Pondok Cabe. Begitu juga dengan moda transportasi laut, dimana terdapat 2 (dua) pelabuhan penyeberangan, 3 (tiga) pelabuhan umum, 40 (empat puluh) pelabuhan khusus, dan 6 (enam) pelabuhan perikanan. Semuanya ini untuk mendukung kelancaran transportasi di Provinsi Banten.

2.4.4.3. Rasio Ketergantungan

Sebanyak 27,51 persen penduduk Banten berusia muda (0-14 tahun), 69,57 persen berusia produktif (15-64 tahun), dan hanya 2,92 persen yang berumur 65 tahun lebih. Dari data tersebut diperoleh angka ketergantungan (dependency ratio) penduduk Banten sebesar 46,14

Tabel 2.142
Tingkat ketergantungan / rasio ketergantungan
Tahun 2014-2016

Kabupaten/ Kota	2014			2015			2016		
	Jumlah Penduduk Usia<15-64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- tungan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia<15- 64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- tungan Penduduk	Jumlah Penduduk Usia<15-64 Tahun	Jumlah Penduduk Usia<15 Tahun dan Usia >64 Tahun	Angka Ketergan- tungan Penduduk
Kabupaten									
1. Pandeglang	748.293	440.112	58,82	745.153	440.758	58,44	759.094	441.418	58,15
2. Lebak	809.158	450.147	55,63	817.685	452.127	55,29	825.341	454.071	55,02
3. Tangerang	2.242.066	1.022.710	45,61	2.317.669	1.052.925	45,43	2.393.975	1.083.520	45,26
4. Serang	963.860	499.234	51,80	972.969	501.332	51,53	981.102	503.400	51,31
Kota									
5. Tangerang	1.443.544	556.350	38,54	1.479.769	567.336	38,34	1.515.630	578.076	38,14
6. Cilegon	279.499	125.804	45,01	284.709	127.397	44,75	289.755	128.950	44,50
7. Serang	419.949	211.152	50,28	428.724	214.481	50,03	437.240	217.764	49,80
8. Tangerang Selatan	1.072.001	420.998	39,27	1.109.911	433.298	39,04	1.148.071	445.741	38,83
Provinsi Banten	7.978.370	3.726.507	46,71	8.165.589	3.789.654	46,41	8.350.208	3.852.940	46,14
Indonesia	169.334.100	82.830.700	48,92	171.874.200	83.587.500	48,63	174.375.100	84.329.900	48,36

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal disingkat SPM diterapkan dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat atau kesejahteraan rakyat tersebut dalam lingkungan strategis globalisasi dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan dalam pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal adalah urusan pemerintahan wajib daerah yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial. Selain itu, penetapan dan penerapan SPM Daerah provinsi menjadi penting mengingat terdapatnya Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

Secara umum tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

Standar Pelayanan Minimal yang menjadi kewenangan provinsi

- 1. SPM Pendidikan
 - ❖ Pendidikan Menengah dan
 - ❖ Pendidikan Khusus

Tabel 2.143
Sekolah Menengah di Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Jumlah SMA	Jumlah SMK
1	Pandeglang	39	94
2	Lebak	55	55
3	Kabupaten Tangerang	159	194
4	Kabupaten Serang	79	51
5	Kota Cilegon	23	25
6	Kota Tangerang	83	133
7	Kota Serang	31	46
8	Kota Tangerang Selatan	83	80

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dalam SPM pendidikan dimana jumlah sekolah menengah ini perlu ada penambahan ruang kelas baru dan unit sekolah baru untuk memudahkan aksesibilitas bagi usia 16-18 tahun untuk bisa semua bersekolah di jenjang sekolah menengah.

Tabel 2.144
Jumlah Sekolah Khusus di Provinsi Banten

No	Kab/Kota	Jumlah Negeri	Jumlah Swasta
1	Kab. Tangerang	1	17
2	Kab Pandeglang	1	16
3	Kabupaten Lebak	3	9
4	Kabupaten Serang	0	5
5	Kota Tangerang	0	16
6	Kota Tangerang selatan	0	18
7	Kota Serang	2	5
8	Kota Cilegon	0	4
	Total	7	90

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dari tabel diatas terlihat bahwa belum seluruh Kabupaten kota memiliki sekolah Khusus, Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang dan kota Tangerang masih nihil, sekolah khusus banyak di tunjang oleh sekolah swasta.

2. SPM Kesehatan
- ❖ Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi; dan

❖ Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- ❖ Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota; dan Provinsi Banten saat ini berkembang menjadi wilayah dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang pesat. Besarnya jumlah penduduk membawa konsekuensi dengan laju permintaan kebutuhan air minum yang tinggi. Tantangan penyediaan air minum semakin besar, karena perkembangan perkotaan dan permukiman di wilayah Banten berdampak terhadap berkurangnya daerah tangkapan air maupun distribusi air alamiahnya (sungai) dengan kualitas air yang layak konsumsi. Sementara pemenuhan kebutuhan air bersih membantu upaya pencapaian Millenium Development Goals.

Tabel 2.145
Persentase Sumber Utama Air Minum di Wilayah
Provinsi Banten Tahun 2016

Kabupaten/ Kota	Sumber Utama Air Minum					Jumlah
	Air dalam kemasan	Ledeng	Pompa / Sumur Bor	Sumur	Lainnya	
Pandeglang	11,94	4,4	17,42	39,37	26,86	100
Lebak	12,89	1,85	15,41	41,85	28,01	100
Tangerang	51,47	4,54	32,65	10,73	0,61	100
Serang	50,5	3,16	25,25	12,37	8,73	100
Kota Tangerang	71,69	5,2	21,69	1,38	0,05	100
Kota Cilegon	75,81	2,47	19,64	2,09	0	100
Kota Serang	62,96	1,41	23,08	12,55	0	100
Kota Tangerang Selatan	49,38	0,69	44,57	5,37	0	100
Provinsi Banten	48,07	3,45	27,1	14,5	6,89	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten 2018

Data tersebut menggambarkan sumber utama air minum terbesar adalah air minum dalam kemasan yaitu sebesar 48,07 sementara layanan air ledeng hanya sebesar 3,45%. Hal ini berdampak pada biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat terhadap kebutuhan air minum cukup tinggi (harga air minum dalam kemasan yang non ekonomis). Sementara pengambilan air menggunakan pompa/sumur bor secara berlebihan secara terus menerus dapat mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan.

Dengan meningkatnya kebutuhan air minum dan makin berkurangnya daerah resapan air di perkotaan dan pemukiman dapat diatasi dengan sistem perpipaan air minum yang berasal dari mata air. Mengingat sumber-sumber air berada di luar kawasan perkotaan dan pemukiman maka dibutuhkan sistem perpipaan air bersih lintas daerah.

- ❖ Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota

Air Limbah domestik (rumah tangga) merupakan limbah cair hasil buangan dari perumahan (rumah tangga), bangunan perdagangan, perkantoran dan sarana sejenis. Contoh limbah cair domestic adalah air deterjen sisa cucian, air sabun, dan air tinja.

Meningkatnya kegiatan manusia dalam rumah tangga mengakibatkan bertambahnya jumlah limbah cair. Sumber limbah cair rumah tangga bersifat organik yaitu dari sisa-sisa makanan dan deterjen yang mengandung fosfor. Limbah cair dapat meningkatkan kadar BOD (Biochemical Oxygen Demand) dan pH air. Keadaan tersebut menyebabkan terjadinya pencemaran yang banyak menimbulkan

kerugian bagi manusia dan lingkungan.

Kualitas suatu air limbah akan dapat terindikasi dari kualitas parameter kunci, dimana konsentrasi parameter kunci tidak melebihi dari standard baku mutu yang ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengingat air limbah domestik kandungan terbesar adalah bahan organik, maka parameter kunci yang umum digunakan adalah BOD, COD dan lemak/minyak. Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, maka parameter kunci untuk air limbah domestik adalah pH, BOD, COD, TSS, Lemak & Minyak, Amonia Total, dan Total Koliform.

Dengan berkembangnya kawasan pemukiman yang tidak lagi berdasarkan batas wilayah administrasi dituntut pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi; dan

SPM Bidang Perumahan adalah tolok ukur kinerja pelayanan perumahan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota menyelenggarakan pelayanan urusan perumahan sesuai dengan SPM bidang perumahan rakyat yang terdiri dari jenis pelayanan dasar, indikator, nilai dan batas waktu pencapaian.

Sementara berdasarkan Permendagri Nomor 100 Tahun 2018 mengenai SPM dijelaskan bahwa salah satu pencapaian SPM bidang permukiman adalah penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

Secara teknis SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana mengikuti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. Secara umum bencana tidak dapat diprediksi waktu kejadiannya sehingga jumlah korban maupun bangunan yang rusak dan hancur dapat bersifat fluktuatif sehingga perencanaan yang dilakukan adalah dengan melihat bangunan dalam hal ini rumah yang terkena dampak bencana.

Tabel 2.146
Data Kerusakan Rumah Akibat Bencana selama
Periode 2016-2020 di Provinsi Banten

Kabupaten/Kota	Rumah (unit)			
	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam
Pandeglang	56	132	102	345
Lebak	189	176	916	4024
Tangerang	0	0	0	3631
Serang	255	22	58	3124
Kota Tangerang	0	0	0	1977
Kota Cilegon	0	0	3	491
Kota Serang	0	0	0	0
Kota Tangerang Selatan	0	0	0	0
JUMLAH	500	330	1079	13592

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Data tersebut merupakan data akumulasi rumah dalam kondisi rusak berat, rusak sedang, rusak ringan maupun terendam yang diakibatkan oleh bencana seperti bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Dalam data terlihat bahwa wilayah yang rentan kerusakan rumah akibat bencana berada pada Kabupaten Pandeglang, Lebak, Tangerang dan Serang, Kota Tangerang dan Kota Cilegon. Untuk penanganan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana ditentukan oleh status bencana yang dikeluarkan oleh pimpinan nasional atau daerah. Jika status bencana dikeluarkan oleh Gubernur maka pemerintah provinsi memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana.

- ❖ Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Pemerintah mempunyai rencana pembangunan yang bersifat spasial atau membutuhkan ruang / kawasan. Terkait dengan hal tersebut tentu perlu diikuti dengan pengadaan lahan yang berasal dari masyarakat, swasta maupun menggunakan lahan milik pemerintah. Apabila lahan masyarakat yang akan digunakan oleh kegiatan pemerintah merupakan lahan terbangun (termasuk rumah) maka salah satu klausul adalah pemerintah wajib membangun kembali atau relokasi ke tempat yang baru. Tentu saja pemerintah harus merelokasi rumah masyarakat yang terkena program pemerintah dalam kondisi rumah yang layak huni sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat.

Dalam hal pembangunan suatu kawasan yang dilakukan pemerintah, salah satu prasyarat adalah adanya pembebasan lahan. Pada pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi maka pemerintah provinsi yang melakukan pembebasan lahan. Sementara pada beberapa kegiatan pemerintah pusat disyaratkan pemerintah daerah (provinsi) yang harus menyediakan lahan bagi kepentingan pemerintah tersebut.

Dalam kurun waktu 2016-2020 terdapat pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat berupa Program Strategis Nasional (PSN). Berdasarkan Peraturan Presiden 56 Tahun 2018, terdapat 13 PSN di Provinsi Banten, yaitu

- 1) Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang
- 2) Jalan Tol Kunciran – Serpong
- 3) Jalan Tol Serpong – Cinere
- 4) Jalan Tol Cengkareng – Batu Ceper – Kunciran
- 5) Jalan Tol Serpong – Balaraja
- 6) Jalur KA Ekspres SHIA (Soekarno Hatta – Sudirman),
- 7) Energi Asal Sampah Kota-Kota Besar (Tangerang),
- 8) Tanggul Laut,
- 9) Bendungan Sindang Heula,
- 10) Bendungan Karian,
- 11) Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung,
- 12) Kawasan Industri Wilmar Serang, dan
- 13) Percepatan Infrastruktur Transportasi, Listrik dan Air Bersih untuk 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Tanjung Lesung.

Sementara rencana pembangunan Pemerintah Provinsi Banten secara spasial atau kawasan dituangkan pada rencana struktur ruang, rencana pola ruang dan rencana Kawasan Strategis Provinsi. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, Kawasan Strategis Provinsi Banten adalah :

Tabel 2.147
Kawasan Strategis Provinsi

Sudut Kepentingan	Kawasan Strategis Provinsi
Pertumbuhan Ekonomi	1. Kawasan sekitar KP3B (Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten) 2. Kawasan Perkotaan Serang – Cilegon (Seragon) 3. Kawasan Serang Utara Terpadu 4. Kawasan Pantai Selatan Terpadu 5. Kawasan perbatasan
Sosial dan Budaya	Kawasan Situs Banten Lama
Pendayagunaan Sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi	Bendungan Karian
Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Kawasan Penyangga Bandar Udara Soekarno-Hatta

Sumber : RTRW Provinsi Banten (Perda Nomor 5/2017)

Selain itu adanya pengembangan secara spasial kebijakan daerah yang menjadi prioritas daerah diantaranya :

- Pembangunan dan pengembangan 6 ruas jalan baru Provinsi Banten
 - Gerbang Tol Serang Baru (Bogeg)
 - Akses Tol Cikeusal (Cikeusal - Boru)
 - Relokasi Jalan Palima - Baros
 - Pembangunan Jalan Lingkar Selatan Serang (Serang South Outer Ring Road), Palima - Kramatwatu
 - Pembangunan Jalan Lingkar Utara Serang (North Outer Ring Road), Pakupatan - Kramatwatu
 - Pembangunan Jalan Lingkar Dalam Kota Serang (Serang South Inner Ring Road) Cipocok - Drangong)
 - Relokasi Jalan Banten Lama
 - Sudirman - Bogeg (Railway Frontage)
- Penataan bangunan monument dan bersejarah seperti :
 - Penataan Caringin
 - Penataan Cikaduen

Dengan adanya Kawasan Strategis Provinsi, kebijakan pengembangan jalan baru, penataan bangun serta adanya rencana struktur serta pola ruang dimana direncanakan pembangunan pada jaringan infrasktur sesuai dengan kewenangan provinsi maka pemerintah provinsi wajib membangunkan kembali atau relokasi ke tempat yang baru

rumah masyarakat yang terkena program pemerintah provinsi dalam kondisi rumah yang layak huni.

5. SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif merupakan modal penting yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan pembangunan. Ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan yang kondusif akan memberikan kenyamanan dan kepastian dalam berinvestasi dan berusaha. Adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kamtibmas di lingkungan wilayahnya dan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat memberikan dorongan untuk memprioritaskan kepentingan bersama, sehingga kestabilan keamanan di masyarakat dapat diwujudkan.

Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi Banten bisa dilihat dengan terbitnya Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat, yang didalam perda tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur untuk melakukan penegakan Peraturan daerah (PERDA), beberapa turunan nya yaitu; Pergub SOP Penindakan Yustisial, Pergub Tata cara perlindungan masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur, Pergub Tata cara Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat sampai saat ini belum ada aturan turunannya.

Tabel 2.148
Jumlah LINMAS dan Rasio Linmas Kab/Kota di Provinsi Banten

Kab/Kota	Jumlah Linmas 2018	Jumlah Penduduk	Rasio Linmas
Kota Cilegon	2.428	425.103	1;175
Kota Serang	3.656	666.600	1;274
Kota Tangerang	10.204	2.139.891	1;209
Kota Tangerang selatan	7.638	1.644.899	1;215
Kabupaten Lebak	7.984	1.288.103	1;161
Kabupaten Pandeglang	7.812	1.205.203	1;154
Kabupaten Serang	9.234	1.493.591	1;161
Kabupaten Tangerang	18.020	3.584.770	1;198
Total	66.976	12.448.160	1;185

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Jika dilihat dari table berikut rata-rata linmas yang masih rasio nya besar adalah Kota serang 1;274, artinya 1 orang linmas mengawasi 274 orang. Untuk itu perlu beberapa upaya dilakukan warga untuk menjaga keamanan, diantaranya dengan membangun poskamling, membentuk regu keamanan lingkungan, memeriksa setiap warga dari luar desa, dan menambah jumlah anggota linmas.

6. SPM Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota dikeluarkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (6) Peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. SPM bidang Sosial Provinsi meliputi:

- ❖ Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti;
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti;
- ❖ Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti; dan
- ❖ Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi.

Dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial terhadap PMKS melalui panti sesuai kewenangan masuk menjadi urusan Provinsi. Saat ini Provinsi Banten memiliki dua UPTD dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan sosial di bawah Dinas Sosial Provinsi Banten.

Tabel 2.149
Panti Rehabilitasi Di Provinsi Banten Tahun 2018

No	Nama Panti	Kab/Kota	PMKS yang ditangani	Daya Tampung	Existing
1	UPTD Perlindungan Sosial	Cipocok serang	Lanjut usia, Anak terlantar, balita terlantar, disabilitas intelektual	75 org	51 org
2	UPTD Panti Rehabilitasi Tuna Sosial (PSRTS)	Pasir Ona Lebak	Gelandangan Pengemis Disabilitas	40 org	15 org

Sumber: Diolah dari UPTD Panti Provinsi Banten

Tabel 2.150
Jumlah Pegawai Panti Rehabilitasi UPTD Perlindungan Sosial

Pegawai	Nama jabatan	Jumlah
Pegawai struktural	Kepala UPTD, Kasubag TU, Kasi, Bendahara, Pengadministrasi umum, Pengolah data	7 orang
Pegawai honorer non professional	pramubakti, pamdal, supir, tukang kebun, binatu	19 orang
Tenaga professional honorer	perawat, pekerja sosial, juru masak	10 orang
Tenaga Profesional ASN	pekerja Sosial , Penyuluh Sosial, perawat	Nihil

Sumber: Dokumen Profil Panti UPTD Panti Provinsi Banten

Dari tabel diatas panti yang di kelola oleh Pemerintah daerah Provinsi Banten selain baru ada dua panti rehabilitasi dari tabel terlihat Panti kekurangan tenaga professional sehingga berpengaruh pada kegiatan dan keberlangsungan panti untuk dikelola secara lebih baik dan bisa sesuai dengan kebutuhan PMKS yang berada di bawah naungan panti di Provinsi Banten.

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi penting dilakukan dan direncanakan karena bencana tsunami yang terjadi Desember tahun 2018 beberapa waktu lalu membuat

Pelaksanaan SPM sebagai urusan pemerintahan wajib tetap berpedoman pada peraturan yang dikeluarkan kementerian teknis, atas dasar itulah Pemerintah Provinsi Banten dalam menentukan kebijakan penetapan indikator SPM sedianya melakukan pentahapan dalam jenis pelayanan, mutu pelayanan dan atau sasaran/lokasi tertentu. Sedangkan untuk target SPM harus 100% setiap tahunnya mengingat SPM merupakan pelayanan yang minimal tentunya harus dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

2.6. Data Capaian Indikator Kinerja RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2018

Dalam perencanaan kinerja program, harus ada korelasi antara aspek strategis dan operasional. Urusan atau program dikategorikan strategis jika terkait langsung visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan. Sehingga, perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan harus sesuai antara kegiatan yang dilakukan dengan urusan dan program yang dibuat.

Dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah, Pemerintah Provinsi Banten menyusun program sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Program-program tersebut disertai dengan kebutuhan pendanaan indikatif kegiatan dan target kinerja terukur yang kemudian yang dijabarkan ke dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah (PD) dilingkup Pemerintahan Provinsi Banten. Pendanaan kegiatan disusun menggunakan prediksi kebutuhan dengan membandingkan persentase total belanja pada pola pengeluaran per PD beberapa tahun sebelumnya capaian kinerja yang telah ditargetkan. Sehingga persentase tersebut dapat dijadikan pagu pengeluaran khususnya untuk urusan strategis berapapun perubahan pengeluarannya.

Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017-2018 yang meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio. Adapun capaian tersebut digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 2.151
 Capaian Indikator Makro Pembangunan Tahun 2017 – 2018

URAIAN INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	2017		2018	
	TARGET RPJMD	REALISASI	TARGET RPJMD	REALISASI
I P M (Poin)	71,35	71,42	71,77	71,77
L P E (%)	5,70	5,73	6,00	5,81
Persentase Penduduk Miskin (%)	5,25	5,59	5,13	5,25
Persentase Pengangguran Terbuka (%)	8,69	9,28	8,45	8,52
Tingkat Inflasi (%)	4,00	3,98	3,70	3,42
Gini Ratio (%)	0,40	0,39	0,39	0,37

Sumber : SIPD Provinsi Banten Tahun 2018

Sebagaimana tabel diatas, Indikator makro pembangunan Provinsi Banten Tahun 2017-2018 untuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengalami peningkatan, sedangkan untuk Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Persentase Penduduk Miskin, Persentase Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Inflasi, dan Gini Ratio mengalami fluktuasi.

Sub Bab ini menjelaskan rincian target dan realisasi capaian indikator kinerja Tahun Anggaran 2018 pada setiap program yang diukur/dievaluasi capaiannya pada 129 program 230 indikator kinerja, dan rata-rata capaian sebesar 97,11%.

Tabel 2.152
 Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pembangunan Tahun 2017 – 2018

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan Daerah Yang Berakhlakul Karimah Dengan Efektif, Efisien, Transparan,Akuntabel Dan Sumber Daya Aparatur Berintegritas,Berkompetensi Serta Melayani Masyarakat	1. Indeks Demokrasi Indonesia (Satuan : %)	70,00	70,00	100
		2. Indeks keterbukaan informasi publik (satuan : %)	88,08	76,00	86,29
		3. Capaian Maturitas SPIP (Satuan : Nilai)	3	3,02	Tercapai

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
		4. Capaian kesesuaian dengan Parameter penilaian Dokumen Perencanaan Daerah (Satuan : Peringkat)	65,00	65,00	100
		5. Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah (Satuan : %)	59,30	61,68	104,01
		6. Capaian Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Daerah	WTP	WTP	Tercapai
2	Meningkatkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dalam Mendukung Kelancaran Arus Barang, Orang dan Jasa yang Berorientasi pada Peningkatan Pembangunan Wilayah dan perekonomian Daerah	7. Tingkat Kemantapan Jalan (Satuan : %)	87,43	91,40	104,55
		8. Persentase Rumah Layak Huni (Satuan : %)	84,02	97,01	115,46
		9. Luasan Kawasan Kumuh yang Ditata (Satuan : hektar)	114,60	58,22	50,80
3	Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan menuju Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berakhlaqul Karimah dan Berdaya saing	10. Rata – rata lama sekolah (Satuan : Tahun)	8,47	8,71	102,83
		11. Indeks Pembangunan Gender (Satuan : Nilai)	91,67	68,30	98,19
		12. Persentasepeningkatan minat baca masyarakat (Satuan : %)	30,00	30,00	100
4	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Akses dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	13. Angka Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)	31	4,6	100
		14. Angka Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	304	100	100
		15. Angka Harapan Hidup (Satuan : Tahun)	69,76	64,69	99,61
5	Meningkatnya Perekonomian Banten Melalui Kualitas Pengelolaan Keuangan, Kecukupan Pangan dan Energi, Pengembangan Sumber Daya Alam yang Mamberikan Solusi Terhadap Pangangguran dan Kemiskinan	16. Pesentase Penanganan Jumlah PMKS (Satuan : %)	4,49	4,79	106,79
		17. Indeks Gini (Satuan : %)	0,39	0,39	100,00
		18. Indeks Ketahanan Pangan Daerah (Satuan : %)	89,20	89,10	99,89
		19. Jumlah Nilai Investasi (Satuan : Trilliun)	56,40	56,52	100,00

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	5	6
		20. Laju Pertumbuhan sektor Perikanan Terhadap PDRB (Satuan : %)	4,55	2,930	64,40
		21. 21. Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB (Satuan : %)	2,89	2,88	99,63
		22. Laju Pertumbuhan sektor Pertanian terhadap PDRD (Satuan : %)	5,30	3,58	67,55
		23. Tingkat Inflasi Bahan Pokok dan Bahan Penting (Satuan : %)	4,00	4,00	100

Tabel 2.153
Pengukuran Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
1	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah yang akuntabel	1. Nilai IKM	2,80	2,41	86,06
2	Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan Menengah dan Khusus	2. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (satuan : %)	72,90	84,23	115,54
		3. Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah (Satuan : %)	58,77	62,02	105,53
		4. Angka Putus Sekolah SMA (Satuan : Nilai)	0,22	0,21	95,45
		5. Angka Putus Sekolah SMK (Satuan : Nilai)	0,44	0,32	72,73
		6. Angka Kelulusan SMA (Satuan : Nilai)	98,64	100	101
		7. Angka Kelulusan SMK (Satuan : Nilai)	99,89	100	101
		8. Nilai Rata – rata ujian SMA IPA (Satuan : %)	51,96	50,63	97,44
		9. Nilai Rata – rata ujian SMK (Satuan : %)	55,50	41,85	75,41
		10.Nilai Rata – rata ujian SMA IPS (Satuan : %)	48,68	43,88	90,14
		11. Persentase SMK yang menerapkan link and match (satuan : %)	17,00	76,15	447,94

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		12. Cakupan Layanan Sekolah Khusus dan Layanan Khusus (Satuan : %)	17,00	33,33	196
		13. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMK (Satuan : Nilai)	56,98	56,23	98,68
		14. Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG) SMA (Satuan : Nilai)	64,86	64,57	99,55
		15. Persentase guru SMA yang bersertifikat (Satuan : %)	96,21	96,48	100,28
		16. Persentase guru SMK yang bersertifikat (Satuan : %)	54,63	92,85	169,96
		17. Persentase Akses dan Mutu Media Pembelajaran (Satuan : %)	20,00	27,50	137,50
3	Meningkatnya Pelestarian Kebudayaan	18. Persentase event yang mengangkat nilai budaya masyarakat Banten	85,00	90,00	105,88
		19. Cakupan Organisasi Kesenian (pembinaan sanggar/keompok seni dan budaya) (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		20. Cakupan Apresiasi Seni dan Kreatifitas Karya Budaya (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		21. Cakupan Pelestarian Nilai – Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		22. Cakupan Pelayanan Museum (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
		23. Cakupan Pelestarian Benda Cagar Budaya (Satuan : %)	85,00	90,00	105,88
4	Pelayanan Kesehatan Berkualitas dan Mudah di Akses	24. Persentase Persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (Satuan : %)	65,00	84,30	129,69
		25. Persentase balita gizi buruk yang dirawat dan ditangani (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		26. Persentase Kab/Kota Yang Telah Mendapatkan Dukungan Program Kesehatan (Satuan : %)	55,00	55,00	55,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
5	Keikutsertaan Masyarakat dalam jaminan kesehatan	27. Persentase Penduduk Yang Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan (Satuan : %)	90,00	91,50	101,67
		28. Persentase pelayanan kesehatan yang terakreditasi (FKTP,FKRTL,Laboratorium) (Satuan : %)	65,00	75,21	115,71
		29. Persentase terbangunnya Rumah Sakit Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
		30. Persentase Pembangunan Rumah Sakit Banten Selatan (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
6	Pelayanan Kesehatan Sesuai dengan standar pelayanan Minimal	31. Capaian SPM Pelayanan Medis RSUD Banten (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		32. Capaian SPM Pelayanan keperawatan RSUD Banten (Satuan : %)	88,00	88,00	100,00
		33. Capaian Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Rumah Sakit Banten (Satuan : %)	70,00	69,00	98,57
		34. Cakupan Kualitas Pelayanan sesuai SPM Rumah Sakit Umum Malingping (Satuan : %)	60,00	48,00	80,00
		35. Bed Occupancy Ratio (BOR) RSUD Malingping	40,00	17,99	44,98
		36. Indeks Kepuasan Pelanggan (Satuan : %)	60,00	44,50	74,17
		37. Persentase Kab/Kota Yang Telah Mendapatkan Dukungan Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit Dan Krisis Kesehatan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		38. Jumlah Dokter / Dokter Gigi, Tenaga kesehatan yang direkrut dan ditingkatkan kompetensinya (satuan : orang)	70	70	100,00
		39. Persentase Pemenuhan Obat Publik Dan Perbekalan Kesehatan (Satuan : %)	70,00	95,33	136,19

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		40. Persentase Pembinaan Sarana Kefarmasian (Satuan : %)	50,00	31,06	62,11
		41. Persentase Jenis Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Yang Di Layani (Satuan : %)	32,00	32,00	100,00
		42. Persentase Perusahaan Yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kerja Di Wilayah Kerja BKKM (Satuan :%)	6,40	0,00	0,00
7.	Infrastruktur Jalan Dan Jembatan Yang Berkualitas	43. Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	79,56	91,406	114,89
		44. Persentase jalan Provinsi yang Memenuhi Standar Teknis (Satuan : %)	27,20	26,92	98,97
		45. Persentase Jembatan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (Satuan : %)	86,30	88,70	102,78
8.	Perencanaan dan Penataan Ruang yang berkualitas	46. Persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada 8 kawasan Strategis Provinsi (Satuan : %)	25,00	12,50	50,00
		47. Persentase Badan Usaha Jasa Kontruksi Yang Memenuhi Standar (Satuan : %)	10,00	9,07	90,07
9.	Penanggulangan Banjir dan Abrasi, serta ketersediaan Air Baku	48. Cakupan Pemulihan Dan Pencegahan Banjir (Satuan : %)	20,89	20,84	99,76
		49. Luas layanan Jaringan Irigasi Teknis Provinsi (Satuan : ha)	15.332,98	15.312,06	99,86
		49. Cakupan Pemulihan Pencegahan Abrasi (Satuan : %)	51,59	46,21	89,62
10.	Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang Layak Ketersediaan Air Minum dan Sanitasi Lingkungan, Pengelolaan Sampah regional	50. Luas Kawasan Kumuh yang ditata (Satuan : ha)	114,60	58,22	50,80
		51. Persentase Rumah tidak layak huni yang ditangani (satuan : %)	84,02	97,01	115,46
		52. Persentase penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi (Satuan : %)	25,00	25,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		53. Persentase pengelolaan gedung strategis Provinsi (Satuan : %)	28,00	36,84	147,36
		54. Cakupan Rumah Tangga yang memiliki akses Air Bersih (satuan : %)	72,75	74,90	102,96
		55. Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi (satuan : %)	72,86	71,09	97,57
		56. Cakupan Pelayanan Pengelolaan Sampah Regional (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
11.	Ketentraman dan ketertiban umum daerah yang aman dan kondusif	57. Cakupan Pelayanan Ketentraman Ketertiban Umum Daerah Provinsi (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		58. Persentase Penegakan Peraturan Perundang – Undangan Daerah (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		59. Cakupan Perlindungan Masyarakat (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		60. Cakupan Koordinasi Penanganan Bencana Kebakaran (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
12.	Sistem penanggulangan kebencanaan yang efektif	61. Cakupan Mitigasi Dan Pengurangan Resiko Bencana (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		62. Presentase Ketersediaan Peralatan Dan Logistik, Prabencana Dan Tanggap Darurat Bencana (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		63. Presentase Pemulihan Kondisi Sosial Ekonomi, Sarana Dan Prasarana Pasca Bencana (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
13.	Wawasan kebangsaan, keamanan dan stabilitas Daerah yang kondusif untuk mendukung NKRI	64. Cakupan Pembinaan Dan Penguatan 4 Konsensus Dasar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, NKRI (Satuan : %)	22,00	22,00	100
		65. Prosentase Penurunan Peristiwa Gangguan Keamanan Dalam Daerah (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		66. Persentase ormas yang mendapatkan pembinaan (satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		67. Angka Partisipasi Pileg (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
		68. Angka Partisipasi Pilgub (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
		69. Angka Partisipasi Pilpres (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
		70. Angka Partisipasi Pilkada Kab/Kota (Satuan : %)	65,00	65,00	100,00
14	Menurunnya PMKS	71. Cakupan PMKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial (satuan : orang)	913	913	100,00
		72. Cakupan PSKS Yang meningkat Partisipasinya Sosial (Satuan : Orang)	5.755	5.755	100,00
		73. Persentase updating Data PMKS (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		74. Cakupan Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Mendapat Perlindungan (Satuan : Orang)	1.103	1.103	100,00
		75. Cakupan Keluarga Miskin Yang Mendapatkan Jaminan Sosial (Satuan : kk)	32.676	31.158	95,35
		76. Cakupan PMKS yang mendapatkan Bimbingan social Keterampilan pada Balai pemulihan dan Pengembangan sosial (Satuan : orang)	110	110	100,00
		77. Cakupan PMKS yang dilayani dan dilindungi pada Balai Perlindungan sosial (Satuan : orang)	160	160	100,00
15.	Tersedianya lapangan kerja bagi masyarakat	78. Capaian Produktivitas Tenaga Kerja (Satuan : %)	4,35	6,82	156,78
		79. Capaian Hubungan Industrial (Satuan : %)	3,66	3,02	82,51
		80. Capaian Pengupahan Dan Kesejahteraan Tenaga Kerja (Satuan : %)	10,00	10,00	100
		81. Capaian Jaminan Sosial Kondisi Lingkungan Kerja (Satuan : %)	2,98	10,00	105,15
		82. Capaian Kesempatan Kerja (Satuan : %)	15,25	13,92	91,28

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		83. Capaian Pelatihan Dan Kompetensi Kerja (Satuan : %)	1,25	2,05	184,68
16.	Kelembagaan PUG (Pengarusutamaan Gender) dan PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak) yang berkualitas	84. Cakupan Data Terpilih Gender Dan Anak (Satuan : %)	60,00	60,00	100,00
		85. Cakupan Perencanaan Responsif Gender (Satuan : %)	50,00	50,00	100,00
		86. Rasio Partisipasi Perempuan Di Lembaga Legislatif, Swasta Dan Pemerintah	58,72	55,11	93,86
		87. Cakupan Kabupaten /Kota Yang Memiliki Lembaga Sadar Gender (Satuan : %)	75,00	71,37	95,16
		88. Indeks Ketahanan keluarga (Satuan : %)	66,66	64,93	97,40
		89. Cakupan Penyelesaian pengaduan KDRT (Satuan: %)	85,00	84,11	98,95
		90. Cakupan Penyelesaian Pengaduan Kekerasan Terhadap Anak (Satuan:%)	85,00	81,38	95,74
		91. Rasio Perlindungan Khusus Anak (Satuan: %)	60,00	58,63	97,71
17.	Administrasi kependudukan yang tertib dan akuntabel	92. Rasio Bayi Berakte Kelahiran (Satuan : %)	64,86	61,64	95,04
		93. Rasio Pasangan Berakte Nikah (Satuan : %)	23,33	24,37	104,46
		94. Rasio kepemilikan KTP el dan NIK (Satuan : %)	85,76	91,95	107,22
		95. Rasio Kepemilikan Akte Kelahiran Per 1000 Penduduk (Satuan :%)	79,19	74,29	93,81
		96. Cakupan Data Dan Informasi Kependudukan (Satuan :%)	85,00	83,62	98,38
18.	Laju pertumbuhan penduduk yang terkendali	97. Angka Kelahiran Total Per WUS (15 -49 tahun) (Satuan : jumlah)	2,33	2,30	98,71
		98. Persentase Pemakaian Kontrasepsi (Satuan :%)	60,90	73,17	120,15
		99. Persentase Kebutuhan Ber-KB Yang Tidak Terpenuhi (satuan : %)	10,26	13,20	128,65

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		100.Tingkat Putus Pakai Kontrasepsi (Satuan : %)	2,53	2,50	98,81
19.	Ketahanan pangan daerah yang terjaga	101. Ketersediaan pangan (satuan : %)	95,10	99,91	105,05
		102.Keterjangkauan/akses pangan (satuan :%)	82,50	82,50	100,00
		103. Pemanfaatan pangan (satuan : %)	90,00	90,00	100,00
20.	Lingkungan hidup yang berkualitas	104. Indeks kualitas Air (Satuan : Nilai)	51,50	52,33	101,612
		105. Indeks Kualitas Udara (Satuan : Nilai)	59,00	72,36	122,64
		106. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Satuan : Kelompok/Lembaga)	52,00	88	169,23
21.	Pengelolaan dan konservasi hutan yang optimal	107. Luas lahan kritis yang terehabilitasi (satuan : hektar)	5.000	7.990	159,8
		108. Persentase peningkatan fungsi hutan bagi masyarakat (satuan :%)	10,00	12,86	128,60
22.	Desa Tertinggal Yang Berkembang Dan Mandiri	109. Cakupan Desa Tertinggal Menjadi Berkembang (Satuan : Desa)	2	2	100,00
		110. Cakupan Desa Berkembang Menjadi Mandiri (Satuan : Desa)	2	2	100,00
		111. Cakupan Lembaga Kemasyarakatan Desa Dalam Kategori Baik (Satuan : Jumlah)	41	41	100,00
		112. Cakupan Kerjasama Desa Yang Meningkatkan Jumlah Desa Mandiri (Satuan : Jumlah)	2	2	100,00
23.	Terwujudnya Keselamatan Dan Kenyamanan Lalulintas	113.Persentase Regulasi Dan Pedoman Standar Pelayanan Transportasi Yang Diterapkan (Satuan :%)	20,00	20,00	100,00
		114. Persentase Wilayah Yang Terlayani Angkutan Umum (Satuan : %)	0,00	0,00	00,00
24.	Kinerja pelayanan, pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang lebih baik	115. Persentase Kebutuhan Terminal Type B Yang Sudah Terpenuhi (Satuan : B)	0,00	0,00	0,00
		116. Persentase Ketersediaan Rambu – Rambu Lalulintas Terhadap Kebutuhan (Satuan : %)	10,00	9,7	97,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		117. Persentase Pembangunan Dan Pemeliharaan Dan Prasarana Perkeretaapian (Satuan : %)	10,00	10,00	100
		118. Persentase Pengaturan Rekayasa Lalulintas Di Ruas Jalan Provinsi (Satuan : %)	100,00	23,38	23,38
		119. Persentase Pengendalian, Penertiban Dan Pengawasan Penyelenggara-an Angkutan (Satuan ; %)	100,00	42,00	42,00
		120. Persentase Pelabuhan Pengumpan Regional Operasional (Satuan : %)	0,00	0,00	0,00
25.	Pelayanan Pemerintahan yang berbasis Teknologi dan Keterbukaan Informasi	121. Persentase ketersediaan Perangkat TI (Satuan : %)	30,26	34,32	113,41
		122. Persentase ketersediaan sarana dan Prasarana persandian dan Keamanan Informasi (satuan : %)	20,00	20,00	100,00
		123. Persentase pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (satuan : %)	20,00	24,98	124,92
26.	Perencanaan dan penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	124. Persentase Keterpakaian Data Dan Informasi Pembangunan Daerah Yang Terintegrasi (Satuan : %)	50,00	50,00	100,00
27.	Usaha Kecil yang berdaya	125. Persentase usaha kecil yang bermitra secara aktif dengan dunia usaha lain(satuan : %)	1,00	1,00	100,00
		126. Capaian Koperasi Aktif (satuan : %)	6,00	6,00	100,00
28.	Kelembagaan Koperasi yang aktif dan sehat	127. Persentase Koperasi Yang Bankable (Satuan : %)	6,00	6,00	100,00
		128. Persentase Realita Implementasi Hasil Pelatihan Terhadap Total Peserta Pelatihan Koperasi (Satuan : %)	6,00	6,00	100,00
		129. Persentase Realita Implementasi Hasil Pelatihan Terhadap Total Peserta Pelatihan Usaha Kecil (Satuan : %)	1,00	1,00	100
29.	Meningkatnya Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan kemudahan berusaha	130. Nilai Realisasi Investasi PMDN (satuan : triliyun)	13,40	18,64	139,10

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		131. Nilai Realisasi Investasi PMA (satuan : Triliyun)	43,00	37,88	88,09
		132. Rasio Pemanfaatan Informasi Penanaman Modal (satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		133. Persentase Realisasi Perizinan sesuai standar pelayanan (satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		134. Cakupan potensi investasi yang terealisasi (satuan : %)	17,03	26,13	153.43
30.	Terwujudnya pemuda wirausahawan baru dan olahraga yang berprestasi	135. Cakupan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan Dan Kewirausahaan Pemuda Mandiri (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		136. Persentase Pemuda Wirausahawan Baru Yang Difasilitasi (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		137. Cakupan Ketercukupan Fasilitas Olahraga (Satuan : %)	70,00	75,00	100,00
		138. Cakupan keikutsertaan cabang olahraga pada event wilayah, nasional dan internasional (satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		139. Cakupan pembinaan olahraga (satuan : %)	75,00	75,00	100,00
31.	Minat Baca Masyarakat yang meningkat	140. Cakupan Pembinaan Perpustakaan Umum Dan Perpustakaan Khusus (Satuan :%)	85,00	85,00	100,00
		141. Cakupan pelayanan Perpustakaan sesuai standar minimal perpustakaan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
32.	Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah Yang Berkualitas	142. Persentase Digitalisasi Arsip Statis Daerah (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		143. Persentase digitalisasi Arsip Dinamis Daerah (satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		144. Persentase pengelolaan Arsip OPD Sesuai Standar (Satuan : %)	85,00	85,00	100,00
33.	Pertumbuhan Sektor Perikanan yang optimal	145. Persentase Produksi Perikanan (Satuan : %)	8,01	8,00	99,88
		146. Luas Laut yang terawasi (satuan : %)	100,00	98,00	98,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		147. Persentase usaha Perikanan yang bersertifikat SNI (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		148. Nilai Tukar Nelayan (NTN) (Satuan :nilai)	116	106,57	91,87
34.	Pertumbuhan Ekonomi sektor Pariwisata yang Optimal	149. Jumlah Pusat Sentra Ekonomi Kreatif (Satuan : lokasi)	1	1	100,00
		150. Jumlah Kunjungan Wisatawan (satuan : orang)	15.146.936	15.146.936	100,00
		151. Rata – rata lama kunjungan (Satuan : hari)	1,36	1,36	100,00
		152. Rata – rata pengeluaran wisatawan (satuan : Rp)	3.743.525	3.743.525	100,00
		153. Jumlah tenaga kerja yang terlatih di sektor kepariwisataan dan ekonomi kreatif (satuan : orang)	300	300	100,00
		154. Presentasi Pengembangan Destinasi Wisata (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
35.	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian yang Optimal	155. Capain Produktivitas Tanaman Padi (satuan : ton/Ha)	57,35	48,88	85,23
		156. Capaian Produksi Tanaman Padi (Satuan ; Ton)	2.408.671	1.603.556	66.57
		157. Capaian Produksi Tanaman Jagung (Satuan ; Ton)	21.579	210.556	975.74
		158. Capaian Produksi Tanaman Kedelai (Satuan ; Ton)	7.141	14.751	206,57
		159. Capaian Produksi Tanaman Cabai (Satuan ; Ton)	8.246	10.997	133,12
		160. Capaian Produksi Tanaman Bawang Merah (Satuan ; Ton)	735,00	920.7	125,27
		161. Peningkatan Produktivitas Komoditas Unggulan Perkebunan Kakao (Satuan : Kg/Ha)	3.343	2.043,93	61,14
		162. Capaian Produksi Tanaman Aren (Satuan : Ton)	1.728	4.167,54	101,95
		163. Capaian Produksi Tanaman Kelapa (Satuan : Ton)	43.978	44.833,49	101,95
		164. Peningkatan Produksi Daging (Satuan : Ton)	33,52	23,47	70,02

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		165. Persentase Sarana Produksi Pertanian (Satuan : %)	85,00	85	100
		166. Persentase pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan Masyarakat Veteriner (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		167. Persentase Struktur Industri Pada Industri Unggulan Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Penguatan (Satuan : %)	20,00	30,00	150,00
		168. Persentase Kerjasama SDM Berkompetensi Industri Yang Aktif (Satuan : %)	20,00	24,00	120,00
		169. Rasio Pertumbuhan Industri Kreatif (Satuan : %)	20,00	20,00	100,00
36.	Pengendalian, Pengawasan Dan Perijinan Geologi,Air Tanah, Mineral Dan Batubara Yang Efektif	170. Persentase Pelaksanaan Pengawasan Dan Rekomendasi Perijinan (Satuan : %)	65,00	65,00	100,00
		171.Persentase Badan Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Standar (Satuan : %)	41,10	41,10	100,00
37.	Pelayanan kelistrikan dan energi terbarukan yang optimal	172. Cakupan Pelayanan Listrik Perdesaan (Satuan : Rumah Tangga)	10.000	10.000	100,00
		173. Pelaku usaha ketenagalistrikan yang memenuhi standar (satuan : %)	16,17	16,17	100,00
38.	Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Yang Optimal Dan Inflasi Yang Terkendali	174. Koefisien Variasi Harga Kebutuhan Pokok Antar Waktu dan Wilayah (Satuan : %)	5,00	1,65	Harga Stabil
		175. Pertumbuhan Omset Pedagang (Satuan : %)	10,00	21,23	212,00
		176. Capaian Stabilitas Harga Barang Pokok (Satuan : %)	5,00	1,22	Harga Stabil
		177. Neraca Ketersediaan Barang Pokok (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		178. Surplus Neraca Perdagangan (Satuan : Juta USD)	2.970	950,77	Defisit
		179. Indeks Tendensi Konsumen (satuan satuan : nilai)	108,00	111,35	103,1
		180. Persentase Pelayanan Sertifikasi Dan Standarisasi (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		181. Jumlah Produk Industri Kecil Berstandar Dan Bersertifikasi (Satuan : Jumlah)	200,00	359	179,5
39.	Terwujudnya Peran DPRD Sesuai Dengan Fungsinya	182. Capaian % kinerja Fungsi DPRD (Satuan : %)	100,00	95	95,00
		183. Rasio ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur (satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		184. Capain % pelayanan keprotokolan, kehumasan dan dukungan pelaksanaan kegiatan reses DPRD (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
40.	Pelayanan Publik yang berkualitas	185. Cakupan Koordinasi Badan Penghubung Terhadap Mitra Strategis (Satuan : %)	70,00	100,00	100,00
41.	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang akuntabel	186. Persentase OPD Yang Memiliki Nilai Laporan Kinerja Pemerintah Daerah B (Satuan : %)	30,00	30,00	100,00
		187. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Pemerintahan (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		188. Presentase Keselarasan Kebijakan Pada Bidang Ekonomi (Satuan : %)	17,27	17,27	100,00
		180. Persentase Realisasi Target Prolegda (Satuan : %)	100,00	80,00	80,00
		181. Presentase Keselarasan Peraturan Perundangan Daerah Dengan Regulasi Hukum Nasional (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		182. Persentase Raperda Inisiatif Yang Memiliki Naskah Akademik (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		183. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Infrastruktur (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		184. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Kesra (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		185. Persentase Keselarasan Kebijakan Di Bidang Administrasi Pembangunan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		186. Presentase Kinerja Pengadaan Barang/Jasa (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		187. Capaian % Kinerja Pelayanan Rumah Tangga Pimpinan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		188. Capaian % Kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		189. Capaian % Kinerja Pelayanan keprotokolan (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
		190. Persentase Prasarana Dan Sarana Penunjang Kinerja Di Lingkungan Setda Dalam Kondisi Baik (Satuan : %)	75,00	75,00	100,00
42.	Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bebas Dari Korupsi	191.Capaian Nilai Sakip (Satuan : %)	75,00	-	-
		192.Indeks Integritas (Satuan : Poin)	73,48	-	-
		193. Capaian Leveling Maturitas SPIP (Satuan : Nilai)	3,00	3,02	Tercapai
43.	Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah yang berkualitas	194. Persentase Dokumen Perencanaan Rpjpd,Rtrw, Dan Rpjmd Yang Telah Ditetapkan Dengan Perda (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		195. Persentase Dokumen Perencanaan : Rkpd Yang Telah Ditetapkan Dengan Perkada (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
		196. Persentase Penjabaran Konsistensi Program RPJMD Kedalam RKPD (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		197. Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Dengan RTRW (Satuan : %)	70,00	70,00	100,00
		198. Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Ekonomi Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan (Satuan : %)	70,00	75,71	108.15
		199. Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Sosial Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan (Satuan : %)	70,00	63,43	90.61

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
		200. Persentase Usulan Kegiatan Lingkup Bidang Infrastruktur Yang Diakomodir Dalam Dokumen Perencanaan (Satuan : %)	70,00	78,21	111.72
44.	Penelitian dan Pengembangan yang berkualitas	201. Persentase Hasil Penelitian Yang Dimanfaatkan (Satuan : %)	50,00	69,31	138.62
		202. Persentase Inovasi Yang Diadopsi (Satuan : %)	50,00	62,37	124.74
45.	Pendapatan Daerah yang optimal	201. Persentas Peningkatan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Daerah (Satuan : %)	57,58	59,09	102,62
		202. Persentase Peningkatan Retribusi Daerah Dan Pendapatan Lain –Lain Terhadap Pendapatan Daerah (Satuan : %)	42,42	41,62	98,11
		203. Persentase Potensi Tunggakan Pajak Daerah Yang Dapat Di Selesaikan (Satuan : %)	14,20	25,00	176,06
46.	Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	204. Persentase Kepatuhan Opd Terhadap Peraturan Perundang – Undangan Di Bidang Keuangan (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		205. Persentase Kesesuaian Laporan Dengan Standar Akuntansi Pemerintah (Satuan : %)	80,00	80,00	100,00
		206. Capaian Tertib Administrasi Aset Daerah (Satuan : %)	100,00	100,00	100,00
47.	Terwujudnya Profesionalisme Aparatur	207. Prosentase Pegawai Yang Didistribusikan Sesuai Hasil Pemetaan (Satuan : %)	85,00	82,10	96,58
		208. Prosentase Pegawai Yang Tidak Melanggar Kode Etik Dan Disiplin Pegawai (Satuan : %)	85,00	85,00	100,00
		209. Prosentase Akurasi Data Kepegawaian (Satuan : %)	85,00	77,64	90,64
		210. Prosentase Penempatan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Kompetensinya (Satuan : %)	85,00	67,85	79,82

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	2	3	4	6	8
48.	Terwujudnya Kompetensi Aparatur	211. Rasio Peserta Diklat Kepemimpinan Dan Prajabatan, Manajemen Dan Pemerintahan Yang Lulus Berkategori Baik (Satuan : %)	80,00	88,72	110,9
		212. Rasio Peserta Diklat Teknis Umum,Substansif, Fungsional Yang Lulus Berkategori Baik (Satuan : %)	80,00	89,76	112,2
		214. Prosentase Kompetensi Dan Profesionalisme Penyelenggara Diklat (Satuan : %)	80,00	93,97	117,46

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1 KINERJA KEUANGAN MASA LALU

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja Pelaksanaan Keuangan Daerah yang realisasinya diwujudkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas perkiraan pendapatan daerah, Belanja Daerah, dan Pembiyaaan Daerah yang berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, didefinisikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Komponen pendapatan daerah terdiri atas :
 - a. Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Hasil Pajak Daerah, Hasil Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
 - b. Dana Perimbangan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus; serta
 - c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang berasal dari Pendapatan Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, dan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
2. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Komponen Belanja Daerah terdiri atas :
 - a. Belanja Tidak Langsung pada umumnya berupa belanja wajib dan mengikat yang terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya, dan Belanja Tidak Terduga; dan

- b. Belanja Langsung adalah belanja yang dalam pengalokasian didasarkan atas Program dan Kegiatan yang ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Komposisi belanja langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Modal.
- 3. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Komponen pembiayaan sebagai berikut :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Lalu, Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, dan Penerimaan Piutang Daerah;
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang didalamnya terdiri atas Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, dan Pembayaran Pokok Utang; serta
- 4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan

3.1.1.1 Realisasi Pelaksanaan APBD

Perkembangan APBD Provinsi Banten Tahun 2012-2016 menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. **Rata – rata pertumbuhan pendapatan daerah** berada pada kisaran 12,58 persen, pendapatan daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 5,41 triliun terus bergerak naik hingga pada tahun 2016 menjadi Rp 8,65 triliun. Pertumbuhan tersebut memberikan gambaran yang sangat baik terhadap peningkatan pendapatan daerah. Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah sebesar 12,9 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun 2012 masih sebesar Rp 3,30 triliun dan menjadi Rp 5,46 triliun pada tahun 2016.

Rata-rata pertumbuhan Dana Perimbangan pada posisi 56 persen. Realisasi Dana Perimbangan secara berurutan sebesar tahun 2012 sebesar Rp 1,01 triliun, tahun 2013 sebesar Rp 1,12 triliun, Tahun 2014 sebesar Rp 1,15, tahun 2016 sebesar Rp 0,97 triliun, dan tahun 2016 sebesar Rp 3,18 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan pendapatan dana perimbangan pada tahun 2015 dan selanjutnya meningkat tajam pada tahun 2016. Menurunnya pendapatan

dana perimbangan disebabkan oleh menurunnya pendapatan dana perimbangan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak (DBH Pajak) dan dana alokasi umum (DAU) seiring dengan menurunnya capaian penerimaan negara di sektor perpajakan. Selanjutnya pada Tahun 2016 pendapatan Dana Perimbangan meningkat tajam hal tersebut dipengaruhi oleh adanya pengalihan pos pendapatan belanja BOS yang pada tahun 2012-2015 berada pada kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dialihkan menjadi kelompok Dana Alokasi Khusus Non Fisik pada Kelompok Pendapatan Dana Perimbangan yang posisinya menyumbang rata rata pertumbuhan Dana Alokasi Khusus sehingga persentasenya meningkat drastis. hal ini juga sekaligus berdampak pada turunnya **rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah** menjadi minus 15,54 persen.

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yaitu dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Banten tergolong tinggi. Pada tahun 2016 Pemerintah Provinsi Banten memiliki rasio kemandirian keuangan daerah kategori tinggi yaitu sebesar 171 persen.

Kondisi yang lebih menggembirakan terhadap perkembangan pendapatan daerah di Provinsi Banten dimana Komposisi Pendapatan daerah selama kurun waktu 2012-2016 didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak daerah yang berasal pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), dan Pajak Rokok yang pada tahun 2016 secara kumulasi mencapai 63 persen dari Pendapatan Daerah. Komposisi dana perimbangan meningkat tajam pada tahun 2016 hingga mencapai 36 persen dari pendapatan daerah. hal tersebut merupakan dampak dengan adanya Dana BOS yang dikelompokkan dalam DAK Non Fisik. Selanjutnya untuk Dana alokasi umum sebesar 7,63 persen dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar 5,56 persen. Selanjutnya lain-lain pendapatan daerah yang sah berada komposisi yang sangat kecil yaitu sekitar 0,9 persen.

Seiring dengan meningkatnya pendapatan daerah, belanja daerah selama kurun waktu 2012-2016 juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dengan rata -rata pertumbuhan sebesar 14,37 persen. Realisasi

Belanja Daerah pada tahun 2012 sebesar Rp 5,31 triliun dan menjadi Rp8,92 triliun pada tahun 2016. Peningkatan Belanja Daerah tersebut ditopang oleh kenaikan Belanja tidak langsung dan Belanja Langsung. Komponen Belanja tidak langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten Kota, Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota, Partai Politik dan Pemerintahan Desa, serta Belanja Tidak Terduga. Pertumbuhan Rata-rata Belanja Tidak Langsung sebesar 15,68 persen dengan rata rata pertumbuhan sebagai berikut :

1. Realisasi Belanja Pegawai memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 11,49 persen. Peningkatan realisasi belanja pegawai terjadi seiring dengan adanya kenaikan gaji dan tunjangan PNSD serta adanya penambahan penghasilan PNSD sehubungan dengan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, penambahan tunjangan keluarga, serta adanya penambahan Jumlah PNSD.
2. Realisasi Belanja Hibah memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 20,89 persen yang didalamnya secara signifikan lebih dipengaruhi oleh belanja bantuan operasional sekola pendidikan dasar dan pendidikan menengah selain itu juga terdapat belanja hibah kepada lembaga pemerintah dan organisasi kemasayarakatan dalam rangka mendukung capaian sasaran pembangunan Provinsi Banten.
3. Realisasi Belanja Bantuan Sosial memiliki rata pertumbuhan sebesar 46,06 persen. Tingginya rata-rata pertumbuhan belanja bantuan social pada APBD Provinsi Banten Kurun Waktu 2012-2016 ditujukan dalam rangka menurunkan angka kemiskinan dalam bentuk crisis action program yaitu bantuan social untuk keluarga sangat miskin (JAMSOSRATU), bantuan social kecacatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pemenuhan kebutuhan dasar anak, dan KUBE.
4. Realisasi Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 15,46 persen. Kenaikan tersebut sebagai kosekuensi dengan terus meningkatnya realisasi pendapatan pajak daerah khususnya komponen dalam pendapatan asli daerah.
5. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan desa sebesar 27,54 persen sebagai upaya pemerintah Provinsi Banten dalam rangka membantu capaian pembangunan

Provinsi Banten yang kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota.

6. Realisasi Belanja Tidak Terduga tidak ada pertumbuhan. Hal tersebut disebabkan karakteristik Belanja Tidak terduga yang realisasinya hanya dapat digunakan untuk mendanai kegiatan pendanaan kebencanaan serta pembayaran atas pengembalian pendapatan tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi Belanja Langsung memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 13,44 persen. Belanja Langsung adalah kelompok Belanja yang alokasi di dalamnya ditujukan untuk melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan serta memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Komponen belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja Modal. Rata-rata pertumbuhan belanja pegawai sebesar minus 0,88 persen menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten semakin efisien dalam rangka penyelenggaraan program/kegiatan pembangunan. Kemudian rata-rata pertumbuhan belanja barang dan jasa sebesar 15,62 persen dan Belanja Modal sebesar 18,56 persen. Berdasarkan Komposisi Pertumbuhan rata-rata Belanja Langsung juga menggambarkan hal yang positif dimana pertumbuhan rata-rata tertinggi terdapat pada kelompok belanja modal dan diikuti dengan Belanja Barang dan jasa. Belanja barang dan Jasa ditujukan untuk membiayai program atau kegiatan yang bersifat operasional sedangkan belanja modal lebih ditujukan untuk penyediaan barang modal berupa tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan dan jembatan, serta asset lainnya yang menambah nilai bersih kekayaan pemerintah daerah.

Pembiayaan Daerah yang komponennya terdiri atas Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran pembiayaan memiliki rata-rata pertumbuhan sebesar 157 persen. Namun demikian nilai rata rata pertumbuhan tersebut kurang dapat memberikan gambaran karena realisasinya yang sangat berfluktuasi. Komponen pembiayaan daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Realisasi Penerimaan pembiayaan secara dominan hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA). Realisasi dimaksud sangat bergantung pada capaian program

kegiatan tahun sebelumnya yaitu capaian target pendapatan daerah dan realisasi belanja daerah, misalnya kinerja Belanja Daerah dalam satu tahun anggaran adalah sebesar 95,00 persen maka dalam kondisi capaian target pendapatan daerah sebesar 100 persen akan menyebabkan SiLPA sebesar 5,00 persen dari Belanja Daerah.

2. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan ditujukan untuk penyertaan modal kepada Badan usaha pemerintah daerah yaitu PT BGD, PT Bank Jabar Banten, BPR/LPK, dan PT JAMKRIDA. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud hanya dapat dilaksanakan dalam hal telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Badan Usaha.

Data perkembangan relaisasi APBD Tahun 2012-2016 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.1
Realisasi Pendapatan Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445	12,58
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.395.883.043.919	4.118.551.716.459	4.899.125.741.756	4.972.737.619.281	5.463.156.734.851	12,90
	Pajak Daerah	3.257.728.614.843	3.943.816.591.566	4.624.337.475.308	4.686.574.137.486	5.215.140.686.124	12,73
	Retribusi Daerah	6.418.727.194	13.669.633.828	30.734.862.552	47.693.913.039	72.500.255.191	86,25
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	32.293.948.793	38.331.096.525	42.421.275.504	42.436.400.420	50.083.829.359	11,86
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99.441.753.089	129.658.194.408	201.632.128.392	196.033.168.336	125.431.964.177	11,78
1.2	DANA PERIMBANGAN	1.015.105.167.897	1.126.004.171.838	1.159.872.633.122	976.787.585.900	3.185.553.940.739	56,07
	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	454.584.589.897	498.321.857.838	418.844.143.122	319.017.534.900	493.494.029.945	6,13
	Dana Bagi Hasil Pajak	451.137.609.766	494.140.096.588	415.270.932.833	313.708.987.325	489.941.663.642	6,32
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumberdaya Alam	3.446.980.131	4.181.761.250	3.573.210.289	5.308.547.575	3.552.366.303	5,56
	Dana Alokasi Umum	530.833.378.000	617.081.101.000	728.490.012.000	640.981.003.000	693.738.579.794	7,63
	Dana Alokasi Khusus	29.687.200.000	10.601.213.000	12.538.478.000	16.789.048.000	1.998.321.331.000	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	1.002.716.971.810	985.673.925.502	1.009.434.537.776	1.378.817.456.419	7.684.819.855	
	Pendapatan Hibah	4.256.098.000	4.670.632.000	5.441.490.000	5.245.680.000	5.479.200.000	6,77
	Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus	998.428.325.000	979.144.586.000	1.001.583.024.000	1.372.280.428.500	-	
	Pendapatan Lainnya	32.548.810	1.858.707.502	2.410.023.776	1.169.455.746	2.205.619.855	22,26
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445	12,58
2	BELANJA DAERAH						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.300.647.526.762	3.316.069.656.604	4.013.607.703.615	4.758.963.213.403	5.835.995.713.862	15,68

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Belanja Pegawai	384.981.221.088	423.141.043.569	481.328.441.248	544.637.409.065	594.410.665.016	11,49
	Belanja Bunga	-	-	-			-
	Belanja Subsidi	-	-	-			
	Belanja Hibah	1.288.347.988.660	1.331.719.638.201	1.244.666.640.856	1.500.205.771.116	2.493.536.667.187	20,89
	Belanja Bantuan Sosial	38.852.100.000	36.185.650.000	86.602.000.000	131.217.500.000	131.544.392.635	46,06
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	1.177.659.225.703	1.334.273.509.903	1.764.024.522.670	1.920.559.281.430	2.063.821.141.426	15,46
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	410.060.814.931	190.749.814.931	436.986.098.841	657.845.799.066	552.584.087.998	27,54
	Belanja Tidak Terduga	746.176.380	-	-	4.497.452.726	98.759.600	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	2.017.087.961.855	1.979.069.495.393	2.178.547.864.325	3.325.176.945.591	3.089.817.728.352	13,44
	Belanja Pegawai	148.070.030.980	181.862.098.337	144.776.980.151	156.935.312.600	134.390.258.250	(0,88)
	Belanja Barang dan Jasa	951.318.822.889	983.932.219.941	1.342.462.761.217	1.732.271.926.147	1.621.293.886.743	15,62
	Belanja Modal	917.699.107.986	813.275.177.115	691.308.122.957	1.435.969.706.844	1.334.133.583.359	18,56
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.317.735.488.617	5.295.139.151.997	6.192.155.567.940	8.084.140.158.994	8.925.813.442.214	14,37
3	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan Daerah	374.844.506.630	450.814.201.639	1.069.804.863.441	1.907.994.208.155	1.130.074.818.588	48,79
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000	316.100.000.000	38.088.000.000	22.000.000.000	301.500.000.000	655,19
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	354.844.506.630	134.714.201.639	1.031.716.863.441	1.885.994.208.155	828.574.818.588	157,64

3.1.2 Neraca Daerah

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Komponen Laporan Keuangan Pemerintah baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuiatas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Khususnya Neraca yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sangat diperlukan dalam mengetahui Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah sehingga dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi yang lebih efektif dan efisien.

Perkembangan Neraca Pemerintah Provinsi Banten per akhir periode Tahun 2013-2016 memberikan gambaran analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas, dan analisis rasio aktivitas.

1. Analisis Rasio Likuiditas

Menunjukkan kemampuan Pemerintah Provinsi Banten untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan pada saat jatuh tempo pembayaran. Terdapat dua jenis rasio likuiditas yaitu yang pertama current ratio yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset lancar yang dimiliki. Yang kedua quick ratio yaitu mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan aset yang lebih liquid lagi (aset lancar – persediaan). Rasio likuiditas Pemerintah Provinsi Banten dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.2
Rasio Likuiditas Tahun 2013-2016 (dalam juta rupiah)

PERKIRAAN	2013	2014	2015	2016
Aset Lancar	1.260.677	2.110.192	1.481.642	638.256
Kewajiban Jangka Pendek	159.112	411.239	219.324	161.737
Persediaan	184.399	194.730	85.322	59.351
Aset Lancar – Persediaan	1.076.278	1.915.462	1.396.320	578.905
Current Ratio	792,3persen	513,1persen	675,5persen	394,6persen
Quick Ratio	676,4persen	465,8persen	636,6persen	357,9persen

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas rasio lancar menunjukkan bahwa setiap Rp 1 utang lancar pemerintah dijamin dengan asset sebesar Rp 792 pada tahun 2013, Rp 513 pada tahun 2014, Rp 676 pada tahun 2015, dan Rp 395 pada tahun 2016.

2. Analisis Rasio Solvabilitas

Rasio ini sering disebut juga dengan *leverage* Ratio yang membandingkan dana yang disediakan oleh entitas (Pemerintah Provinsi Banten) dengan dana yang dipinjam dari pihak ketiga. Rasio ini menggambarkan seberapa besar aktiva Pemerintah Provinsi Banten yang dibiayai dari hutang. Selain itu juga rasio ini dapat menunjukkan indikasi tingkat keamanan pihak ketiga dalam memberikan pinjaman. Dalam neraca Pemerintah Provinsi Banten Kewajiban kepada Pihak Ketiga bukanlah dalam bentuk pinjaman akan tetapi lebih disebabkan adanya pembayaran atas penyelesaian pekerjaan yang belum dibayarkan pada tahun berkenaan. Hal tersebut yang secara lazim disebut dengan pembayaran kewajiban kepada pihak ketiga. Perbandingan Total Hutang terhadap ekuitas dan perbandingan Total Hutang terhadap Harta yang dirumuskan dengan :

- 1. *Total Debt to Equity Ratio* = (Total Hutang / Ekuitas) x 100persen
 - 2. *Total Debt to Aktiva Ratio* = (Total Hutang / Harta) x 100persen
- Dengan perhitungan sebagaimana tersaji pada table berikut :

Tabel 3.3
Rasio Solvabilitas Tahun 2013-2016 (dalam juta rupiah)

PERKIRAAN	2013	2014	2015	2016
Total Hutang	159.112	411.239	219.324	161.737
Total Ekuitas	10.562.084	12.124.101	9.917.022	9.873.242
Total Harta	10.721.196	12.535.341	10.136.346	10.034.979
<i>Debt to Equity Ratio</i>	1,5persen	3,4persen	2,2persen	1,6persen
<i>Debt to Aktiva Ratio</i>	1,5persen	3,3persen	2,2persen	1,6persen

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Atas Analisis Rasio Ekuitas di atas menggambarkan bahwa posisi keuangan Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun 2013-2016 yang dalam rangka pendanaan urusan pemerintahan setiap Rp 100 yang disediakan oleh Pemerintah Provinsi Banten terdapat dana pihak

ketiga pada tahun 2013 sebesar Rp 1,5, tahun 2014 Rp 3,4, tahun 2015 Rp 2,2, dan Tahun 2016 Rp 1,6. Selanjutnya Rasio Hutang terhadap Ekuitas dan Rasio Hutang terhadap harta tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena memang jumlah hutang atau kewajiban kepada pihak ketiga sangat kecil.

Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2016 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.4
Perkembangan Neraca Daerah Provinsi Banten Tahun 2013-2016

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
1	ASET					
2	ASET LANCAR					
3	Kas di Kas Daerah	1.069.618.555.761	1.907.621.796.822	1.128.287.102.245	559.135.160.663	
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	191.026.370	1.587.994.005	6.819.711	15.476.461	
5	Kas di Bendahara Penerimaan	16.115.408	12.165.852	11.442.099	21.711.156	
6	Kas di BLUD		-	-		
6	Kas Lainnya		-	1.776.274.143	-	
8	Setara Kas		-	-		
9	Investasi Jangka Pendek		-	-		
7	Piutang Pajak	982.839.840	982.839.840	248.971.810.239	9.021.215	
8	Penyisihan Piutang Pajak	-	-	(1.245.008.442)	-	
9	Piutang Pajak Netto (7 - 8)	982.839.840	982.839.840	247.726.801.797	9.021.215	
10	Piutang Retribusi	11.515.608	6.996.500	2.722.793.100	3.950.037.382	
11	Penyisihan Piutang Retribusi	-	-	(13.613.966)	-	
12	Piutang Retribusi Netto (10 - 11)	11.515.608	6.996.500	2.709.179.135	3.950.037.382	
13	Belanja Dibayar Dimuka		-	4.360.142.699	4.341.357.065	
14	Bagian Lancar Pijaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
15	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara		-	-		
16	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Negara Netto		-	-		
17	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-		
18	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah		-	-		
19	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah Netto		-	-		
20	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		-	-		
21	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat		-	-		
22	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Pusat Netto		-	-		
23	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		
24	Penyisihan Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya		-	-		
25	Bagian Lancar Pinjaman Kepada Pemerintah Daerah Lainnya Netto		-	-		
26	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-		
27	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-		
28	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-		
14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	942.736.192	941.952.856	
15	Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		-	(600.193.711)	609.400.125	
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Netto (14 - 15)		-	342.542.481	332.552.731	
17	Piutang Pendapatan		-	-		
18	Penyisihan Piutang Pendapatan		-	-		

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
19	Piutang Pendapatan Netto		-	-		
17	Piutang Lainnya	5.458.137.525	5.250.338.044	12.333.916.600	12.333.916.600	
18	Penyisihan Piutang Lainnya	-	-	(1.233.391.660)	(1.233.391.660)	
19	Piutang Lainnya Netto (17 - 18)	5.458.137.525	5.250.338.044	11.100.524.940	11.100.524.940	
23	Beban Dibayar Dimuka		-	-		
20	Persediaan	184.399.050.570	194.730.387.793	85.322.131.994	59.351.033.759	(27,01)
21	JUMLAH ASET LANCAR (3+4+5+6+9+12+13+16+19+20)	1.260.677.241.082	2.110.192.518.856	1.481.642.961.243	638.256.875.372	(6,44)
22						
23	INVESTASI JANGKA PANJANG					
24	Investasi Nonpermanen	-		-	-	
25	Pinjaman Jangka Panjang		-	-		
26	Investasi dalam Surat Utang Negara		-	-		
27	Investasi dalam Proyek Pembangunan		-	-		
28	Investasi Non Permanen Lainnya		-	-		
25	Jumlah Investasi Nonpermanen (24)	-	-	-	-	
26	Investasi Permanen					
27	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	508.205.306.980	566.544.946.815	586.500.973.362	890.955.868.859	
32	Investasi Permanen Lainnya		-	-		
28	Jumlah Investasi Permanen (27)	508.205.306.980	566.544.946.815	586.500.973.362	890.955.868.859	
29	Jumlah Investasi Jangka Panjang (25 + 28)	508.205.306.980	566.544.946.815	586.500.973.362	890.955.868.859	22,30

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
30						
31	ASET TETAP					
32	Tanah	3.495.111.433.984	3.630.900.594.740	3.917.705.028.739	4.082.334.554.413	
33	Peralatan dan Mesin	878.631.052.313	1.103.481.099.962	1.327.660.883.093	1.598.125.431.320	
34	Gedung dan Bangunan	943.857.010.081	1.126.405.344.156	1.189.278.468.983	1.502.925.038.331	
35	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	3.286.585.672.965	3.360.338.352.211	3.603.050.777.270	5.118.919.796.299	
36	Aset Tetap Lainnya	14.449.307.369	17.176.068.564	30.552.898.128	49.536.201.770	
37	Konstruksi Dalam Pengerjaan	305.065.325.219	592.143.515.375	810.353.792.147	285.089.989.300	
38	Akumulasi Penyusutan		-	(2.897.435.523.551)	(4.226.107.057.015)	
39	JUMLAH ASET TETAP (32 s/d 38)	8.923.699.801.930	9.830.444.975.008	7.981.166.324.811	8.410.823.954.418	(1,09)
40						
41	DANA CADANGAN					
42	Dana Cadangan		-	-	-	
43	JUMLAH DANA CADANGAN (42)		-	-	-	
44						
45	ASET LAINNYA					
50	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-		
51	Penyisihan Tagihan Penjualan Angsuran		-	-		
52	Tagihan Penjualan Angsuran Netto		-	-		
53	Tagihan Jangka Panjang		-	-		

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
54	Penyisihan Tagihan Jangka Panjang		-	-		
55	Tagihan Jangka Panjang Netto		-	-		
46	Tuntutan Ganti Rugi danTuntutan Perbendaharaan	992.935.472	906.626.939	8.050.000	-	
47	Penyisihan Tuntutan Ganti Rugi danTuntutan Perbendaharaan	-	-	-	-	
48	Tuntutan Ganti Rugi danTuntutan Perbendaharaan Netto (46 - 47)	992.935.472	906.626.939	8.050.000	-	
53	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		-	-		
49	Aset Tak Berwujud	13.731.477.929	15.881.180.062	20.425.685.129	16.124.276.720	
50	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	(14.371.625.552)	(5.395.130.045)	
51	Aset Tak Berwujud Netto (49 - 50)	13.731.477.929	15.881.180.062	6.054.059.577	10.729.146.675	
52	Aset Lain-lain	13.890.158.584	11.371.328.150	80.974.477.022	84.214.121.507	
53	Jumlah Aset Lainnya (48 + 51 + 52)	28.614.571.985	28.159.135.151	87.036.586.599	94.943.268.182	72,19
54						
55	Jumlah Aset (21 + 29 +39 + 43 + 53)	10.721.196.921.977	12.535.341.575.829	10.136.346.846.015	10.034.979.966.831	(1,07)
56						
57	KEWAJIBAN					
58						
59	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
60	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	4.863.050	76.883.508	6.819.610	15.476.461	
65	Utang Bunga		-	-		
66	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-		

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
67	Pendapatan Diterima Dimuka		-	-	186.364.932	
61	Utang Belanja	-	-	199.946.754.075	148.845.028.553	
69	Utang Beban		-	-		
62	Utang Jangka Pendek Lainnya	159.107.537.622	411.162.951.910	19.371.252.482	12.691.056.763	
68	Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan		-	-		#DIV/0!
63	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK (60 s/d 62)	159.112.400.672	411.239.835.418	219.324.826.167	161.737.926.709	28,51
64						
65	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
70	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		-	-		
70	Utang Dalam Negeri – Obligasi		-	-		
71	Premium (Diskonto) Obligasi		-	-		
71	Utang Jangka Panjang Lainnya		-	-		
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-		
67	JUMLAH KEWAJIBAN (63 + 66)	159.112.400.672	411.239.835.418	219.324.826.167	161.737.926.709	28,51
68						
69	EKUITAS DANA					
70	EKUITAS DANA LANCAR					
71	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	1.069.804.863.441	1.907.994.208.155	-	-	
72	Pendapatan yang Ditangguhkan	16.115.408	1.150.993.016	-	-	
73	Cadangan Piutang	6.452.348.613	6.240.046.384	-	-	

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016	Rata -rata Pertumbuhan
74	Cadangan Persediaan	184.399.050.570	194.730.387.793	-	-	
75	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	(159.107.537.622)	(411.162.951.910)	-	-	
76	Jumlah Ekuitas Dana Lancar (71 s/d 75)	1.101.564.840.410	1.698.952.683.438	-	-	
77						
78	EKUITAS DANA INVESTASI					
79	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	508.205.306.980	566.544.946.815	-	-	
80	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	8.923.699.801.930	9.830.444.975.008	-	-	
81	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	28.614.571.985	28.159.135.151	-	-	
82	Jumlah Ekuitas Dana Investasi (79 s/d 81)	9.460.519.680.895	10.425.149.056.973	-	-	
83						
84	EKUITAS DANA CADANGAN					
85	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	-	-	-	-	
86	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan (85)	-	-	-	-	
87						
88	JUMLAH EKUITAS/EKUITAS DANA (76 + 82 + 86)	10.562.084.521.305	12.124.101.740.411		-	
89	JUMLAH EKUITAS	10.562.084.521.305	12.124.101.740.411	9.917.022.019.848	9.873.242.062.122	(1,29)
90	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA (67 + 89)	10.721.196.921.977	12.535.341.575.829	10.136.346.846.015	10.034.979.988.831	(1,07)

3.2 KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai kepada pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Pengelolaan keuangan daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengamanatkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum daerah; pengelolaan keuangan daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja daerah; penyelenggaraan urusan desentralisasi; penyelenggaraan tugas pembantuan; dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.

3.2.1 Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

Dalam rangka menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari pos Pendapatan Asli Daerah, selama tahun 2012-2016 berbagai upaya telah dilakukan baik melalui kegiatan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber pendapatan daerah. Sejalan dengan arah kebijakan penganggaran di bidang pendapatan, Pemerintah Provinsi Banten berupaya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

melalui pajak daerah, non pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat dengan mempertimbangkan tidak menimbulkan biaya ekonomi tinggi bagi masyarakat.

Pemerintah Provinsi Banten selama tahun 2012-2016 telah melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mempertimbangkan perkembangan dunia usaha dan aspek keadilan masyarakat. Langkah-langkah yang ditempuh melalui:

1. Kegiatan-kegiatan Razia Kendaraan Bermotor, Sosialisasi Pajak Daerah melalui media cetak dan media elektronik serta penyuluhan pajak daerah.
2. Koordinasi dengan instansi terkait antara lain Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Kepolisian Daerah Banten, Jasa Raharja, Bank bjb dan Bank Banten serta Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Produsen Kendaraan Bermotor (GAIKINDO) dan Lembaga Pembiayaan/Leasing.
3. Peningkatan koordinasi bidang retribusi daerah dengan Perangkat Daerah penghasil.
4. Koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan Dana Perimbangan terutama Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak.
5. Manajemen Kas Daerah dalam rangka peningkatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
6. Peningkatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan melalui penambahan penataan modal pada perusahaan daerah dan lembaga sektor perbankan.
7. Penyempurnaan sistem administrasi dan pelayanan perpajakan.
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik bidang pajak daerah melalui peningkatan kinerja aparatur pelayanan pajak daerah.
9. Penataan regulasi dibidang perpajakan dan retribusi daerah.
10. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan melalui: rehabilitasi/renovasi bangunan gedung unit pelayanan teknis dinas yang representatif, pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung.
11. Peningkatan sumberdaya manusia melalui bimbingan teknis peningkatan kemampuan pelayanan aparatur, pelatihan penerapan sistem aplikasi samsat (sistem administrasi manunggal satu atap) dan pembinaan aparatur pelayanan di unit pelayanan teknis dinas.

12. Peningkatan pelayanan pada Unit Pelayanan Teknis Dinas/Kantor Bersama Samsat melalui kegiatan:
 - a. Samsat Keliling dengan jumlah armada bis samsat keliling sebanyak 6 unit.
 - b. Pembentukan Gerai Samsat sampai dengan tahun 2016, sudah terdapat 26 Gerai Samsat yang tersebar di 8 (delapan) Kabupaten/Kota.
 - c. Pembentukan Samsat Drive Thru di Kantor Bank Jabar Banten Serang.
 - d. Pembentukan Gerai Samsat Online bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di 2 lokasi yakni Kantor Bersama Samsat Cinere dan Kantor Bersama Samsat Jakarta Selatan serta dengan Polda Banten.
 - e. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 Kantor Bersama Samsat Cikokol, Serpong, Ciputat, Ciledug, Serang, Cilegon, Balaraja.
13. Peningkatan maintenance Sistem Aplikasi Samsat.
14. Peningkatan pendapatan pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) melalui Program Bulan Bakti/Panutan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Banten tentang penghapusan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor atas keterlambatan daftar atau bayar dan penghapusan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) atas penyerahan kedua dan selanjutnya bagi kendaraan bermotor yang berasal dari luar Provinsi Banten yang dilakukan setiap tahun pada periode bulan Agustus s.d November.

3.2.2 Kebijakan Umum Belanja Daerah

Selama tahun 2012-2016, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan belanja daerah. Upaya tersebut melalui:

1. Peningkatan sistem penganggaran daerah melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPADA),
2. Peningkatan sistem pengelolaan perbendaharaan daerah melalui Sistem Perbendaharaan Daerah (SIMPEDA),

3. Peningkatan sistem pelaporan keuangan daerah melalui Sistem Akuntansi Keuangan (SIAKU),
4. Peningkatan sistem manajemen barang daerah (SIMDA),
5. Peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan,
6. Peningkatan sarana dan prasarana administrasi pengelolaan keuangan,
7. Penyusunan pedoman pengelolaan keuangan,
8. Monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

3.2.3 Proporsi Penggunaan Anggaran

Gambaran realisasi dari kebijakan belanja daerah Provinsi Banten pada periode tahun anggaran sebelumnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah, adalah sebagai berikut:

1. Persentase Realisasi Belanja Terhadap Anggaran Belanja.

Tabel 3.5
 Persentase Belanja Daerah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012	2013	2014	2015	2016	RERATA
2	BELANJA DAERAH						
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	95	93	92	96	98,68	94.94
	Belanja Pegawai	96	89	85	96	97,72	92.74
	Belanja Bunga	-		-	-	-	-
	Belanja Subsidi	-		-	-	-	-
	Belanja Hibah	94	91	90	97	98,40	94.08
	Belanja Bantuan Sosial	98	42	95	96	90,38	84.28
	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	98	99	94	94	100	97.00
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota dan Pemerintahan Desa	88	98	99	100	98,32	96.66
	Belanja Tidak Terduga	12	0	0	14	57,04	16.61
	Belanja Bantuan PILKADA	-	-	-	-	-	-
2.2	BELANJA LANGSUNG	92	70	62	77	91,16	78.43
	Belanja Pegawai	96	90	85	88	92,89	90.38
	Belanja Barang dan Jasa	96	88	83	79	92,21	87.64
	Belanja Modal	89	53	40	74	89,74	69.15
	JUMLAH BELANJA DAERAH	94	83	79	87	95,94	87.79

Sumber : SIPD Provinsi Banten

2. Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur

Tabel 3.6
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Daerah
Provinsi Banten (dalam juta) Tahun 2012-2016

Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja Daerah + Pengeluaran Pembiayaan)	Persentase
a	b	c	d = (b / c) x100
TA 2012	533.051.252.068	5.337.735.488.617	9,99
TA 2013	605.003.141.906	5.611.239.151.997	10,78
TA 2014	626.105.421.399	6.230.243.567.940	10,05
TA 2015	701.572.721.665	8.106.140.158.994	8,65
TA 2016	728.800.923.266	9.227.313.442.214	7,90

Sumber : SIPD Provinsi Banten

3.2.4 Analisis Pembiayaan

Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah didefinisikan sebagai semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan sumbernya, pembiayaan dibagi menjadi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan sumber penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang di antaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Sedangkan ketika APBD diperkirakan surplus, diutamakan untuk pembayaran pokok utang, penyertaan modal (investasi) daerah, pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan.

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan dimasa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Defisit riil anggaran secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445
1.1	Pendapatan Asli Daerah	3.395.883.043.919	4.118.551.716.459	4.899.125.741.756	4.972.737.619.281	5.463.156.734.851
1.2	Dana Perimbangan	1.015.105.167.897	1.126.004.171.838	1.159.872.633.122	976.787.585.900	3.185.553.940.739
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	1.002.716.971.810	985.673.925.502	1.009.434.537.776	1.378.817.456.419	7.684.819.855
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	5.413.705.183.626	6.230.229.813.799	7.068.432.912.654	7.328.220.769.427	8.656.395.495.445
2	BELANJA DAERAH	5.317.735.488.617	5.295.139.151.997	6.192.155.567.940	8.084.140.158.994	8.925.813.442.214
2.1	Belanja Tidak Langsung	3.300.647.526.762	3.316.069.656.604	4.013.607.703.615	4.758.963.213.403	5.835.995.713.862
2.2	Belanja Langsung	2.017.087.961.855	1.979.069.495.393	2.178.547.864.325	3.325.176.945.591	3.089.817.728.352
	JUMLAH BELANJA DAERAH	5.317.735.488.617	5.295.139.151.997	6.192.155.567.940	8.084.140.158.994	8.925.813.442.214
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.2	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	20.000.000.000	316.100.000.000	38.088.000.000	22.000.000.000	301.500.000.000
	Defisit Riil	75.969.695.009	618.990.661.802	838.189.344.714	(777.919.389.567)	(570.917.946.769)

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 3.8
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Than Anggaran Sebelumnya	374.844.506.630	450.814.201.639	1.069.804.863.441	1.907.994.208.155	1.130.074.818.588
	Persentase dari Surplus / (Defisit Riil)	493,4	72,8	127,6	245,3	197,9
2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	-
3	Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan	-	-	-	-	-
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
6	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dari tabel terlihat bahwa dari kurun waktu tahun 2012 s.d 2016 terdapat kecenderungan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) yang relatif tinggi. Pada tahun 2016 SiLPA berada pada angka yang relative rendah.

Surplus/Defisit Riil adalah realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi belanja daerah ditambah dengan pengeluaran pembiayaan daerah. Surplus/Defisit riil APBD Provinsi Banten selama kurun waktu tahun 2012 s.d 2016 disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.9
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012-2016

NO	URAIAN	2012		2013		2014		2015		2016	
		Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA	Rp	persen dari SiLPA
1	Jumlah SiLPA	374.844.506.630	100,0	450.814.201.639	100,0	1.069.804.863.441	100,0	1.907.994.208.15 ₅	100,0	1.130.074.818.5 ₈₈	100,0
2	Pelampauan Penerimaan PAD	158.012.701.863	42,2	137.202.861.459	30,4	236.710.353.810	22,1	(97.047.849.936)	(5,1)	133.080.888.53 ₇	11,8
3	Pelampauan Penerimaan Dana Perimbangan	(2.775.832.103)	(0,7)	(108.975.760.162)	(24,2)	(7.872.318.878)	(0,7)	(205.381.332.100)	(10,8)	46.079.215.714	4,1
4	Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	(49.401.718.190)	(13,2)	(70.171.314.498)	(15,6)	(1.392.024.278)	(0,1)	(11.423.332.574)	(0,6)	2.284.819.855	0,2
5	Sisa Penghematan Belanja atau Akibat Lainnya	344.979.050.069	92,0	1.111.749.076.642	246,6	1.680.548.197.501	157,1	1.443.927.333.19 ₈	75,7	377.711.947.71 ₃	33,4
6	Kewajiban Kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum terselesaikan	92.031.033.129	24,6	159.112.400.672	35,3	411.239.835.418	38,4	219.324.826.167	11,5	161.737.926.70 ₉	14,3
7	Kegiatan Lanjutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Dari Tabel di atas dapat dilihat bahwa realisasi APBD Provinsi Banten mengalami surplus pada tahun 2012, 2013 dan 2014. dan hanya mengalami defisit pada tahun 2015 dan tahun 2016. Hal ini berakibat semakin besarnya SILPA yang bisa digunakan menjadi sumber pembiayaan pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan. Dalam hal perhitungan SILPA Tahun Berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

3.3 KERANGKA PENDANAAN

Berdasarkan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu sampai tahun 2016, digambarkan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2017 hingga tahun 2022 mendatang yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan.

3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Proyeksi pendapatan daerah menggunakan potensi dana rata-rata pertumbuhan realisasi masing-masing objek pendapatan daerah dalam kurun waktu 2017-2022, sebagaimana ditunjukkan pada tabel 3.10.

1. Pendapatan Daerah

a. Pendapatan Asli Daerah

Kelompok Pendapatan Daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Berdasarkan data realisasi pada tahun-tahun sebelumnya, komposisi pendapatan didominasi oleh Pendapatan Asli Daerah yang pada tahun 2016 mencapai 63 persen dari Pendapatan Daerah. Pencapaian Target Daerah dapat dilakukan intervensi secara langsung melalui program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten yaitu yang terkait dengan pajak daerah khususnya yang

bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Pajak Air Permukaan. Sedangkan Pajak Rokok realisasinya bergantung pada hasil pajak rokok yang dihimpun oleh Pemerintah Pusat.

Pada RPJMD Tahun 2017-2022, pertumbuhan rata-rata pendapatan asli daerah diproyeksi meningkat sebesar 7,8 persen. Penetapan target peningkatan pendapatan asli daerah ini didasarkan pada realisasi periode sebelumnya serta pertimbangan logis yang mendasari penetapan target pendapatan asli daerah, antara lain regulasi yang berlaku, daya beli masyarakat, titik jenuh angka pertumbuhan kendaraan bermotor, perubahan pola pembelian kendaraan bermotor baru yang bergeser ke LCGC (Low Cost Green Car).

Selanjutnya pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah diproyeksikan meningkat 0,67-3,2 persen, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan diproyeksikan meningkat 4,8 – 5,7 persen setiap tahunnya. Selanjutnya lain-lain PAD yang sah diproyeksikan tidak meningkat hal ini terkait dengan target perpajakan dimana pos tersebut berasal dan denda keterlambatan pajak, tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan yang diharapkan menurun setiap tahunnya.

b. Dana Perimbangan

Kelompok Pendapatan Daerah yang bersumber dari Dana bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana transfer dari Pemerintah Pusat yang realisasinya bergantung hasil penerimaan negara berupa pajak dan penerimaan bukan pajak yang formulasinya telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selaras dengan adanya asumsi pertumbuhan ekonomi, Pemerintah Provinsi Banten menargetkan kenaikan pendapatan dana bagi hasil pajak/bukan yang meningkat antar 5,2- 5,4 persen setiap tahunnya.

Dana Alokasi Umum diproyeksikan meningkat rata-rata sebesar 4,4 persen setiap tahunnya. Hal tersebut didasarkan atas asumsi peruntukkan dana alokasi umum untuk pembayaran belanja pegawai selanjutnya diprediksi setiap tahunnya untuk mendanai

gaji PNSD. Adapun hal yang menguatkan adanya kenaikan Dana Alokasi Umum asumsi membaiknya penerimaan negara selaras dengan target pertumbuhan ekonomi.

Dana Alokasi Khusus tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp 2,39 triliun, tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 2,62 triliun, tahun 2020-2022 dianggarkan tetap sebesar Rp 2,45 triliun, yang peruntukkannya berupa DAK Non Fisik untuk pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yang bersumber dari pendapatan hibah diproyeksikan meningkat dengan rata rata 11,47 persen pada tahun.

2. Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

Penganggaran belanja pegawai tahun 2018 menggunakan realisasi penganggaran pada P-APBD TA 2018 sedangkan untuk tahun 2019 menggunakan realisasi penganggaran pada APBD TA 2019. Selanjutnya untuk Tahun 2020 telah memperhitungkan kebutuhan gaji dan tunjangan selama 1 (satu) termasuk didalamnya gaji dan tunjangan ketigabelas dan keempat belas serta telah memperhitungkan *acress* sebesar 2,5 persen. Selanjutnya pada tahun 2021 dan 2022, Pemerintah Provinsi Banten telah menganggarkan belanja pegawai untuk peningkatan kesejahteraan PNS secara bertahap.

2) Belanja Hibah

Belanja hibah tahun 2018 dianggarkan sebesar Rp2,13 triliun selanjutnya tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp2,13 triliun untuk tahun 2020-2022 dianggarkan sebesar Rp2,28 triliun setiap tahunnya. Peruntukkan hibah ditujukan bagi pendanaan biaya operasional sekolah Pendidikan menengah dan pendidikan khusus.

- 3) Belanja Bantuan Sosial
Belanja bantuan sosial pada setiap tahunnya dianggarkan sebesar Rp105,97 miliar.
- 4) Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota
Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota tahun 2018 dan 2019 menggunakan realisasi penganggaran pada tahun berkenaan, penganggaran tahun 2020 tidak terdapat peningkatan mengingat target yang ditetapkan masih sama dengan tahun sebelumnya. Sedangkan Penganggaran belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota tahun 2021 dan 2022 diproyeksikan meningkat pada angka 3 persen seiring dengan kenaikan target pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak daerah.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Pemerintahan Desa.
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam rangka mendukung capaian sasaran pembangunan Provinsi Banten tahun 2017-2022. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, Partai Politik, dan Pemerintahan Desa dianggarkan sebesar Rp432,69 miliar
- 6) Belanja Tidak Terduga
Belanja tidak terduga dianggarkan pada kisaran 5 persen dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Penganggaran Belanja Tidak terduga tahun 2018 sebesar 19,18 miliar, tahun 2019 sebesar 55,43 miliar, tahun 2020 sebesar Rp45,00 miliar, tahun 2021 sebesar Rp63,00 miliar, dan tahun 2022 sebesar Rp64 miliar.

b. Belanja Langsung

Belanja Langsung ditujukan mendanai pelaksanaan program – program pembangunan Provinsi Banten dalam rangka pencapaian visi-misi Gubernur dan Wakil Gubernur yang berujung pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Banten. Pelaksanaan Program pembangunan tentunya telah mempedomani kewenangan tentang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penambahan penganggaran untuk beberapa kegiatan prioritas pada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 yaitu :

1. Penambahan anggaran BOSDA, seiring dengan bertambahnya peserta didik sehubungan dengan peningkatan daya tampung karena telah difungsikannya USB dan RKB yang dibangun;
2. Pengadaan Lahan untuk Unit Sekolah Baru dan Ruang Kelas Baru;
3. Penambahan anggaran untuk pembiayaan jaminan kesehatan masyarakat miskin;
4. Pembangunan RSUD Malingping, RSUD Cibaliung, dan RSUD Ciligrang berserta peralatannya (ALKES);
5. Pembangunan Pusat Distribusi Provinsi; dan
6. Pembangunan Sport Center.

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang merupakan hasil pelampauan target pendapatan dan efisiensi

b. Pengeluaran Pembiayaan

Rencana pengeluaran pembiayaan daerah akan diatur sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Proyeksi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah Provinsi Banten tahun 2017-2022 disajikan pada tabel 3.10 :

Tabel 3.10
PROVINSI BANTEN PROYEKSI ANGGARAN RPJMD PERIODE : 2017-2022

KODE	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN (Rp)					TOTAL
		P-APBD TA.2018	APBD TA.2019	APBD TA.2020	APBD TA.2021	APBD TA.2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
4	PENDAPATAN						
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	6.296.107.366.717,00	7.344.821.272.800,00	7.839.778.690.388,00	8.054.352.930.000,00	8.295.983.510.000,00	46.127.027.279.905,00
411	Pendapatan Pajak Daerah	5.942.765.440.000,00	6.967.729.412.400,00	7.525.148.000.000,00	7.750.902.440.000,00	7.983.429.510.000,00	44.153.404.312.400,00
412	Hasil Retribusi Daerah	19.826.483.520,00	18.569.771.200,00	20.700.708.000,00	21.321.720.000,00	21.961.370.000,00	44.277.745.735.120,00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	51.614.659.419,00	55.300.000.000,00	51.511.432.000,00	53.056.770.000,00	54.648.470.000,00	44.598.525.536.539,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	281.900.783.778,00	303.222.089.200,00	242.418.550.388,00	229.072.000.000,00	235.944.160.000,00	46.127.027.279.905,00
42	DANA PERIMBANGAN	4.176.078.228.000,00	4.481.092.487.000,00	4.307.492.103.262,00	4.428.517.173.000,00	4.491.359.850.000,00	26.375.899.691.262,00
421	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	707.384.582.000,00	711.779.997.000,00	650.605.096.612,00	711.779.997.000,00	711.779.990.000,00	4.205.109.652.612,00
422	Dana Alokasi Umum	1.072.903.468.000,00	1.140.003.353.000,00	1.197.003.520.650,00	1.256.853.696.000,00	1.319.696.380.000,00	11.511.266.450.262,00
423	Dana Alokasi Khusus	2.395.790.178.000,00	2.629.309.137.000,00	2.459.883.486.000,00	2.459.883.480.000,00	2.459.883.480.000,00	26.375.899.691.262,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.670.000.000,00	6.070.000.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	36.540.000.000,00
431	Pendapatan Hibah	5.670.000.000,00	6.070.000.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00	36.540.000.000,00
432	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540.000.000,00
433	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540.000.000,00
434	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540.000.000,00
435	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540.000.000,00
436	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.540.000.000,00
	TOTAL PENDAPATAN	10.477.855.594.717,00	11.831.983.759.800,00	12.153.470.793.650,00	12.489.070.103.000,00	12.793.543.360.000,00	72.539.466.971.167,00
5	BELANJA DAERAH						
51	BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.904.550.820.612,00	7.626.033.770.600,00	8.227.457.353.650,00	8.463.638.453.000,00	8.912.936.610.000,00	49.047.553.617.862,00
511	Belanja Pegawai	1.849.085.000.000,00	2.218.718.430.000,00	2.488.504.853.650,00	2.595.032.413.000,00	2.913.139.010.250,00	14.977.618.717.150,00
512	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.977.618.717.150,00
513	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.977.618.717.150,00
514	Belanja Hibah	2.132.051.721.820,00	2.310.418.836.000,00	2.280.418.830.000,00	2.280.418.830.000,00	2.280.418.830.000,00	28.541.764.594.970,00

KODE	URAIAN	PROYEKSI ANGGARAN (Rp)					TOTAL
		P-APBD TA.2018	APBD TA.2019	APBD TA.2020	APBD TA.2021	APBD TA.2022	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
515	Belanja Bantuan Sosial	69.735.000.000,00	105.979.000.000,00	105.979.000.000,00	105.979.000.000,00	105.979.000.000,00	29.141.394.594.970,00
516	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	2.370.396.604.634,00	2.502.794.028.200,00	2.874.861.200.000,00	2.986.514.740.000,00	3.076.706.299.750,00	46.029.373.767.304,00
517	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah/Pemerintahan Desa dan Partai Politik	464.093.476.400,00	432.693.476.400,00	432.693.470.000,00	432.693.470.000,00	472.693.470.000,00	48.736.934.600.104,00
518	Belanja Tidak Terduga	19.189.017.758,00	55.430.000.000,00	45.000.000.000,00	63.000.000.000,00	64.000.000.000,00	49.047.553.617.862,00
52	BELANJA LANGSUNG	4.150.713.910.000,00	4.528.497.626.200,00	4.627.041.250.000,00	4.538.894.270.000,00	4.392.778.390.000,00	26.630.703.836.200,00
521	Belanja Pegawai	266.963.509.100,00	55.587.557.000,00	76.879.822.000,00	90.777.880.000,00	87.855.560.000,00	665.919.888.100,00
522	Belanja Barang dan Jasa	2.119.833.963.595,00	2.785.054.925.626,00	2.609.020.656.470,00	2.723.336.554.000,00	2.504.922.830.000,00	15.913.011.647.791,00
523	Belanja Modal	1.763.916.437.305,00	1.687.855.143.574,00	1.941.140.771.530,00	1.724.779.836.000,00	1.800.000.000.000,00	26.630.703.836.200,00
	TOTAL BELANJA DAERAH	11.055.264.730.612,00	12.154.531.396.800,00	12.854.498.603.650,00	13.002.532.723.000,00	13.305.715.000.000,00	75.678.257.454.062,00
	TOTAL SURLPLUS / DEFISIT	(577.409.135.895,00)	(322.547.637.000,00)	(701.027.810.000,00)	(513.462.620.000,00)	(512.171.640.000,00)	(3.138.790.482.895,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	752.409.135.895,00	453.547.637.000,00	751.027.810.000,00	563.462.620.000,00	562.171.640.000,00	3.644.790.482.895,00
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	752.409.135.895,00	453.547.637.000,00	751.027.810.000,00	563.462.620.000,00	562.171.640.000,00	3.644.790.482.895,00
612	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.790.482.895,00
613	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.790.482.895,00
614	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.790.482.895,00
615	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.790.482.895,00
616	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.790.482.895,00
617	Penerimaan Kembali Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644.790.482.895,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	175.000.000.000,00	131.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	506.000.000.000,00
621	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	175.000.000.000,00	131.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	50.000.000.000,00	506.000.000.000,00
623	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000.000.000,00
624	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.000.000.000,00
	TOTAL PEMBIAYAAN NETTO	577.409.135.895,00	322.547.637.000,00	701.027.810.000,00	513.462.620.000,00	512.171.640.000,00	3.138.790.482.895,00
	TOTAL SILPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim RPJMD Provinsi Banten

3.3.2 Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran dikelompok 3 (tiga) prioritas, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Prioritas I**, merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (dedicated) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen).
Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Prioritas II**, Program Prioritas II merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas II berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.
3. **Prioritas III**, Prioritas III merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar.

3.4.2 Perhitungan Kerangka Pendanaan

Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan sebagaimana tabel 3.10

Tabel 3.10
Kapasitas Riil Kemampuan Kapasitas Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah
Tahun 2017-2022 (rupiah)

NO	URAIAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022
1	Pendapatan	10,477,855,594,717	11,831,983,759,800	12,153,470,793,650	12,489,070,103,000	12,793,543,360,000
2	Pencairan dana cadangan	-	-	-	-	-
3	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	752,409,135,895	453,547,637,000	751,027,810,000	563,462,620,000	562,171,640,000
	Total Penerimaan	11,230,264,730,612	12,285,531,396,800	12,904,498,603,650	13,052,532,723,000	13,355,715,000,000
	Dikurangi :					
4	Belanja Tidak Langsung	6,904,550,820,612	7,626,033,770,600	7,833,490,161,000	8,155,399,216,000	8,590,371,290,000
5	Pengeluaran Pembiayaan	175,000,000,000	131,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000	50,000,000,000
	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4,150,713,910,000	4,528,497,626,200	5,021,008,442,650	4,847,133,507,000	4,715,343,710,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim RPJMD Provinsi Banten

Kapasitas riil kemampuan kapasitas daerah untuk mendanai pembangunan daerah merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah, pencairan dana cadangan dan sisa lebih perhitungan anggaran dikurangi belanja wajib mengikat (Belanja Tidak Langsung) dan Pengeluaran Pembiayaan. Dalam hal kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi untuk mendanai program/kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan melalui skema pendanaan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU).

Tabel 3.11
Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Provinsi Banten
Tahun 2017 – 2022 (rupiah)

NO	URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	4,150,713,910,000	4,528,497,626,200	5,021,008,442,650	4,847,133,507,000	4,715,343,710,000
2	Prioritas I					
	- Belanja Pegawai pada BTL	1.849.085.000.000	2.218.718.430.000	2.488.504.853.650	2.595.032.413.000	2.913.139.010.250
	- Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota	2.370.396.604.634	2.502.794.028.200	2.874.861.200.000	2.986.514.740.000	3.076.706.299.750
3	Prioritas II					
	- Belanja Program/Kegiatan	4.150.713.910.000	4.528.497.626.200	4.627.041.250.000	4.538.894.270.000	4.392.778.390.000
4	Prioritas III					
	- Belanja Hibah	2.132.051.721.820,00	2.310.418.836.000,00	2.280.418.830.000,00	2.280.418.830.000,00	2.280.418.830.000,00
	- Belanja Bantuan Sosial	69.735.000.000	105.979.000.000	105.979.000.000	105.979.000.000	105.979.000.000
	- Belanja Bantuan Keuangan	464.093.476.400,00	432.693.476.400,00	432.693.470.000,00	432.693.470.000,00	472.693.470.000,00
	- Belanja Tidak Terduga	19.189.017.758	55.430.000.000	45.000.000.000	63.000.000.000	64.000.000.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tim RPJMD Provinsi Banten

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1 Permasalahan

Permasalahan sebagai suatu pernyataan tentang keadaan yang belum sesuai dengan yang diharapkan yaitu adanya perbedaan antara kinerja yang ditargetkan dengan yang terjadi sehingga harus dilakukan penyelesaiannya. Dalam penyusunan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Banten 2017-2022, kerangka yang harus dipahami oleh pemangku kepentingan tentang permasalahan sebagai berikut :

1. Permasalahan yang didefinisikan merujuk dari Bab 2 tentang gambaran kondisi umum daerah yaitu kinerja pembangunan yang telah dicapai pada periode sebelumnya, kemudian membuat capaian kinerja baru dan kinerja pembangunan yang belum tercapai, serta berusaha dicapai pada periode berikutnya.
2. Tema permasalahan yang diangkat berasal dari urusan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah meliputi urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non pelayanan dasar, dan urusan pilihan.
3. Permasalahan disampaikan dalam deskripsi pernyataan dan didukung dengan indikasi perangkaan yang menjadi perbedaan antara yang terjadi saat ini dengan yang hendak dicapai dalam periode lima tahun.
4. Permasalahan yang disampaikan harus memiliki hubungan logis dan rasional untuk dapat diselesaikan melalui pernyataan dalam indikator kinerja utama yaitu sesuatu yang akan dirubah, outcome yaitu sesuatu yang akan dicapai, dan output yaitu sesuatu yang akan dikerjakan.
5. Permasalahan yang diselesaikan melalui indikasi pencapaian indikator kinerja utama dalam ruang lingkup struktur, tugas

pokok dan fungsi yang terkait. Setiap tingkatan struktur, baik itu tingkat eselon satu, eselon dua, eselon tiga dan eselon empat, mengemban penyelesaian permasalahannya dengan indikasi pencapaian indikator kinerja utamanya. Karenanya setiap tingkatan eselon harus tahu dan memahami benar, untuk apa keberadaan dan fungsi Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala Perangkat Daerah, tugas dan fungsi kepala bidang, tugas dan fungsi kepala seksi/kasubag terhadap masalah-masalah yang baru, masalah yang belum selesai pada periode sebelumnya dan antisipasi masalah baru pada periode yang akan datang, dengan melihat pada Bab II Gambaran umum Kondisi Daerah, pencapaian kinerja kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

6. Pada Bab II Gambaran umum kondisi daerah, pada pencapaian data indikator kinerja kesejahteraan masyarakat, pencapaian data indikator kinerja pelayanan umum dan pencapaian data indikator kinerja daya saing, merupakan data hasil capaian kinerja periode RPJMD Provinsi Banten periode 2012-2017, yang menjadi dasar RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 pada target indikator kinerja utamanya.

Fungsi penetapan indikator kinerja utama pada sebuah urusan merupakan cara mengindikasikan solusi penyelesaian suatu permasalahan setelah melalui proses identifikasi dengan cermat terhadap permasalahan urusan tersebut. Identifikasi permasalahan tergambar dengan deskriptif dan perangkannya yang merujuk pada Bab II disetiap urusan pelayanan, harus menjadi tanggung jawab dan sangat dipahami Perangkat Daerah pada tingkat kepala Dinas, Kepala Badan, Kepada Bidang/Bagian sampai Kepala Seksi/Kasubag, sehingga setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah tersebut mengemban indikator kinerja utamanya merupakan indikasi penyelesaian permasalahan pada urusan pelayanan selama periode RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022.

Pentingnya setiap tingkatan struktur Perangkat Daerah memahami permasalahannya dan mengemban indikator kinerja utamanya, yang merupakan indikasi penyelesaian permasalahan urusan pelayanan karena akan sangat terkait pada capaian kinerja RPJMD Provinsi Banten periode 2017-2022 yaitu:

Keterkaitan pemahaman capaian kinerja daerah yang menjadi rujukan identifikasi permasalahan pada Bab II, kemudian dirumuskan permasalahannya pada Bab IV, dirumuskan visi, misi, tujuan sasaran pembangunan sebagai indikasi prioritas solusi permasalahan dalam pembangunan pada Bab V, dan ditetapkan arah kebijakan serta indikator kinerja utamanya pada Bab VI, kemudian permasalahan diselesaikan dengan program pembangunan daerah beserta indikator kinerja utamanya, kemudian dilakukan penataan program pembangunannya pada setiap urusan pelayanan, indikator kinerja utamanya dan indikasi kegiatan yang mendukung pencapaian kinerjanya disertai indikasi pendanaannya pada Bab VII. Detail indikator kinerja daerah dijabarkan pada Bab VIII.

Rangkaian tersebut merupakan hubungan sebab akibat, sebab yang belum tepat menentukan permasalahannya akan berakibat salah sasaran dalam menentukan kebijakan program dan kegiatannya serta yang mengemban indikator kinerja utamanya.

Berikut ini tabel permasalahannya urusan pelayanan yang mengarahkan pada indikasi pencapaian kinerjanya dan struktur yang harus mengemban penyelenggaraan solusinya.

Tabel 4.1
Permasalahan Urusan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
1	Pendidikan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Masih rendahnya akses pendidikan, kualitas dan penyediaan biaya operasional Sekolah Menengah	KADIS	
		Masih rendahnya akses pendidikan, kualitas dan penyediaan biaya operasional sekolah khusus		
		Belum baiknya mutu kelulusan SMA		KABID SMA
		Masih tingginya angka putus sekolah SMA		
		Masih rendahnya akses pendidikan SMA		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMA		
		Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi jenjang SMA		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SMK		KABID SMK
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) SMK		
		Masih rendahnya akses pendidikan SMK		
		Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi jenjang SMK		
		Relevansi <i>link and match</i> lulusan SMK dengan dunia kerja		
		Masih rendahnya Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Khusus		KABID Pendidikan Khusus
		Masih Kurangnya Sekolah pendidikan Khusus yang terakreditasi		KABID Ketenagaan dan Kelembagaan
		Kurangnya Rasio Ketersediaan Guru dan Murid pada Jenjang Pendidikan Menengah dan Khusus		
		Distribusi Guru belum merata		
		Masih rendahnya kompetensi guru		
		Belum terpenuhinya kebutuhan tenaga kependidikan		
		Minimnya ketersediaan lembaga		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		pendidikan menengah		
		Masih tingginya angka putus sekolah SMA/SMK		Kepala KCD
		Masih rendahnya APK/APM SMA/SMK		
		Kurangnya pemanfaatan Teknologi Informasi dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan		Kepala UPTD Teknologi Informasi, Komunikasi, Pendidikan dan Kebudayaan
2	Kebudayaan		DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
		Masih rendahnya perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan kebudayaan	KADIS	
		Masih kurangnya pelestarian budaya Banten		KABID Pembinaan Kebudayaan
		Kurangnya pembinaan organisasi kesenian dan seni budaya		
		Belum optimalnya Pelestarian kawasan dan benda cagar budaya		
		Belum Optimalnya Tata Kelola Taman Budaya dan Museum Banten		Kepala Taman Budaya dan Museum
3	Kesehatan		DINAS KESEHATAN	
		Masih rendahnya kesehatan berkualitas dan akses kesehatan	KADIS	
		Masih rendahnya akses dan kualitas Kesehatan Masyarakat		
		Masih belum optimalnya pelayanan kesehatan, Sumber daya kesehatan dan kefarmasian di RSUD		Direktur RSUD
		Minimnya Pembangunan fasilitas Pelayanan Kesehatan		KABID Pelayanan Kesehatan
		Masih adanya penduduk yang belum mendapatkan jaminan kesehatan		
		Minimnya sarana prasarana pelayanan kesehatan Rumah Sakit di Banten Selatan		
		Belum adanya RS Jiwa dan Pusat Rehabilitasi Ketergantungan Obat		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya Pemerataan fasilitas kesehatan dan keterjangkauan kesehatan bagi masyarakat		
		Masih tingginya Angka Kematian Ibu		KABID Kesehatan Masyarakat
		Masih tingginya Angka Kematian Bayi		
		Masih adanya masalah stunting di masyarakat		
		Belum optimalnya Kinerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit		KABID Pencegahan dan penanggulang an penyakit
		Masih tingginya penyakit menular dan tidak menular		
		Kesiapan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana provinsi (SPM)		
		Kesiapan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi (SPM)		
		Belum optimalnya kinerja SDM kesehatan dan Kefarmasian serta keterbatasan tenaga medis dan para medis		KABID Sumber Daya Kesehatan dan Kefarmasian
		Belum optimalnya distribusi tenaga medis		
		Masih kurangnya Kompetensi tenaga dan SDM kesehatan		Kepala UPTD Pelatihan Kesehatan
4.a	Pekerjaan Umum dan Penataan ruang		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	
		Belum Terwujudnya Sistem Jaringan Jalan, Jembatan dan Irigasi yang Andal serta Terpadu dan Berbasis Penataan Ruang yang Berkelanjutan	KADIS	
		Kondisi Jaringan jalan Provinsi belum Mantap		KABID Bina Marga
		Kondisi Jembatan Provinsi belum Mantap		
		Belum adanya Perda Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Banten		KABID Penataan Ruang

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya pengendalian dan pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang		
		Belum optimalnya pembinaan Jasa Konstruksi		KABID Jasa Konstruksi
		Belum efektifnya penanggulangan dan pemulihan banjir dan abrasi		KABID Pengelolaan Jaringan Sumber Daya Air
		Belum optimalnya penyediaan air baku		
		Belum optimalnya Luas layanan jaringan irigasi teknis (Ha)		KABID Pengelolaan Jaringan Pemanfaatan Air
		Masih kurangnya kebutuhan air minum curah lintas kab/kota (SPM)		
		Belum adanya pelayanan pengolahan air limbah domestic regional lintas Kab/Kota		
		Belum Optimalnya pelayanan UPTD		Kepala UPTD
5	Perumahan dan Pemukiman		DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	
		Masih banyak kawasan kumuh yang belum tertangani	KADIS	
		Tingginya Backlog (kepemilikan rumah) di Provinsi Banten		KABID Perumahan
		Belum adanya pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana provinsi		
		Belum adanya pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi		
		Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman		KABID Kawasan Permukiman
		Kurangnya penataan di Kawasan Banten Lama		
		Masih minimnya sarana infrastruktur fasilitas olahraga berstandar nasional/internasional		KABID Infrastruktur Permukiman

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
7	Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
		Belum efektifnya Pelayanan dan Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	KADIS	
		Masih kurangnya upaya penegakan Peraturan Perundang-undangan		KABID Penegakan Perundang-Undangan Daerah
		Belum optimalnya penanganan ketentraman dan ketertiban di masyarakat		KABID Ketentraman dan Ketertiban Umum
		Masih kurangnya perlindungan terhadap masyarakat		KABID Perlindungan Masyarakat dan Pengembangan Kapasitas
		Belum adanya Pemetaan daerah rawan kebakaran		KABID Pemadam kebakaran
8	Sosial		DINAS SOSIAL	
		Masih tingginya jumlah PMKS	KADIS	
		Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana		
		Masih kurangnya bimbingan Sosial dan Pelatihan Keterampilan		KABID Rehabilitasi Sosial
		Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar dalam panti(SPM)		KABID Rehabilitasi Sosial
		Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dalam panti(SPM)		
		Masih kurangnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar dalam panti(SPM)		
		Masih kurangnya rehabilitasi		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti(SPM)		
		Kurangnya Ketersediaan Data Kemiskinan, PMKS dan PSKS		KABID Perlindungan & Jaminan Sosial
		Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana		
		Masih kurangnya Masyarakat yang mendapat Jaminan Sosial		
		Belum optimalnya pemberdayaan sosial terhadap masyarakat		KABID Pemberdayaan Sosial
		Kurangnya Kelembagaan Kesejahteraan Sosial yang dibina		
		Masih kurangnya Pemberdayaan Keluarga yang dibina		
		Belum optimalnya masyarakat miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial		KABID Penanganan Fakir Miskin
		Optimalisasi pelayanan UPTD		Kepala UPTD
9	Tenaga Kerja		DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
		Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja	KADIS	
		Belum optimalnya capaian Indeks pembangunan ketenaga kerjaan		
		Masih kurangnya Hubungan Industrial, Kesejahteraan Pekerja dan Perlindungan Tenaga Kerja		
		Belum meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja		KABID Pelatihan dan Produktifitas Tenaga Kerja
		Masih kurangnya Pelatihan dan Kompetensi Kerja		
		Belum baiknya Hubungan Industrial		KABID Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
		Belum baiknya pengupahan dan Kesejahteraan Tenaga Kerja		
		Masih rendahnya kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja		
		Kurangnya Perlindungan Kondisi Lingkungan Kerja		KABID Pengawasan Ketenaga Kerjaan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Proporsi penduduk yang tergolong pekerja rentan masih cukup tinggi		
		Masih rendahnya Kesempatan Kerja		KABID Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Belum optimalnya Persiapan, Pemetaan dan Pengembangan Permukiman Transmigrasi		
		Belum optimalnya pengawasan kondisi lingkungan kerja		Kepala UPTD
10	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Masih kurangnya akses layanan keluarga berencana dan pembangunan keluarga	KADIS	
		Belum optimalnya administrasi kependudukan		
		Belum terpenuhinya Data Terpilah Gender dan Anak		KABID Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
		Belum efektifnya Perencanaan Responsif Gender		
		Kurangnya Partisipasi perempuan di lembaga legislatif, swasta dan pemerintah		
		Banyaknya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)		KABID Perlindungan Perempuan dan Anak
		Masih banyaknya Kasus Kekerasan Terhadap Anak		
		Masih terdapat perdagangan anak dan perempuan		
		Kurangnya penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan		
		Belum meningkatnya perlindungan hak perempuan		
		Kurangnya Perlindungan Khusus Anak		
		Masih kurangnya Pemenuhan Hak Anak		
11	Pengendalian Penduduk, Kependudukan dan Catatan Sipil		DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			ANAK, KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	
		Belum meningkatnya Penggunaan Alat Kontrasepsi / CPR	KADIS	
		Kurangnya Peserta KB baru		KABID Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Masih kurangnya Petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD)		KABID Kependudukan dan Catatan Sipil
		Masih kurangnya bayi berakte kelahiran		
		Masih kurangnya Pasangan berakte nikah		
		Belum optimalnya kepemilikan e-KTP		
		Masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk		
		Belum baiknya profil kependudukan		
12	Pemberdayaan masyarakat dan desa		DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
		Masih belum baiknya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Ekonomi Desa dan Pemerintahan Desa/Kelurahan	KADIS	
		Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pengembangan kerjasama Lembaga Desa dan Pemerintahan Desa		KABID Penataan dan Kerjasama Desa
		Belum optimalnya upaya realisasi lembaga kemasyarakatan desa katagori baik		KABIDPemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
		Belum optimalnya upaya realisasi masyarakat desa yang berhasil setelah diberdayakan		KABID Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Belum optimalnya pengelolaan Profil desa dan kelurahan		
13	Pangan		DINAS KETAHANAN PANGAN	
		Belum terpenuhinya ketersediaan pangan	KADIS	
		Masih kurangnya ketersediaan		KABID

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		bahan pangan		Penyelenggara an Ketahanan Pangan
		Banyaknya masalah distribusi pangan yang belum terselesaikan		KABID Keterjangkau an Pangan
		Masih kurangnya konsumsi energi dan konsumsi protein		KABID Konsumsi dan Keamanan Pangan
		belum optimalnya keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang dikonsumsi masyarakat		Kepala UPTD
14	Kelautan dan Perikanan		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	
		Masih rendahnya laju pertumbuhan sektor perikanan	KADIS	
		Kurangnya Pemanfaatan Sumber daya Kelautan yang sesuai dengan Zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil		KABID Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil
		Belum terkelolanya ruang laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan kawasan konservasi		
		Masih rendahnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)		
		Masih kurangnya Produksi Perikanan Tangkap		KABID Perikanan Tangkap
		Lambatnya peningkatan jumlah kelompok usaha mandiri		KABID Peningkatan Daya Saing
		Lambatnya peningkatan jumlah produk perikanan yang memenuhi standar		
		Kurangnya Penanganan Pelanggaran Sumberdaya Kelautan dan Perikanan		KABID Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
		Belum maksimalnya luas laut yang terawasi		
		Belum optimalnya pelabuhan perikanan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat nelayan		Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Pantai Labuan
		Belum optimalnya pengelolaan produksi, distribusi dan pemasaran induk dan benih unggul ikan air payau dan laut		Kepala UPTD Produksi Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
		Rusaknya sarana dan prasarana UPTD akibat bencana alam tsunami		
		Rendahnya usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah utara Provinsi Banten		Kepala Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Wilayah Utara
		Rendahnya usaha kelautan yang direkomendasikan dari jumlah pelaku usaha yang ada di wilayah selatan Provinsi Banten		Kepala Cabang Dinas Kelautan dan perikanan Wilayah Selatan
		Rendahnya standart peningkatan kualitas pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan		Kepala UPTD pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
15	Lingkungan Hidup dan Kehutanan		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN	
		Belum meningkatnya Indeks Kualitas Air	KADIS	
		Masih rendahnya Indeks Kualitas Udara		
		Masih kurangnya luas area rehabilitasi hutan dan lahan		
		Belum optimalnya Fungsi Hutan dan Kawasan Lindung		
		Kurangnya Ketaatan usaha/kegiatan terhadap peraturan perundangan dan ketentuan izin lingkungan hidup		KABID Penataan dan Peningkatan Kapasitas
		Rendahnya Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Lingkungan Hidup		
		Masih rendahnya indeks kualitas air dan indeks kualitas udara		KABID Pengelolaan Sampah, Limbah B3

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				dan Pengendalian Pencemaran
		Masih rendahnya fungsi hutan bagi masyarakat dan kawasan lindung		KABID Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan
		Kurangnya pengendalian penggunaan kawasan hutan		
		Minimnya Kesadaran masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan		KABID Pengelolaan DAS, KSDAE dan Pemberdayaan Masyarakat
		Masih belum optimalnya konservasi dan Tata Kelola DAS (Kawasan/DAS)		
		Belum optimalnya pelayanan pengujian Laboratorium Lingkungan		Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup
		Belum Optimalnya pengelolaan dan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan		Kepala Cabang Dinas DLHK
		Belum Optimalnya pengelolaan dan konservasi hutan rakyat		Kepala UPTD Tahura
		Masih kurangnya persediaan benih unggul yang bersertifikat bagi masyarakat		Kepala UPTD Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan
16	Perhubungan		DINAS PERHUBUNGAN	
		Masih kurangnya keselamatan dan kelancaran lalu lintas	KADIS	
		Masih kurangnya sarana dan prasarana transportasi darat		KABID Angkutan dan Teknik Sarana Prasarana
		Masih rendahnya ketertiban lalulintas		KABID Lalulintas
		Kurangnya pengembangan sistem transportasi wilayah		KABID Pengembangan Transportasi
		Belum optimalnya wilayah yang terlayani angkutan umum		
		Belum optimalnya penyelenggaraan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)		KABID Perhubungan Laut dan Udara
		Belum tersedianya pelabuhan		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		pengumpan regional		Kepala UPTD Pengelolaan Prasarana Perhubungan
		Masih belum optimalnya pelayanan penyelenggaraan transportasi		
17	Komunikasi dan informatika		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Peningkatan Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik)	KADIS	KABID Teknologi Informasi dan Komunikasi
		Masih kurangnya Ketersediaan Perangkat Teknologi Informasi		
		Pengelolaan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi (TIK)		KABID Aplikasi dan tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik
18	Statistik dan Persandian		DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	
		Indeks Keterbukaan Informasi Publik	KADIS	
		Belum meningkatnya dukungan layanan Persandian		
		Belum optimalnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		KABID Statistik, Persandian, informasi dan Komunikasi Publik
		Belum optimalnya pemanfaatan Data pembangunan Daerah dan integrasi data daerah		
		Belum optimalnya pengelolaan persandian dan keamanan informasi		
19	Koperasi dan UKM		DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
		Masih rendahnya kualitas koperasi	KADIS	
		Masih minimnya Realisasi peningkatasn omset usaha kecil		KABID Kelembagaan dan Pengawasan
		Masih kurangnya realisasi tingkat kesehatan koperasi KSP/USP dan KSPPS/ UKSPPS		
		Masih sedikitnya koperasi aktif binaan yang cukup berkualitas		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum optimalnya hasil implementasi pelatihan pemberdayaan koperasi		KABID Pemberdayaan Koperasi
		Belum optimalnya implementasi hasil pelatihan Usaha Kecil.		KABID Pemberdayaan Usaha Kecil
		Masih rendahnya usaha kecil yang bermitra dengan dunia usaha		
20	Penanaman Modal		DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
		Masih rendahnya realisasi PMA dan PMDN	KADIS	
		Masih kurangnya Indeks Kepuasan Pelayanan Investor		
		Masih kurangnya minat calon investor		KABID Promosi dan Pembinaan BUMD
		Belum optimalnya data informasi investasi yang disebarluaskan kepada public/pemangku kepentingan serta sistem informasi investasi yang sesuai		KABID Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Masih rendahnya Potensi Investasi yang bisa terealisasi		KABID Pengendalian Penanaman Modal
		Belum optimalnya Penerbitan perizinan dan non perizinan		KABID Pelayanan
		Masih kurangnya pengaduan yang terlayani		
21	Olah Raga dan Kepemudaan		DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	
		Masih kurangnya Indeks Pembangunan olahraga	KADIS	
		Masih kurangnya Indeks pembangunan pemuda		
		Masih minimnya Fasilitas Olahraga untuk ikut serta pada even-even wilayah, nasional dan internasional		KABID Pemberdayaan Olah Raga
		Masih belum optimalnya Pembinaan Atlet Olahraga Beprestasi		KABID Prestasi Olah Raga

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum efektifnya pembinaan Kelompok/ Organisasi Kepemudaan dan kewirausahaan pemuda mandiri		KABID Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda
		Belum optimalnya Pelayanan pembinaan olahraga		Kepala UPT Pembinaan dan Pelatihan Olahraga
22	Perpustakaan dan Kearsipan		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	
		Masih rendahnya budaya literasi di masyarakat	KADIS	
		Belum optimalnya SKPD Provinsi yang pengelolaan arsipnya sesuai dengan ketentuan		
		Belum optimalnya pelayanan Perpustakaan Sesuai Standar Minimal Perpustakaan		KABID Deposit, Pengembangan Koleksi dan Layanan Perpustakaan
		Belum optimalnya pembinaan perpustakaan Umum dan perpustakaan khusus		KABID Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan
		Masih minimnya pengelolaan Digitalisasi Arsip Statis dan dinamis Daerah		KABID Pengelolaan Arsip
23	Pariwisata		DINAS PARIWISATA	
		Belum meningkatnya Kunjungan Wisatawan	KADIS	
		Belum bertambah dan berkembangnya destinasi daya tarik wisata.		KABID Destinasi Pariwisata
		Masih minimnya peningkatan jumlah wisatawan setiap tahunnya		KABID Pemasaran Produk Pariwisata
		Masih rendahnya rata-rata lama kunjungan wisatawan		
		Belum berkembangnya Industri ekonomi kreatif		KABID Pengembangan Industri Pariwisata dan
		Belum berkembangnya Industri pariwisata dan ekonomi kreatif		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Ekonomi Kreatif
		Masih rendahnya kapasitas dan kualitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat bersaing		KABID Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
24	Pertanian		DINAS PERTANIAN	
		Belum optimalnya pertumbuhan Sektor Pertanian yang optimal	KADIS	
		Belum terpenuhinya sarana prasarana produksi pertanian		KABID Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Pertanian
		Masih kurangnya produktifitas komoditas tanaman pangan		KABID Tanaman Pangan
		Belum meningkatnya produktifitas komoditas tanaman hortikultura		KABID Hortikultura
		Masih kurangnya penerapan Inovasi Teknologi Hortikultura		
		Masih kurangnya produktifitas tanaman perkebunan serta kawasan komoditas perkebunan		KABID Perkebunan
		Masih kurangnya produksi daging (Non Impor)		KABID Produksi Peternakan
		Belum optimalnya peningkatan kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		KABID Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
		Kurangnya Pengendalian Penyakit Hewan Menular (PHM)		
		Belum optimalnya pelayanan dan tata kelola pelayanan di UPTD		Kepala UPTD
25	Energi dan Sumberdaya Mineral		DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
		Belum optimalnya Pelayanan kelistrikan dan energy terbarukan	KADIS	
		Belum Optimalnya Pertumbuhan Sektor		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Sumber Daya Mineral		
		Masih kurangnya Regulasi Geologi dan Air Tanah		KABID Geologi dan Air Tanah
		Kurangnya Pembinaan dan Pengendalian Geologi dan Air Tanah		
		Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan Rekomendasi perijinan air tanah dan minerba		
		Masih kurangnya Regulasi Mineral dan Batubara		KABID Mineral dan Batubara
		Masih minimnya Badan Usaha Pertambangan yang memenuhi Standar		
		Masih kurangnya Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		KABID Pengembangan Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan
		Belum efektifnya rencana dan Pengendalian Infrastruktur Energi dan Ketenagalistrikan		
		Masih belum optimalnya Pelayanan Listrik Perdesaan		
		Kurangnya pembinaan, Pengendalian dan Pemanfaatan Ketenagalistrikan		KABID Pemanfaatan Ketenagalistrikan
		Masih kurangnya ketenagalistrikan yang memenuhi standar		
		Kurangnya Regulasi Pemanfaatan Ketenagalistrikan		
26	Industri dan Perdagangan		DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	
			KADIS	
		Masih kurangnya LPE Sektor Perindustrian		
		Masih kurangnya LPE Sektor Perdagangan		
		Belum optimalnya jumlah Industri yang menyelenggarakan penyiapan SDM secara Link and Match		KABID Perindustrian
		Masih minimnya Kerjasama SDM berkompetensi Industri		
		Belum baiknya neraca ketersediaan barang pokok		KABID perdagangan dalam negeri
		Masih minimnya Produk Lokal		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		yang beredar pada Retail Modern		
		Belum optimalnya komoditas yang berpartisipasi pada Pasar Lelang Komoditi Berjangka		
		Masih rendahnya nilai transaksi penjualan ke luar negeri		KABID Perdagangan Luar Negeri
		Masih kurangnya Mutu/Daya Saing, Standarisasi dan Sertifikasi Produk		KABID Pengawasan
		Belum optimalnya Perlindungan Konsumen, dan Pengawasan Barang Beredar/Jasa		
		Belum optimalnya jumlah Produk Industri Kecil Berstandar dan bersertifikasi		Kepala Balai Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Industri
27	Pendapatan daerah		BADAN PENDAPATAN DAERAH	
		Belum optimalnya Pendapatan Asli Daerah	KABAN	
		Belum efektifnya perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah terhadap potensi daerah yang tersedia		KABID Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah
		Masih kurangnya Ketersediaan jumlah sistem/data/dokumen/informasi penunjang peningkatan pendapatan daerah		
		Belum optimalnya pendapatan pajak		
		Belum optimalnya Potensi Wajib Pajak Daerah		KABID Pendapatan Pajak Daerah & UPTD
		Masih rendahnya hasil Retribusi Daerah		KABID Retribusi Daerah dan pendapatan Lain-lain
		Belum optimalnya Hasil Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah		
		Masih kurangnya ketersediaan regulasi pengelolaan bagi hasil pajak/non pajak		
28	Administrasi Keuangan Daerah		BADAN	PENGELOLAAN

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			KEUANGAN DAN ASET DAERAH	
		Belum optimalnya pengelolaan keuangan pemerintah terhadap pencapaian kinerja daerah	KABAN	
		Belum Optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah		
		Belum Optimalnya pelayanan perbendaharaan dan anggaran		KABID Perbendaharaan dan Anggaran
		Masih kurangnya pelaksanaan manajemen aset daerah		KABID Aset Daerah
29	Kepegawaian		BADAN DAERAH	KEPEGAWAIAN
		Masih rendahnya kinerja pegawai dengan kategori baik	KABAN	KABID Perencanaan dan Mutasi Pegawai
		Belum baiknya peringkat Indeks Profesionalitas ASN		
		Belum optimalnya pegawai yang didistribusikan sesuai hasil pemetaan		
		Belum optimalnya penempatan pegawai sesuai dengan kebutuhan dan kompetensinya		KABID Pengembangan Sumberdaya Aparatur
		Belum semua pegawai memiliki kompetensi sesuai dengan standar kompetensi jabatan		KABID Pembinaan dan Data Kepegawaian
		Kurangnya akurasi data kepegawaian		
		Belum optimalnya penanganan pegawai yang melanggar kode etik dan disiplin pegawai		
30	Sumber Daya Aparatur		BADAN SUMBER DAERAH	PENGEMBANGAN DAYA MANUSIA
		Belum Optimalnya layanan kediklatan	KADIS	KABID Sertifikasi Kompetensi dan Pengendalian Mutu Diklat
		Belum meningkatnya Indeks Kompetensi ASN Provinsi Banten		
		Kurangnya Ketersediaan Bahan Penunjang Kediklatan dan Bimtek Aparatur		
		Masih kurangnya kompetensi dan profesionalisme penyelenggara diklat		

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Masih kurangnya peserta Diklat Teknis Umum, Substantif, dan Fungsional yang lulus berkategori baik		KABID Pengembangan Kompetensi Teknis dan Fungsional
		Masih kurangnya peserta Diklat kepemimpinan dan prajabatan, manajemen dan pemerintahan yang lulus berkategori baik		KABID Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Pemerintahan
31	Perencanaan Pembangunan		BADAN PEMBANGUNAN DAERAH	PERENCANAAN DAERAH
		Kualitas perencanaan pembangunan daerah yang belum optimal	KABAN	
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian		KABID Perekonomian
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang sosial dan pemerintahan		KABID Sosial dan Pemerintahan
		Belum optimalnya Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah		KABID Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
		Belum efektifnya Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah		KABID Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan
		Masih kurangnya penelitian yang dimanfaatkan		KABID Penelitian dan Pengembangan
		Belum lengkapnya ketersediaan Data pembangunan Daerah		
32	(Pengawasan)		INSPEKTORAT PROVINSI	
		Belum optimalnya Capaian Maturitas SPIP	INSPEKTUR	
		Masih rendahnya tindak Lanjut LHP		Inspektur Pembantu I
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan		Inspektur Pembantu II
		Belum optimalnya tindak lanjut temuan APIP dan BPK RI		Inspektur Pembantu III
		Masih belum optimalnya Laporan		Inspektur

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		keuangan SKPD sesuai SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan)		Pembantu IV
		Belum efektifnya Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Persentase penyelesaian kasus-kasus/pengaduan masyarakat		
33	DPRD		SEKRETARIAT DEWAN	
		Belum optimalnya Program-program Kerja DPRD untuk Melaksanakan Fungsi Pengawasan, Fungsi Pembentukan Perda, dan Fungsi Anggaran Dalam Dokumen RPJMD maupun Dokumen RKPD	KEPALA	
		Belum Maksimalnya Fungsi Legislasi		KaBag Hukum dan Persidangan
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Keuangan
		Belum efektifnya pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Sekretariat DPRD		KaBag Umum dan Kepegawaian
		Masih kurangnya Dukungan alat kelengkapan DPRD terhadap pelaksanaan fungsi Pengawasan		KaBag Alat Kelengkapan DPRD
34	Administrasi Pemerintahan		SEKRETARIAT DAERAH 1 - ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih perlunya perluasan kesempatan dan lapangan kerja	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih banyaknya Angka kematian Ibu dan angka kematian Bayi		
		Masih rendahnya daya beli masyarakat		
		Masih kurangnya Indeks pembangunan gender		
		Masih rendahnya kualitas sekolah menengah dan khusus		
		Masih rendahnya pelayanan kesehatan		
		Masih belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	KA.BIRO PEMERINTAHAN	KaBag Administrasi kewilayahan
		Masih kurangnya realisasi kebijakan administrasi kewilayahan		
	Masih kurangnya realisasi		KaBag	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		kebijakan administrasi pemerintahan dan otonomi daerah		Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Masih kurangnya kualitas dan kuantitas produk hukum daerah	KA.BIRO HUKUM	
		Belum selarasnya peraturan perundangan daerah Kabupaten/ Kota dengan regulasi hukum nasional		KaBag Perundang-Undangan
		Belum optimalnya pelayanan Bantuan Hukum dan HAM		KaBag Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia
		Kurangnya sosialisasi dan produk hukum yang terdokumentasikan		KaBag Sosialisasi Dan Dokumentasi Produk Huku
		Masih kurangnya pelayanan Kesejahteraan Rakyat	KA.BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Masih kurangnya dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi bidang kesehatan, Dukcapil, pengendalian penduduk, KB, Pendidikan dan Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga		KaBag Kesehatan, Kependudukan dan Capil, Pengendalian Penduduk dan KB, Pendidikan, kebudayaan, Kepemudaan Dan Olah Raga
		Masih kurangnya dokumen Kebijakan dan Evaluasi Bidang Sosial dan Agama		KaBag Sosial dan Agama
		Masih kurangnya Dokumen Rumusan Kebijakan dan Evaluasi Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat		KaBag Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, PMD, Ketentraman dan Ketertiban Umum, dan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
35				Perlindungan Masyarakat
	Administrasi Pembangunan		SEKRETARIAT DAERAH 2 - ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya Laju Pertumbuhan Ekonomi	ASISTEN PEMBANGUNAN DAN PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya pembangunan ramah karbon		
		Belum optimalnya Peningkatan daya saing daerah		
		Masih kurangnya layanan keuangan bagi masyarakat		
		Belum optimalnya infrastruktur daerah untuk menunjang pekonomian daerah		
		Masih tingginya pengangguran terbuka		
		Masih kurangnya implementasi kebijakan perekonomian daerah	KA.BIRO BINA PEREKONOMIAN	
		Masih rendahnya implelementasi kebijakan Sarana Perekonomian		Kabag Sarana perekonomian
		Kurangnya dokumen Kebijakan Industri Jasa dan Ketenagakerjaan		KaBag Industri Jasa dan Ketenagakerjaan
		Masih Rendahnya implementasi kebijakan mengenai produksi daerah		KaBag Produksi Daerah
		Masih Kurangnya Lembaga Perusahaan Daerah atau BUMD dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi ekonomi daerah		
		Belum maksimalnya kinerja layanan Administrasi Pembangunan	KA.BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	
		Kurang maksimalnya keselarasan kebijakan di bidang aministrasi pembangunan		KaBag Perencanaan Pelaksanaan Pembangunan dan Analisa Data
		Kurangnya maksimalnya Kinerja Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan		KaBag Pengendalian Pelaksanaan

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
				Pembangunan
		Belum baiknya Kinerja Pengadaan Barang/Jasa		KaBag Administrasi Pelaksanaan Pembangunan dan Pengadaan Barang/Jasa
		Masih kurangnya implementasi kebijakan daerah bidang Infrastrukutr dan SDA	KA.BIRO INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA ALAM	
		Belum maksimalnya dokumen kebijakan Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, Permukiman		KaBag Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Kurangnya dokumen kebijakan Infrastruktur ESDM		KaBag Bina Infrastruktur ESDM
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Kurang berkembangnya dokumen rumusan kebijakan Perhubungan Kominfo dan sandi		KaBag Perhubungan, Komunikasi dan Informasi dan Persandian
36	Administrasi Umum		SEKRETARIAT DAERAH 3 - ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
		Belum baiknya Laporan akuntabilitas kinerja institusi pemerintahan (LAKIP)	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
		Masih kurangnya penerapan E-GOVERNMENT		
		Belum optimalnya laporan kinerja pemerintah (LKPJ)		
		Belum efektifnya layanan Pimpinan daerah	KA.BIRO ADMINISTRASI RUMAH	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
			TANGGA PIMPINAN	
		Masih kurangnya kinerja Pelayanan Tata Usaha Pimpinan		KaBag Tata Usaha Pimpinan
		Belum optimalnya kinerja layanan Keprotokolan		KaBag Protokol
		Belum maksimalnya kinerja layanan Rumah Tangga Pimpinan		KaBag Rumah Tangga
		Belum tepatnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		
		Masih kurangnya kualitas pelayanan di sekretariat daerah	KA.BIRO UMUM	
		Belum maksimalnya kinerja Keuangan Sekretariat Daerah		
		Masih kurangnya Prasarana dan sarana penunjang kinerja di Lingkungan Setda		KaBag Perlengkapan
		Belum tepatnya laporan keuangan Sekretariat Daerah		KaBag Keuangan Setda
		Kurangnya laporan Akuntabilitas Kegiatan		KaBag Tata Usaha
		Belum maksimalnya kualitas kelembagaan dan ketatalaksanaan perangkat daerah	KA.BIRO ORGANISASI	
		Nilai Capaian LAKIP Provinsi belum maksimal		
		Belum optimalnya kualitas kebijakan bidang kelembagaan		KaBag Kelembagaan
		Belum optimalnya kualitas kebijakan ketatalaksanaan dan pelayanan publik		Kepala Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
		Belum tercapainya akuntabilitas kinerja aparatur		KaBag Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah
37			BADAN PENGHUBUNG DAERAH	
		Kurangnya koordinasi Badan Penghubung terhadap Mitra Strategis	KABAN	

NO	URUSAN	PERMASALAHAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	
		Belum efektifnya kepuasan pelayanan badan penghubung terhadap masyarakat		
38			BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
		Masih belum baiknya Indeks Resiko Bencana	KABAN	
		Belum optimalnya upaya Pencegahan dan kesiapsiagaan pengurangan resiko Bencana		KABID Pencegahan dan Kesiapsiagaan
		Belum optimalnya penanganan darurat bencana		KABID Kedaruratan dan Logistik
		Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Pasca Bencana		KABID Rehabilitasi dan Rekonstruksi

4.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya sangat signifikan bagi entitas daerah/ masyarakat dimasa mendatang, yang meliputi permasalahan yang berlarut sudah sampai pada titik tertentu, menimbulkan dampak amat luas, yang menyangkut permasalahan kewenangan dan terkadang tidak mudah dijelaskan tetapi dirasakan kehadirannya.

Perumusan isu strategis dilakukan melalui evaluasi kondisi lingkungan internal maupun eksternal yang dianggap dapat mempengaruhi pencapaian tujuan pembangunan yang tersaji dalam dokumen perencanaan. Untuk itu, perumusan isu strategis dalam RPJMD Provinsi Banten dimulai dengan pengamatan isu strategis dalam lingkup global, nasional maupun regional.

4.2.1 Isu Strategis Global

Berakhirnya MDGs pada 2015 masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pada periode Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) yang akan dilaksanakan sampai dengan 2030. Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang telah dilaksanakan selama periode 2000-2015 memang telah membawa berbagai kemajuan. Sekitar 70 persen dari total indikator yang mengukur target MDGs telah berhasil dicapai oleh Indonesia. Akan tetapi, beberapa indikator yang mengukur target di bidang kesehatan masih cukup jauh dari capaian dan harus mendapatkan perhatian khusus. Target yang belum tercapai di antaranya adalah tingkat kemiskinan nasional, angka kematian bayi, angka kematian ibu, prevalensi gizi buruk, prevalensi HIV dan AIDS serta beberapa indikator terkait lingkungan.

Sustainable Development Goals(SDGs) dicanangkan sampai dengan tahun 2030, merupakan kelanjutan *Millennium Development Goals*(MDGs), yang telah berakhir tahun 2015. SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa 1) mengakhiri kemiskinan, 2) mencapai kesetaraan dan 3) mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

1. Tanpa Kemiskinan;
2. Tanpa Kelaparan;
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan;
4. Pendidikan Berkualitas;
5. Kesetaraan Gender;
6. Air Bersih dan Sanitasi;
7. Energi Bersih dan Terjangkau;
8. Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak;
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur;

10. Mengurangi Kesenjangan;
11. Keberlanjutan Kota dan Komunitas;
12. Konsumsi dan Produksi Bertanggung Jawab;
13. Aksi Terhadap Iklim;
14. Kehidupan Bawah Laut;
15. Kehidupan di Darat;
16. Institusi Peradilan yang Kuat dan Kedamaian;
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Perpres 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) Setiap Pemerintah Provinsi memiliki kewajiban menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs. Meski Perpres tersebut sudah ditetapkan sejak setahun yang lalu, Penyusunan RAD SDGs Provinsi Banten masih dalam tahapan pembahasan dan belum ditetapkan dalam bentuk peraturan Kepala Daerah. Meski demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan ini menjadi salah satu rujukan dalam penentuan issue strategis RPJMD 2017-2022 mengingat ada keterkaitan antar tujuan pembangunan global (SDGs), Nasional (RPJMN) maupun daerah (RPJMD).

Implementasi SDGS bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya (Perpres 59/2017). Karenanya Provinsi Banten sebagai bagian dari lingkungan strategis nasional maupun Global memiliki kewajiban untuk mensukseskan capaian tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut.

4.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Isu Strategis Pembangunan Wilayah Jawa-Bali

Dalam lingkup pembangunan nasional, kebijakan pengembangan wilayah diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan wilayah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua dengan tetap mempertahankan momentum pertumbuhan di Wilayah Jawa-Bali dan Sumatera. Percepatan pembangunan wilayah ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, serta mengurangi kesenjangan.

Dalam konteks konsepsi pengembangan kewilayahan, Provinsi Banten merupakan bagian dari Wilayah Jawa, berkaitan hal tersebut maka isu strategis pengembangan yang harus dicermati adalah isu strategis di Wilayah Jawa-Bali yang meliputi:

1. Belum optimalnya potensi peningkatan nilai tambah dari aktivitas perdagangan internasional;
2. Semakin meningkatnya peran sektor sekunder (industri pengolahan) dan tersier (perdagangan dan jasa) dalam perekonomian;
3. Terancamnya fungsi wilayah Jawa-Bali sebagai salah satu lumbung pangan nasional;
4. Menurunnya daya dukung lingkungan;
5. Tingginya ancaman terorisme terhadap obyek vital;
6. Ketimpangan pembangunan intra-regional wilayah Jawa-Bali;
7. Menjaga momentum pertumbuhan di Jawa-Bali;
8. Tingginya tingkat pengangguran di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
9. Tingginya kepadatan dan konsentrasi penduduk di wilayah metropolitan Jabodetabek dan sekitarnya;
10. Tingginya kasus tindak pidana korupsi;

11. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan tingkat kemiskinan perkotaan di DI Yogyakarta;
12. Besarnya dampak bencana alam terhadap kehidupan dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat;
13. Rendahnya kapasitas dan daya saing SDM dalam menghadapi persaingan global dan Era Industri 4.0.

2. Isu Strategis Nasional Terkait Perubahan Iklim

Indonesia memiliki posisi yang sangat penting dalam isu perubahan iklim global. Di satu sisi, Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, yang berpengaruh besar bagi kehidupan masyarakat seperti; terganggunya cuaca dan iklim yang berpengaruh terhadap musim tanam berbagai komoditas pertanian; timbulnya berbagai bencana banjir di berbagai tempat yang tidak saja mengganggu musim tanam dan panen namun juga kehidupan masyarakat; rusaknya infrastruktur dan pengikisan area pantai akibat kenaikan muka air laut; dan dampak negatif di bidang kesehatan. Indonesia sebagaimana Negara lain juga menyumbang emisi GRK. Sehubungan dengan itu, Indonesia menilai penting untuk melakukan langkah-langkah mengatasi dampak perubahan iklim dan juga mengurangi peluang timbulnya perubahan iklim dengan mengurangi emisi Gas Rumah Kaca yang menjadi penyebab perubahan iklim global.

Sebagai kelanjutan dari komitmen Presiden untuk menurunkan emisi GRK sebesar 26 persen pada Tahun 2020 dengan upaya sendiri dan sebesar 41persen dengan dukungan internasional, diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 mengenai RAN-GRK. Selanjutnya Pada COP ke-21 Paris (2015), PresidenJoko Widodo menegaskan komitmen target

penurunan emisi Indonesia dalam INDC sebesar 29 persen secara sukarela pada tahun 2030

Secara eksplisit Perpres menjabarkan komitmen Presiden dengan membagi sasaran penurunan emisi GRK ke dalam 5 (lima) sektor utama yaitu Sektor Kehutanan, Sektor Pertanian, Sektor Energi dan Transportasi, Sektor Industri dan Sektor Persampahan selanjutnya adalah mengidentifikasi program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran penurunan emisi.

Provinsi Banten salah satu penyumbang emisi Gas Rumah Kaca dari berbagai Sektor tersebut, dalam upaya mendukung program nasional penurunan emisi Gas Rumah Kaca Di Provinsi Banten telah berkomitmen yang tertuang dalam Peraturan Gubernur No 39 tahun 2012 mengenai Rencana Aksi Daerah Penurunan Gas Rumah Kaca (RAD-GRK), menetapkan aksi mitigasi Daerah di 6 Sektor yaitu sektor Pertanian, Sektor Kehutanan, Sektor Industri, Sektor Transportasi, sektor energi dan sektor Limbah

Dengan demikian di Provinsi Banten perlu dilakukan program dan kegiatan yang mendukung penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Data Baseline dan proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca sampai dengan 2020 berdasarkan perhitungan BAU (*Bussines as Usual*) adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Proyeksi Emisi Gas Rumah Kaca Tahun 2020

No	SEKTOR	TAHUN 2020 (Ton CO2 eq)	%
1	Pertanian	494.519	7,6
2	Kehutanan	5.299.858	81
3	Pengelolaan Limbah	605.945	9,3
4	Industri	2.492	0,04
5	Transportasi	1.648,93	0,03
6	Energi	137.613	2.1
	TOTAL	6.542.075,93	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten

Tabel 4.3
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari 6 Sektor di Provinsi Banten
berdasarkan Pegub 39 Tahun 2012

No	SEKTOR	TAHUN 2010 (Ton CO2 eq)	%	TAHUN 2020 (Ton CO2 eq)	%
1	Pertanian Peternakan	573.462	0.69	709,734	0.69
2	Kehutanan	5.861.511	7.08	11,723,022	11.41
3	Limbah	1,044,163	1.26	1,871,502	1.82
4	Industri	27,690.000	33.45	38,570,000	37.55
5	Transportasi	3,876,200	4.68	6,002,500	5.84
6	Energi	43,730.000	52.83	43,830,000	42.67
	TOTAL	81,800,608	100	103,215,484	100

Sumber : SIPD Provinsi Banten

3. Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang mengatur mengenai prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-lain.

a. SPM pendidikan

SPM Pendidikan di Provinsi Banten adalah penguatan dalam pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Hal ini akan berimplikasi pada jumlah warga Negara usia 16-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah. Untuk pendidikan khusus juga bagian dari kewenangan Provinsi dimana indikator yang dilihat adalah jumlah warga Negara Usia 4–18 tahun yang termasuk dalam penduduk disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus. Hal ini berimplikasi pada impleemntasi Program di Dinas pendidikan untuk mulai membuat Unit sekolah baru dan ruang kelas baru.

b. SPM Sosial

Berdasarkan Permensos Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar teknis pelayanan dasar pada standar pelayanan minimal Bidang Sosial di daerah Provinsi dan di daerah Kabupaten/kota. Persoalan Panti rehabilitasi sosial jika dilihat adalah perlunya SDM professional untuk mengisi kegiatan di dalam panti, ini dimaksudkan agar pengelolaan panti bisa lebih baik bukan hanya sekedar rumah singgah saja tapi benar-benar kegiatan dan pengelolaanya lebih terasa bagi PMKS yang tinggal. Penambahan tenaga professional misalnya penyuluh sosial, pekerja sosial dan perawat dimana kondisi saat ini tidak ada satupun ASN Provinsi yang bertugas disana. Selanjutnya kasus seperti di Panti Rehabilitasi Tuna Sosial Lebak, dengan kondisi bangunan yang cukup luas namun perawatannya kurang, lalu kegiatan yang dilakukan hanya 4 kali setahun sehingga tidak ada satupun PMKS yang ditangani tinggal di Panti tersebut.

c. SPM Ketentraman dan Ketertiban Umum Pelindungan Masyarakat

Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum Provinsi yang harus di perhatikan adalah Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkara di Provinsi. Maksud dari SPM trantibumlinmas ini jika Provinsi mengeluarkan kebijakan misalnya relokasi bangunan atau alih fungsi bangunan warga untuk kebutuhan publik, maka Pemerintah Provinsi wajib untuk melayani warga yang terkena akibat kebijakan tersebut. Untuk saat ini kondisi warga yang banyak terkena penegakan Perda adalah terkait pelebaran jalan Provinsi di kawasan KP3B dan warga masyarakat yang terkena dampak akan diberikan ganti rugi oleh Provinsi.

d. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

➤ Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota

Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Upaya pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas kabupaten/kota diimplementasikan melalui program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional termasuk di Provinsi Banten. Pembangunan SPAM regional merupakan solusi untuk mengatasi kurangnya ketersediaan air baku di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Banten. Dengan perkembangan kabupaten/kota di Provinsi Banten seperti pertumbuhan perindustrian di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon, serta pertumbuhan jumlah penduduk perkotaan di Kota Serang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan mengakibatkan kebutuhan air yang meningkat namun tidak diimbangi dengan sumber air baku setempat, karena itu pemerintah pusat mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota untuk membangun SPAM regional.

SPAM regional dibangun atas kerja sama lintas-kabupaten/kota dan merupakan program penyediaan air minum bagi rakyat yang ada di wilayah layanan SPAM regional itu, sedangkan pengelolanya adalah pemerintah provinsi, Karena motor penggerak dan pengelola SPAM regional itu pemerintah provinsi, maka gubernur dan dinas provinsi terkait didorong untuk mengambil inisiatif dan meningkatkan perannya dalam perencanaan dan pembangunan SPAM regional di wilayahnya. Keunggulan

SPAM regional adalah agar memudahkan pemerintah provinsi dalam penanganan konservasi daerah tangkapan air, serta kemudahan dalam manajemen pengelolaan sumber daya air baku.

Saat ini di wilayah Provinsi Banten terdapat pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak serta Bendungan Sindangheula di Kabupaten/Kota Serang. Direncanakan akan dibangun SPAM regional melalui WTP Bendungan Karian dan Bendungan Sindangheula yang nantinya akan memenuhi kebutuhan air yang ada di wilayah Provinsi Banten bagian utara.

➤ **Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota**

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota SPM bidang pekerjaan umum sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan.

Beberapa permasalahan yang ada dalam pengelolaan air limbah permukiman seperti rendahnya tingkat pelayanan pengolahan air limbah di perkotaan dan perdesaan serta fasilitas pengolahan air limbah yang belum memenuhi standar teknis yang ditetapkan, belum memadainya perangkat peraturan perundangan yang diperlukan dalam sistem pengelolaan air limbah permukiman serta masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan-peraturan yang terkait dengan pencemaran air limbah, masih lemahnya fungsi kelembagaan di daerah yang melakukan pengelolaan air limbah permukiman serta masih rendahnya kapasitas SDM yang melaksanakan pengelolaan air limbah permukiman serta terbatasnya

sumber pendanaan pemerintah untuk investasi maupun pengembangan pengolahan air limbah serta rendahnya tarif pelayanan air limbah yang mengakibatkan kurangnya biaya operasi dan pemeliharaan serta pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Pemerintah Provinsi Banten bakal melibatkan kelompok masyarakat serta dunia usaha dalam penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) di Provinsi Banten.

Implementasi dari penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota di Provinsi Banten dibentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) SPALD sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keuangan daerah Provinsi Banten.

Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas kabupaten/kota diharapkan dapat mewujudkan pengembangan dan pengelolaan air limbah domestik yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan; mewujudkan peningkatan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup; melindungi kualitas sumber air dari pencemaran air limbah domestik; mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan mewujudkan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan kualitas sumber air.

e. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

➤ Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi

Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru

yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat bencana bersifat fluktuatif dan dinamis mengingat bencana tidak dapat diprediksi, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan dan rehabilitasi rumah secara kualitatif. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan SPM terkait penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi adalah penetapan status kebencanaan oleh Gubernur. Hal tersebut penting sebagai dasar hukum pelaksanaan SPM melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD pemerintah provinsi.

➤ **Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.**

Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi merupakan SPM bidang perumahan rakyat sesuai dengan Permendagri No. 100 Tahun 2018 tentang SPM dimana merupakan SPM baru yang menjadi urusan wajib bagi pemerintah provinsi yang harus dilaksanakan. Namun demikian data terkait jumlah rumah akibat adanya program pemerintah daerah yang mengakibatkan adanya relokasi rumah bagi masyarakat, sehingga pencapaian SPM yang dimaksud merupakan pencapaian penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah secara kualitatif berdasarkan hasil kajian dan produk rencana tata ruang / masterplan program pemerintah provinsi.

Program-program Pemerintah Provinsi Banten tertuang dalam indikasi program Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten seperti Kawasan Strategis Provinsi,

rencana jalan baru prospektif terutama terkait dengan perencanaan tematik dan spasial Metropolitan Serang sebagai ibukota Provinsi Banten. Selain itu terdapat program-program prioritas Gubernur seperti penataan bangunan monumen dan bersejarah.

Terkait dengan program pemerintah pusat yang walaupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun pada beberapa kegiatan mensyaratkan agar Pemerintah Provinsi Banten yang melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan Undang-Undang No. 12/2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum; seperti adanya Proyek Strategis Nasional.

4.2.3 Isu Strategis Daerah Provinsi Terdekat

A. Isu Strategis Jawa Barat

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena ataubelum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampakjangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun isu strategis pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat, yaitu:

- a. Pertumbuhan penduduk dan persebarannya.
- b. Kualitas dan aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.
- c. Pengangguran dan ketenagakerjaan.
- d. Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.
- e. Kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur dasar dan strategis.
- f. Kualitas lingkungan hidup untuk mendukung terwujudnya Jabar Green Province.
- g. Kualitas demokrasi.

- h. Kecepatan dan ketepatan penanganan bencana serta adaptasi masyarakat terhadap bencana.
- i. Pemerintahan daerah yang efektif dan efisien.
- j. Pelestarian nilai – nilai dan warisan budaya lokal.
- k. Pengembangan Industri Wisata Jawa Barat.
- l. Penanggulangan penduduk miskin.
- m. Pasar global dan Asean – China Free Trade Area (ACFTA).
- n. Pencegahan dan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- o. RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 - 2017 IV - 8.
- p. Alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian dan penertiban okupasi lahan tidur (HGU).
- q. Ketahanan Pangan.
- r. Keamanan dan ketertiban daerah.

B. Isu Strategis Provinsi Jawa Barat terkait Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi Jawa Barat dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang penekanan yaitu:

- 1. Geografi
 - a. Luas wilayah jawa barat 35.377,76 Km² yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 9 Kota data pada tahun 2014 panjang jalan di jawa barat 22.751,155 Km, dan moda transportasi yang tersediakendaraan darat mobil dengan jumlah terminal 122, moda transportasi laut dengan 10 pelabuhan, terdapat kereta api dan bandara udara Husen Sastra Negara.
 - b. Menganangkan sebagai green province, dan kecepatan dalam penanganan bencana serta alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian menjadi hal yang penting di Jawa Barat

- c. Hal yang perlu menjadi perhatian Provinsi Banten adalah bentuk kerjasama penataan infrastruktur di perbatasan yang dapat mensinergiskan beberapa moda transportasi bagi arus barang dan penumpang, green province bagi JawaBarat juga menjadi dorongan bagi Provinsi Banten untuk menjadi bagian dari lingkungan yang sehat bagi kedua daerah. Secara Bersama mempertahankan fungsi lahan pertanian yang maju sebagai daerah lumbung padi secara bersama-sama.

2. Demografi

- a. Jumlah penduduk jawa barat 46,7 Juta jiwa dengan luas 35.377,76 Km², tingkat kepadatan penduduk 1000 jiwa km² dengan laju pertumbuhan penduduk 1,48 % pertahun, dengan tingkat pengangguran terbuka TPT 8,49 % dan penduduk miskin 8,77 % atau 4,17 Juta
- b. Pembangunan manusia di Jawa Barat pada tahun 2016 terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat. Pada tahun 2016, IPM Jawa Barat telah mencapai 70,05. Angka ini meningkat sebesar 0,55 poin dibandingkan dengan IPM Jawa Barat pada tahun 2015 yang sebesar 69,50. Kontribusi berasal dari angka harapan hidup saat lahir 72,44 Tahun, Rata rata lama sekolah 7,95 dan pengeluaran perkapita 10.035.
- c. Wilayah perbatasan yang sangat dekat dengan isu kualitas sumber daya manusia yang hampir menyerupai namun dengan jumlah penduduk Provinsi Jawa Barat yang lebih besar menjadi perhatian terhadap potensi masing-masing daerah untuk menata kependudukan dan catatan sipilnya lebih berkualitas, kerjasama dalam mempertahankan kualitas pembangunan manusia dan

menjaga pertumbuhan laju penduduk dengan proporsi yang wajar dan seimbang.

3. Pemerintahan

- a. Provinsi Jawa Barat dengan Jumlah penduduk 46,7 Juta dengan jumlah Pegawai negeri sipil 333.713, mengelola 27 Kabupaten/Kota, 626 kecamatan, 2.671 kelurahan, 3.291 desa perlu menjalankan roda pemerintahan dengan efektif dan efisien dengan senantiasa menjaga ketertiban umum. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat dalam demokrasi dari target di atas 70 persen realisasi 60 %.
- b. Provinsi Banten dalam pengelolaan pemerintahan daerah perlu selalu menjaga konsistensi kualitas pelayanan pemerintahan, menjaga stabilitas keamanan ketertiban dan menjaga partisipasi masyarakat dalam demokrasi secara bersama-sama dengan Provinsi Jawa Barat.

4. Ekonomi

- a. Ekonomi Jawa Barat tahun 2016 tumbuh 5,67 persen meningkat dibanding tahun 2015 sebesar 5,04 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 14,27 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (KRT) sebesar 5,60 persen. Tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 42,49 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 15,15 persen, dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 8.90 persen.
- b. Isu perekonomian ini di Jawa barat salah satu untuk dapat menanggulangi kemiskinan dengan memperkuat Basis Data terpadu oleh Tim Koodinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK).

- c. Provinsi Banten dengan potensi perekonomian yang telah dicapai dapat membangun kerangka ekonomi dengan orientasi pada pertumbuhan ekonomi yang memiliki dampak terjadinya penurunan angka kemiskinan. Perlu disimulasikan dan di formulasi agenda-agenda yang dapat dilakukan bersama dengan memberi hasil yang optimal.

5. Kerjasama

- a. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas menjadi potensi besar bagi pertumbuhan daerah di sekitar perbatasan Provinsi Banten.
- b. Kerjasama yang dapat dilakukan dengan pengembangan infrastruktur perbatasan, moda transportasi untuk memperlancar arus barang dan penumpang. Potensi Parawista pada masing-masing daerah dapat dikerjasamakan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Kerjasama bidang perdagangan industry dan investasi dapat dikembangkan dengan optimal.

C. Provinsi DKI Jakarta

Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi lainnya yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten. Permasalahan pembangunan yang muncul di perbatasan kedua wilayah akan lebih efektif dan efisien jika ditangani secara bersama dengan melibatkan kedua belah pihak. Untuk mewujudkan hal tersebut, dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana dengan mempertimbangkan sistem informasi dan teknologi serta penegakan hukum, serta menerapkan prinsip-prinsip *urban management* sesuai dengan kondisi setempat. Dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dengan penekanan pada pemberdayaan masyarakat, kerjasama dengan

lembaga keuangan, Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dan kerangka kerjasama lainnya.

- a. Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengurangan ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja
- c. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kota
- d. Peningkatan ketentraman, ketertiban dan keamanan masyarakat
- e. Penanggulangan dampak perubahan iklim
- f. Pengolahan kependudukan yang berkualitas
- g. Peningkatan perbaikan iklim investasi
- h. Pengelolaan pembiayaan pembangunan
- i. Pembangunan telematika Jakarta

D. Isu Strategis Provinsi DKI Jakarta terkait Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi DKI Jakarta dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang penekanan yaitu:

1. Geografi.
 - a. Keseluruhan luas wilayah DKI Jakarta 7.659,02 Km² yang meliputi 662,33 Km² daratan termasuk 110 pulau di Kabupaten Kepulauan Seribu dan 6.977.5 Km² Lautan, Terdapat 4 aliran sungai dari 17 Aliran sungai DKI Jakarta yang bersinggungan dengan kabupaten Kota di Provinsi Banten dan Terdapat 39 ruas jalan dengan panjang 155.687 km yang banyak bersinggungan dengan ruas jalan Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Berbagai moda transportasi pula melintas bersama di jalan Nasional yang menghubungkan Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Banten.
 - b. Untuk menghadapi tantangan yang terjadi atas potensi kedua provinsi tersebut, perlu sepakati solusi dan

strategi pembangunan bersama dalam menghadapi banjir, kemacetan lalu lintas, moda transportasi barang dan orang, dan penyediaan infrastruktur yang melayani kepentingan publik serta pemanfaatan bersama ruang terbuka hijau.

2. Demografi

- a. Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 5 Kota dan 1 kabupaten Kepulauan pada 2016 jumlah penduduk 10.177.924 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1.02persen dengan luas wilayah 7.659,02 Km² maka kepadatan penduduk 15 366,87/km² , terdapat masyarakat miskin 412,8 ribu , dengan tingkat pengangguran terbuka TPT 7,23persen dan Tingkat Partisipasi Angkat Kerja (TPAK) 66.39 persen.
- b. Pembangunan manusia di Provinsi DKI Jakarta terus mengalami kemajuan yang ditandai dengan terus meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta. Pada tahun 2016, IPM DKI Jakarta telah mencapai 79,60. Angka IPM tersebut meningkat sebesar 0,61 poin dibandingkan IPM tahun lalu yang sebesar 78,99.
- c. Jumlah tindak kejahatan/pelanggaran kamtibmas tahun 2014 sebanyak 14.44 kejadian. Jumlah anggota polisi pada tahun 2013 sebanyak 9.090 orang dimana mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2012 (10.408 orang).
- d. Dengan Potensi DKI Jakarta yang berbatasan langsung dengan Provinsi Banten, perlu di tingkatkan pengelolaan kependudukan yang lebih ketat dan berkualitas serta peningkatan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat secara bersama-sama.

3. Ekonomi

- a. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2016 mencapai 5.85 persen yang berarti melampaui nasional sebesar 5,02 persen dan sedikit turun dibandingkan 5,89

persen (yoy) pada tahun 2015 silam dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 16,69, Industri Pengolahan 13,84 persen, dan konstruksi 12,89.

Jumlah proyek investasi asing dan dalam negeri 3282 proyek dengan nilai Rp 19.132.118(juta).

Sedangkan Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 di Provinsi Banten 5,26 persen lebih tinggi rata rata nasional 5,04 persen dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 32,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 11,94 dan Transportasi dan Pergudangan 10,72.

- b. Melihat potensi yang besar dari lingkungan provinsi DKI Jakarta, dan beberapa keunggulan Provinsi Banten anatara lain transportasi dan pergudangan atau dari potensi yang lain di provinsi Banten.

4. Kerjasama

Posisi DKI Jakarta Sebagai ibukota Negara sangat strategis sebagai mitra kerjasama Provinsi Provinsi sebagai penyangga ibu kota yang perlu di perkuat dengan infrastruktur, yang dapat memperlancar arus barang dan penumpang. Melihat potensi dari kedua Provinsi yang saling berbatasan langsung sangat dimungkinkan kerjasama dari berbagai aspek antara lain infrasturktur pendukungn bagi DKI Jakarta, Transportasi, Parawisata, Perdagangan, Investasi dan teknologi informasi dan telematika.

E. Provinsi Lampung

- a. Pada tahun 2015, ASEAN menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal dimana terjadi arus barang, jasa, investasi,

dan tenaga terampil yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas diantara Negara ASEAN. Dengan terbentuknya pasar tunggal yang bebas tersebut maka akan terbuka peluang bagi Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasarnya di kawasan ASEAN;

- b. Provinsi Lampung berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dengan konsekuensi Provinsi Lampung berada pada jalur laut/udara yang terbuka dengan dunia luar sehingga bisa dilalui kapal dan pesawat udara asing, kondisi ini bisa dimanfaatkan menjadi jalur perdagangan ilegal (human trafficking, illegal fishing, illegal logging);
- c. Lokasi strategis Provinsi Lampung menjadi pintu gerbang Pulau Sumatera namun daya dukung infrastruktur seperti jaringan transportasi darat baik lintas timur maupun lintas barat guna memperlancar arus barang dan orang dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa dan sebaliknya dalam kondisi rusak;
- d. Persaingan antar daerah yang ketat di mana efisiensi, produktivitas dan nilai tambah menjadi pertimbangan kinerja, menjadikan Provinsi Lampung relatif tertinggal dibanding daerah lain yang lebih efisien dan produktif dalam menciptakan nilai tambah yang tinggi. Sehingga berakibat pada beratnya peningkatan keunggulan daerah (komparatif dan kompetitif) secara sektoral, komoditas dan jasa unggulan;
- e. Dengan adanya penerapan standardisasi barang dan jasa yang dikaitkan dengan isu lingkungan, HAM, dan buruh berakibat menjadi terhambatnya perdagangan akibat lemahnya pemahaman isu global. Hal ini menuntut Pemda perlu melakukan pengembangan kebijakan yang responsif terhadap isu, kesepakatan dan hukum internasional;
- f. Adanya perubahan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi untuk mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Hal ini menuntut untuk

dilakukan pengembangan ekonomi kreatif dan berbasis iptek (knowledge-based economy);

- g. Di alam demokrasi sekarang ini proses politik menjadi mahal sehingga menimbulkan pemborosan uang negara yang merupakan investasi yang tidak produktif. Pemerintah dan Pemerintah daerah perlu melakukan percepatan konsolidasi demokrasi untuk mencegah pemborosan yang lebih besar lagi;
- h. Terjadinya konflik kepentingan antara legislatif dan eksekutif yang mengakibatkan tidak optimalnya kinerja birokrasi dalam pelayanan
- i. Publik;
- j. Ketidapastian hubungan pusat, provinsi dan kabupaten/kota telah memunculkan lemahnya koordinasi dan sinergi pusat-daerah, tidak optimalnya pengelolaan anggaran negara dan daerah, dan konflik antar daerah. Karena itu pemerintah harus mengembangkan forum-forum kerjasama antardaerah;
- k. Rendahnya mutu layanan publik: Standar Pelayanan Minimal mengakibatkan lambatnya peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah. Diperlukan regulasi pemerintah yang bertujuan mengembangkan dan pelaksanaan manajemen berbasis kinerja;
- l. Lemahnya manajemen sumberdaya dan aset daerah: tata ruang, SDA, tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan. Perlu upaya penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan asset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;
- m. Lemahnya manajemen sumber daya dan aset daerah: tata ruang, SDA, tanah, dan laut telah mengakibatkan tidak optimalnya pengelolaan sumberdaya secara berkelanjutan sehingga meningkatkan kerusakan lingkungan. Perlu upaya

penataan dan pengembangan manajemen sumber daya dan aset daerah, perencanaan tata ruang dan tata guna lahan;

- n. Belum berjalannya reformasi birokrasi daerah telah memunculkan ketidakpastian dan kelambanan, karenanya dibutuhkan pengembangan sistem insentif dan disinsentif;
- o. Lemahnya kerjasama dan kemitraan pemerintah dan swasta mengakibatkan rendahnya investasi, pemerintah perlu melakukan perencanaan dan pengembangan kerjasama pemerintah dan swasta.
- p. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu hanya 72,45 Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan $\pm 1,23$ persen selama 10 tahun terakhir, memberikan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- q. Masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86 persen, masih diatas rata-rata nasional sekitar 11,66 persen;
- r. Kerusakan hutan di Provinsi Lampung hingga tahun 2012 sudah mencapai 55 persen dari luas yang ada akibat berbagai tekanan pembangunan dan aktivitas masyarakat. Potensi ekonomi dari kawasan hutan berupa hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan dan keanekaragaman hayati belum dimanfaatkan secara maksimal;
- s. Beberapa daerah-daerah berpotensi ekonomi (Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Timur, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Lampung Selatan, Lampung Utara dan Way Kanan) belum terlayani oleh sarana dan prasarana yang memadai;
- t. Masih banyaknya lahan-lahan produktif di wilayah kabupaten yang belum dimanfaatkan secara optimal;

- u. Terjadinya disparitas pembangunan antar wilayah, khususnya antara Bandar Lampung sebagai ibukota Provinsi dengan kabupaten-kabupaten di Provinsi Lampung;
- v. Menurunnya daya dukung lingkungan yang ditandai dengan semakin tingginya frekuensi terjadinya bencana banjir pada musim hujan dan terjadinya kelangkaan air pada musim kemarau;
- w. Kerusakan ekosistem pesisir dan pantai, pendangkalan dan pencemaran sungai, semakin meningkatnya polusi udara di lingkungan perkotaan, dan semakin punahnya fauna dan flora lokal;
- x. Masih tingginya konflik pertanahan antara masyarakat dengan pemerintah (negara) dan masyarakat dengan perusahaan (negara/swasta);
- y. Adanya peningkatan penggunaan teknologi dan informasi harus dilihat sebagai potensi yang mendukung percepatan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten/Kota.

F. Keterkaitan dengan isu-isu strategis Provinsi Banten

Keterkaitan isu-isu strategis Provinsi Lampung dengan isu-isu strategis Provinsi Banten ditata dalam beberapa bidang kajian yaitu:

1. Geografi

- a. Luas wilayah Provinsi Banten 9.662,92 Km² dan Provinsi Lampung 35.288,35 km² keduanya berdampingan termasuk dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALK I) melintasi Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Laut Jawa - Selat Sunda, secara khusus selat sunda. Alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan Hak Lintas Alur Laut Kepulauan berdasarkan konvensi hukum laut

internasional. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing diatas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Penetapan ALKI dimaksudkan agar pelayaran dan penerbangan internasional dapat terselenggara secara terus - menerus, langsung dan secepat mungkin serta tidak terhalang oleh perairan dan ruang udara teritorial Indonesia.

- b. Posisi yang strategis yang dipisahkan dengan perairan selat sunda mewaspadai kedua belah pihak dengan area terbuka tersebut rawan terhadap *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal immigration* dan *human trafficking*, untuk itu hal yang bersifat keamanan nasional yang lebih luas dan pengaturan lalulintas yang baik perlu di lengkapi dengan traffic Separation Scheme (TSS), Integrated Maritime surveillance System (IMSS) dan under water Detection yang dapat bekerjasama dengan stakeholder Kementrian Kemaritiman dan TNI Angkatan Laut;
- c. Posisi strategis tersebut dapat lebih meningkatkan perekonomian melalui arus barang, arus penumpang dan jasa melalui jalur laut nasional sekunder dan jalur utama darat tol trans Jawa, tol trans Sumatera.

2. Demografi

- a. Provinsi Banten dengan 4 Kabupaten dan 4 kota, berpenduduk 12.203.148 jiwa yang menempati luas wilayah 9.662,92 km² dengan kepadatan penduduk 1178.91 jiwa/km sedangkan Penduduk Provinsi Lampung dengan 12 Kabupaten, 2 Kota 9.499.116 jiwa, kepadatan 215.07 jiwa/km², merupakan kondisi yang sangat kontras dimana Provinsi Banten dengan luas wilayahnya berpenduduk besar sedangkan Provinsi

Lampung dengan luasan wilayah besar berpenduduk sedikit;

- b. IPM Banten sendiri pada tahun 2016 ini baru mencapai 70,96. Berarti, jaraknya dari yang ideal masih kurang 29,04 persen. Adapun status pembangunan manusianya masih tetap berkategori “Tinggi” ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Betapapun juga, dengan angka IPM sebesar itu, capaian pembangunan manusia Banten berada pada peringkat tertinggi ke delapan di Indonesia, sedangkan Tingkat kemiskinan tercatat sebesar 5,42 persen dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 658,11 ribu jiwa. Provinsi Lampung memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan yang terendah di Pulau Sumatera yaitu hanya 72,45; Perkembangan jumlah penduduk Provinsi Lampung dengan laju pertumbuhan $\pm 1,23$ persen selama 10 tahun terakhir menyisakan masih tinggi angka kemiskinan di Lampung yaitu 14,86 persen, masih diatas rata-rata nasional sekitar 11,66 persen; memberikan konsekuensi dari kondisi tersebut adalah ketersediaan ruang, lapangan kerja, dan lain-lain dengan tetap memperhatikan keseimbangan dengan sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- c. Kedua provinsi perlu bijaksana dan hati-hati dalam mengelola arus orang bergerak dan tinggal dengan memperketat dalam pengelolaan kependudukan dan catatan sipil sehingga kedua daerah tersebut terjadi pertumbuhan penduduk yang alami, seimbang dan proporsional.

3. Ekonomi

- a. Laju pertumbuhan ekonomi pada periode 2016 di Provinsi Banten 5,26 persen lebih tinggi rata rata nasional 5,04 persen dengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam

PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Industri Pengolahan 32,61 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, 11,94 dan Transportasi dan Pergudangan 10,72. Provinsi kurun waktu 2009-2013 di Provinsi Lampung Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,97persen, dan pada periode triwulan I-2017 sebesar 5,11 persendengan tiga sektor kontribusi terbesar dalam PDRB atas dasar harga berlaku yaitu Pertanian, kehutanan, perikanan 32,28 persen, Indutri pengolahan 18,11 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 11,08persen;

- b. Pertumbuhan ekonomi dan tiga kontribusi sektor terbesar pada pada masing-masing daerah terdapat perbedaan yang menunjukkan keunggulan dan persamaan yang menjadi tren nasional, sehingga hal ini menjadi peluang yang intensif dalam beberapa sektor antara lain, sektor transportasi dan pergudangan di Provinsi Banten dapat mendukung pada Provinsi Lampung, sedangkan kesamaan pertumbuhan pada sektor industri pengolahan dan Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor perlu di jaga dengan iklim ekonomi yang kondusif.

4. Kerjasama

- a. Posisi Provinsi Banten berdampingan Provinsi Lampung ini, dengan potensi geografi, demografi dan perekonomian dapat saling menguatkan dan saling melengkapi kekurangan dan kelebihanannya untuk menunjang kesejahteraan masyarakat;
- b. Dari perjalanan waktu dan data, informasi rintisan telah dilakukan kerjasama yang dapat di tindak lanjuti antara bidang pariwisata, Pertanian, listrik dan gas,

perdagangan, investasi, ketahanan pangan dan implementasi teknologi informasi.

4.2.4 ISU STRATEGI WILAYAH KABUPATEN/KOTA PROVINSI BANTEN

A. Kota Tangerang

Yang menjadi isu strategis utama dalam pembangunan di kota Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan;
2. Peningkatan Kualitas pelayanan Kesehatan;
3. Pengurangan Genangan dan Titik Banjir;
4. Pengembangan transportasi massal;
5. Penataan Ruang Kota yang Berkelanjutan dan penyediaan ruang publik;
6. Pemberdayaan masyarakat miskin;
7. Perluasan Kesempatan kerja dan peningkatan daya saing tenaga kerja;
8. Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Ekonomi Lokal;
9. Peningkatan Pelayanan Publik dan Profesionalisme aparatur Pemerintah.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Pengembangan jaringan jalan berpola grid radial utara – selatan dan timur – barat. Koridor utara – selatan menghubungkan Bandara Soekarno – Hatta sampai dengan Kabupaten Tangerang sedangkan jalur barat – timur untuk menghubungkan pergerakan Jakarta – Kota Tangerang – Kabupaten Serang. Di samping itu juga ada rencana pembangunan jalan di kiri dan kanan jalan bebas hambatan sehingga dapat membuka akses dan peluang investasi pada sepanjang koridor tersebut;

2. Ada rencana pembangunan kota baru Tangerang sebagai CBD, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan sebagai pusat bisnis Kota Tangerang sekaligus menangkap peluang luberan dari DKI Jakarta;
3. Isu lainnya yaitu pembangunan stasiun KA di Kota Tangerang sebagai titik awal dan akhir perjalanan regional, sehingga arus lalu lintas orang dan barang dapat ditangkap/diberangkatkan dari Kota Tangerang. Pembangunan stasiun KA tersebut sebagai penyeimbang keberadaan stasiun KA Gambir, sekaligus untuk memudahkan perjalanan dari-dan-menuju Bandara Soekarno Hatta yang akan lebih mudah dijangkau dari Kota Tangerang dibandingkan dari stasiun KA Gambir.

B. Kota Tangerang Selatan

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan BSD Serpong-Parung;
2. Peningkatan struktur dan pelebaran ruas jalan Serpong-Ciputat-Simpang Gablek-Sawangan;
3. Penataan Geometri perempatan jalan untuk mengatasi kemacetan perkotaan;
4. Belum selesainya Jalan Siliwangi yang sudah dimulai pembangunannya dari tahun 2013;
5. Pelebaran jalan provinsi yang melintasi Tangerang Selatan, seperti Jalan Pondok Cabe – Cirendeui;
6. Flyover Pasar Serpong dan underpass Pasar Jombang;
7. Perbaikan drainase kota untuk menangani banjir tahunan;
8. Percepatan pembangunan TPSA Cipeucang dan optimasi armada persampahan dan TPS Regional;

9. Percepatan pembangunan monorel/RLT Tangerang Selatan-Bandara Soekarno-Hatta dan monorel /RLT Lebak Bulus-Puspiptek;
10. Pengembangan Kawasan Pusat Pertumbuhan Kecamatan Setu;
11. Percepatan Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik;
12. Mengoptimalkan produksi tanaman hortikultura khususnya komoditas Anggrek dan Phylodendron;
13. Revitalisasi pasar Tradisional;
14. Pembangunan Terminal Pondok Cabe.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Keberadaan Lapangan Terbang Pondok Cabe sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kota, sehingga perlu pengembangan kawasan untuk mendukung pengembangan potensi unggulan daerah;
2. Belum tersedianya Pusat Pemerintahan Kota Tangerang Selatan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan.

C. Kota Serang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kota Serang adalah sebagai berikut:

1. Reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
2. Aparatur yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera;
3. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
4. Pelayanan publik yang berkualitas;
5. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan;

6. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan;
7. Penyediaan infrastruktur wilayah yang memadai bagi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat;
8. Pengendalian pemanfaatan ruang guna menjamin keberlanjutan pembangunan serta pengendalian bencana alam;
9. Revitalisasi sektor pertanian, pariwisata, perdagangan dan jasa, serta UKM dan Koperasi guna mengentaskan kemiskinan;
10. Peningkatan iklim investasi yang kondusif bagi berkembangnya sektor industri, perdagangan dan jasa berbasis pemanfaatan sumber daya setempat dalam rangka memperluas kesempatan kerja;
11. Optimalisasi peran serta masyarakat dalam rangka pengendalian penyakit masyarakat dan masalah sosial lainnya, menciptakan ketentraman dan ketertiban, serta iklim sosial dan politik yang kondusif bagi terlaksananya pembangunan daerah;
12. Peningkatan daya saing daerah melalui pembinaan prestasi olahraga, seni dan budaya daerah, serta kewirausahaan di kalangan pemuda.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Pengembangan Wilayah Serang Utara Terpadu;
2. Dibangunnya bendungan Sindang heula untuk mengairi kawasan industri;
3. Mempertahankan dan penataan keberadaan situs Banten Lama.

D. Kota Cilegon

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kota Cilegon adalah sebagai berikut:

1. Kualitas dan Daya Saing Perekonomian;
2. Penataan Ruang dan Kelola SDA-LH;
3. Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial;
4. Daya Dukung, Sarpras dan Fasilitas Kota;
5. Kinerja Pemerintahan, Pelayanan dan Kamtib, Demokrasi, Hukum.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan Bendungan Cidanau sebagai jaringan sumber daya air bagi kebutuhan air baku industri serta sebagai jaringan air baku untuk kebutuhan air minum di Wilayah Kota Cilegon dan sekitarnya;
2. Pengembangan Pelabuhan Regional Warnasari;
3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

E. Kabupaten Tangerang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Tangerang adalah sebagai berikut:

1. Angka laju pertumbuhan ekonomi (LPE) tahun 2015 yang sebesar 5,39 persen masih harus terus ditingkatkan dalam rangka penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran);
2. Angka indeks pembangunan manusia (IPM) tahun 2015 adalah 70,05 yang berarti menyamai IPM provinsi Banten yang sudah menembus batas angka 70, namun demikian hal itu masih perlu ditingkatkan lagi dalam rangka kualitas SDM yang lebih baik lagi;

3. Tingkat urbanisasi dan migrasi yang meningkat sementara angka laju pertumbuhan penduduk (LPP) adalah sebesar 3,24 persen yang berada di atas angka rata-rata nasional;
4. Angka tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) tahun 2015 adalah sebesar 62,46 persen, sedangkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 9 persen. Kondisi kinerja ketenagakerjaan masih harus terus diperbaiki;
5. Seiring dengan pertumbuhan urbanisasi dan migrasi, dimana Kabupaten Tangerang adalah termasuk daerah penyangga ibukota DKI Jakarta maka pertumbuhan pemukiman dan kekumuhan di wilayah kabupaten Tangerang adalah sesuatu yang sulit dihindari. Akibatnya keindahan dan keteraturan kabupaten Tangerang akan terganggu;
6. Daerah penyangga ibukota DKI Jakarta juga menjadikan Kabupaten Tangerang mengalami kemacetan lalu lintas. Hal ini terutama terjadi ketika jam berangkat kerja di pagi hari dan pulang kerja di sore-malam hari;
7. Angka kemiskinan masih harus terus ditekan dari posisi yang sekarang karena hal ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia di wilayah kabupaten Tangerang;
8. Masih tingginya angka kematian ibu dan bayi (AKI-AKB) serta keberadaan penyakit menular yang mengganggu kinerja pembangunan kesehatan di wilayah kabupaten Tangerang.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah Regional di Kabupaten Tangerang;
2. Pengembangan Kawasan Industri maritim di Kabupaten Tangerang;

3. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

F. Kabupaten Serang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di Kabupaten Serang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Sosial
 - Angka indeks pembangunan manusia (IPM) yang pada posisi 64,49 Point;
 - Persentase kemiskinan yang mencapai 20,75 persen dari total penduduk;
 - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mencapai 14,8 persen.
2. Ketersediaan dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur
 - 500 Km jalan Kabupaten kondisi belum mantap;
 - 601 Ruang Kelas SD, 97 Ruang Kelas SMP dan 113 Ruang Kelas SMA / SMK dalam kondisi rusak;
 - 14 Puskesmas memerlukan perbaikan / perawatan.
3. Penataan Ruang, Permukiman, Pengelolaan Bencana dan Lingkungan Hidup;
4. Pemerataan dan Kualitas Perekonomian;
5. Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik serta Kualitas Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Penataan kawasan perbatasan di Kabupaten Serang dan sekitarnya;
2. Penambangan di kawasan hutan Gunung Gede dapat mempertinggi volume aliran permukaan, menyebabkan banjir dan longsor serta mengurangi peresapan air tanah;

3. Pengembangan Kawasan Pusat Distribusi Regional di Kecamatan Kopo;
4. Pengembangan potensi pariwisata di Kecamatan Padarincang untuk meningkatkan sektor kepariwisataan Provinsi Banten;
5. Perlu pengembangan kawasan industri yang ditetapkan dalam satu kawasan untuk menampung industri-industri baru dan industri yang berada di luar kawasan.

G. Kabupaten Lebak

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Lebak adalah sebagai berikut:

1. Aksesibilitas dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan;
2. Kemiskinan dan ketenagakerjaan;
3. Iklim investasi dan daya saing daerah;
4. Ketahanan pangan;
5. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah;
6. Pengendalian pemanfaatan ruang dan kelestarian lingkungan hidup.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Kabupaten Lebak memiliki Bendungan Karian di empat kecamatan namun lebih dikenal/terkonsentrasi di Kecamatan Sajira sebagai salah satu dam strategis nasional karena akan dipakai untuk suplai air baku ke Jakarta, Cilegon, dan Tangerang, dengan kapasitas 208.000.000 M³ dan luasnya hampir 1.774 Ha. Untuk itu maka perlu dilakukan upaya-upaya untuk mewujudkan pembangunan Bendungan Karian di Kabupaten Lebak untuk memenuhi kebutuhan air baku bagi Kawasan Perkotaan, Kawasan Bojonegara, dan untuk mempertahankan ketahanan pangan (lumbung padi);

2. Rencana pengembangan kawasan industri yang didukung potensi pertambangan dibagian selatan, di Kecamatan Bayah;
3. Pengembangan kawasan pariwisata geologi di selatan Kabupaten Lebak;
4. Pengembangan Kawasan Perumahan Kota Baru Publik Maja di Wilayah Kabupaten Lebak yang perlu didukung pembangunan infrastruktur;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

H. Kabupaten Pandeglang

Yang menjadi isu strategis dalam pembangunan di kabupaten Pandeglang adalah sebagai berikut:

1. Kualitas sumber daya manusia masih rendah, permasalahan ini terkait dengan masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat dan kurang berdayanya masyarakat khususnya di perdesaan;
2. Penataan ruang dan kawasan/kewilayahan kabupaten Pandeglang masih belum optimal. Hal ini terkait dengan belum adanya tata guna lahan yang terintegrasi dan sinergis dengan pembangunan yang diprioritaskan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan yang ada. Selain itu, permasalahan tersebut terkait dengan belum optimalnya fungsi kawasan dan tata ruang wilayah;
3. Sarana dan prasarana dasar belum memadai, permasalahan ini terkait dengan kurang optimalnya sarana dan prasarana publik khususnya sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan jalan serta sarana dan prasarana penunjang perekonomian;
4. Belum optimalnya pemanfaatan potensi unggulan daerah, permasalahan ini terkait dengan masih dilakukannya aktivitas perekonomian barang mentah pada sektor unggulan, belum dilakukannya aktivitas perekonomian pada sektor

unggulan dengan meningkatkan nilai tambah dan nilai rantainya;

5. Pertumbuhan ekonomi daerah belum menunjukkan tingkat perkembangan yang signifikan, permasalahan ini khususnya terkait dengan belum optimalnya iklim investasi yang prospektif dan kondusif, serta belum berkembangnya jiwa kewirausahaan;
6. Tata kelola dan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah masih lemah, permasalahan ini terkait dengan masih lemahnya kapasitas kelembagaan dan kualitas aparatur pemerintahan daerah.

Isu strategis terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah sebagai berikut :

1. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis Banten Selatandi Kabupaten Pandeglang. Rencana pembangunan lapangan terbang perintis tersebut dilakukan dari Departemen Perhubungan Pusat pada tahun 2005, di samping untuk percepatan pembangunan daerah juga mempertimbangkan keberadaan potensi pariwisata khusus Tanjung Lesung, Carita, di Kabupaten Pandeglang;
2. Penataan Kawasan agroindustri di Kabupaten pandeglang;
3. Untuk pengembangan bagian selatan Provinsi Banten pada umumnya dan Kabupaten Pandeglang pada khususnya perlu peningkatan jalan nasional yang menghubungkan bagian selatan Provinsi Banten maupun Kabupaten Pandeglang dengan bagian utara wilayah tersebut;
4. Penanggulangan banjir di selatan Kabupaten Pandeglang;
5. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

4.2.5 Isu Strategis Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2010-2030

Beberapa isu strategis yang terdapat di Provinsi Banten adalah sebagai berikut :

1. Perkembangan kondisi perekonomian nasional yang mendorong orientasi pembangunan daerah menuju sektor pertanian dan kawasan perdesaan dengan pendekatan ekonomi kerakyatan. Reorientasi mendorong dikembangkannya paradigma perencanaan pembangunan yang mengurangi ketergantungan pada *trickle down effect* pusat pertumbuhan berbasis sektor industri dan sektor tersier di kawasan perkotaan serta pilihan basis perekonomian pada sektor pertanian dengan penajaman komoditi yang tangguh terhadap perubahan pasar global.
2. Kebijakan menuju perluasan otonomi daerah yang membawa implikasi terhadap posisi dan fungsi rencana tata ruang dalam perkembangan pembangunan menurut hirarki pemerintahan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Banten perlu diposisikan secara tepat pada arah kebijakan tersebut, sehingga mampu berperan sebagai instrumen pencapaian tujuan pembangunan melalui pembentukan ruang secara regional planning.
3. Ketidakseimbangan pertumbuhan (*imbalance growth*) antar Wilayah Banten Selatan dan Wilayah Banten Utara di Provinsi Banten, berdampak pada ketidakseimbangan pertumbuhan, serta akan mempertajam kesenjangan kesejahteraan sosial-ekonomi (*disparitas*) yang dapat mengganggu ketertiban proses pembangunan. Azas demokratisasi ruang dan sinergi wilayah perlu melandasi RTRW Provinsi Banten dalam mengatasi kesenjangan antar wilayah tersebut, dengan mengakomodir RTRW Kabupaten/Kota serta keterikatan dengan RTRW Jawa-Bali.
4. Pelestarian lingkungan hidup merupakan isu yang perlu dipertimbangkan dalam RTRW Provinsi Banten, terutama

menyangkut okupansi kawasan lindung dan masalah pencemaran lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan upaya mempertahankan Kawasan Lindung di Provinsi Banten untuk meningkatkan daya dukung lingkungan yaitu Kawasan Akarsari dan DAS Cidanau.

5. Eksplorasi bahan tambang dan mineral sebagai bagian peningkatan pendapatan daerah perlu dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga persoalan lingkungan dapat dikurangi. Selain itu, perlu adanya keseimbangan kesempatan berusaha bagi masyarakat setempat untuk menghindari kecemburuan sosial ekonomi.
6. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi darat, udara dan laut yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan baru untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat secara bijaksana dan optimal.

4.2.6 Isu Strategis Daerah Dalam RPJPD Provinsi Banten 2005-2025

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten 2017-2022 isu strategis dan permasalahan pokok yang dikembangkan merujuk pada Rencana Pembangunan jangka panjang Daerah Provinsi Banten tahun 2005-2025 dengan penyajian sebagai berikut :

1. Isu Ketahanan Pangan, Kemiskinan, Kualitas SDM dan Kesejahteraan Sosial

Dengan mencermati berbagai fenomena dan kecenderungan yang terjadi dalam beberapa tahun sebelumnya, khususnya yang terkait masalah ketahanan pangan, kemiskinan, kualitas SDM, dan kesejahteraan sosial dapat diindikasikan beberapa isu pembangunan dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Masih tingginya tingkat kemiskinan, dimana 8,5 persen penduduk (816.742) masih tergolong dalam kategori miskin

hingga tahun 2008, dengan sebaran di wilayah perkotaan sekitar 45,0 persen dan wilayah perdesaan 55,0 persen.

- b. Masih terdapatnya kantung-kantung rawan gizi buruk, terutama disebabkan karena tidak memadainya pelayanan kesehatan.
- c. Masih belum memadainya tingkat pendidikan masyarakat, dimana dari tahun 2006 hingga tahun 2008 dengan angka rata-rata lama sekolah adalah 8,1 tahun (standar nilai maksimum 15 tahun, UNDP). dan angka melek huruf masih sebesar 95,6 persen (standar nilai maksimum 100 persen, UNDP)
- d. Masih belum memadainya tingkat kesehatan masyarakat, dimana angka harapan hidup baru mencapai 66,0 tahun hingga tahun 2008 (standar nilai maksimum 85 tahun, UNDP).
- e. Masih tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada tahun 2008, yang terdiri dari 91.438 jiwa PMKS.
- f. Suku Baduy sebagai komunitas adat terpencil (KAT) yang memerlukan perlindungan dan perlakuan khusus atas keberadaan dan keberlanjutan komunitasnya.
- g. Sebanyak 764 desa atau 51,52 persen terhadap jumlah desa/kelurahan di Provinsi Banten tergolong dalam desa tertinggal, yang terdiri dari 458 desa tertinggal di daerah tertinggal dan 306 desa tertinggal di daerah non tertinggal.
- h. Kualitas SDM dan peran perempuan masih menunjukkan ketertinggalan dibandingkan dengan kualitas SDM dan peran laki-laki dalam pembangunan. Indeks Pembangunan Gender (IPG) tahun 2008 sebesar 62,0 (di bawah IPG Nasional 65,3), dan menempatkan Banten pada peringkat 28 dari 33 provinsi.
- i. Degradasi nilai-nilai moral dan budaya semakin bertumbuhkembang seiring dengan derasnya pengaruh globalisasi.

- j. Masih tingginya pertumbuhan penduduk, dimana hingga tahun 2008 jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 9.602.445 jiwa. Dalam kurun waktu 2007-2008 jumlah penduduk bertambah sebanyak 178.939 jiwa atau meningkat sebesar 2,15 persen. Kepadatan penduduk Provinsi Banten adalah 1.065 jiwa/km².
2. Pengembangan Ekonomi Masyarakat Berorientasi Pasar Global dengan permasalahan pokok yang meliputi:
 - a. Hingga tahun 2008, sekitar $\pm 88,0$ persen perekonomian Provinsi Banten dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah utara (Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan) yang bertumpu pada sektor sekunder dan tersier, sedangkan $\pm 12,0$ persen sisanya dihasilkan oleh aktifitas ekonomi di wilayah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) yang bertumpu pada sektor primer.
 - b. Ketidakmerataan kondisi perekonomian wilayah, dimana nilai ekonomi kabupaten/kota pada tahun 2008, dapat diklasifikasikan dalam 'daerah sangat berkembang' (Kabupaten Tangerang (termasuk Kota Tangsel), dan Kota Tangerang) dengan pencapaian PDRB a.d.h. berlaku Rp.35,12–44,69 trilyun), 'daerah berkembang' (Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon dengan pencapaian PDRB a.d.h. berlaku Rp.10,73–18,01 trilyun) serta 'daerah sedang berkembang' (Kota Serang, Kab. Lebak, dan Kab. Pandeglang) dengan pencapaian PDRB a.d.h. berlaku Rp.4,36–6,94 trilyun).
 - c. Ketidakseimbangan minat tujuan investasi, dimana sampai dengan tahun 2008 sekitar 97,40 persen nilai proyek investasi PMA dan 86,41 persen nilai proyek investasi PMDN berlokasi di wilayah Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

- d. Orientasi investasi belum bertumpu pada sumberdaya lokal, dimana sektor usaha yang diminati melalui investasi masih terkonsentrasi pada sektor usaha perdagangan dan reparasi, industri logam dasar, barang dari logam, mesin dan elektronika, industri karet, barang dari karet dan plastik, industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi, dan industri tekstil.
 - e. Belum optimalnya nilai tambah sektor tersier dan sektor primer, dimana tercermin dari kontribusi ekonomi sektor tersier yang masih sebesar 38,95 persen dan sektor primer sebesar 8,5 persen.
 - f. Belum optimalnya peran sektor dalam penyerapan tenaga kerja, dimana sektor sekunder dengan kontribusi ekonomi 52,56 persennya menyerap tenaga kerja 19,24 persen, sektor tersier dengan kontribusi ekonomi 38,95 persen menyerap tenaga kerja 41,12 persen, sedangkan sektor primer yang kontribusi ekonominya hanya sebesar 8,5 persen mampu menyerap tenaga kerja 22,16 persen.
 - g. Masih tingginya pengangguran dan rendahnya kualitas SDM tenaga kerja lokal, dimana hingga tahun 2008 tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Banten masih sebesar 6,8 persen, dan komposisi penduduk usia 10 tahun keatas menurut pendidikan masih menunjukkan proporsi 93,7 persen berpendidikan non sarjana (tamat SLTA hingga tidak sekolah).
 - h. Masih rendahnya daya beli masyarakat dan tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat, dimana hingga tahun 2008 indeks daya beli masyarakat baru mencapai 56,4 (standar nilai maksimum 100, UNDP). Sedangkan angka gini ratio pada tahun 2008 masih sebesar 0,30.
3. Pengembangan Pelayanan Kepelabuhanan Skala Nasional dan Internasional serta Peningkatan Prasarana dan Sarana Wilayah, dengan permasalahan pokok yang meliputi:

- a. Perlunya mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan bandar dan pelabuhan yang terdapat di Provinsi Banten (Pelabuhan Ciwandan, Pelabuhan Merak, Bandara Soetta, Pelabuhan Perikanan, dll), sebagai gerbang inlet dan outlet distribusi barang (ekspor-impor) dan penumpang, baik dalam lingkup nasional dan internasional.
- b. Koordinasi dan kerjasama yang belum terpadu dan solid dalam upaya pengembangan Pelabuhan Internasional Bojonegara dan Pengembangan KEK Bojonegara, baik antar instansi pemerintah secara vertikal atau horisontal, maupun antara pemerintah dengan pihak swasta (investor).
- c. Ketidakmerataan ketersediaan prasarana dan sarana transportasi yang menghambat upaya percepatan pemerataan pembangunan, dimana tingkat ketersediaan jaringan jalan negara dan provinsi di wilayah utara (0,33 km/km²) lebih memadai daripada di wilayah selatan (0,26 km/km²).
- d. Pengelolaan sistem jaringan transportasi (antar moda, antar wilayah dan antar lembaga) masih belum terpadu, dimana pelayanan sarana angkutan umum umumnya lebih terkonsentrasi pada wilayah-wilayah perkotaan, jaringan kereta api belum menyentuh langsung pada bangkitan perjalanan (seperti kawasan industri, bandar udara, serta jalur padat yang melayani angkutan komuter) disertai dengan frekuensi layanan yang masih terbatas, kesimpangsiuran penanganan kewenangan kepelabuhanan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, rendahnya disiplin masyarakat pengguna jalan, profesionalitas aparat dan operator transportasi, hingga meningkatnya kemacetan dan kecelakaan dalam penyelenggaraan transportasi.
- e. Masih rendahnya pelayanan jaringan irigasi lintas kabupaten/kota dalam mendukung kegiatan pertanian, dimana jaringan irigasi lintas kabupaten/kota yang menjadi

- kewenangan pengelolaan provinsi, hingga tahun 2008 sekitar 20,68 persen rusak berat (tidak dapat beroperasi), 18,41 persen rusak ringan, dan 60,91 persen dalam kondisi baik.
- f. Kondisi rasio elektrifikasi diluar Tangerang hingga tahun 2008 adalah 72,6 persen, namun demikian rasio elektrifikasi Banten relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio elektrifikasi Nasional sebesar 64,3 persen, serta rasio elektrifikasi Jawa Barat sebesar 61,5 persen.
 - g. Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890 sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008.
 - h. Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru 85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri. Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50 m². Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.
4. Penataan Ruang, Pengelolaan Sumberdaya dan Lingkungan Hidup, dengan permasalahan pokok yang meliputi:
- a. Belum optimalnya kelembagaan dan implementasi penataan ruang, dimana koordinasi penataan ruang belum berjalan secara maksimal antara provinsi dengan kabupaten/kota maupun dengan wilayah perbatasan belum berjalan baik, belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya.

- b. Belum memadainya operasionalisasi atas penetapan fungsi-fungsi kawasan dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Banten, yang meliputi kawasan strategis, kawasan cepat tumbuh, kawasan tertinggal, kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, dan kawasan perbatasan. Termasuk belum memadainya kesiapan provinsi dalam mendukung Kawasan strategis Provinsi
- c. Belum optimalnya Rasio realisasi pemanfaatan dalam rencana pola ruang pada luas kawasan budidaya dan luas kawasan lindung secara akumulatif dari kondisi eksisting adalah sebesar 80,7 persen budidaya dan 19,3 persen lindung. Hal ini ditandai dengan beberapa peruntukan lahan yang terkonversi, sehingga untuk mencapai target 30 persen kawasan lindung tahun 2030 diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang.
- d. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya air, dimana kerusakan sungai terjadi pada 3 Wilayah Sungai (WS Ciujung-Ciliman, WS Cisadea-Cikuningan dan WS Cisadane-Ciliwung), sungai lintas kabupaten/kota dalam kondisi rusak sebesar 19,54 persen, pemanfaatan air bawah tanah secara ilegal, dan sebagian besar situ tidak dilengkapi dengan bangun-bangunan irigasi.
- e. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam, dimana beberapa potensi sumberdaya mineral hingga saat ini belum diusahakan seperti tras, batu apung, besi dan andesit. Sumber daya energi alternatif yang berpotensi untuk dikembangkan seperti: sumberdaya energi fosil (batubara), energi panas bumi, tenaga air skala kecil, biomassa, tenaga surya, tenaga angin, dan energi gelombang laut. Potensi sumberdaya perikanan tangkap baru memanfaatkan 82,09 persen dari potensi lestarnya (wilayah perairan Kabupaten Pandeglang). Potensi sumberdaya perikanan budidaya, meliputi budidaya laut (KJA dan rumput laut) di pantai utara dan pantai barat, serta

potensi lahan tambak baru dimanfaatkan sekitar 78,8 persen. Hingga saat ini telah diidentifikasi 60 obyek wisata kategori alam, dan sebagian besar belum dikembangkan.

- f. Belum optimalnya penanganan dan pengelolaan limbah berbau, beracun dan berbahaya.
 - g. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan serta rendahnya penegakan hukum lingkungan.
 - h. Semakin meningkatnya ancaman bencana alam.
5. Pemerintahan yang baik dan bersih, dengan permasalahan pokok yang meliputi:
- a. Belum optimalnya kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Perangkat Daerah.
 - b. Belum memadainya dukungan prasarana dan sarana pemerintahan daerah.
 - c. Belum memadainya kualitas SDM dan profesionalisme aparatur pemerintah daerah.
 - d. Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah.
 - e. Belum memadainya penerapan perencanaan pembangunan partisipatif.
 - f. Pembentukan daerah otonom baru dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
 - g. Perlunya pemeliharaan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum
 - h. Belum optimalnya ketersediaan produk hukum daerah dan penegakan supremasi hukum.
 - i. Dukungan terhadap penyelenggaraan pemilu, pemilu presiden, dan PILKADA.

Berdasarkan hasil analisa dan kajian terhadap kondisi dan tantangan pembangunan yang dihadapi Provinsi Banten di masa mendatang, maka sebagai arahan dan acuan dalam pelaksanaan

pembangunan ditetapkan target-target makro pembangunan Provinsi Banten hingga tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Estimasi Indikator Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2025

NO	INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN	SATUAN	TAHUN 2008	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	5,82	6,5 – 6,8	6,8 – 7,0	7,0 – 7,4	7,4 – 7,8
2.	PDRB a.d.h. Berlaku	Rp. Trilyun	122,497	180,68	282,96	430,13	548,88
3.	PDRB a.d.h. Konstan	Rp. Trilyun	68,83	87,75	119,95	166,24	203,60
4.	PDRB Per Kapita	Rp. Juta	12,76	17,14	24,52	34,12	45,06
5.	Jumlah Penduduk	Jiwa	9.602.445	10.501.425	11.526.493	12.626.715	13.164,799
6.	Laju Pertumbuhan Penduduk	persen	2,15	2,00	1,86	1,71	1,62
7.	Persentase Pengangguran Terbuka	persen	6,8	5,6 – 5,2	5,2 – 4,8	4,8 – 4,4	4,4 – 4,0
8.	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	816.742	650.000 – 600.000	600.000 – 550.000	550.000 – 500.000	500.000 – 450.000
9.	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM)	persen	33,04	25,0 – 23,0	20,0 – 15,0	15,0 – 10,0	10,0 – 5,0
10.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	-	69,7	72,88	75,48	78,08	80,08

Asumsi :

- Terjaganya stabilitas moneter;
- Kondisi keamanan, sosial dan politik yang kondusif;
- Tidak terjadi bencana dengan skala yang besar;
- Inflasi YOY berada dibawah 7,5 persen;
- Adanya komitmen bersama seluruh stakeholders.

Sumber : Hasil Analisis, 2008

Dengan mempertimbangkan target angka dan nilai estimasi dari beberapa indikator makro pembangunan tersebut, maka dalam dua puluh tahun mendatang dapat diperkirakan beberapa kondisi yang akan dihadapi oleh Provinsi Banten sebagai berikut:

Tabel 4.5
Estimasi Kondisi Makro Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2012-2025

NO	KOMPONEN	ASUMSI/ STANDAR	SATUAN	ESTIMASI TAHUN PERENCANAAN			
				2012	2017	2022	2025
1.	Kebutuhan Pangan	120 Kg/Jiwa/Th	Ton	1.260.171	1.383.179	1.515.206	1.579.776
2.	Kebutuhan Perumahan	1 Unit/KK	Unit	2.100.285	2.305.298	2.525.343	2.632.960
3.	Kebutuhan Air Bersih	120 Lit/Jiwa/Hari	Liter	1.260.171.013	1.383.179.181	1.515.205.910	1.579.775.997
4.	Kebutuhan Listrik	0,15 KVA/Jiwa	KVA	1.575.214	1.728.974	1.894.008	1.974.720
5.	Timbulan/Pro-duksi Limbah	2,5 Lit/Jiwa/Hari	Liter	26.253.563	28.816.233	31.566.790	32.912.000

Sumber : Hasil Analisis, 2008

4.2.7 Isu Strategis Daerah RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022

Berdasarkan hasil analisa berbagai isu strategis lingkup global, nasional maupun regional sebagaimana diuraikan sebelumnya, perumusan isu strategis di Provinsi Banten di kelompokkan dalam lima aspek yakni:

1. Isu strategis kesenjangan wilayah
2. Isu strategis daya saing daerah (Sumber daya alam dan sumber daya manusia)
3. Isu strategis Kemiskinan dan Pengangguran
4. Isu strategis Tata Kelola Pemerintahan
5. Isu Strategis Kebencanaan

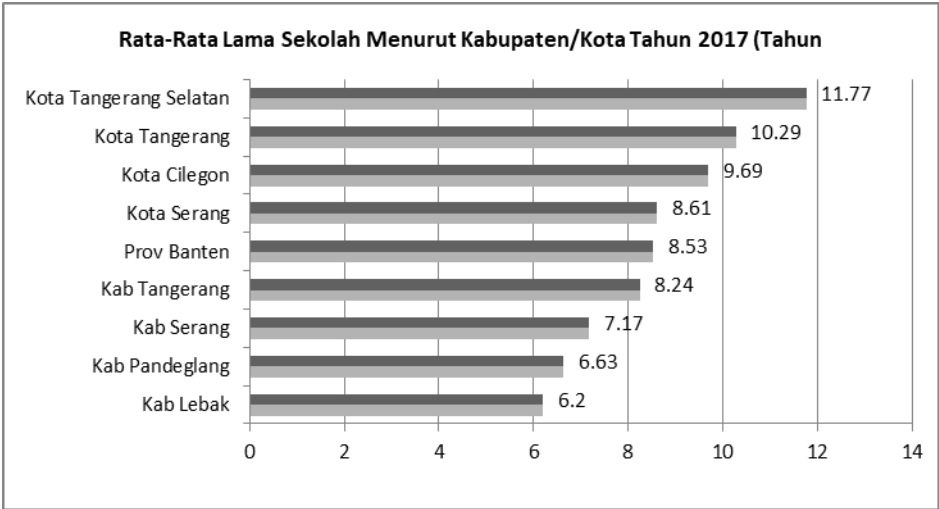
Untuk memberikan gambaran terhadap isu strategi disampaikan penjelasannya dengan data pendukung sebagai berikut.

1. Isu Strategis Kesenjangan Wilayah

Peraturan Presiden Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019 yang dikeluarkan tanggal 4 November 2015 kembali menempatkan Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebagi daerah tertinggal diantara 122 Kabupaten lainnya di Indonesia. Berbeda dengan Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil mengentaskan ketertinggalanya, proses pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Banten selama periode 2010-2014 seolah

belum berhasil mengangkat capaian Kabupaten Lebak dan Pandeglang dalam pemenuhan 6 (enam) kriteria utama dalam penetapan daerah tertinggal yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Belum terpenuhinya cakupan 6 (enam kriteria utama) tersebut, berimplikasi potret ketimpangan yang terjadi diberbgai sector antara lain:

- Ketimpangan Aksesibilitas Pendidikan



Sumber: SIPD Provinsi Banten

Gambar 4.1
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) menurut Kabupaten/Kota Tahun 2017

Pada grafik tergambarkan rata-rata lama sekolah di wilayah kabupaten masih dibawah rata-rata lama sekolah di wilayah perkotaan, terutama di Kab. Lebak dan Pandeglang.

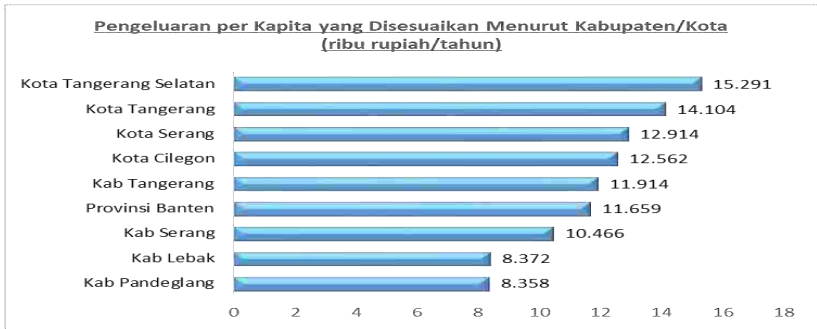
- Ketimpangan Aksesibilitas Kesehatan
Implementasi Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih responsive dalam peningkatan capaian baik dalam hal mutu maupun jenis yang dipersyaratkan dalam regulasi tersebut. Perbandingan jumlah sarana prasarana kesehatan atau pun tenaga kesehatan dibandingkan jumlah penduduknya masih menunjukan tingkat ketimpangan dibandingkan antar wilayah. Ketersediaan rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk jumlahnya sangat kecil pada kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang dibandingkan rata-rata ketersediaan rumah sakit di Provinsi Banten. Khususnya di Kab Tangerang kebutuhan puskesmas tiap 100.000 penduduk masih perlu ditingkatkan.

Tabel 4.6
Fasilitas Kesehatan Provinsi Banten Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Rumah Sakit	Puskesmas	Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk dengan Jumlah Rumah Sakit	Rasio Puskesmas Berdasarkan per 100.000 Penduduk
Kabupaten					
Pandeglang	2	36	345012	172506000	10.43
Lebak	4	42	360031	90007750	11.67
Tangerang	21	44	763174	36341619.05	5.77
Serang	3	31	451922	150640666.7	6.86
Kota					
Tangerang	32	33	474112	14816000	6.96
Cilegon	5	8	128837	25767400	6.21
Serang	10	16	215168	21516800	7.44
Tangerang Selatan	29	29	355296	12251586.21	8.16
Provinsi Banten	106	239	3093552	29184452.83	7.73

Sumber: SIPD Provinsi Banten

- Ketimpangan Daya Beli Masyarakat



Sumber: SIPD Provinsi Banten

Gambar 4.2
Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan Menurut Kabupaten/Kota
(Ribu Rupiah/Tahun) Tahun 2017

Pengeluaran perkapita Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang besarnya masih tertinggal terhadap Pengeluaran per kapita Provinsi Banten. Sementara di wilayah perkotaan pengeluaran per kapita sudah cukup tinggi.

- Kurangnya Infrastruktur penunjang ekonomi masyarakat (Sesuai Potensi Ekonomi Wilayah)
Hubungan kebutuhan infrastruktur pada masyarakat bisa di ukur dengan rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk. Sementara rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk diperoleh dengan membagi jumlah penduduk (ribu jiwa) suatu

wilayah dengan panjang jalan (km).Rasio ini memiliki arti 1 km jalan di wilayah tersebut berbanding dengan akses untuk melayani sejumlah ribu jiwa penduduk.

Tabel 4.7
Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km)
Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Jumlah Penduduk	Rasio Panjang Jalan dengan jumlah Penduduk (ribu jiwa/km)
1	Kab. Pandeglang	723,03	345012	
2	Kab. Lebak	837,96	360031	
3	Kab. Tangerang	992,61	763174	
4	Kab. Serang	601,13	451922	
5	Kota Tangerang	280,71	474112	
6	Kota Cilegon	304,13	128837	
7	Kota Serang	164,90	215168	
8	Kota TangerangSelatan	397,65	355296	
Jumlah		4302.12	10382590	

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Di Kota Tangerang, Kab Tangerang dan Kota Tangerang Selatan jumlah penduduk yang per kilometer panjang jalan cukup tinggi, sehingga menimbulkan kepadatan dijalan, di wilayah ini perlu ditingkatkan layanan panjang jalan untuk bisa menopang potensi ekomoni wilayah yang memadai.

- Ketimpangan Kemandirian Fiskal Antar Daerah dan Wilayah
- Kurangnya Konektivitas Infrastruktur Kewilayahan dan Antar Wilayah

Rasio panjang jalan terhadap luas wilayah masih dibawah 20 persen pada semua kabupaten di Provinsi Banten.

Tabel 4.8
Rasio Panjang Jalan terhadap Luas Wilayah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Luas Wilayah (km2)
Kabupaten			
1	Pandeglang	723,03	2.746,89
2	Lebak	837,96	3.426,56
3	Tangerang	992,61	1.011,86
4	Serang	601,13	1.734,28
Kota			

No	Kabupaten/Kota	Panjang Jalan (km)	Luas Wilayah (km2)
1	Tangerang	280,71	153,93
2	Cilegon	304,13	175,50
3	Serang	164,90	266,71
4	TangerangSelatan	397,65	147,19
Jumlah		4302.12	9.662,92

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Pada isu strategis kesenjangan wilayah keterkaitanya dengan misi RPJMN 2015-2019 pada misi 1 Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, keterkaitannya dengan NAWACITA ke 3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan

2. Isu Strategis Daya Saing Daerah

Daya saing wilayah menunjukkan kemampuan suatu wilayah menciptakan nilai tambah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional, hasil survey National University of Singapore (2018) menyebutkan bahwa peringkat daya saing Provinsi Banten pada tahun 2017 menduduki urutan ke enam dari 34 provinsi di Indonesia. Meski mengalami peningkatan dibandingkan hasil yang diperoleh tahun sebelumnya yakni peringkat ke-11, namun berbagai upaya harus dilakukan mengingat posisi strategis Provinsi Banten dengan segala sumber daya alam yang dimilikinya menjadi modal untuk mengubah keunggulan komparatif tersebut menjadi keunggulan kompetitif.

Sumber daya manusia merupakan salah satu indikator yang menjadi penentu tingkat daya saing daerah. Berdasarkan tingkat Pendidikan yang ditamatkan, diversitas antar wilayah masih terlihat, hal ini tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.9
 Persentase Penduduk Provinsi Banten Menurut Kabupaten/Kota yang Menamatkan Pendidikan jenjang SMA dan Perguruan Tinggi Tahun 2016 dan 2017

No	Kabupaten/Kota	2016		2017	
		SMA	Perguruan Tinggi	SMA	Perguruan Tinggi
1	Kab. Pandeglang	12,26	4,56	11,38	3,65
2	Kab. Lebak	10,32	3,12	8,25	2,47
3	Kab. Tangerang	26,74	4,19	24,37	4,52
4	Kab. Serang	19,22	3,88	18,08	3,29
1	Kota Tangerang	41,02	12,36	37,63	12,03
2	Kota Cilegon	27,23	8,53	33,51	8,17
3	Kota Serang	21,50	8,33	23,30	8,12
4	Kota Tangerang Selatan	34,59	20,14	34,55	26,03
Jumlah		26,09	8,07	24,75	8,67

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa persentase pendudukan yang menamatkan Pendidikan jenjang SMA dan perguruan tinggi di wilayah Provinsi Banten baru mencapai 33,42%. Jumlah tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 34,16%. Diperlukan strategi pembangunan daerah yang diwujudkan dalam program dan kegiatan untuk meningkatkan nilai tersebut.

Tabel 4.10
 Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Ribu USD)	Penyerapan Tenaga Kerja
Kab. Pandeglang	9	97.087	1
Kab. Lebak	24	403.545	1
Kab. Tangerang	786	13.198.266	275
Kab. Serang	271	3.591.425	143
Kota Tangerang	415	3.048.335	168
Kota Cilegon	161	10.194.284	51
Kota Serang	17	6.669.919	-
Kota Tangerang Selatan	212	682.924	44
Total	1.895	37.885.485	683

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Tabel 4.11
 Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten Tahun 2018

Kabupaten/Kota	Realisasi Investasi		
	Jumlah Proyek	Nilai Investasi	Penyerapan Tenaga Kerja
Kabupaten/Kota			
Pandeglang	6	310.223	0
Lebak	14	356	0
Tangerang	326	8.135.633	34
Serang	116	2.382.189	1
Kota			
Tangerang	165	1.146.348	14
Cilegon	55	4.097.963	35
Serang	11	341.349	-
Tangerang Selatan	25	2.223.500	0
Total	718	18.637.561	84

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Pada isu strategis daya saing (sumber daya alam dan sumber daya manusia), keterkaitanya dengan RPJMN 2015-2019 pada misi 5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, misi ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, dan keterkaitannya dengan NAWACITA ke 5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, ke 6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, Ke 7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Permasalahan daya saing ekonomi dan daya saing wisata menjadi salah satu permasalahan di Provinsi Banten. Berbicara potensi SDM dan potensi SDA terlihat sudah tidak diragukan lagi, namun menjadi kendala bagaimana potensi-potensi tersebut tidak bisa menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan menjadi nilai lebih untuk menunjukandaya saing daerah, misalnya dalam hal sumber daya alam yang bisa dijadikan potensi wisata, memiliki panjang garis pantai seluas hampir 509 km, ditambah dengan masuknya proyek strategis nasional di Kawasan KEK Tanjung Lesung harusnya bisa mendongkrak daya saing ekonomi.

Selain objek wisata berbasis alam, tak kalah juga objek wisata berbasis sejarah dan religi. Potensi kunjungan wisata religi ini cukup besar apalagi menjelang ibadah haji dan hari-hari besar islam.Potensi wisata religi di Provinsi Banten yang cukup populer diantaranya

Cagar Budaya Banten Lama, Cagar Budaya Banten Girang dan Wisata Batu Qur'an. Permasalahannya potensi wisata religi ini belum dikelola, direvitalisasi dan dilestarikan secara profesional. Perlu sinergitas antar pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kab/Kota untuk mendukung kemajuan tersebut, ini agar daya saing kita di bidang ekonomi dan pariwisata tidak tertinggal dengan provinsi lain.

Daya saing SDM di Provinsi Banten khususnya dalam bidang olahraga dirasa masih tertinggal jauh dengan Provinsi yang berada di Pulau Jawa. Prestasi olahraga di Banten jika kita lihat dalam PON (Pekan Olahraga Nasional) tahun 2016, Banten meraih posisi ke 13 dimana 4 peringkat teratas adalah provinsi yang wilayahnya ada di Pulau Jawa (1.Jawa Barat, 2.Jawa Timur, 3.DKI Jakarta, 4.Jawa Tengah). Permasalahan ini dirasa karena masih terbatasnya sarana dan prasarana olahraga dengan standar nasional atau internasional serta masih sulitnya pemanfaatan fasilitas olahraga karena sarana yang masih sangat terbatas di kabupaten/kota. Selain peraihan prestasi disebabkan pula pada proses pembinaan dan pelatihan yang masih belum optimal dan sinergitas antara industri olahraga, Pariwisata dan industri lainnya untuk mendukung prestasi olahraga yang dirasa masih sangat kurang.

Manfaat perhelatan event Asian Games di komplek olah raga JakaBaring Palembang telah terbukti membawa dampak positif bagi perekonomian wilayah. Karenanya sangatlah relevan pembangunan Sport Center di Provinsi Banten yang awalnya diperuntukan untuk pelaksanaan Islamic Solidarity Games III (InaISGOC) tahun 2013 silam bisa terwujud.

Struktur ekonomi Provinsi Banten yang banyak ditopang oleh industri pengolahan menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki keunggulan bagi tumbuh kembangnya sektor industri. Keberadaan industri dapat dioptimalkan untuk mengatasi terbatasnya sumber pendanaan dalam rangka pembangunan melalui skema pembiayaan Kerjasama pembangunan pemerintah dengan pihak swasta atau pun BUMN. Meski memiliki tingkat elastisitas keuangan yang tinggi, pemerintah Provinsi Banten masih memerlukan peran pihak swasta atau pun BUMN untuk akselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk perwujudan pembangunan infrastuktur atau

pun fasilitas pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat.

Praktek kerjasama pembangunan pemerintah dengan badan swasta atau BUMN dapat diwujudkan dalam bentuk Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU) atau CSR yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan. Meski sudah memiliki regulasi berupa Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 tahun 2016 tentang Tanggung Jawab Sosial, Kemitraan dan Bina Lingkungan Perusahaan namun dalam prakteknya belum berjalan secara optimal. Selama ini kerjasama swasta yang ada belum selaras dengan pencapaian target perencanaan pembangunan daerah. Untuk itu, diperlukan peningkatan kesadaran dan kemauan bersama dari pihak swasta/BUMN yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten untuk melaksanakan kerjasama sejalan dengan target dokumen perencanaan Provinsi Banten. Selain itu pihak pemerintah Provinsi Banten atau pun kabupaten/kota lainnya di wilayah ini harus senantiasa berupaya menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembangnya sektor industri sehingga hubungan simbiosis mutualisme bisa terwujud.

Terkait daya saing ekonomi, perubahan pola pembangunan dengan asas desentralisasi sebagaimana disebutkan sebelumnya memberikan konsekuensi penggalan potensi daerah melalui pendirian BUMD dan optimalisasi peran BUMD. Oleh sebab itu, entitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi strategis dalam kontribusinya membangun Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, program-program kerja BUMD harus sejalan dengan visi dan misi pemerintah agar terjadi sinergitas yang baik dalam mencapai sasaran tujuan pembangunan daerah (Prastiwi, 2016).

Pengoptimalan peran BUMD salah satunya adalah dengan melakukan penanaman modal (Investasi) oleh pemerintah daerah terhadap Badan Usaha Milik Daerah. Investasi tersebut menjadi penting mengingat dalam era otonomi daerah, salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD) adalah sumbangsih deviden yang dihasilkan dari penanaman modal terhadap Badan Usaha Milik Daerah.

Besarnya potensi ekonomi daerah (pariwisata, pertanian dalam arti luas, dan pertambangan) dan pengembangan kawasan strategis di Provinsi Banten (sport centre dan TPST Regional) merupakan nilai tambah yang harus ditindaklanjuti dengan kebijakan pembentukan badan usaha baru yang strategis dan selaras dengan visi misi Gubernur.

3. Isu Strategis Kemiskinan dan Pengangguran

Persentase tingkat kemiskinan di wilayah Provinsi Banten sebenarnya sudah menunjukkan nilai yang cukup menggembirakan. Data BPS Provinsi Banten, pada Bulan Maret 2018 persentase penduduk miskin Banten mencapai 5,24% jauh di Bawah nilai nasional yang mencapai 9,82% pada periode yang sama. Meski demikian, sebagai musuh Bersama sehingga masuk dalam agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) karenanya kemiskinan tetap menjadi prioritas untuk ditanggulangi.

Fenomena lainnya berkaitan dengan kemiskinan adalah masih banyaknya petani gurem (kepemilikan lahan dibawah 0,5Ha) yang berimbas pada rendahnya pendapatan produktivitas yang mereka peroleh. Hasil kerja mereka bahkan tidak cukup untuk membiayai kebutuhan pokok sekalipun yang ditandai dengan Nilai Tukar Petani (NTP) di bawah 100. Permasalahan lainnya adalah adanya praktek tengkulak yang mempermainkan harga komoditas pertanian disaat musim panen tiba. Kondisi ini dapat diantisipasi melalui pembentukan Badan Usaha yang bisa berpihak kepada para petani dengan memberikan jaminan pemasaran hasil panen dengan harga yang kompetitif.

Berbeda dengan kemiskinan, prestasi Provinsi Banten dalam penanggulangan pengangguran masih menyisakan pekerjaan rumah. Tingkat pengangguran di wilayah ini selalu berada diatas rata-rata tingkat pengangguran nasional. Keberadaan industri belum bisa berperan dalam penyerapan tenaga kerja namun sebaliknya menjadi gula bagi pendatang untuk mengadu nasib para pendatang ke wilayah Banten. Kondisi inilah yang menjadi penyebab tingginya pengangguran.

4. Isu Strategis Tata Kelola Pemerintahan

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten memperoleh nilai 51,12 atau predikat CC pada tahun 2015. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Pemerintah Provinsi Banten belum menunjukkan hasil yang cukup memadai dan masih memerlukan banyak perbaikan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 4.12
Rincian penilaian LAKIP Tahun 2016-2018

NO	KOMPONEN YANG DINIAI	2016		2017		2018	
		Bobot	Nilai	Bobot	Nilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	17,72	30	18,46	30	18,56
2	Pengukuran Kinerja	25	11,17	25	10,01	25	14,09
3	Pelaporan Kinerja	15	9,34	15	9,54	15	9,54
4	Evaluasi Internal	10	6,05	10	6,22	10	6,33
5	Capaian Kinerja	20	11,59	20	11,67	20	11,69
Nilai Hasil Evaluasi		100	55,87	100	55,90	100	60,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC		CC		B

Sumber: SIPD Provinsi Banten

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa perencanaan kinerja memiliki bobot penilaian yang paling besar yakni 30%. Salah satu dokumen perencanaan yang menjadi acuan awal dalam penyusunan perencanananaan di daerah adalah dokumen RPJMD yang menjadi rujukan bagi perangkat daerah dalam menyusun perencanaan.Dalam perjalanannya RPJMD Provinsi Banten 2017-2022 yang telah ditetapkan memiliki beberapa kekurangan dalam penetapan indikator tujuan dan sasaran. Karena itu diperlukan penyempurnaan sehingga indikator capaian tersebut memenuhi kaidah specific, measurable, achievable, reliable dan time bonded (SMART).

5. Isu Strategis Kebencanaan

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor

non alam dan faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

Secara geografis, geologis, hidrologis, dan demografi, Provinsi Banten merupakan daerah yang sangat rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam dan manusia. Potensi bencana yang bisa terjadi meliputi : Banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, kebakaran, gempa bumi, tsunami, kegagalan teknologi, wabah penyakit, bahaya industri, letusan gunung berapi (G. Anak Krakatau), hama tanaman, dan konflik sosial.

Dilihat dari Potensi bencana di Provinsi Banten yang relatif tinggi baik dari segi jumlah kejadian maupun dampak kerusakan/kerugian, peran masyarakat dianggap penting seperti diamanatkan dalam UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Selain itu perubahan pendekatan tanggap darurat menjadi pengurangan resiko bencana. Upaya para pemangku kepentingan untuk meningkatkan dan mempengaruhi kesadaran serta pemahaman pengurangan risiko bencana perlu diwujudkan dan didokumentasikan untuk pencapaian yang terukur. Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) merupakan tantangan bagi para pemangku kepentingan agar dampak negatif bencana dapat diminimalisasikan.

Pengkajian risiko bencana yang dilakukan untuk tahun 2015, pencatatan sejarah kejadian bencana diambil berdasarkan pencatatan kejadian bencana yang telah dimuat dalam Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2011 yang mencatat kejadian bencana-bencana yang terjadi dari tahun 1999-2011 dan ditambahkan dengan pencatatan kejadian bencana dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dari tahun 2012-2015.

Tabel 4.13
Sejarah Kejadian Bencana Provinsi Banten Tahun 1999-2015

NO	KEJADIAN	JUMLAH KEJADIAN	MENINGGAL	LUKA-LUKA	HILANG	MENGUNGSI	RUMAH RUSAK BERAT	RUMAH RUSAK RINGAN	KERUSAKAN LAHAN (Ha)
1	BANJIR	63	15	39	96	83.916	526	61	13.451
2	KEKERINGAN	19	-	-	-	-	-	-	11.690
3	CUACA EKSTRIM	14	3	48	-	55	37	429	-
4	TANAH LONGSOR	13	3	12	-	90	3	-	-
TOTAL KEJADIAN		109	21	99	96	84.061	566	490	25.141

Sumber : Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Banten Tahun 2016-2020 (BNPB, 2015)

Tabel diatas memperlihatkan 4 (empat) jenis bencana yang pernah terjadi dan memberikan dampak, untuk jenis bencana lainnya seperti banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi serta kebakaran hutan dan lahan tercatat di DIBI namun tidak memberikan dampak yang berarti.

Kejadian terakhir gempa dan tsunami di Selat Sunda pada tanggal 22 Desember 2018, sangat berdampak terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena bencana di Kabupaten Serang dan Kabupaten Pandeglang.

Peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda yang menghantam daerah pesisir Banten, sedikitnya 317 orang tewas, 709 orang terluka, 24.796 orang mengungsi serta 3 orang hilang akibat peristiwa ini.

Tabel 4.14
Korban Jiwa akibat Tsunami

Kabupaten	Meninggal	Mengungsi	Luka-luka	hilang
Pandeglang	296	22.811	675	3
Serang	21	1985	34	-
Jumlah	317	24.796	709	3

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2019

Bencana juga menimbulkan kerusakan bangunan, baik rumah tinggal, hotel/villa, kendaraan maupun perahu nelayan. Tercatat 1.581 rumah rusak, 37 hotel dan villa rusak, 108 kendaraan roda empat rusak, 95 kendaraan roda dua rusak, 102 perahu rusak.

Tabel 4.15
Kerusakan bangunan dan kendaraan akibat Tsunami

Kabupaten	Rumah	Kendaraan Roda 4	Kendaraan Roda 2	Perahu	Hotel/Villa
Pandeglang	1.039	68	87	56	25
Serang	41	40	8	46	12
Jumlah	1.080	108	95	102	37

Sumber : BPBD Provinsi Banten, 2019

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1 VISI - MISI RPJPD

5.1.1 VISI

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Banten 2017 – 2022 ,berpijak pada kondisi saat ini dan tantangan yang diproyeksikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Banten 2005 – 2025, serta mempertimbangkan potensi yang dimiliki dan harapan luhur masyarakat Provinsi Banten, yaitu “ **Visi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025**” adalah sebagai berikut:

*”BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN
TAQWA”*

Makna dan harapan yang terkandung dalam visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025 tersebut adalah sebagai berikut:

- **Mandiri** dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk menjadi ‘*Maju*’, adalah kemampuan Provinsi Banten untuk mendahulukan dan memanfaatkan seoptimal mungkin seluruh potensi lokal yang dimiliki. Mandiri sebagai suatu kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 ditandai dengan ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas, berdaya saing, dan mampu memenuhi tuntutan kebutuhan dan kemajuan pembangunan; ketersediaan dan pelayanan infrastruktur yang memadai; serta ketergantungan pembiayaan pembangunan pada potensi lokal yang semakin tinggi.
- **Maju dimaksudkan** sebagai kondisi yang diharapkan bagi Provinsi Banten untuk termasuk dalam jajaran provinsi dengan peringkat terbaik di Indonesia. Kondisi Provinsi Banten yang maju pada tahun 2025 ditandai dengan: kondisi sumberdaya manusia yang berpendidikan tinggi; angka harapan hidup yang lebih tinggi; laju pertumbuhan penduduk yang lebih kecil; kualitas pelayanan sosial yang lebih baik; struktur ekonomi berbasis industri dan pertanian yang tangguh; pertumbuhan ekonomi yang tinggi; tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi; meningkatnya kualitas pelayanan publik; serta meningkatnya partisipasi masyarakat secara nyata dan aktif dalam segala aspek pembangunan.

- **Sejahtera** dimaksudkan sebagai kondisi yang harus dipenuhi Provinsi Banten yang mandiri dan maju pada tahun 2025 yang merupakan refleksi dari terwujudnya masyarakat Banten sebagai masyarakat madani (*civil society*). Kondisi ini ditandai dengan: kualitas sumberdaya manusia yang tinggi; produktivitas daerah yang makin tinggi; kondisi sosial budaya yang kondusif; rendahnya tingkat kriminalitas; terjaganya ketentraman dan ketertiban umum; terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih; terwujudnya supremasi hukum; terpeliharanya budaya demokrasi; kondisi perekonomian yang stabil dan berdaya saing; kondisi infrastruktur yang tingkat pelayanannya memadai dan berkualitas; terwujudnya sinergitas wilayah diseluruh Provinsi Banten; serta terciptanya kondisi lingkungan hidup yang asri, nyaman, dan berkelanjutan.

Dalam Visi Provinsi Banten 2005-2025 terdapat 2 (dua) kalimat kunci yaitu "*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera*" serta "*Iman dan Taqwa*". Kalimat "*Banten Mandiri, Maju, Sejahtera*" adalah merupakan refleksi dari terwujudnya Provinsi Banten sebagai salah satu provinsi termaju di Indonesia. Cita-cita tersebut tergambar dalam kemajuan pembangunan dan kesejahteraan Provinsi Banten dalam segala bidang, namun demikian tetap dapat mempertahankan identitas dan jati diri masyarakat Banten. Adapun "*Iman dan Taqwa*" merupakan syarat mutlak untuk dapat terwujudnya kehidupan agamis, serta untuk menjadikan masyarakat yang saleh dan taat pada tuntunan ajaran agama yang diyakini.

Selain itu, Provinsi Banten sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mempunyai visi yang mendukung Visi Nasional yaitu "*Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur*" serta menjadi acuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Banten. Dengan demikian, pembangunan di Provinsi Banten akan "*satu arah, satu langkah, dan satu tujuan*" menuju Banten Mandiri, Maju, Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa.

5.1.2 MISI

Berdasarkan visi pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-2025, selanjutnya ditetapkan Misi Pembangunan Provinsi Banten tahun 2005-

2025 sebagai bentuk konkrit upaya mewujudkan visi pembangunan tersebut. Adapun **Misi Pembangunan Provinsi Banten Tahun 2005-2025** yaitu:

1. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
2. Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
4. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa.

Tabel 5.1
Keterkaitan RPJMD dengan RPJMN dan Agenda Pembangunan Nasional

RPJP NASIONAL 2005 -2025	RPJPD PROVINSI BANTEN 2005 -2025
VISI INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR	VISI BANTEN MANDIRI, MAJU, SEJAHTERA BERLANDASKAN IMAN DAN TAQWA
MISI	MISI
Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika,berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas;
Mewujudkan bangsa yang berdaya-saing	Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan;
Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan	
Mewujudkan Indonesia asri dan lestari	Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari;
Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum	Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa
Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju,kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	
Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia,internasional	
Mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu	

Keterpaduan pembangunan secara nasional, maka misi pembangunan Provinsi Banten 2005-2025 merupakan wujud komitmen seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Banten untuk turut mendukung pewujudan dan pencapaian misi pembangunan jangka panjang nasional tahun 2005-2025, sebagai matrik telaah, oleh karena itu, keselarasan dan keterkaitan misi pembangunan Provinsi Banten dengan misi pembangunan nasional serta Kabupaten dan Kota di Provinsi Banten menjadi satu hal yang penting adanya.

5.2 TUJUAN DAN SASARAN

Adapun tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada masing-masing misi pembangunan jangka panjang Provinsi Banten adalah merupakan suatu bentuk komitmen yang menjadi pedoman dan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyelaraskan derap langkah mewujudkan visi pembangunan 2005-2025. Khususnya menjadi pedoman baik bagi pemerintah daerah kabupaten/kota dalam menyusun RPJPD, maupun bagi kepala daerah (gubernur) dalam menyusun visi, misi, dan arah pembangunan jangka menengah.

Tujuan dan sasaran misi 1. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera yang Berakhlak Mulia, Berbudaya, Sehat dan Cerdas** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Membentuk karakter dan jati diri masyarakat yang berakhlak mulia dan berbudaya	1.1.	Terpelihara dan terimplementasinya norma agama dan tata nilai sosial budaya dalam kehidupan bermasyarakat
2.	Meningkatkan taraf pendidikan dan minat baca masyarakat	2.1.	Meningkatnya aksesibilitas, kualitas dan daya saing taraf pendidikan masyarakat
3.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	3.1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat
4.	Meningkatkan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial	4.1.	Menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial
		4.2.	Meningkatnya fungsi sosial penyandang masalah kesejahteraan sosial
5.	Meningkatkan kesempatan kerja, produktivitas, dan perlindungan tenaga kerja	5.1.	Meningkatnya kesempatan kerja dan peluang usaha
		5.2.	Menurunnya tingkat pengangguran
		5.3.	Meningkatnya kualitas dan produktivitas tenaga kerja
		5.4.	Meningkatnya perlindungan tenaga kerja

Tujuan		Sasaran	
6.	Meningkatkan taraf hidup masyarakat transmigran		
		6.1.	Meningkatnya kesejahteraan hidup dan terbangunnya kemandirian transmigran
7.	Meningkatkan keberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keberdayaan masyarakat dan desa		
		7.1.	Meningkatnya keberdayaan perempuan dan perlindungan anak
		7.2.	Meningkatnya keberdayaan masyarakat dan desa
8.	Mengendalikan perkembangan penduduk		
		8.1.	Terkendalinya pertumbuhan penduduk
9.	Meningkatkan produktivitas dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan dalam pembangunan		
		9.1.	Meningkatnya kualitas dan peran kepemudaan dalam pembangunan
		9.2.	Meningkatnya pemasyarakatan dan prestasi olah raga

Tujuan dan sasaran misi 2. ***Mewujudkan Perekonomian yang Maju dan Berdaya Saing secara Merata dan Berkeadilan*** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan perekonomian		
		1.1.	Meningkatnya investasi daerah
		1.2.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi
		1.3.	Meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat perkotaan dan perdesaan
2.	Meningkatkan daya saing produk perekonomian yang berbasis pada sumber daya lokal, keunggulan kompetitif dan berorientasi pasar		
		2.1.	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk agribisnis pertanian, perkebunan, kehutanan dan kelautan
		2.2.	Meningkatnya produktivitas, kualitas dan daya saing produk industri
		2.3.	Meningkatnya produktivitas kualitas dan daya saing produk perdagangan
		2.4.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa pariwisata

Tujuan		Sasaran	
		2.5.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan jasa keuangan
3.	Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat		
		3.1.	Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat
4.	Meningkatkan pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional		
		4.1.	Meningkatnya pelayanan kepelabuhanan bertaraf nasional dan internasional
5.	Meningkatkan kualitas pelayanan prasarana dan sarana dasar wilayah		
		5.1.	Meningkatnya pelayanan sistem transportasi
		5.2.	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air
		5.3.	Meningkatnya pelayanan drainase
		5.4.	Menurunnya jumlah lokasi rawan banjir
		5.5.	Meningkatnya pelayanan air bersih
		5.6.	Meningkatnya pelayanan persampahan dan air limbah
		5.7.	Meningkatnya pelayanan energi dan listrik
		5.8.	Meningkatnya pelayanan telekomunikasi dan informatika
6.	Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana permukiman		
		6.1.	Meningkatnya ketersediaan rumah yang layak huni dan terjangkau
		6.2.	Berkurangnya kawasan kumuh

Tujuan dan sasaran misi 3. ***Mewujudkan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Lestari*** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan kualitas penataan ruang		
		1.1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang daerah.

Tujuan		Sasaran	
2.	Meningkatkan pengelolaan dan pelestarian sumberdaya alam		
		2.1.	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam
3.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		
		3.1.	Terjaganya daya dukung lingkungan hidup
		3.2.	Menurunnya tingkat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
4.	Mitigasi dampak bencana	4.1.	Berkurangnya korban jiwa, kerugian moril, dan kerugian materil akibat bencana alam, bencana lingkungan, dan bencana industri

Tujuan dan sasaran misi 4. ***Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Berwibawa*** adalah sebagai berikut:

Tujuan		Sasaran	
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan		
		1.1.	Meningkatnya kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur dan kelembagaan IPTEK
		1.2.	Meningkatnya kualitas data, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan daerah
2.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik		
		2.1.	Meningkatnya kualitas dan daya saing pelayanan dasar masyarakat
3.	Meningkatkan kapasitas keuangan dan pembiayaan pembangunan daerah		
		3.1.	Meningkatnya pendapatan daerah
		3.2.	Meningkatnya efektivitas alokasi belanja daerah
		3.3.	Meningkatnya tertib administasi pengelolaan keuangan daerah
		3.4.	Meningkatnya partisipasi pembiayaan pembangunan daerah dari masyarakat dan swasta
4.	Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan		
		4.1.	Meningkatnya pelayanan umum dan kemasyarakatan

Tujuan		Sasaran	
5.	Meningkatkan ketaatan hukum masyarakat		
		5.1.	Meningkatnya kesadaran, kepatuhan dan supremasi hukum
6.	Meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi	6.1.	Meningkatnya kualitas kehidupan demokrasi masyarakat
7.	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		
		7.1.	Menurunnya tingkat gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Dalam mewujudkan percepatan pembangunan harus mengacu kepada Skala **Prioritas** pembangunan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Banten Tahun 2005-2025, dalam dokumen RPJPD tersebut Skala Prioritas RPJMD Ke-4 (2018-2022) telah di sinkronkan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022, yaitu :

1. **Penanggulangan Kemiskinan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-3 **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Indeks Gini, Kemiskinan, TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka), Daya Beli, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).
2. **Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke- 3 **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas dengan** target capaian indikator kinerja daerah yaitu IPM (Indeks Pembangunan Manusia), Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah, dan Misi ke-4 **Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.
3. **Peningkatan Daya Saing Perekonomian** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-5 **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi** yang diakselerasi

oleh program **prioritas** sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Tingkat Inflasi, LPE Sektor Unggulan, Indeks Keuangan Inklusif, Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan dengan provinsi lain.

4. **Peningkatan Daya Saing Pelayanan Prasarana dan Sarana** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-2 **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah, dan Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur.
5. **Pengelolaan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-5 **Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu, LPE Sektor Unggulan, Peringkat Daya Saing Provinsi dibandingkan dengan provinsi lain dan Emisi Rumah Kaca dan Misi ke-2 **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur.
6. **Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-1 **Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Indeks Reformasi Birokrasi dan SAKIP (sistem Akuntabilitas Kinerja Daerah).
7. **Pengembangan dan Pembangunan serta Optimalisasi Fungsi dan Peran Pusat Pertumbuhan dan Kawasan Strategis** diselaraskan dengan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 pada Misi ke-2 **Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur** yang diakselerasi oleh program prioritas sesuai janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur dengan target capaian indikator kinerja daerah yaitu

Capaian Kinerja Infrastruktur Daerah, dan Persentase Pembangunan dan Penanganan Infrastruktur.

5.3 RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROVINSI BANTEN

Kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Banten tahun 2010-2030 telah mengakselerasikan dengan kebijakan umum nasional yang terbaru diterbitkan yaitu : Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang, Permendagri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah. Akselerasi juga dilakukan untuk kebijakan nasional yang didalamnya mengatur penetapan tata ruang proyek strategis nasional di Provinsi Banten, yaitu : Perpres Nomor 28 Tahun 2012 tentang RTRW Pulau Jawa Bali. Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019, Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Inpres Nomor 1 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Perpres Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Pedarcepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025 (Industri Semen di Bayah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2012 tentang KEK Tanjung Lesung.

5.3.1 Tujuan Penataan Ruang

Dengan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

- a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;

- c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah nasional bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
- b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
- d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2010-2030, tujuan *penataan ruang wilayah provinsi Banten andalah adalah Mewujudkan Ruang Wilayah Banten sebagai Simpul Penyebaran Primer Nasional-Internasional yang Strategis, Aman, Nyaman, Produktif dan Berkelanjutan melalui Pengembangan Pusat-Pusat Pertumbuhan yang mendukung Ketahanan Sumber Daya Alam, Industri, dan Pariwisata*. Untuk itu penyusunan perubahan RPJMD Provinsi Banten Tahun 2017-2022 mengacu pada perwujudan tersebut di atas.

5.4 VISI DAN MISI RPJMD

Visi dan Misi RPJMD merujuk pada kerangka pemahaman Rencana Pembangunan jangka panjang Nasional (RPJPN tahun 2005-2025) berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Provinsi Banten) 2005-2025 serta mengakselerasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN Tahun 2015-2019) mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kearifan lokal yang menjunjung tinggi konsep iman dan Taqwa dalam implementasinya Akhlaqul karimah maka perlu diwujudkan suatu kondisi masyarakat yang dinamis, masyarakat yang maju dan berdaya saing, sehingga dirumuskan

dalam Visi, yaitu menggambarkan arah pembangunan dan kondisi masa depan, dalam Visi pembangunan Provinsi Banten yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-2022), yaitu:

VISI :

BANTEN YANG MAJU, MANDIRI, BERDAYA SAING, SEJAHTERA DAN BERAQHLAQUL KARIMAH.

Provinsi Banten yang **Maju** berarti adanya perubahan dan kondisi semula ke arah yang lebih baik. Cara-cara lama dalam mengelola pemerintahan ditinggalkan, selanjutnya cara baru dalam mengelola pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip *good governance*.

Beberapa indikator pengelolaan pemerintahan yang lebih maju adalah: adanya inovasi dalam tata kelola pemerintahan (lebih efisien, efektif, transparan, akuntabel disertai perbaikan hubungan kelembagaan dengan Kabupaten/Kota), dan adanya perubahan mindset atau perubahan budaya lama yang tidak sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Provinsi Banten yang **Mandiri** mengacu pada kemampuan keuangan daerah untuk mendukung dan menjalankan pembangunan daerah. Suatu daerah dikatakan mandiri bila pendapatan asli daerahnya dalam APBD cukup dominan, sehingga tidak tergantung oleh bantuan atau subsidi pemerintah pusat. Beberapa indikator Mandiri disini menunjukkan kemampuan fiskal yang cukup untuk merealisasikan berbagai program pemerintah daerah.

Provinsi Banten yang Berdaya Saing berarti kemampuan daerah mengelola dan mengembangkan segenap potensi yang dimiliki serta menghilangkan berbagai hambatan sehingga berhasil menjadi tujuan investasi dibandingkan dengan daerah lainnya. Beberapa parameter berdaya saing ini, berupa kemudahan, fasilitasi dan daya tarik investasi di provinsi Banten seperti infrastruktur yang memadai, keamanan yang terjamin, pelayanan perijinan yang mudah dan berkepastian hukum, sumber daya manusia yang berkualitas, serta ketersediaan energi.

Provinsi Banten yang Sejahtera berarti kemampuan daerah dalam mengelola aspek manusia yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Beberapa parameter Sejahtera, diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang pencapaiannya melalui kontribusi tiga indikator utama yaitu pencapaian indikator pendidikan,

pencapaian indikator kesehatan, dan pencapaian indikator daya beli masyarakat.

Provinsi Banten yang Akhlakul Karimah berarti harapan daerah dalam menekankan pada perilaku kehidupan masyarakat dan pemerintah yang mencerminkan penerapan nilai-nilai agama, yaitu nilai-nilai yang sesuai dengan hakikat ketuhanan, keberadaan manusia beserta alam seisinya.

Beberapa parameter akhlakul karimah ini, tingkat kerukunan umat beragama pada masyarakat, implemetasi terhadap rumusannya pada perilaku aparaturnya pemerintahan daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik, dan penurunan indeks persepsi korupsi di Provinsi Banten.

MISI

Misi adalah pernyataan tentang upaya yang harus dilakukan dalam usaha mewujudkan Visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan Visi Provinsi Banten 2017-2022 tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
2. Membangun dan meningkatkan kualitas infrastruktur;
3. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Pendidikan berkualitas;
4. Meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan Kesehatan berkualitas;
5. Meningkatkan kualitas pertumbuhan dan pemerataan ekonomi.

PRIORITAS UNGGULAN

A. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

1. Penerapan E-Planning, E-money, dan E-Budgeting;
2. Reformasi Birokrasi;
3. Penerapan Manajemen Kinerja (Peningkatan Predikat LAKIP dari CC ke BB);
4. Reformasi Tata Kelola Keuangan (Peningkatan predikat dari Disclaimer/WDP ke WTP);
5. Peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam Pelayanan Publik;